



TANGGAP
TANGKAS
TANGGUH

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



(0293) 493772



bpbd.temanggungkab.go.id



bpbdtmg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

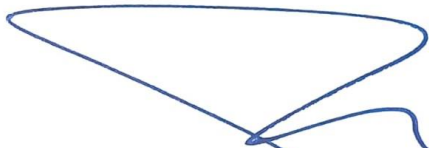
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidan Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



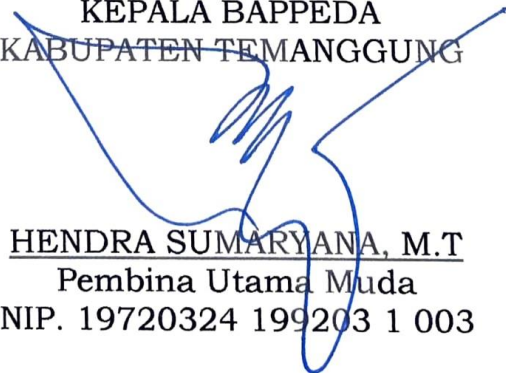
EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



AZIZ SUGIHARTO, S.AP
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga “Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026” dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Badan Penanggulangan Kabupaten Temanggung ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Temanggung, Juli 2025

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGNA BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19830530 200112 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 6

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 9

 1.4 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Tahun 2025 11

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 19

 2.3 Data Pokok Triwulan II Tahun 2025..... 23

 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 92

 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 93

 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 105

 2.7 Inovasi Perangkat Daerah 105

 2.8 Penghargaan..... 106

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 107

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 107

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 118

 3.3 Manajemen Risiko Prgoram dan Kegiatan..... 124

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 125

 4.1 Program dan Kegiatan..... 125

BAB V PENUTUP 142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2025 11

Tabel 2.2 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Triwulan II tahun 2025 20

Tabel 2.3 Capaian kinerja Pembangunan daerah Triwulan II tahun 2025... 20

Tabel 2.4 Indeks risiko bencana Kabupaten temanggung tahun sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II..... 32

Tabel 2.5 Perhitungan indeks risiko bencana Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2025 Triwulan II 33

Tabel 2.6 Nilai IRB dari BNPB 40

Tabel 2.7 Rekap kejadian bencana tahun 2025 Triwulan II 44

Tabel 2.8 Data daerah rawan bencana Tahun 2025 Triwulan II..... 44

Tabel 2.9 Desa mitigasi bencana s.d Tahun 2025 Triwulan II..... 44

Tabel 2.10 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2025 Triwulan II 59

Tabel 2.11 Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2025 Triwulan II..... 60

Tabel 2.12 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2025 Triwulan II..... 61

Tabel 2.13 Data warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2025 Triwulan II..... 62

Tabel 2.14 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2025 Triwulan II..... 64

Tabel 2.15 Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2025 Triwulan II..... 65

Tabel 2.16 Rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana Tahun 2025 Triwulan II..... 67

Tabel 2.17 Rekapitulasi perkiraan kebutuhan pacabencana Tahun 2025 Triwulan II..... 67

Tabel 2.18 Data desa Tangguh bencana s.d Tahun 2025 Triwulan II..... 71

Tabel 2.19 Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana Tahun 2025 Triwulan II 74

Tabel 2.20 Lokasi desa yang terdapat petunjuk keselamatan bencana s.d Tahun 2025 Triwulan II..... 89

Tabel 2.21 Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Temanggung per Kecamatan Tahun sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II..... 91

Tabel 2.22 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 94

Tabel 2.23 Daftar inovasi 2025.....

Tabel 3.1 Tahapan arah kebijakan PB 115

Tabel 3.2 Tujuan, sasaran, indikator, target kinerja Tahun 2026..... 120

Tabel 4.1 Perbandingan rencana program dan kegaitan Tahun 2026 127

Tabel 4.2 Rencana program dan kegiatan Tahun 2026 133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

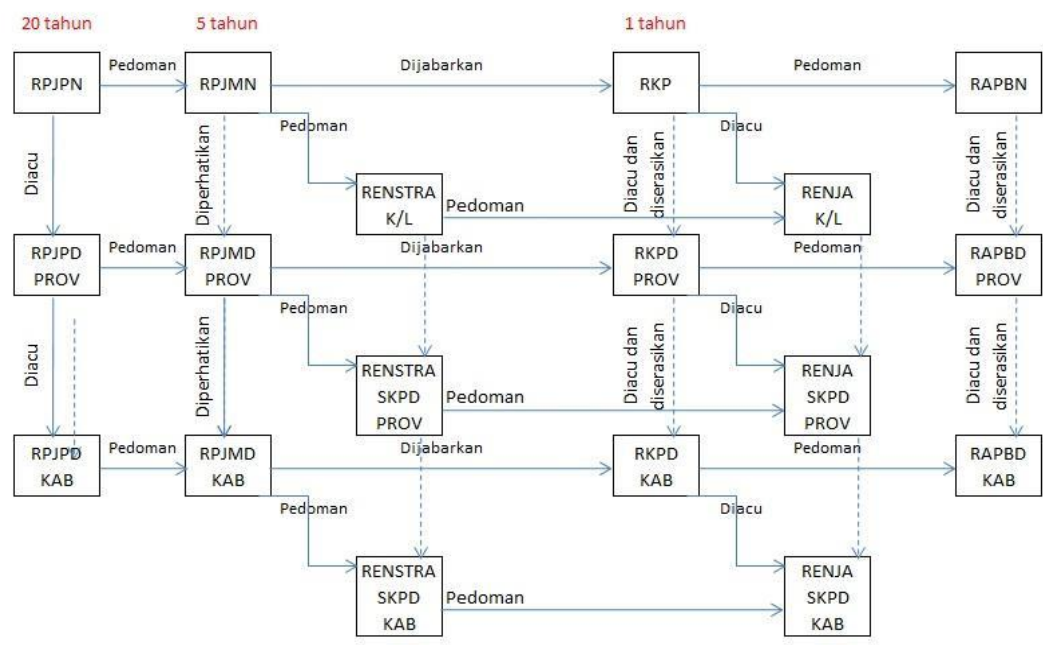
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Kondisi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Data Pokok Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu berdasarkan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun

- 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN			
BAB	II	EVALUASI	PELAKSANAAN	RENJA	BADAN
					PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN			
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN			
BAB	V	PENUTUP			

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2025 Triwulan II terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI 2025		CAPAIAN s.d 2025		K ET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	INDIKATOR SASARAN	: Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat													
		Indeks Resiko Bencana	angka	142,00							105,76		100		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)			3.040.542.430	3.438.534.016		711.264.950		675.050.115		1.386.315.065	100	40,32	
1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.134.984.230	2.364.843.642		560.327.057		578.896.527		1.139.223.584		48,17	
1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bln	31	2.134.984.230	2.364.843.642	31	560.327.057	31	578.896.527	31	1.139.223.584	100	48,17	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100,00	48,17	
												Predikat	Sangat tinggi		
1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				89.335.000	61.551.500		3.292.597		2.372.250		5.664.847		9,20	
1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	6.000.000	4.200.000	0	0		0	0	0	0	0,00	
1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12.000.000	8.718.400	0	0		0	0	0	0	0,00	
1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	10.000.000	6.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	
1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	16	26.335.000	23.701.500	0	0		0	0	0	0	0,00	

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI 2025		CAPAIAN s.d 2025		K ET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	15	35.000.000	18.931.600	3	3.292.597	3	2.372.250	6	5.664.847	40	29,9 2	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			8,00	5,98	
												Predikat	Sangat Rendah		
1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000	202.641.400		0		0		0		0,00	
1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	15	100.000.000	202.641.400	0	0		0	0	0	0	0,00	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			0,00	0,00	
												Predikat	Sangat Rendah		
1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				487.463.900	437.972.884		137.971.896		73.451.291		211.423.187		48,2 7	
1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00	
1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	36.000.000	36.000.000	3	5.441.355	3	5.283.163	6	10.724.518	50	29,7 9	
1.05.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	20.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	431.463.900	386.972.884	3	132.530.541	3	68.168.128	6	200.698.669	50	51,8 6	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			25,00	25,9 9	
												Predikat	Sangat rendah		

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI 2025		CAPAIAN s.d 2025		K ET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				328.759.300	371.524.590		9.673.400		20.330.047		30.003.447		8,08	
1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,jasa,dan perijinan kendaraan dinas operasiaonal / lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	18	120.000.000	188.856.050	3	9.673.400	6	20.330.047	9	30.003.447	50	15,8 9	
1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	183.759.300	170.709.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan / Reahabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	15	25.000.000	11.959.240	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			16,67	5,30	
												Predikat	Sangat Rendah		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				330.294.000	1.552.920.000		9.132.117		86.126.090	0,00	95.258.207	0,00		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100			100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100			100		100		100		100		

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI 2025		CAPAIAN s.d 2025		K ET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana		100			100		100		100		100		
1.05.03.2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000	46.370.600		829.800		0		829.800		0,00	
1.05.03.2.0 1.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	dokumen	1	50.000.000	46.370.600	0,00	829.800	0	0	-	829.800	0	0,00	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan		0,00	0,00		
											Predikat	Sangat Rendah			
1.05.03.2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				45.000.000	0		0		0		0		0,00	
1.05.03.2.0 2.0006	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	30.000.000	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	
1.05.03.2.0 2.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	0	15.000.000	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan		0,00	0,00		
											Predikat	0			
1.05.03.2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200.294.000	1.294.854.400		7.772.717		78.375.090		86.147.807		6,65	

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI 2025		CAPAIAN s.d 2025		K ET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.03.2.0 3.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	dokum en	2	50.000.000	1.099.538.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	orang	75	45.000.000	37.258.000	15	5.820.394	27	10.266.090	42	16.086.484	56	43,1 8	
1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	80	95.294.000	149.764.000	0	0	51	66.630.000	51	66.630.000	64	44,4 9	
1.05.03.2.0 3.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	Lapora n	1	10.000.000	8.294.000	1	1.952.323	1	1.479.000	1	3.431.323	100	41,3 7	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			54,94	32,2 6	
												Predikat	Sedang		
1.05.03.2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				35.000.000	211.695.000		529.600		7.751.000		8.280.600		3,91	
1.05.03.2.0 4.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	kegiata n	1	35.000.000	211.695.000	1	529.600	1	7.751.000	1	8.280.600	100	3,91	
										Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100,0 0	3,91	
												Predikat	Sangat tinggi		

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI 2025		CAPAIAN s.d 2025		K ET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH					3.370.836.430	4.991.454.016		720.397.067		761.176.205	0	1.481.573.272			0
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH					38,08	29,68	
												PREDIKAT	Sangat Rendah		
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH					100,00		
												PREDIKAT	Sangat Tinggi		

Sumber : Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Triwulan II Tahun 2025

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Indeks risiko bencana, bahwa pada tahun 2025 pencapaian indikator sasaran tercapai, dengan pencapaian sebesar 100% dari total 100% target yang telah di tentukan, adapun pencapaian indeks risiko bencana pada tahun 2025 sebesar 105,76 dengan target yang di tetapkan sebesar 142,00 (satuan angka). Pada Tahun 2025 capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung sudah tidak menghitung sendiri, akan tetapi capaian menggunakan hasil perhitungan dari BNPB, karena BNPB juga menghitung nilai Indeks Risiko Bencana seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Nilai Indeks Risiko Bencana dan Nilai Indeks Ketahanan Daerah akan muncul pada tahun berikutnya.
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
 - b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik;

- d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- e. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, jasa dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan;
- f. Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota.
- g. Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota.
- 4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran nihil.
- 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan nihil.
- 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Capaian kinerja program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan nihil.
- 7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - d. Fasilitasi kunjungan tamu;
 - e. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 - f. Penyediaan jasa peralatandna perlengkapan kantor;
 - g. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - h. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
 - i. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota;
 - j. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat memuaskan** yaitu dengan nilai 100%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat.
Capaian Kinerja : 100 % kategori sangat tinggi

Dari Tabel 2.1 dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi akhir 2024	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 2025	Status Capaian			Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK				
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM																			
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																			
		1	Indesk Resiko Bencana	Angka	105,76	142,00	141,50	141,00	105,76	105,76		100%	T			Risk = Hazard x vulnerability / capacity	Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang ada, melalui pelatihan, sosialisasi, informasi kepada masyarakat terutama di wilayah rawan bencana	-	Perhitungan indek risiko bencana saat ini mengikuti dari perhitungan IRB dari BNPB, perhitungan sendiri setiap tahun sekali dan akan muncul pada awal tahun berikutnya, pada saat ini realisasi IRB pada tahun 2025 menggunakan nilai pada hasil tahun 2024
					Jumlah bahaya (hazard)			35											
					Kerentanan (vulnerability)			217											
					Kapasitas (capacity)			363											
INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Penanggulangan Bencana	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100%	100%		100%	T			Jumlah orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang akan terlayani x 100%	Bantuan media sosial dalam pemberian informasi kebencanaan terutama kepada masyarakat di daerah rawan bencana sudah berjalan dengan baik, informasi sendiri diberikan kepada desa dan relawan kebencanaan yang ada untuk di sampaikan terhadap masyarakat, baik berupa peringatan dini, himbauan kepada masyarakat dsb	-	Meningkatkan informasi dan pengetahuan kebencanaan yang ada di kabupaten temanggung terhadap masyarakat di kabupaten temanggung terutama di daerah rawan bencana sebagai langkah secara dini dalam penyampaian informasi kebencanaan yang ada
					Jumlah orang yang terlayani			606.575	357										
					jumlah orang yang akan terlayani			606.575	357										

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Sat uan	Kond isi akhir 2024	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaia n s.d tw 2 2025	Status Capaian			Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Pengh ambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
						202 4	202 5	202 6	202 4	202 5	202 6		T	A T	U K				
		2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100 %	100 %		100%	T			Jumlah orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang akan terlayani x 100%	Masyarakat memiliki peningkatan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana, sehingga saat ini ada kolaborasi dengan pemerintah desa dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana		Peningkatan pelatihan, sosialisasi dan mitigasi teruatam pada daerah rawan bencana di kabupaten temanggung
				Jumlah orang yang terlayani			415.181	94											
				jumlah orang yang akan terlayani			415.181	94											
		3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100 %	100 %		100%	T			Jumlah orang yang terlayani dibagi jumlah orang yang akan terlayani x 100%	Kapasitas dan kemampuan dari TRC (Tim reaksi cepat) BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana serta adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Menjalin komunikasi terhadap masyakarat yang menjadi korban bencana serta peningkatan peran serta pemerintah daerah
				Jumlah orang yang terlayani			54	29											
				jumlah orang yang akan terlayani			54	29											
JUMLAH IKUPD		1			RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						100%	1	-	-					
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		3			RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						100%	3	-	-					
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD		4			RATA-RATA CAPAIAN PD						100%	4	-	-					

Sumber : IKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Triwulan II Tahun 2025

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 4 indikator terdiri dari :
 - a. Indeks risiko bencana
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang ada, melalui pelatihan, sosialisasi, informasi kepada masyarakat terutama di wilayah rawan bencana
 - 2) Faktor penghambatnya adalah kabupaten temanggung memiliki Tingkat kerawanan wilayah yang tinggi
 - 3) Rekomendasi untuk indikator tersebut adalah Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang ada, melalui pelatihan, sosialisasi, informasi kepada masyarakat terutama di wilayah rawan bencana.
 - b. Persentase warga negara yang memperoleh warga negara layanan informasi rawan bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bantuan media sosial dalam pemberian informasi kebencanaan terutama kepada masyarakat di daerah rawan bencana sudah berjalan dengan baik, informasi sendiri diberikan kepada desa dan relawan kebencanaan yang ada untuk di sampaikan terhadap masyarakat, baik berupa peringatan dini, himbauan kepada masyarakat dsb.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah informasi yang disampaikan kepada Masyarakat belum di manfaatkan secara baik.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan informasi dan pengetahuan kebencanaan yang ada di kabupaten temanggung terhadap masyarakat di kabupaten temanggung terutama di daerah rawan bencana sebagai langkah secara dini dalam penyampaian informasi kebencanaan yang ada.
 - c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat memiliki peningkatan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana, sehingga saat ini ada kolaborasi dengan pemerintah desa dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung mendapatkan fasilitas pencegahan dan mitigasi terhadap bencana.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan pelatihan, sosialisasi dan mitigasi terutama pada daerah rawan bencana di kabupaten temanggung.
- d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kapasitas dan kemampuan dari TRC (Tim reaksi cepat) BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana serta adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan korban bencana belum maksimal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menjalin komunikasi terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana serta peningkatan peran serta pemerintah daerah.
2. Untuk capaian indikator dengan katagori tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah tidak ada, karena semua indikator yang ada tercapai dengan katagori sangat tinggi.

2.3 Data Pokok

Data Pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 9 jenis data pokok yaitu 1 indikator sasaran, 3 indikator program dan indikator SPM dan 5 indikator tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Program Penanggulangan Bencana)

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang

berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

Vulnerability

Risk = Hazard x Capacity

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sedangkan untuk penilaian risiko bencana Provinsi dilakukan dengan penghitungan rata-rata dari indeks Risiko Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi tersebut. Untuk Indeks Risiko Bencana Indonesia kali ini dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh alam.

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Bahaya/Ancaman (hazard) adalah suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.

Risiko (risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Kerentanan (vulnerability) adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).

Kemampuan (capacity) adalah penguasaan terhadap sumberdaya, teknologi, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman bencana serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

Pengurangan Risiko Bencana atau *disaster risk reduction (DRR)* adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Praktiknya adalah dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana. Termasuk melalui pengurangan kemungkinan keterpaan bahaya, mengurangi kerentanan, manajemen tanah, dan lingkungan secara bijaksana, serta memperbaiki kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana. Tujuan utamanya untuk mengurangi risiko fatal di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Risiko bencana dapat diartikan sebagai kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta, kesehatan, aset, mata pencaharian, layanan publik, dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu. Definisi risiko bencana ini mencerminkan konsep bahwa bencana adalah hasil dari kondisi berisiko yang terjadi terus-menerus. Risiko bencana terdiri dari berbagai tipe potensi kerugian yang seringkali sulit dihitung. Meskipun demikian, melalui pengetahuan yang memadai terhadap bencana sebelumnya dan pola perkembangan populasi dan sosial-ekonomi, risiko bencana dapat dipetakan dan diukur.

Perkembangan PRB sangat dipengaruhi oleh penelitian massal pada berbagai malapetaka di masa lalu. Konsep PRB berkembang dari paradigma penanggulangan bencana sebelumnya.

Perkembangan paradigma terkait dengan pengurangan risiko bencana meliputi :

1. Pandangan konvensional menganggap bencana sebagai peristiwa atau kejadian yang tidak bisa dielakkan dan korban harus ditolong. Fokus penanggulangan adalah bantuan dan kedaruratan.

2. Paradigma yang berkembang berikutnya adalah mitigasi, yang bertujuan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana dan mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan.
3. Selanjutnya berkembang pada faktor-faktor kerentanan yang mengupayakan integrasi penanggulangan bencana dengan pembangunan.
4. Paradigma yang paling mutakhir adalah Paradigma Pengurangan Risiko Bencana yang memadukan sudut pandang teknis dan ilmiah dengan faktor-faktor sosial ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan dampak bencana. Dalam paradigma ini penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Hal terpenting dalam paradigma ini adalah *memandang masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek dari penanggulangan bencana*.

PRB meliputi berbagai disiplin, seperti manajemen bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan bencana. Selain itu PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar pembangunan bisa berkelanjutan, maka harus mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak tepat akan meningkatkan risiko bencana. Dengan demikian, PRB mencakup semua bagian masyarakat, pemerintahan, dan sektor swasta serta profesional.

Macam-macam Bencana Alam :

1. Gempa Bumi
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi dan diakibatkan oleh tumbukan antarlempeng bumi, patahan aktif, runtuh batuan, atau aktivitas gunung api.
2. Letusan Gunung Api
Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang juga dikenal sebagai erupsi. Bencana alam berupa letusan gunung api dapat menimbulkan sejumlah bahaya seperti awan panas, hujan abu lebat gas racun, lontaran material/pijar, gas racun, lava, tsunami, serta banjir lahar.
3. Tsunami
Nama bencana tsunami diambil dari bahasa Jepang yang

artinya gelombang ombak lautan. Suku kata 'tsu' berarti lautan dan 'nami' berarti gelombang ombak. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak laut raksasa yang terjadi karena pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

4. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau juga campuran keduanya yang keluar lereng akibat kestabilan tanah yang terganggu atau batuan penyusun lereng.

5. Banjir

Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena naiknya volume air.

6. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air besar karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

7. Kekeringan

Kekeringan adalah keadaan di mana jumlah ketersediaan air jauh di bawah yang dibutuhkan untuk hidup, bertani, dan kegiatan lingkungan maupun ekonomi. Sementara, kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian di mana ada tanaman yang sedang dibudidayakan.

8. Angin Puting Beliung

Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang dengan tiba-tiba, terdapat pusat, dan gerakannya melingkar seperti spiral dengan kecepatan 40-50 kilometer per jam. Angin puting beliung terjadi hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat kira-kira 3-5 menit.

9. Gelombang Pasang atau Badai

Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi akibat efek siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi besar menimbulkan bencana alam. Indonesia memang bukan wilayah lintasan siklon tropis, tetapi, keberadaan siklon tropis bisa berpengaruh besar pada terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi yang disertai hujan deras.

Penentuan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung ini menggunakan 3 kriteria yang digunakan yaitu Jumlah bahaya, Kerentanan dan Kapasitas. Pada capaian kinerja Indeks Risiko Bencana dihitung per triwulan sesuai pelaporan capaian kinerja yang dilaporkan oleh perangkat daerah. Tabel dibawah ini merupakan penentuan indeks risiko bencana berserta target dan realisasi.

Tabel 2.3

Indeks Risiko Bencana Triwulan II Tahun 2025

No	Kriteria	Tahun 2025 Triwulan II
1	Persentase Capaian Indeks Risiko Bencana	100%
2	Target Indeks Risiko Bencana Tahun 2025	141,5
3	Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025	105,76

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Nilai indeks risiko bencana adalah semakin kecil nilai yang di capai adalah semakin baik, sehingga penentuan ini korelasinya negatif. Pada tabel di atas, Indek Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 memiliki nilai 105,76 (satuan angka) dari perhitungan yang dilakukan oleh BPBB, sedangkan pada tahun 2025 perhitungan Indek Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung akan diperoleh pada awal Tahun 2026, sehingga hasil perhitungan nilai Indek Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 triwulan II menggunakan hasil dari perhitungan Tahun 2024. BNPB melakukan perhitungan Indek Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota setahun sekali.

TUJUAN

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan

penilaian seluruh kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/ kota. Selanjutnya, buku ini juga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain. Informasi tingkat risiko bencana dari buku ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Indeks Risiko Bencana 2024 berisi gambaran kecenderungan (tren) indeks risiko bencana di kabupaten/ kota dari tahun 2019 hingga 2024. Pola ini dapat memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat pusat dan daerah, berupa penurunan indeks risiko bencana.

Perhitungan skor kelas risiko bencana dari IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) pada tahun 2025 menurut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

1. Katagori kelas risiko rendah memiliki skor sebesar <13
2. Katagori kelas risiko sedang memiliki skor sebesar $13 - 144$
3. Katagori kelas risiko tinggi memiliki skor sebesar >144

Untuk menyusun IRBI diperlukan sumber berbagai data yang kompleks yang terdiri dari sebagai berikut ;

1. Tingkat kerawanan bencana : banjir, gempa bumi, gempa bumi dan tsunami, kebakaran permukiman, kekeringan, angin topan, banjir dan tanah longsor, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang pasang/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, konflik/kerusuhan sosial, kejadian luar biasa (KLB).
2. Jumlah korban meninggal
3. Jumlah korban luka-luka
4. Jumlah kerusakan rumah
5. Jumlah kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur rusak yang terjadi pada Kabupaten/Kota
6. Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota

Data-data tersebut akan diperbarui setiap 1 tahun sekali. Dan versi pertama IRBI terbit pada tahun 2009. Pengumpulan data IRBI dilakukan oleh BNPB dan kemudian menjadi database pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

Adapun faktor pendorong menurunnya nilai IRBI yang ada disebabkan karena adanya peningkatan mitigasi bencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana.

Indikator Sasaran Indeks Resiko Bencana baru dipakai di Tahun 2021 setelah RPJM Perubahan sehingga angka dan perhitungan yang tertera baru dari tahun 2021. Target nilai IRB (Indeks risiko bencana) Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah 141,5 dan sampai pada triwulan I tahun 2025 hasil yang dicapai menggunakan hasil perhitungan IRB dari BNPB pada Tahun 2024 sebesar 105,76, ini dikarenakan perhitungan IRB oleh BNPB dilakukan setahun sekali dan hasil perhitungan akan muncul pada awal tahun berikutnya.

Berikut hasil perhitungan nilai angka IRB dari BNPB dari tahun 2020-2025 Triwulan II terdapat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Nilai IRB dari BNPB untuk Kab. Temanggung

Sumber Data	Tahun						Kelas Risiko 2025
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)	
IRB BNPB	134,51	121,33	110,38	116,84	105,76	105,76	Sedang

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada tabel di atas untuk capaian tahun 2025 triwulan II menggunakan hasil perhitungan tahun 2024 oleh BNPB dikarenakan perhitungan tahun 2025 untuk nilai IRB Kabupaten Temanggung akan muncul pada Bulan Januari Tahun 2026 dengan kelas risiko sedang untuk Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.5

Rekap Kejadian Bencana Tahun 2025 Triwulan II

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
1	12-Jan-25	Wonoboyo	Dusun Cemoro Barat Rt 03 Rw 01 Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo	Tanah Longsor	1
	12-Jan-25	Tretep	Dusun Banaran Rt 08 Rw 02 Desa Bonjor Kecamatan Tretep	Tanah Longsor	
2	20-Jan-25	Bejen	Dusun Sapen RT. 03 RW. 03 Desa Selosabrang Kec. Bejen	Banjir	1
	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Pringapus RT.05 RW.10 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Gletuk Rt 05 RW. 08 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Bonsomo Ds. Kwarakan Kec. Kaloran	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Kemiri RT. 03 RW. 02 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Kranggan	Dsn. Gemawang RT. 01 RW. 09 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Kranggan	Dsn. Gemawang RT. 01 RW. 09 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Tretep	Dsn. Simpar Rt 07 Rw 01 Ds. Simpar Kec. Tretep	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Tretep	Dsn. Simpar Rt 07 Rw 01 Ds. Simpar Kec. Tretep	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Tretep	Dsn. Simpar Rt 07 Rw 01 Ds. Simpar Kec. Tretep	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Bejen	Dusun Tanjungsari Rt 02 Rw 01 Desa Tanjungsari Kec. Bejen	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Bejen	Dusun Tanjungsari Rt 02 Rw 01 Desa Tanjungsari Kec. Bejen	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Bejen	Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bejen	Tanah Longsor	
	20-Jan-25	Bejen	Desa Ngloji RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bejen	Banjir	
	20-Jan-25	Bejen	Ds. Bejen Kec. Bejen	Tanah Longsor	
3	23-Jan-25	Parakan	Jl.Raya Parakan-Wonosobo Desa Caturanom Kecamatan Parakan	Tanah Longsor	1
4	26-Jan-25	Gemawang	Dsn. Babadan RT. 01 RW. 07 Ds. Kemiriombo Kec. Gemawang	Tanah Longsor	1
	26-Jan-25	Jumo	Dusun Dermonganti RT 02 RW 04 Desa Ketitang Kecamatan Jumo	Tanah Longsor	
	26-Jan-25	Gemawang	Margosari Rt 04 Rw 07 Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang	Tanah Longsor	
	26-Jan-25	Gemawang	Dusun Blawong Wetan RT. 05 RW. 09 Desa Muncar Kecamatan Gemawang	Tanah Longsor	
5	30-Jan-25	Pringsurat	Jln. Pingit -Wonokerso Desa Nglorog Kecamatan Pringsurat	Tanah Longsor	1

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
	30-Jan-25	Wonoboyo	Dusun Mejing Desa Tawang Sari RT. 04 RW. 01 Kecamatan Wonoboyo	Cuaca Ekstrem	
6	09-Feb-25	Kandangan	Jln. Kandangan - Rowoseneng	Cuaca Ekstrem	1
	09-Feb-25	Kaloran	Ponpes Montessori Dsn. Pringtali Ds. Kemiri Kec. Kaloran	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kaloran	Dusun Pringtali Desa Kemiri Kecamatan Kaloran	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kranggan	Dsn. Suruh RT. 4 RW. 5 Ds. Genta Kec. Kranggan	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kandangan	Ds. Kembang Sari Kec. Kandangan	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kaloran	Dsn. Tempuran RT. 3 RW. 1 Ds. Tempuran Kec. Kaloran	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kaloran	Jl. Termas - Tegowanuh Kaloran	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kaloran	Desa Tepusen Kecamatan Kaloran	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kaloran	Desa Tepusen RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kaloran	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Kejiwan RT. 03 RW. 06 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Banjarsari RT. 05 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Banjarsari RT. 05 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	
	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Banjarsari RT. 05 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	
7	14-Feb-25	Ngadirejo	Dusun Bakalan RT 04 RW 09 Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo	Tanah Longsor	1
	14-Feb-25	Pringsurat	Jln. Raya Pringsurat (depan Bong Cina)	Cuaca Ekstrem	
	14-Feb-25	Pringsurat	Dusun Digelan Rt 01 RW 05 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat	Cuaca Ekstrem	
	14-Feb-25	Pringsurat	Dusun Batikan Rt 02 RW 04 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat	Cuaca Ekstrem	
	14-Feb-25	Candiroto	Dusun Gembyang Rt 09, 10, 11, 12 RW 05, 06 Desa Kenteng Sari Kecamatan Candiroto	Cuaca Ekstrem	
8	17-Feb-25	Bansari	Dusun Pongangan Desa Candisari Kecamatan Bansari	Banjir	1
	17-Feb-25	Temanggung	Kel. Butuh Kec. Temanggung	Banjir	
	17-Feb-25	Temanggung	Kel. Butuh Kec. Temanggung	Banjir	
	17-Feb-25	Pringsurat	Dsn. Mirikerep Ds. Pringsurat, Dsn. Gilingan Ds. Kebumen, dan Dsn. Mlobo	Banjir	

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
			Ds. Karangwuni Kec. Pringsurat		
			Kab. Temanggung		
	17-Feb-25	Bansari	Dusun Tambahsari Desa Bansari Kec Bansari	Banjir	
	17-Feb-25	Bansari	Dusun Pringapus Rt 05 RW 08 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Tanah Longsor	
	17-Feb-25	Tembarak	Dsn. Ngaglik Ds. Jragan Kec. Tembarak	Tanah Longsor	
	17-Feb-25	Temanggung	Lingk. Perumahan Puri Indah Rt 07 Rw 01, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Banjir	
	17-Feb-25	Temanggung	Lingk. Perumahan Puri Indah Rt 07 Rw 01, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Banjir	
	17-Feb-25	Temanggung	Lingk. Perumahan Puri Indah Rt 07 Rw 01, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Banjir	
9	23-Feb-25	Tlogomulyo	Lamuk Legok Rt 01 Rw 01 Desa Legoksari Kec.Tlogomulyo	Tanah Longsor	1
	23-Feb-25	Kranggan	Jl.Kramat - Purwosari Kranggan Desa Kramat Kec.Kranggan	Tanah Longsor	
10		Bejen	Jln. Ngadirejo - Parakan	Tanah Longsor	1
			Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok		
			Kec. Bejen		
	27-Feb-25	Candiroto	Dusun Karangkulon Desa Gunungpayung Kec Candiroto	Tanah Longsor	
	27-Feb-25	Bulu	Dsn. Kwadungan Ds. Wonotirto Kec. Bulu	Cuaca Ekstrem	
	27-Feb-25	Bulu	Dsn. Kwadungan Ds. Wonotirto Kec. Bulu	Cuaca Ekstrem	
11	14-Mar-25	Wonoboyo	Jl. Raya Cemoro Wates Desa Cemoro Kec. Wonoboyo, Jl. Raya Cemoro Wates Dsn. Pongangan Ds. Wates Kec. Wonoboyo	Banjir	1
	14-Mar-25	Kandangan	Dusun Kedopokan Rt 08 Rw 01 Desa Tlogopucang Kec. Kandangan	Tanah Longsor	
	14-Mar-25	Bansari	Dusun Sawit Rt 02 Rw 01 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Tanah Longsor	
12	15-Mar-25	Gemawang	Dusun Mandang Rt 06 Rw 03 Desa Sucen Kecamatan Gemawang	Tanah Longsor	1
	15-Mar-25	Kledung	Dsn. Legoksari RT. 01 RW. 02 Ds. Paponan Kec. Kledung	Tanah Longsor	
13	26-Mar-25	Temanggung	Lingk. Bakungan Kel. Tlogorejo Kec. Temanggung	Banjir	1
	26-Mar-25	Temanggung	Lingk. Geneng Kel. Kowangan	Banjir	

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
			Kec. Temanggung		
	26-Mar-25	Parakan	Dsn. Mulyosari Ds. Wanutengah Kec. Parakan	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	Tepungsari Kel. Walitelon Selatan	Banjir	
			Kec. Temanggung		
	26-Mar-25	Temanggung	Kelurahan Jurang RT 04 RW 01 Kecamatan Temanggung	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	Jl. MT. Haryono Suronatan	Banjir	
			Kel. Temanggung II Kec. Temanggung		
	26-Mar-25	Temanggung	Kel. Manding Kec. Temanggung	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	Ling. Karangwetan 07/06 Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	RT 4 RW 6 Perum. Gemoh Asri Kel. Butuh Kec. Temanggung	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	Kantor BPKPAD Temanggung	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	Lingk. Dompon Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	Ponpes ABATA Jln. Gatot Subroto Km. 2 Karangsari Manding Temanggung	Banjir	
	26-Mar-25	Temanggung	Lingkungan Perum Paramedis RT1 RW 6 Kelurahan Jurang Kec. Temanggung	Banjir	
14	2 April 2025	Candiroto	Jalan Trocoh Desa Lempuyang Kec. Candiroto	Tanah Longsor	1
	2 April 2025	Bejen	Dusun Biting Rt 05 Rw 01 Desa Larangan Luwok Kec. Bejen	Tanah Longsor	
	2 April 2025	Candiroto	Dusun Winong Rt 01 rw 05 Desa Candiroto Kec. Candiroto	Tanah Longsor	
	2 April 2025	Jumo	Dusun Kompregan Rt 02 rw 08 Desa Jombor Kec. Jumo	Tanah Longsor	
	2 April 2025	Candiroto	Dusun Mentoroto Rt 1 rw 3 Desa Mento kec. Candiroto	Banjir	
	2 April 2025	Candiroto	Jalan alternatif Jumo - Candiroto	Banjir	
	2 April 2025	Candiroto	Dusun Gembyang Rt 12 Rw 6 Desa Kentengsari Kec. Candiroto	Cuaca Ekstrem	
15	8 April 2025	Temanggung	Dsn. Ketitang RT. 03 RW. 03 Ds. Nampirejo Kec. Temanggung	Banjir	1
	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Tembarak Lor RT. 03 RW. 02 Ds. Tembarak Kec. Tembarak	Banjir	

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
	8 April 2025	Tembarak	Ds. Tembarak Kec. Tembarak	Banjir	
	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Jokopati Ds. Tawang Sari Kec. Tembarak	Tanah Longsor	
	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Tinebah Ds. Purwodadi Kec. Tembarak	Tanah Longsor	
	8 April 2025	Selopampang	Dsn. Jlamprang Ds. Tanggulanom Kec. Selopampang	Cuaca Ekstrem	
	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Ngabean Ds. Menggoro Kec. Tembarak	Tanah Longsor	
	8 April 2025	Kranggan	Lingkungan Kranggan Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Banjir	
	8 April 2025	Kranggan	Lingkungan Kranggan Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Banjir	
	8 April 2025	Kranggan	Jalan Raya Kranggan -Pringsurat Km 1 (depan mahkota swalayan kranggan)	Banjir	
	8 April 2025	Selopampang	Dusun Jetis Desa Gambasan Kec. Selopampang	Banjir	
	8 April 2025	Selopampang	Desa Kebonagung Kecamatan Selopampang	Banjir	
	8 April 2025	Selopampang	Jalan Raya Tembarak- Selopampang Desa Kacepit Kec Selopampang	Banjir	
16	7 May 2025	Kranggan	Jln. Raya Karanggen Pringsurat	Cuaca Ekstrem	1
	7 May 2025	Temanggung	Jln. Jendral Sudirman (Depan Kantor Agraria)	Cuaca Ekstrem	
	7 May 2025	Temanggung	Jln. Dewi Sartika Temanggung	Cuaca Ekstrem	
	7 May 2025	Temanggung	Lingkungan Nglarangan Kelurahan Jampirejo Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	
17	9 May 2025	Tlogomulyo	Dusun Pundung Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo	Banjir	1
	9 May 2025	Bejen	Dusun Ngrimpak Rt 01 & Rt 02 Rw 05 Desa Lowungu Kec.Bejen	Cuaca Ekstrem	
	9 May 2025	Ngadirejo	Dusun Carikan Rt 02 Rw 03 Desa Gondang Winangun Kec.Ngadirejo	Cuaca Ekstrem	
	9 May 2025	Ngadirejo	Dusun Carikan Rt 02 Rw 03 Desa Gondang Winangun Kec.Ngadirejo	Cuaca Ekstrem	
	9 May 2025	Temanggung	Jalan Suyoto No.7 Jampiroso Kertosari Kec.Temanggung	Cuaca Ekstrem	

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
	9 May 2025	Temanggung	Jl.Jendral Sudirman, Kelurahan Kertosari Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	
	9 May 2025	Temanggung	Perumda Aneka Usaha Jl.Jendral Sudirman, Kelurahan Kertosari Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	
	9 May 2025	Temanggung	Depan SMAN 2 Temanggung Jl. Pahlawan Kel.Giyanti Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	
18	10 May 2025	Temanggung	Ling. Dompon Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Banjir	1
	10 May 2025	Tlogomulyo	Dusun Tlilir Rt 03 Rw 01 Desa Tlilir Kec.Tlogomulyo	Cuaca Ekstrem	
	10 May 2025	Tembarak	Desa Tembarak Kecamatan Tembarak	Tanah Longsor	
	10 May 2025	Kranggan	Ds. Pendowo Kec. Kranggan	Banjir	
19	11 May 2025	Selopampang	Desa Kebonagung Kec.Selopampang	Tanah Longsor	1
	11 May 2025	Selopampang	Dusun Koripan Desa Kacepit Rt 01 Rw 03 Kec.Selopampang	Tanah Longsor	
20	13 May 2025	Tembarak	Jl penghubung Desa Greges - Desa Krajan Kec. Tembarak	Tanah Longsor	1
	13 May 2025	Temanggung	RT. 02 RW 7 Banyutarung Kecamatan Temanggung	Tanah Longsor	
	13 May 2025	Parakan	Jalan Penghubung Desa Traji Kecamatan Parakan – Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Dusun Gamblog RT.01 RW. 02 Desa traaji Kecamatan Parakan	Banjir	
21	15 May 2025	Temanggung	Lokasi Jalan Raya Pikatan-Titang, Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung	Tanah Longsor	1
	15 May 2025	Parakan	Dusun Gamblok Rt 02 Rw 02 Desa Traji Kec.Parakan	Banjir	
	15 May 2025	Parakan	Depan Matahari Parakan (sebelum RSK dari arah Temanggung) sampai ke lampu merah sari ayam	Banjir	
	15 May 2025	Bulu	Lampu merah sari ayam menuju arah Bulu tepatnya di depan Indomart arah Bulu.	Banjir	
	15 May 2025	Kaloran	Dsn. Banyuurip RT. 04 RW. 05 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor	
22	16 May 2025	Tretep	Dsn. Bakal RT. 05 RW. 02 Ds. Campurejo Kec. Tretep	Tanah Longsor	1

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Jumlah Bencana
	16 May 2025	Tretep	Dsn. Bakal RT. 05 RW. 02 Ds. Campurejo Kec. Tretep	Tanah Longsor	
	16 May 2025	Wonobooyo	Desa Cemoro Kec. Wonobooyo	Tanah Longsor	
	16 May 2025	Parakan	Lingkungan Jogomertan RT. 03 RW. 08 Kelurahan Parakan Kauman Kec. Parakan	Tanah Longsor	
	16 May 2025	Parakan	Dsn. Glapansari RT. 02 RW. 03 Ds. Glapansari Kec. Parakan	Tanah Longsor	
23	17 May 2025	Tretep	Dusun Tlogo rt 2 rw 1 Desa Tlogo Kec. Tretep	Tanah Longsor	1
	17 May 2025	Kandangan	Dusun Rejosari rt 1 rw 1 Desa Rowo Kec. Kandangan	Cuaca Ekstrem	
	17 May 2025	Bulu	Kali Parangan Desa Putat Kecamatan Bulu	Banjir	
24	22 May 2025	Gemawang	Jln. Ds. Krempong - Ds. Sucen Kec. Gemawang	Tanah Longsor	1
	22 May 2025	Candiroto	Dusun Gembyang rt 6 rw 3 Desa Kentengsari Kec. Candiroto	Tanah Longsor	
25	23 May 2025	Wonobooyo	Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonobooyo	Tanah Longsor	1
26	31 May 2025	Tretep	Dsn. Gandikan 04/01 Ds. Bojong Kec. Tretep	Cuaca Ekstrem	1
	31 May 2025	Tretep	Dsn. Gandikan 04/01 Ds. Bojong Kec. Tretep	Cuaca Ekstrem	
	31 May 2025	Wonobooyo	Dsn. Senet Ds. Purwosarii Kec. Wonobooyo	Banjir	
	31 May 2025	Candiroto	Sungai Lutut Dusun Batusari Desa Batusari Kecamatan Candiroto	Banjir	
27	3 June 2025	Kledung	Dsn. Batusari RT. 03 RW. 02 Ds. Batusari Kec. Kledung	Tanah Longsor	1
	3 June 2025	Temanggung	Lingkungan Geneng RT. 02 RW. 01 Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	
	3 June 2025	Temanggung	Lingkungan Geneng RT. 03 RW. 01 Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	
	3 June 2025	Kaloran	Dsn. Noyoragen RT. 03 RW. 02 Ds. Gandulan Kec. Kaloran	Cuaca Ekstrem	

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Sedangkan data desa rawan bencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada dasarnya masih sama dengan desa rawan pada Triwulan IV 2024, data yang ada sebagai berikut terdapat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Data Desa Rawan Bencana
Tahun 2025 Triwulan II

NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA
1	BULU	BULU	118	CANDIROTO	CANDIROTO
2		TEGALLURUNG	119		LEMPUYANG
3		CAMPURSARI	120		CANGGAL
4		GANDUREJO	121		KENTENGSAARI
5		TEGALREJO	122		NGABEYAN
6		GONDOSULI	123		BANTIR
7		PUTAT	124		MUNTUNG
8		DANUPAYAN	125		BATURSARI
9		MONDORETNO	126		MUNENG
10		PANDEMULYO	127		PLOSOGADEN
11		PASURUHAN	128		SIDOHARJO
12		PAKUREJO	129	KRANGGAN	KRANGGAN
13		MALANGSARI	130		BADRAN
14		PAGERGUNUNG	131		BENGKAL
15		WONOSARI	132		PARE
16		BANSARI	133		NGROPOH
17		WONOTIRTO	134		PENDOWO
18		PENGILON	135		SANGGRAHAN
19	TEMBARAK	MENGGORO	136		KLEPU
20		KEMLOKO	137		KEMLOKO
21		GANDU	138		GENTAN
22		BOTOPUTIH	139		KRAMAT
23		GREGES	140		PURWOSARI
24		KRAJAN	141	TLOGOMULYO	LANGGENG
25		DRONO	142		TANJUNGSARI
26		BANARAN	143		LOSARI
27	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 2	144		LEGOKSARI
28		BANYUURIP	145		TLILIR
29		KOWANGAN	146		GEDEGAN
30		JURANG	147		PAGERSARI
31		TLOGOREJO	148	SELOPAMPANG	TANGGULANOM
32		KEBONSARI	149		JETIS
33		MADURESO	150		SALAMREJO

NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA
34		WALITELON SELATAN	151		NGADITIRTO
35		JOHO	152		BULAN
36		MUDAL	153		KACEPIT
37		GILINGSARI	154		GAMBASAN
38	PRINGSURAT	PRINGSURAT	155		BUMIAYU
39		KEBUMEN	156		PLUMBON
40		KUPEN	157	BANSARI	BANSARI
41		KARANGWUNI	158		MOJOSARI
42		GOWAK	159		REJOSARI
43		NGIPIK	160		GUNUNGSARI
44		PINGIT	161		BALESARI
45		KLEPU	162		PURBOREJO
46		SOBOREJO	163		TLOGOWERO
47		NGLOROG	164		MRANGGEN KIDUL
48		PAGERGUNUNG	165		MRANGGEN TENGAH
49		WONOKERSO	166		CANDISARI
50	KALORAN	KALORAN	167		CAMPURANOM
51		TLOGOWUNGU	168		GENTINGSARI
52		GANDON	169		TANUREJO
53		TLETER	170	KLEDUNG	KLEDUNG
54		GETAS	171		KALIREJO
55		KALIMANGGIS	172		PAPONAN
56		TEMPURAN	173		JEKETRO
57		KEMIRI	174		KWADUNGAN GUNUNG
58		GEBLOG	175		KWADUNGAN JURANG
59		TEGOWANUH	176		TLAHAB
60		KEBLUKAN	177		PETARANGAN
61		TEPUSEN	178		CANGGAL
62		KWARAKAN	179		JAMBU
63	KANDANGAN	CARUBAN	180		KRUWISAN
64		WADAS	181		BATURSARI
65		KEMBANGSARI	182		TUKSARI
66		GESING	183	BEJEN	BEJEN
67		MARGOLELO	184		BANJARSARI
68		BLIMBING	185		JLEGONG
69		KEDUNGUMPU L	186		PRANGKOKAN
70		MALEBO	187		CONGKRANG
71		TLOGOPUCANG	188		KEBONDALEM
72		KEDAWUNG	189		KEMUNING
73		BANJARSARI	190		SELOSABRANG
74	KEDU	KEDU	191		TANJUNG SARI

NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA
75		CANDIMULYO	192		PETUNG
76		SALAMSARI	193		DUREN
77		DANUREJO	194		NGALIYAN
78		MERGOWATI	195	WONOBOYO	WONOBOYO
79		KUTOANYAR	196		PATEKEN
80		KUNDISARI	197		PITROSARI
81		BOJONEGORO	198		PURWOSARI
82		TEGALSARI	199		KEBONSARI
83	PARAKAN	PARAKAN WETAN	200		SEMEN
84		WANUTENGAH	201		TENING
85		NGLONDONG	202		WONOCOYO
86		DANGKEL	203		PESANTREN
87		WATUKUMPUL	204		REJOSARI
88		RINGINANOM	205		TAWANGSARI
89		CATURANOM	206		CEMORO
90		GLAPANSARI	207		WATES
91	NGADIREJO	MANGGONG	208	GEMAWANG	GEMAWANG
92		NGADIREJO	209		MUNCAR
93		DLIMOYO	210		KEMIRIOMBO
94		PURBOSARI	211		NGADISEPI
95		CAMPURSARI	212		KREMPONG
96		TEGALREJO	213		SUCEN
97		GIRIPURNO	214		KARANGSENENG
98		KATEKAN	215		BANARAN
99		BANJARSARI	216		KALIBANGER
100		PRINGAPUS	217		JAMBON
101		GEJAGAN			
102	JUMO	JAMUSAN			
103		KERTOSARI			
104		GUNUNGGEMPOL			
105		PADURESO			
106		JOMBOR			
107		KETITANG			
108	TRETEP	TRETEP			
109		DONOROJO			
110		NGLARANGAN			
111		SIGEDONG			
112		BONJOR			
113		TEMPELSARI			
114		CAMPUREJO			
115		BENDUNGAN			
116		SIMPAR			
117		TLOGO			

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berikut data desa rawan yang telah mendapatkan berbagai fasilitas/layanan BPBD dalam mitigasi bencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terdapat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Desa Mitigasi Bencana
s/d Tahun 2025 Triwulan II

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
1	BULU	PANDEMULYO	2020	2022	2022	2022		2019	2022			
2	BULU	MALANGSARI	2020	2022	2022			2019				
3	BULU	PAGERGUNUNG	2020	2021	2021	2021		2018				
4	BULU	WONOSARI	2020	2021	2021	2021	2018	2019				
5	BULU	BANSARI	2020	2022	2022			2018				
6	BULU	WONOTIRTO	2020	2021	2021	2021					20 14	
7	BULU	BULU	2020	2022	2022							
8	BULU	TEGALLURUNG	2020	2022	2022							
9	BULU	CAMPURSARI	2020	2022	2022							
10	BULU	GANDUREJO	2020	2022	2022							
11	BULU	TEGALREJO	2020	2022	2022							
12	BULU	GONDOSULI	2020	2022	2022							
13	BULU	PUTAT	2020	2022	2022							
14	BULU	DANUPAYAN	2020	2022	2022							
15	BULU	MONDORETNO	2020	2022	2022							
16	BULU	PASURUHAN	2020	2022	2022							
17	BULU	PAKUREJO	2020	2022	2022							
18	BULU	PENGILON	2020	2022	2022							
19	TEMBARAK	MENGGORO	2020	2023	2023							
20	TEMBARAK	KEMLOKO	2020	2019	2019	2019		2017	2019			
21	TEMBARAK	GANDU	2020					2017				
22	TEMBARAK	GREGES	2020					2019				
23	TEMBARAK	KRAJAN	2020									
24	TEMBARAK	DRONO	2020	2022	2022	2022		2018	2022			

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
25	TEMBARAK	BANARAN	2020					2017				
26	TEMBARAK	BOTOPUTIH	2020	2022	2022	2022			2022			
27	TEMBARAK	PURWODADI		2023	2023							
28	TEMANGGU NG	TEMANGGUNG 2	2020									
29	TEMANGGU NG	BANYUURIP	2020	2017	2017	2017					20 17	
30	TEMANGGU NG	KOWANGAN	2020									
31	TEMANGGU NG	JURANG	2020									
32	TEMANGGU NG	TLOGOREJO	2020									
33	TEMANGGU NG	WALITELON SELATAN	2020					2019				
34	TEMANGGU NG	MADURESO	2020									
35	TEMANGGU NG	GILINGSARI	2020	2016	2016	2016						2016
36	TEMANGGU NG	KEBONSARI		2021	2021	2021						
37	TEMANGGU NG	MUDAL	2020									
38	TEMANGGU NG	JOHO	2020	2020	2020	2020						
39	PRINGSURAT	KARANGWUNI	2020	2015, 2017, 2021, 2022	2015, 2017, 2021, 2022	2015, 2017, 2021, 2022		2016, 2016	2015	2019		
40	PRINGSURAT	NGIPIK	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022		2019				
41	PRINGSURAT	SOBOREJO	2020	2015, 2021, 2022	2015, 2021, 2022	2015, 2021		2018			20 15	

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
42	PRINGSURAT	WONOKERSO	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022		2018				
43	PRINGSURAT	PRINGSURAT	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022						
44	PRINGSURAT	KEBUMEN	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022						
45	PRINGSURAT	KUPEN	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022						
46	PRINGSURAT	GOWAK	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022						
47	PRINGSURAT	PINGIT	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022						
48	PRINGSURAT	KLEPU	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022						
49	PRINGSURAT	NGLOROG	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022						
50	PRINGSURAT	PAGERGUNUNG	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021, 2022					2015	
51	KALORAN	TLOGOWUNGU	2020	2022	2022			2017				
52	KALORAN	TLETER	2020	2019, 2022	2019, 2022	2019		2017, 2017	2019			
53	KALORAN	GETAS	2020	2015, 2024	2015, 2024	2015, 2024	2024	2016, 2017, 2024	2015			
54	KALORAN	KALIMANGGIS	2020	2022	2022		2024	2017			2013	
55	KALORAN	TEMPURAN	2020	2022	2022	2022, 2024	2022,2024	2016, 2022, 2024				
56	KALORAN	KEBLUKAN	2020	2022	2022			2018				
57	KALORAN	KALORAN	2020	2022	2022							
58	KALORAN	GANDON	2020	2022	2022							
59	KALORAN	KEMIRI	2020	2022	2022	2024	2024	2024				

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
60	KALORAN	GEBLOG	2020	2022	2022							
61	KALORAN	TEGOWANUH	2020	2022	2022							
62	KALORAN	TEPUSEN	2020	2022	2022							
63	KALORAN	KWARAKAN	2020	2022	2022							
64	KANDANGAN	MARGOLELO	2020	2022	2022			2016				
65	KANDANGAN	BLIMBING	2020	2022	2022			2017				
66	KANDANGAN	KEDUNGUMPUL	2020	2019	2019	2019		2017	2019			
67	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	2020	2015	2015	2015		2016	2015		20 09	
68	KANDANGAN	KEDAWUNG	2020	2022	2022			2016,20 17				
69	KANDANGAN	GESING	2020	2020	2020	2020			2020			
70	KANDANGAN	CARUBAN	2020	2022	2022							
71	KANDANGAN	WADAS	2020	2022	2022							
72	KANDANGAN	KEMBANGSARI	2020	2022	2022							
73	KANDANGAN	MALEBO	2020	2022	2022							
74	KANDANGAN	BANJARSARI	2020	2022	2022							
75	KEDU	KUTOANYAR	2020	2015	2015	2015					20 15	
76	KEDU	KUNDISARI	2020					2018				
77	KEDU	BOJONEGORO	2020	2021	2021	2021		2019				
78	KEDU	TEGALSARI	2020	2021	2021	2021						
79	KEDU	KEDU	2020									
80	KEDU	CANDIMULYO	2020									
81	KEDU	SALAMSARI	2020									
82	KEDU	DANUREJO	2020	2023	2023							
83	KEDU	MERGOWATI	2020									
84	PARAKAN	PARAKAN WETAN	2020	2017	2017	2017						2017
85	PARAKAN	WANUTENGAH	2020	2023	2023							

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
86	PARAKAN	NGLONDONG	2020									
87	PARAKAN	DANGKEL	2020									
88	PARAKAN	WATUKUMPUL	2020					2017				
89	PARAKAN	RINGINANOM	2020					2017				
90	PARAKAN	CATURANOM	2020	2021, 2016	2021, 2016	2021, 2016		2017	2021			2016
91	PARAKAN	GLAPANSARI	2020	2015	2015	2015	2019				2015	
92	NGADIREJO	DLIMOYO	2020	2015	2015	2015	2017				2015	
93	NGADIREJO	NGADOREJO	2020									
94	NGADIREJO	MANGGONG	2020									
95	NGADIREJO	PURBOSARI	2020									
96	NGADIREJO	CAMPURSARI	2020				2017					
97	NGADIREJO	TEGALREJO	2020	2021	2021	2021	2017	2018	2021			
98	NGADIREJO	GIRIPURNO	2020									
99	NGADIREJO	KATEKAN	2020	2021	2021	2021	2017	2018				
100	NGADIREJO	BANJARSARI	2020				2017					
101	NGADIREJO	PRINGAPUS	2020				2017					
102	NGADIREJO	GEJAGAN	2020	2021	2021	2021						
103	JUMO	PADURESIO	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021		2018				
104	JUMO	JOMBOR	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021		2016				
105	JUMO	JAMUSAN	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021						
106	JUMO	KERTOSARI	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021						
107	JUMO	GUNUNG GEMPOL	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021						

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
108	JUMO	KETITANG	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021						
109	TRETEP	BONJOR	2020	2016	2016	2016		2016	2016		20 16	
110	TRETEP	TEMPELSARI	2020					2016				
111	TRETEP	CAMPUREJO	2020	2016	2016	2016		2019		2016		
112	TRETEP	TRETEP	2020									
113	TRETEP	DONOROJO	2020	2024	2024	2024						
114	TRETEP	NGLARANGAN	2020	2024	2024	2024			2024			
115	TRETEP	SIGEDONG	2020									
116	TRETEP	BENDUNGAN	2020									
117	TRETEP	SIMPAR	2020									
118	TRETEP	TLOGO	2020									
119	CANDIROTO	CANDIROTO	2020	2021, 2015	2015	2015						2015
120	CANDIROTO	LEMPUYANG	2020	2021	2021	2021						
121	CANDIROTO	CANGGAL	2020	2015, 2021, 2024	2015, 2021, 2024	2015, 2021, 2024	2017, 2018	2018	2024		20 15	
122	CANDIROTO	KENTENGSAARI	2020	2021	2021	2021	2017, 2018	2019				
123	CANDIROTO	NGABEYAN	2020	2021	2021	2021	2017					
124	CANDIROTO	BANTIR	2020	2021	2021	2021	2018					
125	CANDIROTO	KRAWITAN		2023	2023							
126	CANDIROTO	GUNUNG PAYUNG		2023	2023							
127	CANDIROTO	BATURSARI	2020	2021, 2015	2015, 2021	2015, 2021						2015
128	CANDIROTO	MENTO	2020	2023, 2024	2023, 2024	2024						
129	CANDIROTO	MUNENG	2020	2021	2021	2021						
130	CANDIROTO	PLOSOGADEN	2020	2021	2021	2021		2019				

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
131	CANDIROTO	SIDOHARJO	2020	2017, 2015, 2021	2017, 2015, 2021	2017, 2015, 2021	2018	2018	2017		20 15	
132	CANDIROTO	MUNTUNG	2020	2021	2021	2021	2018					
133	KRANGGAN	NGROPOH	2020					2018			20 13	
134	KRANGGAN	PENDOWO	2020					2017				
135	KRANGGAN	KLEPU	2020					2019				
136	KRANGGAN	KEMLOKO	2020					2017				
137	KRANGGAN	GENTAN	2020					2017				
138	KRANGGAN	PURWOSARI	2020	2017	2017	2017	2018	2017	2017			
139	KRANGGAN	KRANGGAN	2020									
140	KRANGGAN	BADRAN	2020									
141	KRANGGAN	BENGKAL	2020									
142	KRANGGAN	PARE	2020									
143	KRANGGAN	KRAMAT	2020									
144	KRANGGAN	SANGGRAHAN	2020									
145	TLOGOMULYO	LOSARI	2020	2021	2021	2021	2021	2017	2021			
146	TLOGOMULYO	TLILIR	2020					2017				
147	TLOGOMULYO	LEGOKSARI	2020	2014	2014	2014					20 14	
148	TLOGOMULYO	LANGGENG	2020									
149	TLOGOMULYO	TANJUNGSARI	2020									
150	TLOGOMULYO	GEDEGAN	2020									
151	TLOGOMULYO	PAGERSARI	2020					2017				

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
152	SELOPAMPA NG	SELOPAMPANG		2023	2023							
153	SELOPAMPA NG	TANGGULANOM	2020	2020, 2017, 2021,20 24	2020, 2017, 2021	2020, 2017, 2021		2017	2020		20 17	
154	SELOPAMPA NG	JETIS	2020	2021	2021	2021		2017				
155	SELOPAMPA NG	SALAMREJO	2020	2021	2021	2021						
156	SELOPAMPA NG	NGADITIRTO	2020	2017, 2021	2017, 2021	2017, 2021	2018	2017	2017			
157	SELOPAMPA NG	BULAN	2020	2021	2021	2021						
158	SELOPAMPA NG	KACEPIT	2020	2021	2021	2021						
159	SELOPAMPA NG	GAMBASAN	2020	2021	2021	2021						
160	SELOPAMPA NG	BUMIAYU	2020	2021	2021	2021						
161	SELOPAMPA NG	KEBONAGUNG		2023	2023							
162	SELOPAMPA NG	BAGUSAN		2023	2023							
163	SELOPAMPA NG	PLUMBON	2020	2021	2021	2021						
164	BANSARI	BANSARI	2020	2015	2015	2015	2016					2015
165	BANSARI	MOJOSARI	2020				2016	2018				
166	BANSARI	REJOSARI	2020				2016					
167	BANSARI	GUNUNGSARI	2020				2016					
168	BANSARI	BALESARI	2020	2009	2009	2009	2016				20 09	
169	BANSARI	PURBOREJO	2020				2016					

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
170	BANSARI	TLOGOWERO	2020				2016					
171	BANSARI	MRANGGEN KIDUL	2020	2017	2017	2017	2016	2016		2017		
172	BANSARI	MRANGGEN TENGAH	2020	2016	2016	2016	2016					2016
173	BANSARI	CANDISARI	2020				2016					
174	BANSARI	CAMPURANOM	2020				2016					
175	BANSARI	GENTINGSARI	2020				2016					
176	BANSARI	TANUREJO	2020				2016					
177	KLEDUNG	KLEDUNG	2020				2019					
178	KLEDUNG	KALIREJO	2020				2019	2019				
179	KLEDUNG	PAPONAN	2020				2019					
180	KLEDUNG	JEKETRO	2020				2019					
181	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	2020	2016	2016	2016	2019	2019				2016
182	KLEDUNG	KWADUNGAN JURANG	2020	2016	2016	2016	2019					2016
183	KLEDUNG	TLAHAB	2020	2021	2021	2021	2019	2018	2021			
184	KLEDUNG	PETARANGAN	2020	2015, 2021	2015, 2021	2015 ,2021	2019	2016			2015	
185	KLEDUNG	CANGGAL	2020				2019	2017				
186	KLEDUNG	JAMBU	2020				2019					
187	KLEDUNG	KRUWISAN	2020	2022	2022	2022	2019	2017	2022			
188	KLEDUNG	BATURSARI	2020				2019	2018				
189	KLEDUNG	TUKSARI	2020				2019	2017				
190	BEJEN	BANJARSARI	2020	2021	2021	2021		2018				
191	BEJEN	JLEGONG	2020	2021	2021	2021		2017				
192	BEJEN	PRANGKOKAN	2020	2021, 2024	2021, 2024	2021, 2024	2024	2019				
193	BEJEN	TANJUNG SARI	2020	2021	2021	2021		2018				

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALISASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUNG SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
194	BEJEN	PETUNG	2020	2015, 2021, 2024	2015, 2021, 2024	2015, 2021, 2024					2015	
195	BEJEN	BEJEN	2020	2021	2021	2021						
196	BEJEN	CONGKRANG	2020	2021	2021	2021						
197	BEJEN	KEBONDALEM	2020	2021	2021	2021						
198	BEJEN	SELOSABRANG	2020	2021	2021	2021						
199	BEJEN	DUREN	2020	2021	2021	2021						
200	BEJEN	NGALIYAN	2020	2021	2021	2021						
201	BEJEN	KEMUNING	2020	2021, 2024	2021, 2024	2021, 2024						
202	WONOBOYO	REJOSARI	2020	2013	2013	2013					2013	
203	WONOBOYO	WONOBOYO	2020					2019				
204	WONOBOYO	KEBONSARI	2020	2016	2016	2016	2018	2016, 2019	2016			
205	WONOBOYO	PESANTREN	2020					2018				
206	WONOBOYO	CEMORO	2020				2024	2018				
207	WONOBOYO	TENING	2020	2021, 2024	2021	2021						
208	WONOBOYO	WATES	2020	2022	2022	2022	2022, 2024		2022			
209	WONOBOYO	PATEKEN	2020									
210	WONOBOYO	PITROSARI	2020									
211	WONOBOYO	PURWOSARI	2020									
212	WONOBOYO	SEMEN	2020									
213	WONOBOYO	WONOCOYO	2020									
214	WONOBOYO	TAWANGSARI	2020									
215	GEMAWANG	GEMAWANG	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021						

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
216	GEMAWANG	MUNCAR	2020	2015, 2015, 2021	2015, 2015, 2021	2015, 2015, 2021	2024	2016, 2016	2015		20 15	
217	GEMAWANG	KEMIRIOMBO	2020	2021,20 22	2021,2022	2021		2016				
218	GEMAWANG	NGADISEPI	2020	2021,20 22	2021,2022	2021			2021			
219	GEMAWANG	KREMPONG	2020	2021,20 22	2021,2022	2021		2017				
220	GEMAWANG	SUCEN	2020	2021,20 22	2021,2022	2021		2017				
221	GEMAWANG	KARANGSENENG	2020	2021,20 22	2021,2022	2021		2019				
222	GEMAWANG	BANARAN	2020	2016, 2021, 2022	2016, 2021, 2022	2016, 2021		2016, 2015	2016			
223	GEMAWANG	KALIBANGER	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021						
224	GEMAWANG	JAMBON	2020	2021, 2022	2021, 2022	2021			2022			
225	PUSKESMAS	PUSKESMAS JUMO		2022	2022							
226		PUSKESMAS TEMANGGUNG		2022	2022							
227		PUSKESMAS TEPUSEN		2022	2022							
228		PUSKESMAS BULU		2022	2022							
229		PUSKESMAS KANDANGAN		2022	2022							
230		PUSKESMAS WONOBOYO		2022	2022							
231		PUSKESMAS KRANGGAN		2022	2022							

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
232		PUSKESMAS REJOSARI		2023	2023							
233		PUSKESMAS BANJARSARI		2023	2023							
234		PUSKESMAS CANDIROTO		2023	2023							
235		PUSKESMAS BANSARI		2023	2023							
236		PUSKESMAS TEMBARAK		2023	2023							
237		PUSKESMAS KEDU		2023	2023							
238		PUSKESMAS TRAJI		2023	2023							
239	SD	SDN TLOGOREJO		2022	2022							
240		SDN 3 PENDOWO		2022	2022							
241		SDN 2 KALIMANGGIS		2022	2022							
242		SDN MANDING		2023	2023							
243		SDN NGIMBRANG		2023	2023							
244		SDN KEBONSARI		2023	2023							
245		SDN KEMLOKO KRANGGAN		2023	2023							
246		SDN 3 TEMANGGUNG II		2023	2023							
247		SDN KALIREJO		2023	2023							
248		SDN 4 KALORAN		2023	2023							
249		SDN 3 KARANGWUNI		2023	2023							
250		SDN BANJARSARI		2023	2023							
251		SD N 3 PARAKAN KAUMAN		2024	2024							

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
252		SD ISLAM QUR'ANI		2024	2024							
253		SD Negeri 1 Malebo		2024	2024							
254		MI Ma'arif 1 Gesing		2024	2024							
255		SD Maschi Temanggung		2024	2024							
256		MI Ma'arif 2 Gesing		2024	2024							
257		IT FI AHSANI TAQWIM		2024	2024							
258		SDIT Al Qudwah Ngadirejo		2024	2024							
259	SMP	SMP N 1 TEMANGGUNG		2022	2022							
260		SMP N 2 TEMANGGUNG		2022	2022							
261		SMP N 3 TEMANGGUNG		2022	2022							
262		SMP N 4 TEMANGGUNG		2022	2022							
263		SMP N 5 TEMANGGUNG		2022	2022							
264		SMP N 6 TEMANGGUNG		2023	2023							
265		MTS Integrasi Al Hudlari Temanggung		2024	2024							
266		SMP Darul Muttaqien Selopampang		2024	2024							
267	SMA/SMK	SMA N 2 TEMANGGUNG		2022	2022							
268		SMK GANESHA KEDU		2022	2022							

No	KECAMATAN	DESA	DESA RAWAN	SOSIALI SASI	PELATIHAN	SIMULASI	PLANK EVAKUASI	EWS	RDTB	KAMPUN G SIAGA	DS B	SIMULASI GABUNGAN
269		SMK HKTI TEMANGGUNG		2022,20 24	2022,2024							
270		SMK SWADAYA TEMANGGUNG		2024	2024							
271		SMK Negeri Pringsurat		2024	2024							
272		SMA IT Istiqomah Tembarak		2024	2024							
273	PONPES	PONPES DARUL ATSAR		2022	2022							
274		BARANUSA WONOBOYO		2022	2022							
275		RUMAH TAHFID ZAIT BIN SABIT		2023	2023							
TOTAL			217	163	165	83	56	72	28	3	20	9

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis* prioritas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
3. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis

- agar hidup secara layak.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
 8. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 9. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan bencana.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud diatas adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Rumus Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan informasi rawan bencana

Tabel 2.8
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Tahun 2025 Triwulan II

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	598.240	598.240	606.144	606.575	357
2	Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan informasi rawan bencana	598.240	598.240	606.144	606.575	357

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan table di atas Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 357 orang dan Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan informasi rawan bencana 357 orang sehingga target terpenuhi 100%. Total jumlah tersebut merupakan 16 desa yang menjadi kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan yaitu desa canggal kecamatan candiroto, seluruh desa di Kecamatan Wonobojo yang di selenggarakan di Hotel Aliyana Temanggung (perwakilan RT dan RW serta perangkat desa), Desa Giyono Kecamatan Jumo dan Desa Tempuran Kecamatan Kaloran.

Pada tahun 2025 ini tidak ada anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi penyebaran informasi kebencanaan secara tatap muka, sehingga BPBD bekerja sama dengan desa untuk melakukan kegiatan tersebut, selain itu ada juga undangan dari dunia Pendidikan dan organisasi Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Tabel 2.9
Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Tahun 2025 Triwulan II

No	Kecamatan	Desa	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yg ditetapkan
1	CANDIROTO	CANGGAL	35	35
2	WONOBOYO	CEMORO	20	20
3	WONOBOYO	KEBONSARI	20	20
4	WONOBOYO	PESANTREN	21	21
5	WONOBOYO	PATEKEN	20	20
6	WONOBOYO	PITROSARI	20	20
7	WONOBOYO	PURWOSARI	21	21
8	WONOBOYO	REJOSARI	20	20
9	WONOBOYO	SEMEN	21	21
10	WONOBOYO	TAWANGSARI	20	20
11	WONOBOYO	TENING	20	20
12	WONOBOYO	WATES	20	20

No	Kecamatan	Desa	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yg ditetapkan
13	WONOBOYO	WONOBOYO	20	20
14	WONOBOYO	WONOCOYO	20	20
15	JUMO	GIYONO	39	39
16	KALORAN	TEMPURAN	20	20
TOTAL			357	357

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

Definisi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sudah dijabarkan dipoin 2 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM).

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

- a) penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b) pembuatan rencana kontinjensi;
- c) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana.

Rumus Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Tabel 2.10
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Tahun 2025 Triwulan II

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	396.318	400.940	413.779	415.181	94
2	Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	396.318	400.940	413.779	415.181	94
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas menunjukkan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 94 orang dan Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 94 orang untuk triwulan II tahun 2025, sehingga persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 100%. Data ini diambil dari data Desa yang sudah pernah dilaberi layanan berupa pelatihan, mitigasi bencana, penyelamatan dan sebagainya.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana menjadikan tercapainya peningkatan Mitigasi Bencana terhadap masyarakat, selain itu saat ini masyarakat lebih berinisiatif melakukan dan mengadakan kegiatan sendiri di bantu oleh Pemerintah Desa dan instansi dalam melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Berikut data Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2025.

Tabel 2.11
Data Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2025 Triwulan II

No	Kecamatan	Desa	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
1	CANDIROTO	CANGGAL	35
2	JUMO	GIYONO	39
3	KALORAN	TEMPURAN	20
TOTAL			94

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

1. **Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- b) respon cepat darurat bencana;
- c) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- d) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- e) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Rumus Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Tabel 2.12
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sampai Tahun 2025 Triwulan II

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73	70	43	54	29
2	Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73	70	43	54	29
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada tabel tersebut diatas warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi adalah warga negara yang menjadi korban bencana yang terjadi dan mengakibatkan luka, mengungsi, hilang dan meninggal dunia. Pada triwulan II tahun 2025 ini terdapat 27 orang korban mengungsi, 0 orang korban luka-luka, 2 orang korban meninggal dan 0 orang korban hilang yang diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi. Maka dari itu pencapaian layanan ini sebesar 100%.

Tercapainya indikator ini ada faktor pendukung yang ada, yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah dan peningkatan kapasitas kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Temanggung dan selalu terjalinnya komunikasi dengan masyarakat yang terdampak bencana serta koordinasi stakeholder yang berjalan dengan baik.

Berikut data Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada triwulan II Tahun 2025.

Tabel 2.13

Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2025 Triwulan II

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Jml KK	Jml Jiwa	Status Korban
1	20-Jan-25	Kranggan	Dsn. Gemawang RT. 01 RW. 09 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan	Tanah Longsor	Sariyadi	1	4	Mengungsi
2	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Kejiwan RT. 03 RW. 06 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	Fendy	1	4	Mengungsi
3	17-Feb-25	Bansari	Dusun Pongangan Desa Candisari Kecamatan Bansari	Banjir	Rosyid, Istiyanah	1	2	Meninggal
4	26-Mar-25	Temanggung	Kelurahan Jurang RT 04 RW 01 Kecamatan Temanggung	Banjir	Arifin	2	5	Mengungsi
5	8 April 2025	Selopampang	Dsn. Jlamprang Ds. Tanggulanom Kec. Selopampang	Cuaca Ekstrem	Margo Utomo	2	4	Mengungsi
6	16 May 2025	Tretep	Dsn. Bakal RT. 05 RW. 02 Ds. Campurejo Kec. Tretep	Tanah Longsor	Makruf	1	4	Mengungsi
7	17 May 2025	Kandangan	Dusun Rejosari rt 1 rw 1 Desa Rowo Kec. Kandangan	Cuaca Ekstrem	Mujamil	1	1	Mengungsi
8	31 May 2025	Tretep	Dsn. Gandikan 04/01 Ds. Bojong Kec. Tretep	Cuaca Ekstrem	Bpk. Jurohmin	1	3	Mengungsi
9	3 June 2025	Temanggung	Lingkungan Geneng RT. 02 RW. 01 Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	Tri Ariyanto Budi	1	2	Mengungsi
TOTAL KORBAN							29	

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2. Persentase penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan

Pada tahun 2025 kegiatan pascabencana yang dilakukan adalah pembuatan laporan Jitupasna (Pengkajian kebutuhan pascabencana) ini merupakan bagian dari kegiatan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) untuk penanganan pascabencana.

Kegiatan pada tahun sebelumnya adalah kegiatan penanganan korban pascabencana dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban bencana terutama yang mendapatkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), kegiatan monitoring tersebut dilakukan supaya bantuan bahan bangunan rumah yang diberikan kepada korban bencana tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pemanfaatan bantuan tersebut bisa bermanfaat terhadap korban bencana.

Pada tahun 2025, kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan dengan sub kegiatan koordinasi penanganan pascabencana, adapun kegiatan yang dilakukan pada seksi rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) adalah membuat dokumen JIUPASNA (pengkajian kebutuhan pascabencana) pada kejadian bencana yang ditetapkan menggunakan juklak dari BNPB untuk dilakukan perhitungan pascabencana berupa, kerugian, kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana. JIUPASNA sendiri merupakan bagian dari pembuatan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) yang dilegalkan.

Tabel 2.14

Tabel rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

No	Sektor/ Subsektor	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan & Kerugian	Kewenangan Aset	
					Pemerintah	Masyarakat/Swasta
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PERUMAHAN	742.816.926	76.850.000	819.666.926	241.840.000	577.826.926
	januari	138.920.500	20.500.000	159.420.500	65.500.000	93.920.500
	februari	116.838.500	5.400.000	122.238.500	29.398.500	92.840.000
	maret	85.349.502	6.250.000	91.599.502	33.600.000	57.999.502
	april	85.981.300	11.300.000	97.281.300	17.990.000	79.291.300
	mei	248.161.124	26.600.000	274.761.124	45.101.500	229.659.624
	juni	67.566.000	6.800.000	74.366.000	50.250.000	24.116.000
2	INFRASTRUKTUR	718.985.600	53.000.000	771.985.600	771.985.600	-
	januari	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
	februari	624.281.850	24.250.000	648.531.850	648.531.850	-
	maret	20.189.250	2.750.000	22.939.250	22.939.250	-
	april	5.900.000	3.500.000	9.400.000	9.400.000	-
	mei	68.614.500	10.500.000	79.114.500	79.114.500	-
	juni					
3	EKONOMI PRODUKTIF	49.060.848	24.450.000	73.510.848	18.250.000	55.260.848
	januari	4.500.000	11.500.000	16.000.000	-	16.000.000
	februari	12.900.000	1.500.000	14.400.000	-	14.400.000
	maret					
	april	3.835.600	500.000	4.335.600	-	4.335.600
	mei	27.825.248	10.950.000	38.775.248	18.250.000	20.525.248
	juni					
4	SOSIAL	9.170.000	4.400.000	13.570.000	5.500.000	8.070.000

No	Sektor/ Subsektor	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan & Kerugian	Kewenangan Aset	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Pemerintah	Masyarakat/Swasta
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	januari	-	500.000	500.000	500.000	-
	februari	3.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	-
	maret	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
	april					
	mei	5.670.000	900.000	6.570.000	-	6.570.000
	juni					
5	LINTAS SEKTOR	-	2.500.000	2.500.000	500.000	2.000.000
	januari	-	-	-	-	-
	februari					
	maret	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
	april	-	500.000	500.000	500.000	-
	mei					
	juni					
TOTAL		1.520.033.374	161.200.000	1.681.233.374	1.038.075.600	643.157.774

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3. Cakupan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Sementara itu pengertian desa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004). Pengertian desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan pengertian kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota. Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin

keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Komponen-komponen Destana antara lain: (1) Legislasi, (2) Perencanaan, (3) Kelembagaan, (4) Pendanaan, (5) Pengembangan kapasitas, dan (6) Penyelenggaraan PB. Strategi untuk mewujudkan Destana antara lain meliputi :

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan

potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.

- 6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- 8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- 9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- 10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Data Tabel Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	RDTB
1	PRINGSURAT	KARANGWUNI	2015
2	KALORAN	GETAS	2015
3	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	2015
4	GEMAWANG	MUNCAR	2015
5	TRETEP	BONJOR	2016
6	WONOBOYO	KEBONSARI	2016
7	GEMAWANG	BANARAN	2016
8	CANDIROTO	SIDOHARJO	2017
9	KRANGGAN	PURWOSARI	2017
10	SELOPAMPANG	NGADITIRTO	2017
11	TEMBARAK	KEMLOKO	2019
12	KALORAN	TLETER	2019
13	KANDANGAN	KEDUNGUMPUL	2019
14	KANDANGAN	GESING	2020
15	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	2020
16	PARAKAN	CATURANOM	2021
17	NGADIREJO	TEGALREJO	2021

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	RDTB
18	TLOGOMULYO	LOSARI	2021
19	KLEDUNG	TLAHAB	2021
20	GEMAWANG	NGADISEPI	2021
21	BULU	PANDEMULYO	2022
22	TEMBARAK	DRONO	2022
23	TEMBARAK	BOTOPUTIH	2022
24	KLEDUNG	KRUWISAN	2022
25	WONOBOYO	WATES	2022
26	GEMAWANG	JAMBON	2022
27	TRETEP	NGLARANGAN	2024
28	CANDIROTO	CANGGAL	2024
29	KLEDUNG	PETARANGAN	2024
30	CANDIROTO	MENTO	2024
31	BEJEN	KEMUNING	2024
32	BEJEN	PRANGKOKAN	2024
33	BEJEN	PETUNG	2024
34	TRETEP	DONOROJO	2024
TOTAL			34

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada tahun 2025 Triwulan II ini belum ada penambahan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dikarenakan kegiatan tersebut tidak diberikan anggaran, pada tahun 2024 pembentukan Desa Tangguh Bencana mendapatkan anggaran dan mendapatkan fasilitas juga dari BPBD Provinsi. Untuk Tahun 2025 ini belum ada informasi fasilitasi yang akan diberikan oleh provinsi. Selain itu upaya yang ada adalah koordinasi dengan desa/kelurahan terutama yang berada di kawasan rawan bencana untuk membentuk desa tangguh bencana secara mandiri. Sampai saat ini pembentukan desa tangguh bencana sebanyak 34 desa.

4. Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Penanganan korban pada masa tanggap darurat dibutuhkan penanganan yang tepat dan cepat karena ini akan berdampak terhadap korban yang terkena bencana. Penanganan yang ada dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) akan memberikan dampak yang baik kepada korban bencana.

Penanganan pada masa tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Tabel 2.16

Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana Triwulan II Tahun 2025

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
1	07-Jan-25	Kranggan	Dusun Gunungpring 03/02 Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	Cuaca Ekstrem	Sunarti	Mengungsi	5	Perumahan
2	10-Jan-25	Temanggung	Jl. Dr. Soetomo Ling. Banyutarung Kel. Temanggung II Kec. Temanggung	Banjir	-	Terdampak	-	Infrastruktur
3	11-Jan-25	Temanggung	Lingkungan Padangan Rt 02 Rw 03 Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung	Tanah Longsor	Sumarmi	Terdampak	5	Perumahan
4	12-Jan-25	Wonoboyo	Dusun Cemoro Barat Rt 03 Rw 01 Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo	Tanah Longsor	-	Terdampak	100	Infrastruktur
5	12-Jan-25	Tretep	Dusun Banaran Rt 08 Rw 02 Desa Bonjor Kecamatan Tretep	Tanah Longsor	Santo	Terdampak	6	Perumahan
6	13-Jan-25	Ngadirejo	Dusun Tloyo 01/03 Desa Karanggedong Kec. Ngadirejo	Cuaca Ekstrem	Nur Widodo	Terdampak	5	Perumahan
7	14-Jan-25	Kranggan	Dusun Gunungpring Rt.2 Rw.2 Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	Cuaca Ekstrem	-	Terdampak	1	Ekonomi
8	16-Jan-25	Jumo	Dsn. Soroditan Rt 0 Rw 02 Ds. Jumo Kec. Jumo	Tanah Longsor	-	Terdampak	-	Perumahan
9	18-Jan-25	Tretep	Desa Nglarangan Rt 07 Rw 01 Kec. Tretep	Tanah Longsor	Kamtini	Terdampak	7	Perumahan
10	18-Jan-25	Tretep	Desa Nglarangan Rt 07 Rw 01 Kec. Tretep	Tanah Longsor	-	Terdampak	7	Infrastruktur
11	20-Jan-25	Bejen	Dusun Sapen RT. 03 RW. 03 Desa Selosabrang Kec. Bejen	Banjir	Wahyu Purwoko, Dwi	Terdampak	4	Perumahan
12	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Pringapus RT.05 RW.10 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor		Terdampak	-	Perumahan
13	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Gletuk Rt 05 RW. 08 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor	-	Terdampak	50	Perumahan

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
14	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Bonsomo Ds. Kwarakan Kec. Kaloran	Tanah Longsor	-	Terdampak	25	Perumahan
15	20-Jan-25	Kaloran	Dsn. Kemiri RT. 03 RW. 02 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor	-	Terdampak	-	Perumahan
16	20-Jan-25	Kranggan	Dsn. Gemawang RT. 01 RW. 09 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan	Tanah Longsor	Sariyadi	Mengungsi	4	Perumahan
17	20-Jan-25	Kranggan	Dsn. Gemawang RT. 01 RW. 09 Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan	Tanah Longsor	-	Terdampak	4	Perumahan
18	20-Jan-25	Tretep	Dsn. Simpar Rt 07 Rw 01 Ds. Simpar Kec. Tretep	Tanah Longsor	Sungadi, Mesidah	Terdampak	8	Perumahan
19	20-Jan-25	Tretep	Dsn. Simpar Rt 07 Rw 01 Ds. Simpar Kec. Tretep	Tanah Longsor	Butuk, Trimo	Terdampak	5	Ekonomi
20	20-Jan-25	Tretep	Dsn. Simpar Rt 07 Rw 01 Ds. Simpar Kec. Tretep	Tanah Longsor	-	Terdampak	-	Perumahan
21	20-Jan-25	Bejen	Dusun Tanjungsari Rt 02 Rw 01 Desa Tanjungsari Kec. Bejen	Tanah Longsor	Misroni	Terdampak	4	Perumahan
22	20-Jan-25	Bejen	Dusun Tanjungsari Rt 02 Rw 01 Desa Tanjungsari Kec. Bejen	Tanah Longsor	Maino	Terdampak	7	Perumahan
23	20-Jan-25	Bejen	Desa Banjarsari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Bejen	Tanah Longsor	-	Terdampak	-	Perumahan
24	20-Jan-25	Bejen	Desa Ngloji RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bejen	Banjir	Ahmad Ruwadi, Sukirman, Suparmo, Muji, Prawono	Terdampak	13	Perumahan
25	20-Jan-25	Bejen	Ds. Bejen Kec. Bejen	Tanah Longsor	-	Terdampak	25	Perumahan
26	21-Jan-25	Kaloran	Dusun Gentan RT 04 RW 07 Ds. Tlogowungu Kec. Kaloran	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan
27	23-Jan-25	Parakan	Jl.Raya Parakan-Wonosobo Desa Caturanom Kecamatan Parakan	Tanah Longsor	-	Terdampak	1	Ekonomi
28	26-Jan-25	Gemawang	Dsn. Babadan RT. 01 RW. 07 Ds. Kemiriombo Kec. Gemawang	Tanah Longsor	-	Terdampak	5	Ekonomi

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
29	26-Jan-25	Jumo	Dusun Dermonganti RT 02 RW 04 Desa Ketitang Kecamatan Jumo	Tanah Longsor	Sujiyah	Terdampak	1	Perumahan
30	26-Jan-25	Gemawang	Margosari Rt 04 Rw 07 Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang	Tanah Longsor	-	Terdampak	-	Sosial
31	26-Jan-25	Gemawang	Dusun Blawong Wetan RT. 05 RW. 09 Desa Muncar Kecamatan Gemawang	Tanah Longsor	Satimin, Yamyoy	Terdampak	7	Perumahan
32	27-Jan-25	Kaloran	Dusun Pringapus Rt 03 Rw 10 Desa Getas Kecamatan Kaloran	Tanah Longsor	Darlan	Terdampak	6	Perumahan
33	27-Jan-25	Temanggung	Jl.Gerilya Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung	Banjir	-	Terdampak	-	Infrastruktur
34	27-Jan-25	Temanggung	Jln. Mahkota Dewa RT. 04 RW. 4 Ling. Tegaltemu Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung	Tanah Longsor	-	Terdampak	-	Perumahan
35	28-Jan-25	Kranggan	Dusun Sijarak Desa Gentan Kecamatan Kranggan	Cuaca Ekstrem	-	Terdampak	-	Lintas Sektor
36	30-Jan-25	Pringsurat	Jln. Pingit -Wonokerso Desa Nglorog Kecamatan Pringsurat	Tanah Longsor	-	Terdampak	50	Infrastruktur
37	30-Jan-25	Wonoboyo	Dusun Mejing Desa Tawangsari RT. 04 RW. 01 Kecamatan Wonoboyo	Cuaca Ekstrem	Faizin	Terdampak	4	Perumahan
38	04-Feb-25	Bansari	Dusun Bansari RT 01 RW 06 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Cuaca Ekstrem	Musliman, Sri Lestari, Nurbuat	Terdampak	8	Perumahan
39	04-Feb-25	Bansari	Dusun Banaran Rt/RW 01/06 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Cuaca Ekstrem	Untoro	Terdampak	3	Perumahan
40	05-Feb-25	Wonoboyo	Dusun Pesantren Desa Pesantren RT /RW 02/02 Kecamatan Wonoboyo	Cuaca Ekstrem	Ahmad Rofiq	Terdampak	3	Perumahan
41	05-Feb-25	Wonoboyo	Dusun Pesantren Desa Pesantren RT /RW 02/02 Kecamatan Wonoboyo	Cuaca Ekstrem	Nurhadi, Darmadi	Terdampak	11	Perumahan
42	09-Feb-25	Kandangan	Jln. Kandangan - Rowoseneng	Cuaca Ekstrem		Terdampak	30	Infrastruktur
43	09-Feb-25	Kaloran	Ponpes Montessori Dsn. Pringtali Ds. Kemiri Kec. Kaloran	Cuaca Ekstrem		Terdampak	-	Sosial

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
44	09-Feb-25	Kaloran	Dusun Pringtali Desa Kemiri Kecamatan Kaloran	Cuaca Ekstrem	Sa'bani, Miftahul Huda	Terdampak	8	Perumahan
45	09-Feb-25	Kranggan	Dsn. Suruh RT. 4 RW. 5 Ds. Genta Kec. Kranggan	Cuaca Ekstrem		Terdampak	30	Infrastruktur
46	09-Feb-25	Kandangan	Ds. Kembang Sari Kec. Kandangan	Cuaca Ekstrem		Terdampak	25	Perumahan
47	09-Feb-25	Kaloran	Dsn. Tempuran RT. 3 RW. 1 Ds. Tempuran Kec. Kaloran	Cuaca Ekstrem	Sariyat, Zaenuri	Terdampak	12	Perumahan
48	09-Feb-25	Kaloran	Jl. Termas - Tegowanuh Kaloran	Cuaca Ekstrem		Terdampak	15	Infrastruktur
49	09-Feb-25	Kaloran	Desa Tepusen Kecamatan Kaloran	Cuaca Ekstrem		Terdampak	20	Sosial
50	09-Feb-25	Kaloran	Desa Tepusen RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kaloran	Cuaca Ekstrem	Bambang Haryanto	Terdampak	6	Perumahan
51	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Kejiwan RT. 03 RW. 06 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	Fendy	Mengungsi	4	Perumahan
52	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Banjarsari RT. 05 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	Bagus, Jumiyanto	Terdampak	2	Ekonomi
53	09-Feb-25	Kandangan	Dusun Banjarsari RT. 05 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan	Cuaca Ekstrem	Slamet	Terdampak	2	Perumahan
54	11-Feb-25	Candiroto	Dusun Limbangan Rt 18 RW 09 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto	Cuaca Ekstrem	Slamet Mujiyono	Terdampak	5	Perumahan
55	12-Feb-25	Parakan	Dusun Karangsari Rt 05 RW 06 Kel. Parakan Kauman Kecamatan Parakan	Cuaca Ekstrem	Wahono	Terdampak	7	Perumahan
56	12-Feb-25	Parakan	Dusun Nglorog Rt 08 RW 04 Desa Campursalam Kecamatan Parakan	Cuaca Ekstrem	Mujibah	Terdampak	2	Perumahan
57	12-Feb-25	Bulu	Dusun Wunut Rt 02 RW 01 Desa Wonotirto Kecamatan Bulu	Cuaca Ekstrem	Mansur	Mengungsi	5	Perumahan
58	14-Feb-25	Ngadirejo	Dusun Bakalan RT 04 RW 09 Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo	Tanah Longsor		Terdampak	25	Perumahan

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
59	14-Feb-25	Pringsurat	Jln. Raya Pringsurat (depan Bong Cina)	Cuaca Ekstrem		Terdampak	60	Infrastruktur
60	14-Feb-25	Pringsurat	Dusun Digelan Rt 01 RW 05 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat	Cuaca Ekstrem		Terdampak	10	Perumahan
61	14-Feb-25	Pringsurat	Dusun Batikan Rt 02 RW 04 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat	Cuaca Ekstrem		Terdampak	20	Perumahan
62	14-Feb-25	Candiroto	Dusun Gembyang Rt 09, 10, 11, 12 RW 05, 06 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto	Cuaca Ekstrem	Rohimin Jumair Rupi Buriwanto Wahrodi Suketnanto Sukirno Ponijem	Terdampak	32	Perumahan
63	15-Feb-25	Bulu	Jl. Raya Temanggung - Bulu Ds. Bulu Kec. Bulu	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
64	16-Feb-25	Temanggung	Lingkungan Kepatihan Rt 05 Rw 03 Kel.Temanggung II Kec.Temanggung	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
65	17-Feb-25	Bansari	Dusun Pongangan Desa Candisari Kecamatan Bansari	Banjir	Rosyid, Istiyanah	Meninggal	2	Infrastruktur
66	17-Feb-25	Temanggung	Kel. Butuh Kec. Temanggung	Banjir	Sutrisno, Imam	Terdampak	7	Perumahan
67	17-Feb-25	Temanggung	Kel. Butuh Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak		Perumahan
68	17-Feb-25	Pringsurat	Dsn. Mirikerep Ds. Pringsurat, Dsn. Gilingan Ds. Kebumen, dan Dsn. Mlobo Ds. Karangwuni Kec. Pringsurat Kab. Temanggung	Banjir		Terdampak		Ekonomi
69	17-Feb-25	Bansari	Dusun Tambahsari Desa Bansari Kec Bansari	Banjir		Terdampak		Perumahan
70	17-Feb-25	Bansari	Dusun Pringapus Rt 05 RW 08 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Tanah Longsor	Tuyem	Terdampak	1	Perumahan
71	17-Feb-25	Tembarak	Dsn. Ngaglik Ds. Jragan Kec. Tembarak	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
72	17-Feb-25	Temanggung	Lingk. Perumahan Puri Indah Rt 07 Rw 01, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Banjir	Supriyanto	Terdampak	1	Ekonomi
73	17-Feb-25	Temanggung	Lingk. Perumahan Puri Indah Rt 07 Rw 01, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Banjir		Terdampak	1	Infrastruktur
74	17-Feb-25	Temanggung	Lingk. Perumahan Puri Indah Rt 07 Rw 01, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
75	18-Feb-25	Ngadirejo	Dusun Kejiwan Rt 04 RW 03 Desa Medari Kecamatan Ngadirejo	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan
76	18-Feb-25	Gemawang	Jl. Gemawang- Seseh Desa Gemawang Kec. Gemawang	Tanah Longsor		Terdampak		Infrastruktur
77	18-Feb-25	Gemawang	Dusun Seseh 01/09 Desa Ngadisepi Kec. Gemawang	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan
78	19-Feb-25	Ngadirejo	Dusun Gendengan Rt.04 Rw 02 Desa Ngadirejo Kec. Ngadirejo	Tanah Longsor		Terdampak		Ekonomi
79	21-Feb-25	Bansari	Dusun Tambahsari 01/02 Desa Bansari Kec Bansari	Banjir		Terdampak	55	Perumahan
80	21-Feb-25	Tembarak	Dsn. Ngaglik Ds. Jragan Kec. Tembarak	Tanah Longsor	Supoyo Muyoso Wahyu Prayitno Sukidi	Terdampak	15	Perumahan
81	23-Feb-25	Tlogomulyo	Lamuk Legok Rt 01 Rw 01 Desa Legoksari Kec.Tlogomulyo	Tanah Longsor	Sodah	Terdampak	3	Perumahan
82	23-Feb-25	Kranggan	Jl.Kramat - Purwosari Kranggan Desa Kramat Kec.Kranggan	Tanah Longsor		Terdampak	50	Infrastruktur
83	24-Feb-25	Ngadirejo	Dusun Jumpit Rt 03 Rw 01 Desa Tegalrejo Kec.Ngadirejo	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan
84	27-Feb-25	Bejen	Jln. Ngadirejo – Parakan Dsn. Limbangan Ds. Larangan Luwok Kec. Bejen	Tanah Longsor		Terdampak	100	Infrastruktur

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
85	27-Feb-25	Candiroto	Dusun Karangkulon Desa Gunungpayung Kec Candiroto	Tanah Longsor		Terdampak	390	Infrastruktur
86	27-Feb-25	Bulu	Dsn. Kwadungan Ds. Wonotirto Kec. Bulu	Cuaca Ekstrem	Paryoto Sulimah	Terdampak	6	Perumahan
87	27-Feb-25	Bulu	Dsn. Kwadungan Ds. Wonotirto Kec. Bulu	Cuaca Ekstrem		Terdampak	25	Sosial
88	01-Mar-25	Tlogomulyo	Dusun Tempuran Rt 01 Rw 01 Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo	Cuaca Ekstrem	Suwarto	Terdampak	2	Perumahan
89	01-Mar-25	Tembarak	Dusun Gandon Rt 02 Rw 02 Desa Gandu Kec. Tembarak	Cuaca Ekstrem	Mugi	Terdampak	5	Perumahan
90	03-Mar-25	Kaloran	Dusun Kendal Rt 01 Rw 01 Desa Gandon Kec. Kaloran	Tanah Longsor	Parjono	Terdampak	3	Perumahan
91	06-Mar-25	Bejen	Dusun Kebondalem I Rt 05 Rw 01 Desa Kebondalem Kec.Bejen	Tanah Longsor	Zaenal Abidin	Terdampak	4	Perumahan
92	07-Mar-25	Ngadirejo	Dusun Gintung Rt 01 Rw 04 Desa Giripurno Kec.Ngadirejo	Tanah Longsor	Sukir, Mawardi	Terdampak	7	Perumahan
93	07-Mar-25	Ngadirejo	Dusun Gintung Rt 08 Rw 05 Desa Giripurno Kec.Ngadirejo	Tanah Longsor	Rohyanto	Terdampak	5	Perumahan
94	08-Mar-25	Kranggan	Dusun Kalipucung RT. 01 RW. 04 Desa Kramat Kecamatan Kranggan	Tanah Longsor	Ramidi	Terdampak	6	Perumahan
95	08-Mar-25	Wonobojo	Dusun Pomahan 02/04 Desa Rejosari Kec Wonobojo	Tanah Longsor		Terdampak	60	Infrastruktur
96	13-Mar-25	Bulu	Dusun Pongangan Rt 02 Rw 06 Desa Pagergunung Kec.Bulu	Cuaca Ekstrem	Muhdawami	Terdampak	4	Perumahan
97	13-Mar-25	Parakan	Dusun Karangsenen Rt 01 Rw 05 Desa Traji Kecamatan Parakan	Banjir	Supadiono, Sarwanto, Supardi, Aziz	Terdampak	16	Perumahan
98	14-Mar-25	Wonobojo	Jl. Raya Cemoro Wates Desa Cemoro Kec. Wonobojo, Jl. Raya Cemoro Wates Dsn. Pongangan Ds. Wates Kec. Wonobojo	Banjir		Terdampak	50	Infrastruktur
99	14-Mar-25	Kandangan	Dusun Kedopokan Rt 08 Rw 01 Desa Tlogopucang Kec. Kandangan	Tanah Longsor		Terdampak	10	Perumahan

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
100	14-Mar-25	Bansari	Dusun Sawit Rt 02 Rw 01 Desa Bansari Kecamatan Bansari	Tanah Longsor	Ruwanto	Terdampak	5	Perumahan
101	15-Mar-25	Gemawang	Dusun Mandang Rt 06 Rw 03 Desa Sucen Kecamatan Gemawang	Tanah Longsor	Wahman, Timbul, Yanto	Terdampak	50	Perumahan
102	15-Mar-25	Kledung	Dsn. Legoksari RT. 01 RW. 02 Ds. Paponan Kec. Kledung	Tanah Longsor		Terdampak	25	Perumahan
103	16-Mar-25	Kandangan	Dusun Dringo Rt 06 Rw 07 Desa Tlogopucang Kec. Kandangan	Tanah Longsor	Walman	Terdampak	7	Perumahan
104	19-Mar-25	Temanggung	Lingkungan Banyutarung Rt 02 Rw 07 Kel.Temanggung II Kec.Temanggung	Cuaca Ekstrem	Giyanto, Urip	Terdampak	7	Perumahan
105	20-Mar-25	Parakan	Dusun Wanutengah 02/01 Desa Wanutengah Kec. Parakan	Cuaca Ekstrem	Irhason, Siti Ilmiyah, Habib Machsun	Terdampak	12	Perumahan
106	26-Mar-25	Temanggung	Lingk. Bakungan Kel. Tlogorejo Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak	20	Perumahan
107	26-Mar-25	Temanggung	Lingk. Geneng Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak	25	Infrastruktur
108	26-Mar-25	Parakan	Dsn. Mulyosari Ds. Wanutengah Kec. Parakan	Banjir		Terdampak	100	Infrastruktur
109	26-Mar-25	Temanggung	Tepungsari Kel. Walitelon Selatan Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
110	26-Mar-25	Temanggung	Kelurahan Jurang RT 04 RW 01 Kecamatan Temanggung	Banjir	Arifin	Mengungsi	5	Perumahan
111	26-Mar-25	Temanggung	Jl. MT. Haryono Suronatan Kel. Temanggung II Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak	50	Infrastruktur
112	26-Mar-25	Temanggung	Kel. Manding Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
113	26-Mar-25	Temanggung	Ling. Karangwetan 07/06 Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung	Banjir	Didik Mularso	Terdampak	1	Perumahan
114	26-Mar-25	Temanggung	RT 4 RW 6 Perum. Gemoh Asri Kel. Butuh Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak	20	Perumahan

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
115	26-Mar-25	Temanggung	Kantor BPKPAD Temanggung	Banjir		Terdampak		Lintas Sektor
116	26-Mar-25	Temanggung	Lingk. Dompon Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
117	26-Mar-25	Temanggung	Ponpes ABATA Jln. Gatot Subroto Km. 2 Karang Sari Manding Temanggung	Banjir		Terdampak	55	Sosial
118	26-Mar-25	Temanggung	Lingkungan Perum Paramedis RT1 RW 6 Kelurahan Jurang Kec. Temanggung	Banjir	Matdidjiarto	Terdampak	4	Infrastruktur
119	28-Mar-25	Wonoboyo	Jl. Raya Cemoro Wates Dsn. Pongangan Ds. Wates Kec. Wonoboyo	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
120	31-Mar-25	Ngadirejo	Dusun Sayangan Rt 01 Rw 02 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo	Tanah Longsor		Terdampak		Ekonomi
121	2 April 2025	Candirotto	Jalan Trocoh Desa Lempuyang Kec. Candirotto	Tanah Longsor		Terdampak	50	Infrastruktur
122	2 April 2025	Bejen	Dusun Biting Rt 05 Rw 01 Desa Larangan Luwok Kec. Bejen	Tanah Longsor		Terdampak		Infrastruktur
123	2 April 2025	Candirotto	Dusun Winong Rt 01 rw 05 Desa Candirotto Kec. Candirotto	Tanah Longsor	Ahmad Zaenudin	Terdampak	4	Ekonomi
124	2 April 2025	Jumo	Dusun Kompregan Rt 02 rw 08 Desa Jombor Kec. Jumo	Tanah Longsor	Rohmadi, Subandi	Terdampak	6	Perumahan
125	2 April 2025	Candirotto	Dusun Mentoroto Rt 1 rw 3 Desa Mento kec. Candirotto	Banjir	Bpk. Jumaeri, Ibu Kusmini Bpk.Daryanto, Bpk. Sodik, Bpk. Arif, Bpk. Rozi	Terdampak	19	Perumahan
126	2 April 2025	Candirotto	Jalan alternatif Jumo - Candirotto	Banjir		Terdampak	25	Infrastruktur
127	2 April 2025	Candirotto	Dusun Gembyang Rt 12 Rw 6 Desa Kentengsari Kec. Candirotto	Cuaca Ekstrem	Sawabi	Terdampak	5	Perumahan
128	8 April 2025	Temanggung	Dsn. Ketitang RT. 03 RW. 03 Ds. Nampirejo Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak		Perumahan
129	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Tembarak Lor RT. 03 RW. 02 Ds. Tembarak Kec. Tembarak	Banjir	Suparmi	Terdampak	1	Perumahan

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
130	8 April 2025	Tembarak	Ds. Tembarak Kec. Tembarak	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
131	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Jokopati Ds. Tawangsari Kec. Tembarak	Tanah Longsor	Istikanah	Terdampak	3	Perumahan
132	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Tinebah Ds. Purwodadi Kec. Tembarak	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan
133	8 April 2025	Selopampang	Dsn. Jlamprang Ds. Tanggulanom Kec. Selopampang	Cuaca Ekstrem	Margo Utomo	Mengungsi	4	Perumahan
134	8 April 2025	Tembarak	Dsn. Ngabean Ds. Menggoro Kec. Tembarak	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan
135	8 April 2025	Kranggan	Lingkungan Kranggan Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Banjir	Mardi, Edy, Suraji	Terdampak	8	Perumahan
136	8 April 2025	Kranggan	Lingkungan Kranggan Rt 04 Rw 05 Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Banjir	Kantor Koramil Kranggan	Terdampak		Lintas Sektor
137	8 April 2025	Kranggan	Jalan Raya Kranggan -Pringsurat Km 1 (depan mahkota swalayan kranggan)	Banjir		Terdampak		Infrastruktur

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
138	8 April 2025	Selopampang	Dusun Jetis Desa Gambasan Kec. Selopampang	Banjir	1. Taat Yulianto 2. Fahrur 3. Kasbullah 4. Muhroni 5. Saryono 6. Marwadi 7. Sulaiman 8. Sugito 9. Kholik 10. Sumanto 11. Sunarsih 12. Sukoyo 13. Syafi'l 14. Abdullah 15. Suparti 16. Agus sumarno 17. Efendi 18. Sucipto 18. Sarif 19. Tasrum 20. Lawar 21. Sulis Rohmadin 22. Sri Utami 23. M khairul Umam 24. Solikhah 25. Minhari 26. Juwono 27. Supriyono	Terdampak	96	Perumahan
139	8 April 2025	Selopampang	Desa Kebonagung Kecamatan Selopampang	Banjir	Triyono	Terdampak	3	Perumahan
140	8 April 2025	Selopampang	Jalan Raya Tembarak- Selopampang Desa Kacepit Kec Selopampang	Banjir		Terdampak	50	Infrastruktur

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
141	7 May 2025	Kranggan	Jln. Raya Karanggan Pringsurat	Cuaca Ekstrem		Terdampak	25	Infrastruktur
142	7 May 2025	Temanggung	Jln. Jendral Sudirman (Depan Kantor Agraria)	Cuaca Ekstrem		Terdampak	25	Infrastruktur
143	7 May 2025	Temanggung	Jln. Dewi Sartika Temanggung	Cuaca Ekstrem		Terdampak	15	Infrastruktur
144	7 May 2025	Temanggung	Lingkungan Nglarangan Kelurahan Jampirejo Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem		Terdampak	17	Sosial
145	9 May 2025	Tlogomulyo	Dusun Pundung Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
146	9 May 2025	Bejen	Dusun Ngrimpak Rt 01 & Rt 02 Rw 05 Desa Lowungu Kec.Bejen	Cuaca Ekstrem	Suwal, Sulisty, Sarju, Suratmin, Kiswsdi	Terdampak	19	Perumahan
147	9 May 2025	Ngadirejo	Dusun Carikan Rt 02 Rw 03 Desa Gondang Winangun Kec.Ngadirejo	Cuaca Ekstrem	Untung Hadi Santoso	Terdampak	1	Ekonomi
148	9 May 2025	Ngadirejo	Dusun Carikan Rt 02 Rw 03 Desa Gondang Winangun Kec.Ngadirejo	Cuaca Ekstrem	Andri Prasetyo, Aulia Rohman, Kusman, Riyanto, Ragil	Terdampak	24	Perumahan
149	9 May 2025	Temanggung	Jalan Suyoto No.7 Jampiroso Kertosari Kec.Temanggung	Cuaca Ekstrem		Terdampak	15	Infrastruktur
150	9 May 2025	Temanggung	Jl.Jendral Sudirman, Kelurahan Kertosari Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem		Terdampak	20	Infrastruktur
151	9 May 2025	Temanggung	Perumda Aneka Usaha Jl.Jendral Sudirman, Kelurahan Kertosari Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem		Terdampak	5	Infrastruktur
152	9 May 2025	Temanggung	Depan SMAN 2 Temanggung Jl. Pahlawan Kel.Giyanti Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem		Terdampak	20	Infrastruktur
153	10 May 2025	Temanggung	Ling. Dompon Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Banjir		Terdampak	25	Perumahan
154	10 May 2025	Tlogomulyo	Dusun Tlilir Rt 03 Rw 01 Desa Tlilir Kec.Tlogomulyo	Cuaca Ekstrem	Supriyono	Terdampak	3	Perumahan
155	10 May 2025	Tembarak	Desa Tembarak Kecamatan Tembarak	Tanah Longsor	harumyani, ahmad zazin,zaenal,daraji	Terdampak	4	Ekonomi

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
156	10 May 2025	Kranggan	Ds. Pendowo Kec. Kranggan	Banjir		Terdampak	25	Sosial
157	11 May 2025	Selopampang	Desa Kebonagung Kec.Selopampang	Tanah Longsor		Terdampak	25	Perumahan
158	11 May 2025	Selopampang	Dusun Koripan Desa Kacepit Rt 01 Rw 03 Kec.Selopampang	Tanah Longsor	Mulyono	Terdampak	6	Perumahan
159	13 May 2025	Tembarak	Jl penghubung Desa Greges - Desa Krajan Kec. Tembarak	Tanah Longsor		Terdampak	100	Perumahan
160	13 May 2025	Temanggung	RT. 02 RW 7 Banyutaring Kecamatan Temanggung	Tanah Longsor		Terdampak		Infrastruktur
161	13 May 2025	Parakan	Jalan Penghubung Desa Traji Kecamatan Parakan – Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Dusun Gamblog RT.01 RW. 02 Desa traji Kecamatan Parakan	Banjir		Terdampak		Infrastruktur
162	15 May 2025	Temanggung	Lokasi Jalan Raya Pikatan-Titang, Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung	Tanah Longsor		Terdampak	50	Infrastruktur
163	15 May 2025	Parakan	Dusun Gamblok Rt 02 Rw 02 Desa Traji Kec.Parakan	Banjir	Anang Prihatmo	Terdampak	4	Perumahan
164	15 May 2025	Parakan	Depan Matahari Parakan (sebelum RSK dari arah Temanggung) sampai ke lampu merah sari ayam	Banjir		Terdampak	100	Infrastruktur
165	15 May 2025	Bulu	Lampu merah sari ayam menuju arah Bulu tepatnya di depan Indomart arah Bulu.	Banjir		Terdampak	100	Infrastruktur
166	15 May 2025	Kaloran	Dsn. Banyuurip RT. 04 RW. 05 Ds. Getas Kec. Kaloran	Tanah Longsor		Terdampak		Perumahan
167	16 May 2025	Tretep	Dsn. Bakal RT. 05 RW. 02 Ds. Campurejo Kec. Tretep	Tanah Longsor		Terdampak	50	Perumahan
168	16 May 2025	Tretep	Dsn. Bakal RT. 05 RW. 02 Ds. Campurejo Kec. Tretep	Tanah Longsor	Makruf	Mengungsi	4	Perumahan
169	16 May 2025	Wonoboyo	Desa Cemoro Kec. Wonoboyo	Tanah Longsor		Terdampak	150	Infrastruktur

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
170	16 May 2025	Parakan	Lingkungan Jogomertan RT. 03 RW. 08 Kelurahan Parakan Kauman Kec. Parakan	Tanah Longsor		Terdampak		Sosial
171	16 May 2025	Parakan	Dsn. Glapansari RT. 02 RW. 03 Ds. Glapansari Kec. Parakan	Tanah Longsor	Ramijan, Ponisir	Terdampak	9	Perumahan
172	17 May 2025	Tretep	Dusun Tlogo rt 2 rw 1 Desa Tlogo Kec. Tretep	Tanah Longsor	Sugito, Budiyo	Terdampak	4	Perumahan
173	17 May 2025	Kandangan	Dusun Rejosari rt 1 rw 1 Desa Rowo Kec. Kandangan	Cuaca Ekstrem	Mujamil	Mengungsi	1	Perumahan
174	17 May 2025	Bulu	Kali Parangan Desa Putat Kecamatan Bulu	Banjir	Karsidah	Terdampak	1	Perumahan
175	22 May 2025	Gemawang	Jln. Ds. Krempong - Ds. Sucen Kec. Gemawang	Tanah Longsor		Terdampak	100	Infrastruktur
176	22 May 2025	Candiroto	Dusun Gembyang rt 6 rw 3 Desa Kentengsari Kec. Candiroto	Tanah Longsor	Daryanto	Terdampak	3	Perumahan
177	23 May 2025	Wonoboyo	Dusun Pongangan Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo	Tanah Longsor		Terdampak	100	Infrastruktur
178	31 May 2025	Tretep	Dsn. Gandikan 04/01 Ds. Bojong Kec. Tretep	Cuaca Ekstrem	Bpk. Jurohmin	Mengungsi	3	Perumahan
179	31 May 2025	Tretep	Dsn. Gandikan 04/01 Ds. Bojong Kec. Tretep	Cuaca Ekstrem	Bpk. Muhammad Niam Ansori	Terdampak	3	Perumahan
180	31 May 2025	Wonoboyo	Dsn. Senet Ds. Purwosari Kec. Wonoboyo	Banjir		Terdampak		Perumahan
181	31 May 2025	Candiroto	Sungai Lutut Dusun Batusari Desa Batusari Kecamatan Candiroto	Banjir		Terdampak		Ekonomi
182	3 June 2025	Kledung	Dsn. Batusari RT. 03 RW. 02 Ds. Batusari Kec. Kledung	Tanah Longsor		Terdampak	50	Perumahan
183	3 June 2025	Temanggung	Lingkungan Geneng RT. 02 RW. 01 Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	Tri Ariyanto Budi	Mengungsi	2	Perumahan

No	Tanggal Kejadian	Kecamatan	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Nama Korban / Tempat	Status Korban	Jml Korban	Jenis Kerusakan
184	3 June 2025	Temanggung	Lingkungan Geneng RT. 03 RW. 01 Kel. Kowangan Kec. Temanggung	Cuaca Ekstrem	Siswoyo	Terdampak	3	Perumahan
185	3 June 2025	Kaloran	Dsn. Noyoragen RT. 03 RW. 02 Ds. Gandulan Kec. Kaloran	Cuaca Ekstrem	Samuji	Terdampak	1	Perumahan
TOTAL KESELURUHAN KORBAN							3304	

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2025

5. Jumlah dan Lokasi Desa Yang Terdapat Plank Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai Titik Kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut. Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana.

Jalur evakuasi didesain untuk mencari jalan tersingkat dengan menggunakan jalan yang telah ada sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai daerah yang aman dapat ditempuh lebih singkat atau cepat.

Sementara itu, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 07 Tahun 2015 Tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana juga menyinggung perihal arah Jalur Evakuasi. Rambu arah jalur evakuasi termasuk dalam bagian rambu petunjuk bencana yang digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di Kawasan rawan bencana. Rambu arah jalur evakuasi memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, dan warna huruf atau angka putih.

Pada tabel 2.17 di bawah ini adalah beberapa daerah/desa di Kabupaten Temanggung yang sudah terpasang plank evakuasi.

Tabel 2.17

Lokasi desa yang terdapat petunjuk keselamatan bencana sampai Tahun 2025 Triwulan II

No	KECAMATAN	DESA	PLANK EVAKUASI	JUMLAH
1	BULU	WONOSARI	2018	1
2	KALORAN	GETAS	2024	1
3	KALORAN	KALIMANGGIS	2024	1
4	KALORAN	TEMPURAN	2022,2024	2
5	KALORAN	KEMIRI	2024	1
6	PARAKAN	GLAPANSARI	2019	1
7	NGADIREJO	DLIMOYO	2017	1
8	NGADIREJO	CAMPURSARI	2017	1
9	NGADIREJO	TEGALREJO	2017	1
10	NGADIREJO	KATEKAN	2017	1

No	KECAMATAN	DESA	PLANK EVAKUASI	JUMLAH
11	NGADIREJO	BANJARSARI	2017	1
12	NGADIREJO	PRINGAPUS	2017	1
13	CANDIROTO	CANGGAL	2017, 2018	2
14	CANDIROTO	KENTENGSAI	2017, 2018	2
15	CANDIROTO	NGABEYAN	2017	1
16	CANDIROTO	BANTIR	2018	1
17	CANDIROTO	SIDOHARJO	2018	1
18	CANDIROTO	MUNTUNG	2018	1
19	KRANGGAN	PURWOSARI	2018	1
20	TLOGOMULYO	LOSARI	2021	1
21	SELOPAMPANG	NGADITIRTO	2018	1
22	BANSARI	BANSARI	2016	1
23	BANSARI	MOJOSARI	2016	1
24	BANSARI	REJOSARI	2016	1
25	BANSARI	GUNUNGSARI	2016	1
26	BANSARI	BALESARI	2016	1
27	BANSARI	PURBOREJO	2016	1
28	BANSARI	TLOGOWERO	2016	1
29	BANSARI	MRANGGEN KIDUL	2016	1
30	BANSARI	MRANGGEN TENGAH	2016	1
31	BANSARI	CANDISARI	2016	1
32	BANSARI	CAMPURANOM	2016	1
33	BANSARI	GENTINGSARI	2016	1
34	BANSARI	TANUREJO	2016	1
35	KLEDUNG	KLEDUNG	2019	1
36	KLEDUNG	KALIREJO	2019	1
37	KLEDUNG	PAPONAN	2019	1
38	KLEDUNG	JEKETRO	2019	1
39	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	2019	1
40	KLEDUNG	KWADUNGAN JURANG	2019	1
41	KLEDUNG	TLAHAB	2019	1
42	KLEDUNG	PETARANGAN	2019	1
43	KLEDUNG	CANGGAL	2019	1
44	KLEDUNG	JAMBU	2019	1
45	KLEDUNG	KRUWISAN	2019	1
46	KLEDUNG	BATURSARI	2019	1
47	KLEDUNG	TUKSARI	2019	1
48	BEJEN	PRANGKOKAN	2024	1
49	WONOBOYO	KEBONSARI	2018	1
50	WONOBOYO	CEMORO	2024	1
51	WONOBOYO	WATES	2022, 2024	2
52	GEMAWANG	MUNCAR	2024	1
TOTAL				56

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Plank evakuasi sendiri sangatlah penting terutama pada daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung, ini menjadi

petunjuk pertama kepada Masyarakat apabila terjadi suatu bencana sehingga bagaimana Masyarakat menuju lokasi/titik yang aman dari radius titik bencana.

6. Jumlah Kejadian Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Temanggung per Kecamatan

Kabupaten Temanggung memiliki 20 Kecamatan, wilayah Kabupaten Temanggung Sebagian besar merupakan wilayah/daerah rawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan rekapitulasi kejadian bencana per kecamatan guna mengetahui Tingkat kerawanan kejadian bencana alam per masing-masing jenis bencana. Kerawanan bencana di Kabupaten Temanggung meliputi kerawanan longsor, kerawanan banjir, kerawanan cuaca ekstrim, kerawanan gunung berapi, kerawanan gempa bumi, kerawanan kekeringan dan kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2025 triwulan II kejadian bencana di Kabupaten Temanggung per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini.

Tabel 2.18
Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Temanggung per Kecamatan Triwulan II Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bansari	9	10	8	0	1
2	Bejen	10	12	20	2	1
3	Bulu	16	10	30	2	1
4	Candiroto	12	9	8	2	1
5	Gemawang	13	14	22	0	3
6	Jumo	7	10	8	1	-
7	Kaloran	36	52	58	3	1
8	Kandangan	17	17	36	5	1
9	Kedu	15	17	14	1	-
10	Kledung	5	21	6	0	-
11	Kranggan	23	11	79	2	-
12	Ngadirejo	14	7	11	2	-
13	Parakan	25	11	10	1	1
14	Pringsurat	14	27	42	3	2
15	Selopampang	4	8	19	0	1
16	Temanggung	26	24	18	3	5
17	Tembarak	13	4	12	0	1

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
18	Tlogomulyo	3	8	26	2	1
19	Tretep	13	17	4	2	3
20	Wonobojo	5	13	1	2	4
JUMLAH		280	302	432	33	27

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2025

Pada tahun 2025 penentuan kejadian bencana sudah menggunakan juklak dari BNPB No 7 Tahun 2023, pada juklak tersebut sudah tertera klasifikasi kejadian bencana yang di katagorikan masuk kedalam kejadian bencana atau tidak. Total kejadian bencana sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebanyak 27 kejadian yang ditetapkan sebagai bencana sesuai juklak BNPB yang ada.

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program yang telah mencapai target 100 %.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :
 - Kurangnya kepemilikan dokumen perencanaan kebencanaan (KRB, RENKON, RPB)
 - Pemetaan daerah/Kawasan rawan bencana di Kabupaten Temanggung belum melalui kajian yang benar, hanya berdasarkan kejadian bencana di suatu daerah/Kawasan

sehingga ditetapkan menjadi daerah/Kawasan rawan bencana

- Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Temanggung belum signifikan, baru terbentuk sebanyak 34 Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dari total 289 Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung
- Pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Temanggung belum maksimal terutama kepada daerah rawan bencana
- Masih rendahnya kesadaran Masyarakat tentang bencana
- Belum memadainya dukungan anggaran
- Sarana dan prasanaa peralatan penanggulangan dan penanganan bencana belum memadai
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap menjaga sinergitas dengan instansi terkait dan Masyarakat serta pentahelix dalam melakukan penanggulangan bencana yang baik serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD sudah sesuai, karena tidak ada penambahan program, kegiatan, Lokasi kegiatan dan target kinerja.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026								HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif		N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.431.98 0.290			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.871.8 08.290	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.431.98 0.290			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.871.8 08.290	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.816.98 0.290		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.816.9 80.290	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	N DAERAH KABUPATEN/K OTA							DAERAH KABUPATEN/KO TA						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			2.134.98 4.230	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			2.134.9 84.230	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31	Orang/b ulan	2.134.98 4.230	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31	Orang/ bulan	2.134.9 84.230	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	89.335.0 00	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	89.335. 000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	6.000.00 0	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	6.000.0 00	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	paket	12.000.0 00	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	paket	12.000. 000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temang gung	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	10.000.0 00	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temang gung	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	10.000. 000	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temang gung	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	16	laporan	26.335.0 00	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temang gung	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	16	lapora n	26.335. 000	
e	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15	laporan	35.000.0 00	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15	lapora n	35.000. 000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	0	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	0	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	unit	0	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	-	0	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			-	-	300.649. 200	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			-	-	300.649 .200	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintahan Daerah							Pemerintahan Daerah						
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	30	laporan	0	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0	-	0	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	36.000.000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	36.000.000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	15.000.000	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	15.000.000	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	249.649.200	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	249.649.200	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			-	-	292.011.860	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			-	-	292.011.860	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N O	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Daerah							Urusan Pemerintahan Daerah						
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18	unit	156.511.860	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18	unit	156.511.860	
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	123.000.000	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	123.000.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	unit	12.500.000	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	unit	12.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	atau Bangunan Lainnya							atau Bangunan Lainnya						
B	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA			-	-	1.615.00 0.000	B	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA			-	-	1.054.8 28.000	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a			-	-	40.000.0 00	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-	-	0	
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Temang gung	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	500	orang	40.000.0 00	a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Temang gung	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0	-	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			tinggalnya selama 1 (satu) tahun											
b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	dokume n	0	b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	-	0	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	-	640.000. 000	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	-	54.000. 000	
a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temang gung	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10	kawasa n	200.000. 000	a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temang gung	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0	-	0	
b	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	58	dokume n	29.000.0 00	b	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	58	dokum en	29.000. 000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
c	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Temanggung	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100	orang	25.000.000	c	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Temanggung	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100	orang	25.000.000	
d	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	dokumen	20.000.000	d	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	-	0	
e	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	6	unit	366.000.000	e	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	-	0	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			-	-	770.000.000	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			-	-	835.828.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Teman ggung	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	12	dokume n	50.000.0 00	a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	12	dokum en	250.000 .000	
b	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Teman ggung	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	60	orang	70.000.0 00	b	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	60	orang	70.000. 000	
c	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Teman ggung	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	150	orang	630.000. 000	c	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	150	orang	495.828 .000	
d	Aktivasi Sistem Komando Penanganan	Kab. Teman ggung	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat	2	laporan	20.000.0 00	d	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Temang gung	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat	2	lapora n	20.000. 000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Darurat Bencana		bencana Kabupaten/Kota							bencana Kabupaten/Kota				
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana			-	-	165.000. 000	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			-	-	165.000 .000	
a	Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	30	orang	30.000.0 00	a	Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	30	orang	30.000. 000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN RKPD 2026							
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Targ et Kiner ja	Satuan	Kebutu han Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
b	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kab. Temang gung	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3PO Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	kegiatan	135.000. 000	b	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kab. Temang gung	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3PO Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	kegiat an	135.000 .000	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

Pada tahun 2026 rancangan awal rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mendapatkan program prioritas bupati Temanggung, anggaran yang diberikan untuk pra bencana/pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana cukup besar baik untuk pembentukan destana, penyusunan dokumen renkon dan rencana penanggulangan bencana, penyediaan peralatan perlindungan berupa early warning system dan sosialisasi informasi rawan bencana. Akan tetapi hasil KUA PPAS anggaran pencegahan dan kesiapsiagaan hanya mendapatkan sedikit sekali, ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian indikator sasaran berupa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) karena kegiatan mitigasi menjadi minim, sedangkan kegiatan mitigasi bencana merupakan urusan wajib yang harus diberikan kepada masyarakat dikarenakan masuk kedalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun pada tahun 2026 tidak ada usulan program dan kegiatan Masyarakat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 ada Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.20
Daftar Inovasi Perangkat Daerah tahun 2025

No .	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Aplikasi rekap kejadian bencana secara online	BPBD	-	Integrasi layanan informasi kejadian bencana	Tersedianya laporan kejadian bencana secara online	Memudahkan dalam mengakses data kejadian bencana darimanapun	BPBD / 2025

2.8 Penghargaan

Pada tahun 2025 tidak ada penghargaan yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung karena tidak mengikuti kompetisi apapun.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Isu-isu strategis meliputi isu-isu strategis nasional dan global yang membutuhkan sinergis antara BNPB, K/L dan pemangku kepentingan terkait lainnya, serta isu-isu strategis internal BNPB yang juga membutuhkan perhatian. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a) Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius. Namun demikian ancaman bencana kedepan tentunya tidak hanya ancaman bencana alam saja, akan tetapi bencana non alam perlu menjadi perhatian pula seperti kegagalan teknologi dan wabah/epidemi penyakit, sebagai contoh adanya bencana akibat pandemi Covid 19 yang terjadi di akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020. Sehingga manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan perlu dirancang pula untuk dapat mengakomodir upaya-upaya antisipasi terhadap kemungkinan kejadian bencana yang diakibatkan faktor non alam diantaranya covid-19 dan *zoonosis*;
- b) Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik;
- c) Indonesia dan negara-negara dunia pada tahun 2015 telah menyepakati *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* yang menggantikan *Hyogo Framework for Action*. Sendai Framework memiliki tujuh tujuan global, yaitu:

- Secara substansial mengurangi angka kematian akibat bencana global pada tahun 2030, dengan tujuan menurunkan rata-rata per 100.000 angka kematian global pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015;
- Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global pada tahun 2030, bertujuan untuk menurunkan angka global rata-rata per 100.000 pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015;
- Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana langsung terkait dengan produk domestik bruto global (PDB) pada tahun 2030;
- Secara substansial mengurangi kerusakan bencana pada infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pengembangan ketahanan terhadap bencana pada tahun 2030;
- Secara substansial meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020;
- Secara substansial meningkatkan kerja sama internasional dengan negara-negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi tindakan nasional dalam implementasi Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2030;
- Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi dan penilaian risiko bencana kepada masyarakat pada tahun 2030.

Pencapaian tujuan ini dicanangkan dalam empat aksi prioritas, yaitu: (1) memahami risiko bencana, (2) memperkuat tata kelola risiko bencana, (3) berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan,

dan (4) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali dengan Lebih Baik dan Lebih Aman” dalam pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

- d) Indonesia bersama-sama dengan negara lain telah memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa- bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kemajuan dalam mengimplementasikan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 adalah kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030. Pada gilirannya, kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat secara substansial membangun ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Terdapat sejumlah target di 17 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Sebaliknya, ketujuh target global Kerangka Sendai sangat penting untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- e) Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dari RPJMN ke

IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Ke 7 agenda pembangunan tersebut di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan nasional.

- f) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan. Berdasarkan survei BNPB (2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah.
- g) Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana.
- h) Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- i) Masih perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana. Selain itu juga dengan memperhatikan arahan sektor-sektor teknis yang dituangkan kedalam NSPK sebagai acuan.
- j) Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk tahapan pencegahan dan tahapan pemulihan pascabencana. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pencegahan dan pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- k) Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan, seperti dinyatakan dalam studi “Disaster Risk Financing and Insurance Strategy” (Kemenkeu, 2018). Dukungan inovasi pembiayaan dalam bentuk pooling fund menyasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana. Selain dari kontribusi APBN/APBD, dana tersebut dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan pooling fund dan produk turunannya dapat dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran untuk memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan;
- l) Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Tercatat banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunungapi, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami. Dalam konteks ini secara pemerintahan dikenal dengan istilah desentralisasi fungsional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus yang lintas wilayah administrasi. Oleh karena itu, hasil kajian saintifik di bidang adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana haruslah dapat dimanfaatkan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut sangat penting guna mempersiapkan rencana pembangunan yang responsif dan antisipatif terhadap dampak perubahan iklim serta potensi bencana hidrometeorologis dan geologis berdasarkan data, informasi dan kajian ilmiah;
- m) Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau “build back better, safer and sustainable” harus menjadi perhatian utama

BNPB. Oleh karena itu, perlunya dibangun sinergitas pemulihan pascabencana daerah terdampak. BNPB perlu mengoptimalkan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, bahkan juga aset yang hilang seperti pada kejadian likuifaksi di Palu dan sekitarnya serta tsunami Aceh. Optimalisasi juga dilakukan pada saat pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, proses pengusulan dan penganggaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung “build back better, safer and sustainable”, BNPB perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi baik pemerintah pusat dan daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB perlu mengoptimalkan peran serta lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, lembaga usaha, masyarakat dan media dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyediaan pendanaan, pendampingan, pengkajian dan pelaksanaan dengan pemberdayaan. Selain itu, perlu adanya pengarusutamaan berketahanan bencana (disaster resilience) dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan mengacu kepada prinsip membangun lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan;

- n) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam;
- o) Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu perlu adanya sebuah manajemen logistik dan peralatan yang

sesuai dengan kondisi geografis dan jenis ancaman bencana di Indonesia. BNPB perlu mengembangkan manajemen logistik dan peralatan yang bisa memaksimalkan kecepatan dan ketepatan respon pada saat penanganan darurat bencana dan sesuai dengan kajian ancaman bencana serta kondisi daerah masing-masing.

- p) Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang bisa secara progresif mendukung kebutuhan atas kompetensi pengelolaan bencana yang berkualitas dan bertaraf internasional. Peningkatan sumber daya pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana harus mengikuti perkembangan teknologi. BNPB harus terus mengembangkan modul-modul unggulan di bidang pengelolaan bencana, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait dalam bidang pelatihan dan sertifikasi profesi penanggulangan bencana. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi fungsi pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagai kelembagaan.
- q) Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan.
- r) Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045 yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan.

a. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB 2020 - 2044)

Di dalam dokumen implementasi rencana induk penanggulangan bencana memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.

Sedangkan misi rencana Induk Penanggulangan Bencana yang berlaku hingga tahun 2044 adalah:

- 1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif.
- 3) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan dan sasaran utama dalam rencana induk penanggulangan bencana adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang". Dan sasaran nya adalah:

- 1) Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat & keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam PB.
- 2) Peningkatan investasi kesiapsiagaan & pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana.
- 3) Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- 4) Penanganan darurat bencana yang cepat & andal.
- 5) Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik & aman.

Kebijakan	Strategi
Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria PB.
Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB. b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip - prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan kebijakan memperhatikan tata ruang dan	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema

Kebijakan	Strategi
penataan kawasan.	pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB. c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB.
Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB. b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal PB. c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam PB. d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas. e. Mewujudkan kabupaten kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana. g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Peningkatan kapasitas & kapabilitas penanganan	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.

Kebijakan	Strategi
kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. d. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	a. Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

- Fokus Capaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana Periode II tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB;

2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;

3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana;
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memiliki tujuan dan sasaran yang harus di capai dalam perencanaan pembangunan daerah yang sudah ditentukan. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka menengah (biasanya 5 tahun). Tujuan ini

mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan memperjelas arah kinerja perangkat daerah, adapun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

“Menurunnya Risiko Bencana”, dengan indikator yaitu Indeks Risiko Bencana.

Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dan terukur dari tujuan. Sasaran menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam jangka pendek-menengah dan menjadi dasar dalam menyusun program/kegiatan, adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

“Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana”, dengan indikator :

1. Indeks Ketahanan Daerah
2. Persentase Desa Tangguh Bencana
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN						TARGET KONDISI AKHIR 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya risiko bencana			Indeks risiko bencana	Angka	105,16	101,48	97,93	94,50	91,19	88,00	88,00
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks ketahanan daerah	Angka	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65
			Persentase desa tangguh bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks kepuasan masyarakat	Angka	76,75	77,75	78,75	79,75	80,75	81,75	81,75
			Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Angka	73,05	74	75	76	77	78	78
		Program penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh	%	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN						TARGET KONDISI AKHIR 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			layanan informasi rawan bencana								
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN						TARGET KONDISI AKHIR 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase koordinasi penanganan pascabencana	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah masuk dalam program prioritas pembangunan daerah dengan program pencegahan dan mitigasi bencana alam. Pada program prioritas pembangunan daerah memiliki beberapa program aksi dalam mendukung program prioritas daerah meliputi :

1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
2. Pembentukan desa tangguh bencana
3. Peningkatan kapasitas relawan destana
4. Penyediaan early warning system

Adapun kebijakan yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung program aksi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sistem informasi kebencanaan dengan cara mendorong pengumpulan data dan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Pengembangan basis data dan peta risiko berbasis geospasial dengan cara menggunakan teknologi GIS untuk menghasilkan peta rawan bencana yang akurat dan dapat di akses publik.
3. Pemutakhiran rutin terhadap data dan peta risiko bencana sesuai dengan kondisi geologis, klimatologis dan tata ruang yang baru.
4. Melakukan kolaborasi dengan instansi teknis dan pusat seperti BNPB dan BMKG dengan mengintegrasikan hasil kajian dan peta.

Untuk strategis yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah :

1. Mengidentifikasi jenis bahaya, kerentanan dan kapasitas dan potensi dampak pada setiap wilayah khususnya kawasan rawan bencana.
2. Memperbaharui peta tematik yang dimiliki.
3. Pemanfaatan teknologi geospasial.
4. Melibatkan masyarakat dalam partisipatif pemetaan daerah rawan.
5. Integrasi peta risiko dalam dokumen tata ruang dan pembangunan.
6. Sosialisasi dan diseminasi hasil pemetaan ke pemangku kepentingan dan masyarakat.

3.3 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan

Manajemen risiko program dan kegiatan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh instansi/organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program dan kegiatan.

Tujuan Manajemen Risiko Program & Kegiatan :

1. Menjamin program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
2. Meminimalisasi potensi kegagalan pencapaian sasaran.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sudah melakukan analisis risiko yang mungkin terjadi untuk dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada. Adapun beberapa risiko yang teridentifikasi disajikan dalam tabel di bawah ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki program yang menunjang program prioritas pembangunan daerah yaitu “Program Penanggulangan Bencana”, adapun rencana kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan guna menunjang program tersebut seperti :

1. Kegiatan Pra-Bencana meliputi :
 - a. Kajian dan Perencanaan
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana
 - Pembuatan dan pemutakhiran peta rawan bencana
 - Penyusunan rencana kontijensi dan rencana penanggulangan bencana
 - b. Peningkatan kapasitas
 - Pelatihan relawan kebencanaan (SAR, ORMAS, komunitas, media masa dsb)
 - Simulasi dan gladi lapang evakuasi bencana
 - Pembentukan dan pembinaan DESTANA (Desa tangguh bencana)
 - Sosialisasi dan edukasi kebencanaan ke sekolah, masyarakat dan aparatur
 - c. Penguatan sistem informasi
 - Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system)
 - Pemasangan rambu dan jalur evakuasi dan papan informasi publik
2. Kegiatan Saat Bencana (Tanggap darurat)
 - a. Aktivasi posko siaga darurat bencana

- b. Pengerahan tim evakuasi dan penyelamatan korban bencana
 - c. Pelayanan logistik darurat dan distribusi bantuan korban bencana
 - d. Penyiapan tenda pengungsian dan layanan kesehatan darurat
 - e. Dokumentasi dan pelaporan cepat kejadian bencana
3. Kegiatan Pasca-Bencana
- a. Pendataan dan verifikasi korban, kerusakan dan kerugian
 - b. Rehabilitasi infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi dan listrik)
 - c. Bantuan perbaikan dan pembangunan rumah yang rusak
 - d. Penyusunan laporan evaluasi penanggulangan bencana.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 yang secara spesifik mendukung prioritas pembangunan daerah adalah kegiatan identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana, dimana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut mendapatkan tambahan alokasi pagu indikatif anggaran pada Tahun 2026.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026		
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.431.980.290
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.816.980.290
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.134.984.230
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.134.984.230
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.335.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.335.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.972.704.625	-459.275.665
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.917.876.625	100.896.335
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.134.984.230	0
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.134.984.230	0
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.335.000	0
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	0
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	0
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.335.000	0

RANCANGAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026		
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.649.200
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.649.200
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.011.860
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.511.860

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3	4
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	0
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.545.535	100.896.335
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	0
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	0
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.545.535	100.896.335
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.011.860	0
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.511.860	0

RANCANGAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026		
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.000.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.615.000.000
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000
a	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	40.000.000
b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	640.000.000
a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	200.000.000
b	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	29.000.000
c	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3	4
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.000.000	0
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000	0
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.054.828.000	-560.172.000
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	-40.000.000
a	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	0	-40.000.000
b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	54.000.000	-586.000.000
a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	-200.000.000
b	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	29.000.000	0
c	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000	0

RANCANGAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026		
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
d	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
e	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	366.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	770.000.000
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
b	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
c	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	630.000.000
d	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	20.000.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	165.000.000
a	Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	30.000.000
b	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	135.000.000

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3	4
d	Penyusunan rRencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	-20.000.000
e	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0	-366.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	835.828.000	65.828.000
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	200.000.000
b	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	0
c	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	495.828.000	-134.172.000
d	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	20.000.000	0
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	165.000.000	0
a	Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	30.000.000	0
b	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	135.000.000	0

Pada tabel 4.1 diatas tidak ada perubahan yang ada pada pagu anggaran untuk kegiatan kesekretariatan (ex bau), perubahan terjadi pada pagu anggaran di program penanggulangan bencana Tahun 2026, dimana pagu anggaran untuk kegiatan mitigasi bencana khususnya pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana tidak mendapatkan anggaran sama sekali, padahal kegiatan sosialisasi sangat penting terutama pada daerah atau kawasan rawan bencana di Kabupaten Temanggung. Pada rancangan rencana kerja awal pengajuan pagu anggaran untuk kegiatan sosialisasi sebesar Rp 40.000.000, akan tetapi hasil penetapan pada pagu anggaran Tahun 2026 menjadi Rp 0. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan rincian sebagai berikut :

Pengajuan pagu awal rencana kerja (renja) :

- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Rp 200.000.000 (pembentukan destana dengan target 10 desa di kawasan rawan bencana)
- Penyusunan rencana kontijensi Kabupaten/Kota Rp 29.000.000
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Rp 25.000.000
- Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Rp 20.000.000
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Rp 366.000.000 (untuk pengadaan EWS untuk daerah rawan bencana sebanyak 6 unit)

Pagu penetapan rencana kerja (renja) menjadi :

- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Rp 0
- Penyusunan rencana kontijensi Kabupaten/Kota Rp 29.000.000
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Rp 25.000.000
- Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Rp 0
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Rp 0

Diketahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan mutu layanan yang harus di penuhi pada capaian standar pelayanan minimal (SPM), merupakan standar wajib yang harus diberikan kepada masyarakat.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2026

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.972.704.625				4.431.980.290
	1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.972.704.625				4.431.980.290
	1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.917.876.625				2.816.980.290
	1	0 5	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			2.134.984.230		-		2.134.984.230
	1	0 5	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	2.134.984.230	DAU	-		2.134.984.230
	1	0 5	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	89.335.000		-		89.335.000

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 5	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	DAU	-		6.000.000
	1	0 5	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	DAU	-		12.000.000
	1	0 5	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	DAU	-		10.000.000
	1	0 5	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Lapora n	26.335.000	DAU	-		26.335.000
	1	0 5	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Lapora n	35.000.000	DAU	-		35.000.000
	1	0 5	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	0		-		0
	1	0 5	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	DAU	-		0

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 5	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	401.545.535		-		300.649.200
	1	0 5	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	36.000.000	DAU	-		36.000.000
	1	0 5	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	15.000.000	DAU	-		15.000.000
	1	0 5	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	350.545.535	DAU	-		249.649.200
	1	0 5	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	292.011.860		-		292.011.860
	1	0 5	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	156.511.860	DAU	-		156.511.860

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	123.000.000	DAU	-		123.000.000
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	12.500.000	DAU	-		12.500.000
	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			-	-	1.054.828.000				1.749.000.000
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-	-	0		-		174.000.000
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	-	-	-		150.000.000

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	0 5	0 3	2.0 1	000 4	Sosialisasi, Komunikasi, Infomasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	-	-	-	24.000.000
		1	0 5	0 3	2.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	-	54.000.000	-		640.000.000
		1	0 5	0 3	2.0 2	000 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	0	-	-	200.000.000
		1	0 5	0 3	2.0 2	000 9	Penyusunan Rencana Kontinjensi			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	58 Dokum en	29.000.000	-	-	29.000.000
		1	0 5	0 3	2.0 2	001 0	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang	100 Orang	25.000.000	DAU	-	25.000.000

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan						
	1	0 5	0 3	2.0 2	001 4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	0	-			20.000.000
	1	0 5	0 3	2.0 2	001 5	Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	0	-	-		366.000.000
	1	0 5	0 3	2.0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			-	-	835.828.000		-		770.000.000

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokum en	250.000.000	DAU	Untuk kekeringan dan sumur bor		50.000.000
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	60 orang	70.000.000	DAU	-		70.000.000
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 orang	495.828.000	DAU	Pagu program prioritas bupati sebesar (untuk bantuan logsitik panganan bencana dan korban bencana serta bantuan bahan bangunan rumah untuk		630.000.000

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													korban bencana)		
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/kota	2 lapora n	20.000.000	DAU	-		20.000.000
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			-	-	165.000.000				165.000.000
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/kota			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 orang	30.000.000	DAU	-		30.000.000

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Loka si Uotp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sum ber Dana		
								Pro gra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	1 Dokum en	135.000.000	DAU	-		135.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.118.524.946, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 4.923.164.946 dan belanja modal sebesar Rp 195.360.000. Untuk realisasi belanja operasi sebesar Rp 761.176.205 atau sebesar 15,46% dari total pagu belanja operasi. Untuk realisasi belanja modal dengan anggaran Rp 761.176.205 belum ada realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025. Adapun beberapa faktor penghambat dalam realisasi anggaran adalah karena banyak kegiatan yang menggunakan KKPD (kartu kredit pemerintah daerah) sebagai pembayarannya akan tetapi aktivasi KKPD sendiri

terlambat. Selain itu pengadaan barang milik daerah berupa alat selam dan proyektor harus melalui proses ijin tim TKDN untuk peralatan selam dikarenakan barang yang akan di beli merupakan barang import.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 3.972.704.625,- yang terdiri dari 2 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini sudah mengalokasikan anggaran untuk responsif gender lebih dari 2% dari total anggaran yang ada.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGNA BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOTOK NURSETYANTO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830530 200112 1 005



**DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**



RENJA DINBUDPAR

Periode
2026

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung
Kode Pos 56216
Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 Fax (0293) 492203
Email: dinbudpar@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator.

Pada Tanggal: 5 Juni 2025

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur

Verifikator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur

ADI WIBOWO, ST
NIP. 198111012009031003

DWI FATMA A., SE., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT Tuhan semesta alam, atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 dapat tersusun. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Akhirnya penghargaan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026. Besar harapan kami, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2026 ini dapat bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Temanggung. Demi kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk tahun-tahun berikutnya, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Temanggung, 5 Juni 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

DAFTAR ISI

COVER..... i

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 6

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 9

 1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA..... 11

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 11

 2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... 36

 2.3 *Review* terhadap rancangan awal RKPD 38

 2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat..... 47

 2.5 Inovasi Perangkat Daerah 47

 2.6 Penghargaan 47

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 49

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 49

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 53

 4.1 Program dan Kegiatan..... 53

BAB V PENUTUP 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan..... 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Tahun 2024 12

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Triwulan II Tahun 2025..... 18

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung . 26

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar 35

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar 36

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 39

Tabel 2. 7 Usulan program dan kegiatan masyarakat 47

Tabel 2. 8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 47

Tabel 2. 9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung..... 47

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja 51

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan..... 54

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2026 58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

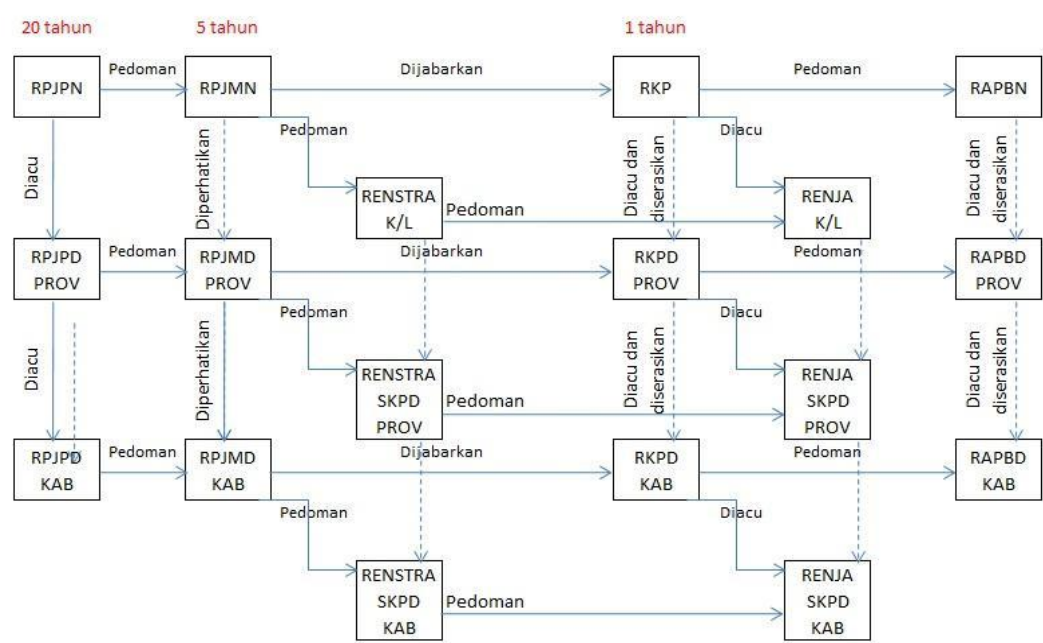
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

- Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPd. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyangkut aspek:
- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2) Kondisi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kondisi tahun 2026-2030;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2026.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-kedua pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp				I		II		III		IV					
							K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							6.217.92 9.742	16.293. 636.130		798. 392. 978		6.43 2.87 5.77 4		3.449. 541.36 4		5.059.594. 855		15.7 40.6 04.9 71		96,61
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.476.70 3.242	5.138.6 36.130		789. 330. 228		1.39 2.15 3.97 4		1.684. 763.39 4		1.022.323. 955		4.88 8.77 1.55 1		95,14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.429.90 3.242	3.318.8 36.130		637. 620. 614		1.16 9.86 3.30 9		750.6 63.19 7		642.779.1 57		3.20 0.92 6.27 7	100, 00	96,45
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12			12	3.429.903 .242	3.318.83 6.130	3	637. 620. 614	3	1.16 9.86 3.30 9	3	750.66 3.197	3	642.779.15 7	12	3.200 .926. 277	100,0 0	96,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	975.000 .000		15.7 82.5 00		57.9 10.0 00		717.01 6.345		111.557.6 50		902. 266. 495	100, 00	92,54
	Sosialisasi Perundang- undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perundang- undangan Cukai Tembakau	Bulan				12	-	975.000. 000	3	15.7 82.5 00	3	57.9 10.0 00	3	717.01 6.345	3	111.557.65 0	12	902.2 66.49 5	100,0 0	92,54
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								165.200 .000	165. 200. 000		16.2 76.0 00		30.5 91.6 00		56. 49 1.8		52.6 57.4 00		156. 216. 800	100,0 0

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
										I		II		III		IV					
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
																00					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan				12	10.000.00 0	10.000.0 00	3	0	3	2.75 0.00 0	3	4.527. 500	3	2.345.000	12	9.622 .500	100,0 0	96,23
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Bulan				12	15.000.00 0	15.000.0 00	3	2.51 3.50 0	3	-	3	3.487. 500	3	8.394.000	12	14.39 5.000	100,0 0	95,97
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan				12	15.000.00 0	15.000.0 00	3	0	3	3.60 6.10 0	3	2.179. 700	3	7.563.900	12	13.34 9.700	100,0 0	89,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Bulan				1	200.000	200.000	0	0		-		-	1	200.000	1	200.0 00	100,0 0	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12			12	50.000.00 0	50.000.0 00	3	5.26 5.00 0	3	5.98 0.00 0	3	13.813 .100	3	24.919.700	12	49.97 7.800	100,0 0	99,96

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp				I		II		III		IV					
							K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12			12	75.000.00 0	75.000.0 00	3	8.49 7.50 0	3	18.2 55.5 00	3	32.484 .000	3	9.434.800	12	68.67 1.800	100,0 0	91,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.202.00 0.000	10.000. 000	-	-		-		9.990. 000		-	1	9.99 0.00 0	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1			1	250.000.0 00	10.000.0 00							1	9.990.000	100,0 0	99,9	1	9.990. 000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4			4	952.000.0 00													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							534.600. 000	534.600 .000		119. 651. 114		119. 376. 665		129.3 57.05 2		129.930.7 48		498. 315. 579	100, 00	85,66
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12			12	1.500.000	1.500.00 0	3	100. 000	3	200. 000	3	1.175. 000	3	-	12	1.475 .000	100,0 0	98,333 3333
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Bulan	12			12	70.000.00 0	70.000.0 00	3	9.60 4.55 2	3	9.35 3.64 1	3	13.919 .870	3	9.477.295	12	42.35 5.358	100,0 0	60,51

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp				I		II		III		IV					
							K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
		Air dan Listrik yang Disediakan																			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12			12	463.100.000	463.100.000	3	109.946.562	3	109.823.024	3	114.262.182	3	120.453.453	12	454.485.221	100,00	98,14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							145.000.000	135.000.000		0		14.412.400		21.245.000		85.399.000		121.056.400	50,00	61,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17			12	100.000.000	100.000.000	3	0	3	14.412.400	3	18.655.000	3	53.339.000	12	86.406.400	100,0	86,4
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12			12	30.000.000	30.000.000	3	0	3	-	3	-	3	29.766.000	12	29.766.000	100,00	99,2

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp				I		II		III		IV					
							K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bulan	12			12	5.000.000	5.000.00 0	3	0	3	-	3	2.590. 000	3	2.294.000	12	4.884 .000	100,0 0	97,7
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bulan	12			12	10.000.00 0	0		0		-		-		0	0	0	0,00	0,0
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							741.226. 500	11.155. 000.000		9.06 2.75 0		5.04 0.72 1.80 0		1.764. 777.97 0		4.037.270. 900		10.8 51.8 33.4 20	100, 00	97,28
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							741.226. 500	11.155. 000.000		9.06 2.75 0		5.04 0.72 1.80 0		1.764. 777.9 70		4.037.270 .900		10.8 51.8 33.4 20	100, 00	97,28
	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan ,	Bulan	12			12	741.226.5 00	11.155.0 00.000	3	9.06 2.75 0	3	5.04 0.72 1.80 0	3	1.764. 777.97 0	3	4.037.270. 900	12	10.85 1.833 .420	100,0 0	97,28

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp				I		II		III		IV					
							K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																				
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							567.925. 000	154.250 .000		5.79 6.50 0		7.17 4.00 0		105.28 2.000		34.513.60 0		152. 766. 100		99,04
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							567.925. 000	154.250 .000		5.79 6.50 0		7.17 4.00 0		105.28 2.000		34.513.60 0		152. 766. 100		99,04
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Ko ta		Lokasi	8				567.925.0 00	154.250. 000	3	5.79 6.50 0	3	7.17 4.00 0	3	105.28 2.000	3	34.513.600	12	152.7 66.10 0	100	99,04
								6.785.85 4.742	16.447. 886.130		804. 189. 478		6.44 0.04 9.77 4		3.554. 823.36 4	0	5.094.108. 455		15.8 93.3 71.0 71		

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11			12	13	20	21	22	23
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12.481.227.229	12.680.159.363				854.494.346		1.750.074.065		43,18
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.901.227.229	4.087.423.063				814.181.346		1.702.596.565		43,18
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.431.427.229	3.331.966.817		728.625.141		710.175.719		1.438.800.860	50,00	43,18
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12		12	3.431.427.229	3.331.966.817	3	728.625.141	3	710.175.719	6	1.438.800.860	50,00	43,18
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						650.000.000									
	Sosialisasi Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Cukai Tembakau	Orang			3.000	650.000.000									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						151.500.000	109.522.350		10.718.065		9.625.250	18	20.343.315	30,00	16,75

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11			12	13	20	21	22	23
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			12	10.000.000	7.060.000	0	0	0	-	0	0	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket			12	15.000.000	9.921.350	3	2.074.865	0	-	3	2.074.865	25,00	20,91
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12	16.500.000	11.645.000	3	1.117.200	3	1.274.700	6	2.391.900	50,00	20,54
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket			12	50.000.000	45.020.000	3	3.455.000	0	-	3	3.455.000	25,00	7,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	60.000.000	35.876.000	3	4.071.000	3	8.350.550	6	12.421.550	50,00	34,62
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.500.000	6.000.000								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1		1	7.500.000	6.000.000								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						533.100.000	528.030.296		141.321.213	6	74.889.877	12	216.211.090	50,00	34,95

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIA TAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									I		II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11			12	13	20	21	22	23
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12		12	70.000.000	70.000.000	3	9.364.263	3	9.391.263	6	18.755.526	50,00	26,79
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12		12	463.100.000	458.030.296	3	131.956.950	3	65.498.614	6	197.455.564	50,00	43,11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.700.000	111.903.600		7.750.800	5	19.490.500	8	27.241.300	23,53	18,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17		17	92.700.000	96.903.600	3	7.750.800	5	17.790.500	8	25.541.300	47,1	26,4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2		2	25.000.000	15.000.000	0	0		1.700.000	0	1.700.000	0,0	11,3

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									I		II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11			12	13	20	21	22	23
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bulan	12			10.000.000									
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						7.580.000.000	8.592.736.300		7.164.500		40.313.000		47.477.500	0,00	0,55
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						7.580.000.000	8.592.736.300		7.164.500		40.313.000		47.477.500	0,00	0,55
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	Bulan	12			7.580.000.000	8.592.736.300		7.164.500		40.313.000		47.477.500	0,00	0,55
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						190.000.000	329.480.800		3.942.000		3.650.000		7.592.000		2,30
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						190.000.000	329.480.800		3.942.000		3.650.000		7.592.000		2,30
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						190.000.000	329.480.800		3.942.000		3.650.000		7.592.000		2,30

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11			12	13	20	21	22	23
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Bulan	12			190.000.000	329.480.800		3.942.000		3.650.000		7.592.000	-	2,30
							12.671.227.229	13.009.640.163		899.521.719		858.144.346		1.757.666.065		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026-2030 berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)
 - b. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (IUP)
 - c. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)
 - d. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)
 - e. Jumlah desa wisata aktif
 - f. Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Melakukan Pendataan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda
 - b. Melakukan Pendataan Kelompok Kesenian
 - c. Melakukan Pendataan Pelaku Budaya
 - d. Melakukan Pendataan Cagar Budaya
 - e. Memfasilitasi Destinasi Tujuan Wisata (DTW)
 - f. Melakukan Pendataan SDM Usaha Pariwisata
 - g. Melakukan Promosi Destinasi Tujuan Wisata (DTW)
 - h. Melakukan Pendataan Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)
 - i. Melakukan Pendataan Pengunjung Tempat Bersejarah (IUP)
 - j. Melakukan Pendataan Pelaku Ekraf
 - k. Melakukan Pendataan Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sosialisasi Perundang-undangan
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - p. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - q. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.
 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.
 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.
 7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada ditahun 2024.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **87,39%** dan capaian indikator sasaran dengan kategori **Sangat Memuaskan** dengan nilai **98,84**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

: Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya local
- Indikator Sasaran

: Indeks Pembangunan Kebudayaan
- Capaian Kinerja

: 87,17 % Kategori Memuaskan
2. Sasaran Strategis

: Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata;
- Indikator Sasaran

: Sektor Pariwisata terhadap PDRB
- Capaian Kinerja

: 91,58 % Kategori Sangat Memuaskan

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2.1

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.1

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,31	4,21	4,66	5,11	3,67	3,67*		78,76		T			
2	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	n.a	21,05	26,1	31,15	113,63	100,00		100	ST				
3	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	n.a	4,1	8,2	12,3	72,83	100,00		100	ST				
4	Presentase kelompok kesenian yang produktif	%	n.a	38	44	50	184,33	0,00		0					SR
5	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,73	7,49	9,25	11,01	7,05	7,93		85,7		T			
6	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	5,18	9,18	13,18	17,18	9,33	13,47		100	ST				
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,77	2,02	2,1	2,15	1,85	1,85*		88,10		T			
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	21	0,03	0,04	0,05	7,42	-57,38		0					SR
9	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1	1		100	ST				

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
10	Persentase peningkatan desa wisata	%	11,76	13,26	14,76	16,26	11,65	11,65		78,96		T			
11	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	9,02	9,5	10	10,5	1,64	11,29		100	ST				

*masih menggunakan nilai tahun lalu, dikarenakan tahun ini angkanya belum keluar, IPK menunggu hasil dari UNDIP dan PDRB menunggu hasil dari BPS yang keluar satu kali dalam setahun

Kriteria Penilaian Realisasi	Status
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 5 terdiri dari:
 - a. Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.
 - b. Persentase kelompok budaya yang teregister
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana

pengembangan seni dan budaya.

c. Lama Tinggal Wisatawan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keindahan wisata alam dan aktivitasnya.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya pilihan akomodasi dan fasilitas, kurangnya daya tarik wisata yang beragam, kurangnya aktivitas malam dan hiburan hingga biaya dan aksesibilitas ekonomi.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengembangan akomodasi yang beragam dan berkualitas, pengembangan daya tarik wisata dan aktivitasnya, peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan.

d. Presentase peningkatan pelaku ekraf

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah dukungan pemerintah dan kebijakan ekonomi kreatif, tumbuhnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk lokal, peningkatan infrastruktur dan akses pasar, kolaborasi dan kemitraan dengan sektor lain.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan pasar dan akses ke pemasaran, persaingan yang ketat hingga perubahan preferensi konsumen.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan keterampilan dan pendidikan, dukungan pemasaran dan akses pasar, penguatan komunitas dan kolaborasi, perlindungan hukum dan kekayaan intelektual.

2. Capaian indikator dengan status Tinggi ada 1 terdiri dari:

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

1) Faktor pendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung jika dilihat dari Paparan dari UNDIP yang menilai IPK di Kabupaten Temanggung adalah:

- Sub-Variabel yang pertama adalah Pendidikan dengan nilai 4,17 hal ini dikarenakan mulai digerakkannya program pendidikan kesetaraan dengan sosialisasi wajar 13 tahun hingga pengembangan karir guru;
- Sub-Variabel kedua adalah Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 4,50, hal ini dikarenakan solidaritas antar masyarakat masih tinggi seperti masih banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong;
- Sub-Variabel ketiga adalah Warisan Budaya dengan nilai 4,50 dan Sub-Variabel keempat adalah Ekspresi Budaya dengan nilai 5,00, hal ini dikarenakan masyarakat ikut serta dalam menjaga budaya benda (cagar budaya) dan tak benda (tradisi lisan, sejarah lokal, tarian tradisional dll) yang ada di Kabupaten Temanggung;
- Sub-Variabel kelima adalah Kesetaraan Gender dengan nilai 4,67, dikarenakan mulai adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan seperti mulai banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok budaya dan ikut tampil dalam pertunjukan.

2) Terdapat Sub-Variabel yang mempunyai nilai rendah sehingga menghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk mencapai target yang telah

ditentukan, berikut beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu:

- Sub-Variabel pertama yaitu Ekonomi Budaya dengan nilai 2,00, dikarenakan masyarakat Kabupaten Temanggung belum berorientasi kepada pendapatan terkait pementasan seni budayanya, masih sebatas kepuasan untuk hiburan diri sendiri dan masyarakat;
 - Sub-Variabel kedua yaitu Budaya literasi dengan nilai 3,33, dikarenakan masih sedikit penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan fasilitas yang ada.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
- Pemberian bantuan keuangan bagi kelompok kesenian
 - Melakukan monitoring bantuan keuangan kelompok kesenian dan memberikan saran serta masukan kepada kelompok kesenian
 - Memberikan fasilitasi kepada kelompok seni untuk pentas di luar dan dalam daerah
- b. Presentase pelestarian sejarah lokal
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah peninggalan sejarah seperti candi dan situs purbakala hingga cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat, terdapat tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan kisah sejarah yang turun menurun.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya masyarakat tentang pentingnya sejarah lokal, keterbatasan sumber daya dan anggaran, kurangnya riset dan dokumentasi sejarah sehingga terdapat kemungkinan kehilangan bukti sejarah.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melestarikan tradisi lisan seperti cerita rakyat, lagu daerah dan cerita sejarah yang turun menurun agar tidak hilang.
- c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Peningkatan jumlah wisatawan di beberapa obyek wisata, kenaikan jumlah wisatawan dapat meningkatkan permintaan sektor akomodasi dan makan minum;
 - Peningkatan infrastruktur, peningkatan infrastruktur yang baik seperti, transportasi, jalan raya hingga fasilitas umum lainnya dapat mendukung kenyamanan wisatawan dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata;
 - Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi dan komunikasi seperti platform pemesanan online untuk tiket masuk wisata hingga akomodasi dapat mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan;
 - Peningkatan daya tarik destinasi wisata, melakukan promosi destinasi wisata serta pengembangan atraksi wisata dapat memperbesar peluang sektor akomodasi dan makan minum
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Penurunan jumlah wisatawan di beberapa tempat wisatawan, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menurunkan jumlah wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan di sektor makan minum dan akomodasi;
 - Keterbatasan Infrastruktur, jumlah transportasi

umum kurang memadai hingga tempat parkir bus besar yang belum ada dapat menghambat pertumbuhan sektor ini;

- Persaingan ketat, banyaknya tempat makan dan destinasi yang serupa dapat menyebabkan persaingan harga dan menurunkan potensi keuntungan;
- Perubahan preferensi konsumen, perubahan preferensi wisatawan dapat mempengaruhi permintaan akan akomodasi dan makanan tertentu.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Melakukan promosi melalui sosial media untuk menarik minat wisatawan untuk datang berwisata di Kabupaten Temanggung;
- Memberikan bantuan keuangan kepada desa wisata untuk meningkatkan infrastruktur yang ada;
- Memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang Manajemen Obyek Wisata.

d. Presentase peningkatan desa wisata

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya potensi wisata yang menarik, kearifan lokal dan budaya tradisional, partisipasi masyarakat local.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan infratraktur, kurangnya daya tarik wisata yang bervariasi, persaingan dengan destinasi wisata lain.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pemberdayaan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran yang efektif, pengembangan wisata berbasis komunitas, penyusunan paket wisata.

3. Capaian indikator dengan status Sangat Rendah ada 3 terdiri dari:

- a. Persentase kelompok kesenian yang produktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terdapat dukungan dari pemerintah jika kelompok seni dan budaya melakukan register di DINBUDPAR, mendapat kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sehingga dapat menghambat perkembangannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seni dan budaya seperti memberikan hibah atau dana pengembangan seni dan budaya.
- b. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keindahan alam dan potensi wisata alam, kehadiran destinasi wisata baru hingga adanya kolaborasi dengan sektor swasta.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur, kurangnya diversifikasi atraksi wisata, keterbatasan dana untuk pengembangan pariwisata, persaingan dengan destinasi wisata lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, promosi wisata lebih intensif, pengembangan paket wisata dan atraksi baru, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata, pengembangan wisata berkelanjutan hingga kolaborasi dengan destinasi

terdekat.

2.1.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kebudayaan dan Data Pokok Bidang Pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Kebudayaan

a. Nomenklatur Indikator pada Data Pokok

Realisasi Capaian tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar Bidang Kebudayaan

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,31	3,67	3,67*
2	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	n.a	113,63	100,00
3	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	n.a	72,83	100,00
4	Persentase kelompok kesenian yang produktif	n.a	184,33	0,00
5	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	6,73	7,05	7,93
6	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	5,18	9,33	13,47

*masih menggunakan nilai tahun lalu, dikarenakan tahun ini angkanya belum keluar, IPK menunggu hasil dari UNDIP dan PDRB menunggu hasil dari BPS yang keluar satu kali dalam setahun

2. Data Pokok Bidang Pariwisata

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar Bidang Pariwisata

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,77	1,85	1,85*
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	21	7,42	-57,38
3	Lama Tinggal Wisatawan	1	1	1
4	Persentase peningkatan desa wisata	11,76	11,65	11,65
5	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	9,02	1,64	11,29

*masih menggunakan nilai tahun lalu, dikarenakan tahun ini angkanya belum keluar, IPK menunggu hasil dari UNDIP dan PDRB menunggu hasil dari BPS yang keluar satu kali dalam setahun

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari 11 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target ST (Sangat Tinggi), antara lain:

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nilai dari presentase ini dikeluarkan oleh UNDIP sekali dalam setahun dan penilaiannya tidak hanya terdiri dari sektor kebudayaan saja, tetapi bergabung dengan sektor pendidikan, kesetaraan gender dll, sehingga mempengaruhi hasil nilai yang dikeluarkan.

- Indikator persentase kelompok kesenian yang produktif
Hal ini disebabkan karena pencairan bantuan hibah kesenian belum dicairkan hingga triwulan 2.
 - Indikator presentase pelestarian sejarah lokal
Kurangnya pengetahuan dan sumber daya karena generasi muda tidak memiliki pengetahuannya
 - Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Presentase ini dibuat oleh BPS dan dikeluarkan setiap awal tahun $n+1$, dan sektor pariwisata sendiri tidak berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan sektor akomodasi dll, sehingga mempengaruhi hasil nilai yang keluar.
 - Indikator presentase pertumbuhan jumlah wisatawan
Kurangnya inovasi pada daya tarik wisata, sarpras pendukung pariwisata (jalan, tempat oleh-oleh, penginapan, informasi tentang pariwisata), kualitas SDM pariwisata di Kabupaten Temanggung hingga strategi pemasaran yang kurang efektif dan efisien.
 - Indikator presentase peningkatan desa wisata
 - Keterbatasan sumber daya
 - Ketidakjelasan manfaat ekonomi
 - Nilai religius atau konservatif yang kuat di masyarakat
2. Permasalahan, hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain :
- Kelompok budaya belum memahami kegunaan dari register kebudayaan

Solusi: memberikan penjelasan bahwa register digunakan untuk melakukan pendataan kebudayaan/kesenian yang dilakukan oleh Dinbudpar

- Keterbatasan anggaran, sehingga tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan

Solusi: melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti instansi pendidikan dan komunitas

- Fasilitas yang ada kurang mendukung

Solusi: untuk promosi wisata menggunakan sarpras yang ada dan menggunakan peralatan pribadi, untuk melakukan mobilitas menggunakan mobil yang sudah ada walaupun usianya sudah tua dan tidak efisien untuk digunakan

- Kurangnya SDM (kuantitas dan kualitas) di Dinbudpar dan di masyarakat

Solusi: peningkatan kualitas SDm dengan melakukan pelatihan, penyuluhan dan peningkatan literasi, sedangkan untuk kuantitasnya melakukan penambahan pegawai

2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat kesesuaian kegiatan dan anggaran di luar rancangan awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					4.283.638.158		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					11.972.607.678	
1	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.888.388.159	1	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.497.357.678	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.888.388.159		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					11.497.357.678	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.742.388.159	A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.076.857.678	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.431.427.229		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.431.427.228	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	orang/bulan	3.431.427.228	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	orang/bulan	3.431.427.228	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					130.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					130.000.000	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	10.000.000	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	10.000.000	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	15.000.000	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	15.000.000	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	15.000.000	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	30.000.000	5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	30.000.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	60.000.000	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	60.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					17.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					17.000.000	
7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	unit	17.000.000	7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	unit	17.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					399.469.520	
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	50.000.000	8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	50.000.000	
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	laporan	15.000.000	9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	laporan	349.469.520	

RANCANGAN AWAL RKPd 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.960.930		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.960.930	
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	unit	83.960.930	10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	unit	83.960.930	
11.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	15.000.000	11.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	15.000.000	
	Program Pengembangan Kebudayaan					146.000.000		Program Pengembangan Kebudayaan					7.375.500.000	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					35.500.000		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					346.000.000	
12.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Temanggung	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1	objek	35.500.000	12.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Temanggung	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4	objek	321.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
							13.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Temanggun g	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250	orang	25.000.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang MasyarakatPelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					7.029.500.000	
								Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Temanggun g	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	195	laporan	6.999.500.000	
13.	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Temanggun g	Jumlah budayawan yang diberikan penghargaan	5	orang	30.000.000	14.	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Temanggun g	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5	sertifikat	30.000.000	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
14.	Penyusunan, Pemutakhiran Penetapan Pokok Pikiran	Kab. Temanggun g	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD	1	dokumen	35.500.000								

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kot		Kabupaten/kota											
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					45.000.000		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					45.000.000	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					30.000.000		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					30.000.000	
15.	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Temanggun g	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			30.000.000	15.	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Temanggun g	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3	obyek	30.000.000	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					15.000.000		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					15.000.000	
16.	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Temanggun g	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			15.000.000	16.	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Temanggun g	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10	obyek	15.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					395.200.000		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					395.250.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					100.000.000		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					100.000.000	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					25.000.000		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					25.000.000	
17.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kot a	Kab. Temanggun g	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan			25.000.000	17.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Ko ta	Kab. Temanggun g	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	40	orang	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					75.000.000		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					75.000.000	
18.	Pengadaan/Pe- meliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	Kab. Temanggun g	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	lokasi	40.000.000	18.	Pengadaan/Pe- meliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Kab. Temanggun g		3	lokasi	40.000.000	
19.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	Kab. Temanggun g	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10	laporan	35.000.000	19.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Kab. Temanggun g	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10	laporan	35.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					325.250.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					325.250.000	
20.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kot a	Kab. Temanggun g	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	kegiatan	245.250.000	20.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Kab. Temanggun g	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2	kegiatan	325.250.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					20.000.000		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					20.000.000	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					20.000.000		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					20.000.000	
21.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1	lembaga	10.000.000	21.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1	lembaga	10.000.000	
22.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	laporan	10.000.000	22.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	laporan	10.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					30.000.000		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					30.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					30.000.000		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					30.000.000	
23.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	laporan	30.000.000	23.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	laporan	30.000.000	
						4.283.638.158							11.972.607.678	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sipd.ri tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Namun dalam proses ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2. 7 Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

2.5 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				

2.6 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Penyaji Terbaik V Event bersama Kedu Raya 2022	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jateng	Karisidenan	Bidang Kebudayaan
2	Juara 1 di Event Magelang Craft Expo dan Festival	Bupati Magelang	Kabupaten	Bidang Kebudayaan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Gedhuk 2022			
3	Penghargaan Upaya Pelestarian Terbaik – IAI Jateng Heritage Award 2022	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Bidang Kebudayaan
4	50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024		Nasional	Bidang Pariwisata

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur, Prambanan, dan Sangiran berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kabupaten Temanggung termasuk pada KSPN Borobudur.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2024 Pemerintah menetapkan 5 KSPN Super Prioritas dan Kabupaten Temanggung masuk pada KSPN Super Prioritas Borobudur. Kabupaten Temanggung juga masuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025, yang artinya Kabupaten Temanggung termasuk kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

RIPPARKAB Temanggung menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) berada di kawasan Kledung dan sekitarnya. Sedangkan untuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) ada di kawasan Liyangan dan sekitarnya, Kandangan dan sekitarnya, Temanggung dan sekitarnya, dan Kembangarum-Wagir Bawang dan sekitarnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2030
Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	%	1.91	1.99
	Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (IUP)	%	20,70	28,28
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)	%	49,35	59.98
	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	%	610.271	611.747
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah desa wisata aktif	%	31	31
		Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	orang	90 %	90 %

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2025-2030

Kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2030. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2030.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.972.607.678		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.972.607.678	
A	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.497.357.678	A	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.497.357.678	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.497.357.678		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.497.357.678	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.076.857.678	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.076.857.678	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.427.228	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.427.228	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.427.228		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.427.228	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.469.520	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.469.520	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.469.520		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.469.520	

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2026		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.950.930
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.960.930
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.375.500.000
a	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	346.000.000
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	321.000.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	25.000.000
b	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.029.500.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6.999.500.000
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	30.000.000
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	45.000.000
a	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30.000.000
	Penetapan Cagar Budaya	30.000.000
b	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	15.000.000
	Pelindungan Cagar Budaya	15.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	475.250.000
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	475.250.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.950.930	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.960.930	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.375.500.000	
a	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	346.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	321.000.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	25.000.000	
b	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.029.500.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6.999.500.000	
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	30.000.000	
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	45.000.000	
a	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30.000.000	
	Penetapan Cagar Budaya	30.000.000	
b	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	15.000.000	
	Pelindungan Cagar Budaya	15.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	475.250.000	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	475.250.000	

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100.000.000	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100.000.000	
a	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.000.000	a	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	25.000.000		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	25.000.000	
b	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.000.000	b	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	75.000.000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40.000.000		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	35.000.000		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	35.000.000	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	325.250.000	2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	325.250.000	
a	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	325.250.000	a	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	325.250.000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	325.250.000		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	325.250.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	20.000.000	3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	20.000.000	
a	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	20.000.000	a	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	20.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	10.000.000		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	10.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.000.000		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	30.000.000	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	30.000.000	
a	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	30.000.000	a	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	30.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	JUMLAH	11.972.607.678		JUMLAH	11.972.607.678	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2026.

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2026

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
																NASI ONA L	DAERAH			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						11.972.607.678							11.638.138.158	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.497.357.678							11.162.888.158	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						7.375.500							7.375.500.000	
1.	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.076.857.678							3.742.388.158	
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.431.427.228			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			3.431.427.228	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.431.427.228,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		3.431.427.228,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	130.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	130.000.000,00	

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
																NASI ONA L	DAERAH			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		10.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				4 Paket	15.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah				12	30.000.0	Kab.	PENDAP	-	Penguatan	-		30.000.00	DINAS

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
																NASI ONA L	DAERAH			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Laporan	00,00	Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			0,00	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		60.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17.000.0 00,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	17.000.00 0,00	
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	17.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		17.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
																NASI ONA L	DAERAH			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	399.469. 520,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	65.000.00 0	
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		50.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	349.469. 520,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.00 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.960.9 30,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	98.960.93 0,00	

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
															NASI ONA L	DAERAH					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															program prioritas						
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya				16 Unit	83.960.9 30,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		83.960.93 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi				2 Unit	15.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	7.375.50 0.000,00						-	7.375.500. 000,00		
		2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	346.000. 000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	346.000.0 00,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan															
							Jumlah				4 Objek	321.000.	Kab.	PENDAP	-	Penguatan	-		321.000.0	DINAS	

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
															NASI ONA L					DAERAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Objek Pemajuan Kebudayaa n yang Dilakukan Pelindunga n, Pengemba ngan, Pemanfaat an					000,00	Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			00,00	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaa n				250 Orang	25.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		25.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.029.50 0.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	7.029.500. 000,00	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,				195 Laporan	6.999.50 0.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan	-		6.999.500. 000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
															NASI ONA L					DAERAH
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dan Pranata Tradisional									reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas				
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Orang/Le mbaga yang Diberi Pengharga an untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaa n				5 Sertifika t	30.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		30.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	45.000.0 00,00					-		45.000.00 0,00	
		2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			30.000.0 00,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	30.000.00 0,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	30.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi	-		30.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)					
															NASI ONA L	DAERAH								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															dan roadmap program prioritas									
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.0 00,00			-	-	-	-	15.000.00 0,00					
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				10 Objek	15.000.0 00,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						475.250. 000,00							475.250.0 00,00					
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						475.250. 000,00							475.250.0 00,00					
4	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	100.000. 000,00						-	100.000.0 00,00					
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.0 00,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	25.000.00 0,00					
	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikemban gkan				40 Orang	25.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		25.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
																NASI ONA L	DAERAH			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		-	75.000.0 00,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	75.000.00 0,00	
		3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
								0			3 0	40.000.0 00,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		40.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota				10 Laporan	35.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		35.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5		3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-		-	325.250. 000,00						-	325.250.0 00,00	
		3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	-	-		-	325.250. 000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	325.250.0 00,00	

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
																NASI ONA L	DAERAH						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Pariwisata Kabupaten/Kota									Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas								
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							0				2 0	325.250. 000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		325.250.0 00,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
6	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-			-	20.000.0 00,00					-		20.000.00 0,00				
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	20.000.0 00,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	20.000.00 0,00				
	3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah																	
							Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatk				1 Lembaga	10.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan	-		10.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			

No	Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
											TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)					
															NASI ONA L	DAERAH								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							an penguatan kelembaga an ekonomi kreatif daerah						Kel/Desa			Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas								
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengemba ngan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	10.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		10.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
7	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	30.000.0 00,00						-	30.000.00 0,00					
		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			30.000.0 00,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	30.000.00 0,00					
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi				1 Laporan	30.000.0 00,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		30.000.00 0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				

No	Kode						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	ANGGARAN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET 2026	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
																NASI ONA L	DAERAH				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pengemba ngan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	J U M L A H											11.972.607.678						11.638.138.158			

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

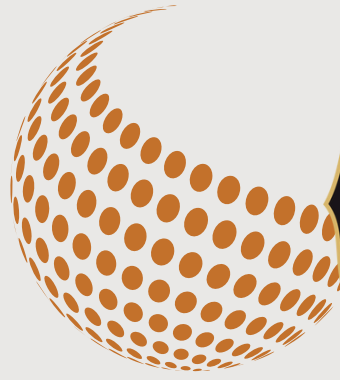
Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 96,63%, dengan nominal sebesar Rp. 15.893.371.071,00. Hal ini menandakan ada efisiensi anggaran yang disebabkan oleh selisih anggaran dengan realisasi anggaran yaitu sebesar 3,37% atau sebesar Rp. 554.515.059,00.

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 13,45 %, dengan nominal sebesar Rp. 1.750.074.065,00

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.11.972.607.678,00- yang terdiri dari 7 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program

Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.



RENJA 2026

**DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

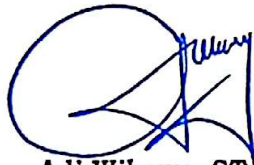
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi SDA dan
Infrastruktur



Adi Wibowo, ST
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



Dwi Fatma A., S.E., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. Hendra Sumaryana, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran progres pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan;
3. Merupakan petunjuk atas target kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 bisa dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanat yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARSO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 7

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 9

 1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOPDAG..... 11

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINKOPDAG Tahun 2024, 2025
 Triwulan II, dan Capaian Kinerja Dinkopdag tahun 2021-2025
 Triwulan II..... 11

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINKOPDAG 27

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 DINKOPDAG..... 40

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 41

 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 48

 2.6 Inovasi DINKOPDAG 48

 2.7 Penghargaan DINKOPDAG 48

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 49

 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 49

 3.2 Tujuan dan sasaran RENJA DINKOPDAG 49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 54

 4.1 Program dan Kegiatan..... 54

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINKOPDAG s.d Tahun 2024 Triwulan IV 12

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINKOPDAG s.d Triwulan II tahun 2025 18

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DINKOPDAG Triwulan II Tahun 2025..... 28

Tabel 2. 4 Realisasi Indikator bidang Koperasi & UMKM Tahun 2021 - 2025 39

Tabel 2. 5 Realisasi Indikator bidang Perdagangan Tahun 2021-2025.... 40

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 42

Tabel 2. 7 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat 48

Tabel 2. 8 Daftar Inovasi Perangkat 48

Tabel 2. 9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung 48

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja DINKOPDAG Tahun 2026 51

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DINKOPDAG Tahun 2026 55

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan DINKOPDAG Tahun 2026..... 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

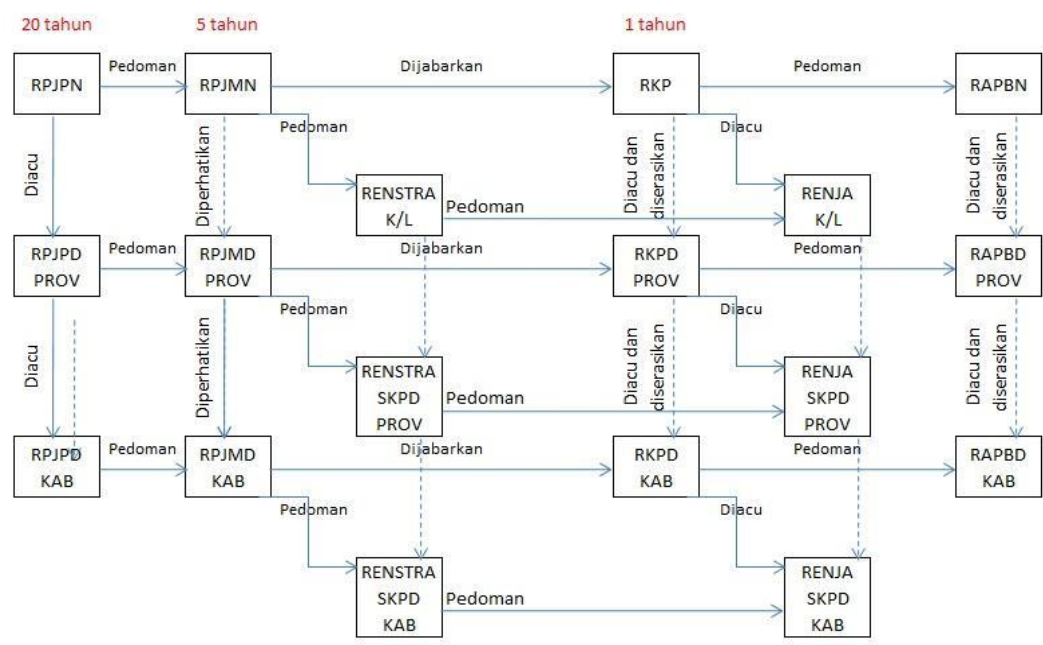
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2025 Triwulan II berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul

terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan saran dan masukan

dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2024, 2025 Triwulan II, dan Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2025 Triwulan II**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 Triwulan II terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2025, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 Triwulan IV dan Tahun 2025 Triwulan II terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama dan Tahun 2025 Triwulan II sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
s.d Tahun 2024 Triwulan IV

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/										
	KEGIATAN	KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%	60	15.000.000	36	15.000.000	15.000.000	15,15	14.516.000	25,25	96,77
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota										
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	25	15.000.000	40	15.000.000	15.000.000	50	14.516.000	100,00	96,77
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	25	25.000.000	4,45	25.000.000	25.000.000	100,00	24.286.750	100,00	97,15
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro										
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	25	25.000.000	25	25.000.000	25.000.000	25	24.286.750	100,00	97,15
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	1	50.000.000	0,92	50.000.000,00	50.000.000,00	1,39	43.519.750	139,00	87,04

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/										
	KEGIATAN	KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya										
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	150	50.000.000,00	150	50.000.000,00	50.000.000,00	469	43.519.750	100,00	87,04
		Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	2,91		1,74			80,65		100,00	
		Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	86,71		86,71			77,58		89,47	
		Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	100		100,00			0,44		0,44	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	
										Predikat	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	41,12	1.161.303.300	14	1.161.303.300	1.161.303.300	17,00	1.103.670.728	100,00	95,04
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67		67			67,00		100,00	
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1,5		1,5			1,55		100,00	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	84,26		75			75,04		89,06	

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/										
	KEGIATAN	KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										
	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6	900.000.000	6	900.000.000	900.000.000	4	855.830.488	66,67	95,09
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	261.303.300	12	261.303.300	261.303.300	12	247.840.240	100,00	94,85
5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	210.000.000	70	10.000.000	210.000.000	95,08	207.672.900	100,00	98,89
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota		laporan	1	200.000.000	1	25.000.000	200.000.000	1,00	198.443.600	100,00	99,22
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/										
	KEGIATAN	KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	10.000.000	12	9.229.300	100,00	92,29
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	99,42	20.000.000	98,37	20.000.000	20.000.000	100,00	18.653.720	100,00	93,27
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku										
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	5965,2	20.000.000	5902	20.000.000	20.000.000	6066	18.653.720	100,00	93,27
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,9		20,79			20,95		100,00	
		Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	3,46		1,15			2,56		100,00	
		Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	100		100			100,00		100,00	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	91,67	
										Predikat	Sangat Tinggi	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	15.426.014.203	100	15.426.014.203	15.170.302.910	100,00	14.647.850.760	100,00	96,56
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	9.269.657.753	14	9.269.657.753	9.013.946.460	14	8.863.682.481	100,00	95,62
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/										
	KEGIATAN	KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2000	175.000.000	1400	175.000.000	550.000.000	2.000	532.280.180	100,00	96,78
	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	15.000.000	5.000.000	12	4.867.250	100,00	97,35
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	127.006.000	12	127.006.000	132.996.000	12	121.770.084	100,00	95,88
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	59.650.000	12	59.650.000	54.650.000	12	53.342.650	100,00	89,43
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	75.000.000	12	50.000.000	74.000.000	12	73.885.900	100,00	98,51
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	15.000.000	5.010.000	12	4.987.000	100,00	99,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	820.000.000	12	820.000.000	820.000.000	12	647.137.583	100,00	78,92
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	15.000.000	12	14.989.000	100,00	99,93
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.949.224.450	12	3.954.224.450	3.949.224.450	12	3.821.705.527	100,00	96,77

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/										
	KEGIATAN	KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan BMD										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	80.000.000	2	80.000.000	80.000.000	2	65.939.066	100,00	82,42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	170.476.000	43	170.476.000	170.476.000	43	149.328.219	100,00	87,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	300.000.000	2	300.000.000	300.000.000	2	293.935.820	100,00	97,98
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN										16.060.170.608		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan											100,00	
										Predikat	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											97,22	
										PREDIKAT	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM											90,20	
										PREDIKAT	Tinggi	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
s.d Triwulan II Tahun 2025

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
	KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%	60	15.000.000	48	15.486.400	13,13	715.000	27,35	4,62
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota									
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	25	15.000.000	40	15.486.400	20,00	715.000	50,00	4,62
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	25	25.000.000	6,67	318.335.000	100,00	6.218.100	100,00	1,95
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1	25.000.000	1	318.335.000	0,00	6.218.100	0	1,95
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	1	50.000.000	0,96	23.589.500,00	0,59	0	61,46	0,00

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN									
	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya									
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	150	50.000.000,00	90	23.589.500,00	0,00	0	-	0,00
		Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	2,91		2,33		23,68		100,00	
		Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	86,71		93,72		18,18		19,40	
		Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	100		100,00		0,00		-	
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	16,67	
									Predikat	Sangat rendah	
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	41,12	900.000.000	27	400.000.000	4,46	165.155.300	16,27	41,29
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67		67		66,67		99,51	
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1,5		2,41		1,77		73,44	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	84,26		79,63		76,18		95,67	

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
	KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6	900.000.000	6	400.000.000	2,00	165.155.300	33,33	41,29
5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	210.000.000	75	139.012.200	49,59	10.596.000	66,12	7,62
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		laporan	1	200.000.000	1	139.012.200	0,00	10.596.000	0	7,62
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	6,00	0	50,00	0,00
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	99,42	20.000.000	99,41	25.000.000	26,52	2.885.000	26,68	11,54

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
	KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku				6000					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	5965,2	20.000.000	5965	25.000.000	1591,00	2.885.000	26,67	11,54
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,9		20,8		20,95		100,00	
		Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	3,46		2,31		2,56		100,00	
		Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	100		100		100,00		100,00	
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	36,67	
									Predikat	Sangat Rendah	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	15.426.014.203	100	15.737.916.053	50,00	6.881.297.861	50,00	43,72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	9.269.657.753	14	9.269.657.753	8,00	4.304.497.379	57,14	46,44
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2000	175.000.000	200	300.000.000	0,00	6.367.000	-	2,12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN		K	Rp	K	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
	KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	15.000.000	0,00	0	-	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	127.006.000	12	170.000.000	6,00	82.238.798	50,00	48,38
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	59.650.000	12	60.000.000	6,00	21.221.000	50,00	35,37
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	75.000.000	12	60.000.000	6,00	17.601.000	50,00	29,34
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	3		3	0	0,00	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	2.500.000	6,00	1.115.000	50,00	44,60
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	820.000.000	12	820.000.000	6,00	330.494.336	50,00	40,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.949.224.450	12	3.943.029.500	6,00	1.901.473.648	50,00	48,22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan BMD					548.864.400				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	80.000.000	2	73.571.400	1,00	23.375.800	50,00	31,77

No	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN									
	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		50		40	15.000.000	28,00	6.650.000	70,00	44,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	170.476.000	43	390.293.000	23,00	136.993.900	53,49	35,10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	300.000.000	1	70.000.000	1,00	49.270.000	100,00	70,39
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN									7.066.867.261		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan										46,72	
									Predikat	Sangat Rendah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN										33,35	
									PREDIKAT	Sangat Rendah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM										64,74	
									PREDIKAT	Rendah	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Persentase UMKM yang difasilitasi
 - b. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu Persentase Koperasi Sehat
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro
 - b. Program pengembangan UMKM
 - c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - e. Program Pengembangan Ekspor
 - f. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Sedangkan Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu

 - a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi
 - b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

- a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- c. Pengembangan Usaha Mikro
- d. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- e. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota
- f. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- g. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- h. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- i. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- l. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- p. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- s. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- t. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya UMKM yang difasilitasi
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
2. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
3. Meningkatnya UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
5. Meningkatnya Pasar daerah dalam kondisi baik
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
6. Meningkatnya kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
7. Meningkatnya Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
8. Meningkatnya Pedagang yang menggunakan transaksi digital
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
9. Meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
10. Meningkatnya Cakupan pelaku usaha yang di bina
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
11. Meningkatnya Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
12. Meningkatnya fasilitasi promosi produk dalam negeri
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Triwulan II Tahun 2025
(Laporan IKPD)
Kabupaten Temanggung

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																		
		1	Persentase Koperasi Sehat	%	28,18	36	48	60	15,15	13,33		27,78					V	
				Jumlah koperasi yang bernilai sehat						25	22							
				Jumlah koperasi aktif						165	165							
		2	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	2,034	0,92	0,96	1	1,39	0,59		61,88				V		
				Jumlah UMKM yang menerima fasilitas						469	201							
				jumlah UMKM keseluruhan						33.835	33.835							
INDIKATOR PROGRAM																		
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	Persentase koperasi sehat	%	28,18	36	48	60	15,15	13,33		27,78					V	
				Jumlah koperasi yang bernilai sehat						25	22							
				Jumlah koperasi aktif						165	165							
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	n.a	1,74	2,33	2,91	80,65	23,68		100,00	V					
				Jumlah koperasi yang naik dari cukup sehat menjadi sehat						25	9							
				Jumlah koperasi cukup sehat (n-1)						31	38							

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	3	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	75	91,43	93,71	96	77,58	18,18		19,40					V
				Jumlah koperasi yang ikut pelatihan			128	30									
				Jumlah koperasi yang aktif			165	165									
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	4	Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	n.a	100	100	100	0,44	0,00		0,00					V
				Jumlah koperasi diusulkan untuk dibubarkan			2	0									
				jumlah koperasi tidak aktif			457	458									
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	5	Persentase UMKM berbasis Desa/ Kelurahan	%	n.a	4,45	6,67	8,89	100,00	100,00		100,00	V				
				Jumlah UMKM di Desa/ Kelurahan			33.835	33.835									
				jumlah UMKM keseluruhan			33.835	33.835									
6	Program Pengembangan UMKM	6	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	2,034	0,92	0,96	1	1,39	0,59		61,88				V	
				Jumlah UMKM yang menerima fasilitas			469	201									
				jumlah UMKM keseluruhan			33.835	33.835									
JUMLAH IKUPD				2	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						44,83	0	0	0	1	1	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				6	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						51,51	2	0	0	1	3	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				8	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						48,17	2	0	0	2	4	
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																	

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
		1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,95	20,79	20,8	20,9	20,95	20,95		100,00	V				
			Data BPS														
			Data BPS														
INDIKATOR PROGRAM																	
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	%	n.a	13,71	27,42	41,12	13,71	4,46		16,25					V
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Fasilitasi					200	65							
				Jumlah Pelaku Usaha Informal					1459	1459							
		2	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	67	67	66,67	66,67		99,50	V				
				Jumlah Pasar dalam kondisi baik					4	4							
				Jumlah Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung					6	6							
		3	Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	n.a	1,5	2,41	3,33	1,55	1,77		73,35			V		
				Jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital					168	192							
				Jumlah pedagang di Pasar Daerah					10.861	10.861							
		4	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70	75	79,63	84,26	75,04	76,18		95,67	V				
				Jumlah pedagang yang patuh sesuai zonasi yang telah ditentukan					8.150	8.274							
				jumlah pedagang di Pasar Daerah					10.861	10.861							
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	68,41	70	75	80	95,08	49,59		66,12			V		
				Jumlah Laporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting					348	181							
				Jumlah Hari					366	365							

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
3	Program Pengembangan Ekspor	6	Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	n.a	1,15	2,31	3,46	2,56	2,56		100,00	V				
				Jumlah Pelaku Usaha Eksportir yang di Bina			1	1									
				Jumlah Pelaku Usaha Eksportir Di Kabupaten Temanggung			39	39	0								
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	7	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	95	98,37	99,41	99,42	101,10	26,52		26,67					V
				Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera ulang			6066	1591									
				Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)			6000	6000									
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	8	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	n.a	100	100	100	100	100,00		100,00	V				
				Jumlah Kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri yang difasilitasi			82	47									
				Jumlah Kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri Yang Diselenggarakan			82	47									
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						100,00	1	0	0	0	0	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				8	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						72,20	4	0	2	0	2	
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERDAGANGAN				9	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR BIDANG PERDAGANGAN						86,10	5	0	2	0	2	
JUMLAH TOTAL IKUPD				3	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						72,41	1	0	0	1	1	
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM				14	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						61,85	6	0	2	1	5	
JUMLAH TOTAL PERANGKAT DAERAH				17	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH						67,13	7	0	2	2	6	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi (ST) ada 7 terdiri dari:
 - a. Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Peningkatan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya
 - ✓ Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan koperasi
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Banyak koperasi yang tidak ditemukan alamatnya
 - ✓ Pengurus, pengelola, dan pengawas internal koperasi yang sudah tidak ada
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Pemetaan koperasi sesuai dengan peringkatnya
 - ✓ Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan
 - b. Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Adanya beberapa kegiatan yang memerlukan pendataan UMKM walaupun tidak secara menyeluruh
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Tidak adanya anggaran yang memadai untuk melakukan pendataan secara sistematis menghambat proses pembaharuan informasi terkait data UMKM
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Berkoordinasi antarinstansi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data UMKM.
 - ✓ Melibatkan komunitas atau grup UMKM dalam untuk mengajak anggotanya berpartisipasi dalam pendataan
 - c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ UMK Temanggung menarik peminat Pelaku Usaha Eksportir untuk Pengembangan Usaha di Kabupaten

Temanggung

- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Dinkopdag Tidak menghitung sendiri angka PDRB
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Optimalisasi kegiatan dengan dana mandiri atau fasilitasi dari Provinsi atau Pusat
- d. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Adanya program pemerintah untuk melaksanakan pemeliharaan rutin Pasar Daerah
 - ✓ Adanya partisipasi dari pedagang untuk menjaga sarana prasarana Pasar Daerah
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pemeliharaan Pasar Daerah secara menyeluruh
 - ✓ Belum adanya revitalisasi terhadap bangunan Pasar Daerah yang telah berumur
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Pasar Daerah berdasarkan skala prioritas kerusakan
 - ✓ Mengajukan usulan anggaran untuk revitalisasi bangunan Pasar Daerah yang telah rusak berat
- e. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Adanya penertiban pedagang secara rutin di Pasar Daerah
 - ✓ telah dilakukan pemasangan papan zonasi yang jelas di gangway Pasar Daerah
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Kurangnya petugas keamanan untuk melakukan pengawasan secara terus menerus
 - ✓ Kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati lokasi berdagang sesuai zonasi peruntukannya
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Bekerja sama dengan OPD terkait untuk melaksanakan penertiban pedagang dan

- pengawasan secara berkala
- ✓ Menyediakan lokasi berdagang yang representatif agar pedagang berjualan sesuai zonasi peruntukannya
- f. Cakupan pelaku usaha yang di bina
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Kesadaran pelaku usaha akan kebutuhan perluasan pasar.
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha dalam upaya perluasan pasar.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Mengikutsertakan dan mendorong pelaku usaha untuk mengikuti kurasi untuk Kegiatan Pengembangan Ekspor yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
- g. Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Animo Pelaku Usaha untuk mengikuti Promosi Produk Dalam Negeri Sangat Tinggi
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Terbatasnya anggaran khusus untuk Kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Mengupayakan Kegiatan promosi dengan anggaran mandiri atau kegiatan yang didanai oleh Provinsi dan Pusat
2. Capaian indikator dengan status Sedang (S) ada 2 terdiri dari:
- a. Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Adanya pelatihan transaksi digital bagi pedagang Pasar Daerah
 - ✓ Dukungan dari perbankan untuk fasilitasi penggunaan aplikasi dan Qris dalam transaksi digital
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- ✓ Kurangnya kesadaran beberapa pedagang yang terbiasa menggunakan transaksi tunai
 - ✓ Jaringan internet di beberapa lokasi Pasar Daerah tidak stabil dan kurang memadai
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Pengenalan kepada pedagang Pasar Daerah untuk menggunakan transaksi digital
 - ✓ Meningkatkan jaringan internet di Pasar Daerah
 - ✓ Bekerja sama dengan Perbankan untuk memfasilitasi pembuatan Qris secara gratis
- b. Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Ketepatan waktu pelaporan hasil pemantauan harga.
 - ✓ Fasilitasi sarana pelaporan bagi petugas pantau.
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Petugas pantau yang ada mempunyai tugas rutin lainnya yang harus dilaksanakan setiap hari.
 - ✓ Tidak tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Melakukan pemantauan dan pelaporan harga secara rutin dan tepat waktu.
 - ✓ Melaksanakan rapat koordinasi bagi para petugas pantau dan kontributor.
3. Capaian indikator dengan status Rendah (R) ada 2, yaitu:
- a. Persentase UMKM yang difasilitasi (indikator sasaran sekaligus indikator program)
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Pengusaha mikro yang ingin menjual di marketplace, toko modern, atau ekspor seringkali membutuhkan bukti kepemilikan merek.
 - ✓ Biaya pengajuan merek yang menjadi lebih ringan jika menggunakan Surat Keterangan UMKM Binaan dari Dinas
 - ✓ Dukungan kegiatan dari pihak eksternal terkait

penyelenggaraan sosialisasi

- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Minimnya kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mengikuti program yang telah disediakan
 - ✓ Anggaran yang terbatas untuk program fasilitasi, seperti pelatihan.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Melibatkan komunitas atau grup UMKM untuk membantu menyebarkan informasi tentang program fasilitasi
 - ✓ Selalu menyebarkan informasi terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik sosialisasi maupun pelatihan secara luring atau daring.
4. Capaian indikator dengan status Sangat Rendah (SR) ada 6 terdiri dari:
- a. Persentase Koperasi Sehat (indikator sasaran sekaligus indikator program)
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Telah dilaksanakan pemetaan koperasi sesuai dengan jenis koperasi
 - ✓ Terdapatnya laporan keuangan koperasi yang rutin
 - ✓ Adanya pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Kurangnya SDM Pengawas koperasi
 - ✓ Terdapat koperasi yang tidak rutin membuat laporan dan mengirimkan ke Dinas
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan
 - ✓ Penjadwalan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang belum rutin membuat laporan keuangan dan mengirimkan ke Dinas
- b. Persentase Fasilitasi Pelaku Usaha Informal
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Adanya Sarana konsultasi dan Informasi untuk

- pengembangan usaha bagi Pelaku Usaha informal
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Tidak adanya Anggaran Kegiatan yang menunjang untuk Fasilitas
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Melaksanakan kegiatan layanan konsultasi dan penyuluhan dengan memanfaatkan SDM yang ada
- c. Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Pendataan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh koperasi
 - ✓ Pelaksanaan pelatihan bagi pengurus, pengelola dan pengawas internal koperasi
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Tahun 2025 tidak ada anggaran untuk melaksanakan pelatihan bagi pengurus, pengelola dan pengawas koperasi
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Melakukan pembinaan tentang aturan-aturan terbaru tentang perkoperasian
- d. Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Pendataan Koperasi tidak aktif
 - ✓ Mendorong koperasi yang tidak aktif untuk kembali aktif dengan cara menjalankan usaha koperasi
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Banyak koperasi yang tidak ditemukan alamatnya
 - ✓ Pengurus, pengelola dan pengawas koperasi yang sudah tidak ada
 - ✓ Proses pembubaran koperasi sangatlah rumit, dan bukan Dinas yang membubarkan akan tetapi Dias hanya mengusulkan ke Kemenkop dan yang akan membubarkan adalah dari Kemenkumham
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Melakukan pemetaan koperasi yang tidak aktif

- ✓ Melakukan kunjungan ke koperasi yang tidak aktif
 - ✓ Melakukan koordinasi dengan desa dan warga setempat
 - ✓ Mengusulan pembubaran koperasi yang tidak aktif ke Kemenkumham
- e. Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - ✓ Adanya kegiatan pengamatan, pengawasan dan sosialisasi kepada wajib tera
 - ✓ Meningkatnya kesadaran wajib tera akan pentingnya tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - ✓ Sosialisasi belum menyeluruh kepada wajib tera
 - ✓ Anggaran yang terbatas untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang ke lokasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya milik wajib tera berada/terpasang (Pelayanan Jemput Bola)
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada wajib tera tentang pentingnya tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
 - ✓ Melakukan Kegiatan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kantor, Pasar Daerah maupun Desa, SPBU, Gudang-Gudang, CV, PT dan Tempat lain yang memiliki alat UTTP

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang koperasi dan UMKM serta Data Pokok Bidang Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang koperasi dan UMKM
 - a. Persentase koperasi sehat
 - b. Persentase UMKM yang difasilitasi

- c. Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat
 - d. Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif
 - e. Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan
 - f. Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan
- Realisasi indikator bidang koperasi dan UMKM tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Realisasi indikator bidang koperasi dan UMKM
Kabupaten Temanggung, Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Koperasi Sehat	7,35	15,09	28,18	15,15	13,33
2	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92	1,39	2,034	1,39	0,59
3	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	na	na	na	80,645	23,68
4	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	57,35	89,14	80,65	77,57	18,18
5	Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	na	na	0	0,43	0
6	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	na	na	100	100	100

2. Data Pokok Bidang Perdagangan
- a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
 - b. Persentase fasilitasi pelaku usaha informal
 - c. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik
 - d. Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital
 - e. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
 - f. Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting.

- g. Cakupan pelaku usaha yang di bina
- h. Cangkupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang
- i. Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri

Tabel 2.5

Realisasi indikator bidang perdagangan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,9	20,79	20,95	20,95	20,95
2	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	n.a	n.a	n.a	16,99	4,46
3	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
4	Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	n.a	n.a	n.a	1,55	1,77
5	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	29,59	62,28	70,34	73,93	76,18
6	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting	69,32	98,08	74,79	95,08	49,58
7	Cakupan pelaku usaha yang di bina	n.a	n.a	n.a	2,56	2,56
8	Cangkupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	79,02	100,95	95,82	100	26,52
9	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	n.a	n.a	n.a	100	100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat semua indikator yang diampu oleh DINKOPDAG sudah mencapai target semua. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana berikut:

- a. Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi masih lemah
- b. Banyaknya koperasi tidak aktif
- c. Minimnya skill/omset UMKM
- d. Belum optimalnya informasi tentang fluktuasi harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting
- e. Data Ekspor Impor belum maksimal
- f. Produk kabupaten Temanggung belum dapat menembus pasar nasional dan internasional
- g. Lemahnya daya saing sektor informal (pedagang kaki lima)
- h. Kondisi sarana dan prasarana perdagangan yang kurang memadai
- i. Pedagang pasar banyak melanggar waktu/zonasi yang telah ditentukan
- j. Pedagang belum sepenuhnya membayar sewa BMD
- k. Perlindungan konsumen belum tercapai secara merata

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM				16.970.262.781
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	15.020.984.031
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji pegawai negeri sipil, tunjangan tambahan penghasilan serta insentif retribusi daerah	14 Bulan	9.269.657.753
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	9.269.657.753
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	300.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya komponen instalasi listrik, alat tulis, cetak penggandaan, makan minum harian, dan rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	250.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000

HASIL PENETAPAN					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM				16.970.262.781
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	15.020.984.031
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji pegawai negeri sipil, tunjangan tambahan penghasilan serta insentif retribusi daerah	14 Bulan	9.269.657.753
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	9.269.657.753
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	300.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya komponen instalasi listrik, alat tulis, cetak penggandaan, makan minum harian, dan rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	250.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya anggaran Transport lokal perjalanan dalam daerah, jasa komunikasi, internet, air, listrik, peralatan perlengkapan kantor dan pembayaran honor sopir, tenaga keamanan dan kebersihan	12 Bulan	4.681.951.278
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	770.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.911.951.278
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan dan operasional, BBM, pajak, dan pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	519.375.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.625.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	358.750.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	13.000.000

HASIL PENETAPAN					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya anggaran Transport lokal perjalanan dalam daerah, jasa komunikasi, internet, air, listrik, peralatan perlengkapan kantor dan pembayaran honor sopir, tenaga keamanan dan kebersihan	12 Bulan	4.681.951.278
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	770.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.911.951.278
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan dan operasional, BBM, pajak, dan pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	519.375.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.625.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	358.750.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	13.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	12,25%	25.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabpaten/Kota sebanyak 35 Koperasi dalam 1 Tahun	50 Koperasi	25.000.000
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	75 Unit Usaha	25.000.000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	4,54%	50.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi bagi 180 SDM Koperasi	195 Orang	50.000.000

HASIL PENETAPAN					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	12,25%	25.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabpaten/Kota sebanyak 35 Koperasi dalam 1 Tahun	50 Koperasi	25.000.000
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	75 Unit Usaha	25.000.000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	4,54%	50.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi bagi 180 SDM Koperasi	195 Orang	50.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Temanggung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	50.000.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,25%	1.874.278.750
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Berkembangnya 60 usaha mikro dalam berproduksi	75 Usaha Mikro	1.874.278.750
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	136.278.750
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Kab. Temanggung	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 Unit Usaha	1.738.000.000
B	URUSAN PERDAGANGAN				2.251.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	67 % 2 % 1,71 %	1.936.000.000

HASIL PENETAPAN					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Temanggung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	50.000.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,25%	1.874.278.750
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Berkembangnya 60 usaha mikro dalam berproduksi	75 Usaha Mikro	1.874.278.750
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	136.278.750
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Kab. Temanggung	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 Unit Usaha	1.738.000.000
B	URUSAN PERDAGANGAN				2.251.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	67 % 2 % 1,71 %	1.936.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6 Pasar Daerah	1.911.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temanggung	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.911.000.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	25.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	25.000.000
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90%	80.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	292 laporan	50.000.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	50.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	30.000.000

HASIL PENETAPAN					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6 Pasar Daerah	1.911.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temanggung	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.911.000.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	25.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	25.000.000
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90%	80.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	292 laporan	50.000.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	50.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	30.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
			dengan Realisasi Minimal 90%		
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	30.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor	126276147 US\$	200.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk ekspor Unggulan yang Dibina	50 Pelaku Usaha	200.000.000
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	150.000.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha	50.000.000
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95%	35.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	100%	35.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Temanggung	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5700 Unit	35.000.000
	JUMLAH				19.221.262.781

HASIL PENETAPAN					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/ Satuan	Kebutuhan Dana
			dengan Realisasi Minimal 90%		
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	30.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor	126276147 US\$	200.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk ekspor Unggulan yang Dibina	50 Pelaku Usaha	200.000.000
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	150.000.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha	50.000.000
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95%	35.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	100%	35.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Temanggung	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5700 Unit	35.000.000
	JUMLAH				19.221.262.781

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Penelaahan usulan dari masyarakat dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Berikut program dan kegiatan usulan dari masyarakat:

Tabel 2.7

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kompleks Kecamatan Pringsurat	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	1 Gedung UMKM 14 Desa	737.000.000,00
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kelurahan Jurang (lapangan)	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Kurang lebih 16 kios	926.000.000,00

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, belum ada Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Tabel 2.8

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2025

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
NIHIL							

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, belum ada penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Tabel 2.9

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Tujuan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam Renstra oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2025-2029 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah, Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	Target kondisi
						2026	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	12,25	NA
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	4,54	NA
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	0,25	NA
		Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67
				Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	2	1,55
				Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	6,85	17
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	95,08
			Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	US\$	126.276.147	140.188.854
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95	100

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	Target kondisi
						2026	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	87,60	87,30
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	72,80	72,55

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2026			RKPD DINKOPDAG TAHUN 2026			(+/-)
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	15.170.984.031	A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	16.970.262.781	1.799.278.750
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.020.984.031	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.020.984.031	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.269.657.753		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.269.657.753	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.269.657.753		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.269.657.753	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.681.951.278		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.681.951.278	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	770.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	770.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.911.951.278		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.911.951.278	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.375.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.375.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.625.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.625.000	-

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2026			RKPD DINKOPDAG TAHUN 2026			(+/-)
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	358.750.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	358.750.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	-
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000	-
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000	-
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	-
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.000.000	3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.000.000	-
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	-
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	75.000.000	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.874.278.750	1.799.278.750
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	75.000.000		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.874.278.750	-
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	75.000.000		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	136.278.750	-
				Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	1.738.000.000	
B	URUSAN PERDAGANGAN	1.065.000.000	B	URUSAN PERDAGANGAN	2.251.000.000	1.186.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	900.000.000	5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.936.000.000	1.036.000.000

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2026			RKPD DINKOPDAG TAHUN 2026			(+/-)
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	900.000.000		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.911.000.000	-
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	90.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.911.000.000	-
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25.000.000		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25.000.000	-
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000	-
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.000.000	6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	80.000.000	-
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	50.000.000		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	50.000.000	-
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.000.000		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.000.000	-
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	-
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	-
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	50.000.000	7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	200.000.000	150.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	-
	Pameran Dagang Nasional	-		Pameran Dagang Nasional	150.000.000	-
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000	-
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	35.000.000	8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	35.000.000	-
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	35.000.000		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	35.000.000	-
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	35.000.000		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	35.000.000	-

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

	RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2026			RKPD DINKOPDAG TAHUN 2026		(+/-)
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	JUMLAH	16.235.984.031		JUMLAH	19.221.262.781	2.985.278.750

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp 2.985.278.750 (Dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Penambahan tersebut terjadi pada program antara lain;

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) bertambah sebesar Rp 1.799.278.750,- yang mana merupakan usulan musrenbang kecamatan tahun 2026
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan bertambah sebesar Rp 1.036.000.000,- karena termasuk kegiatan prioritas bupati
3. Program Pengembangan Ekspor sebesar Rp 150.000.000,- yang bersumber dari pokok pikiran (POKIR) DPRD

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung
Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan						19.221.262.781,00							18.830.637.781,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.970.262.781,00							16.704.637.781,00				
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						16.970.262.781,00							16.704.637.781,00				
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-			100 %	15.020.984.031,00						-	14.755.359.031,00				
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai negeri sipil, tunjangan tambahan penghasilan serta insentif retribusi daerah	-			14 Bulan	9.269.657.753,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	9.269.657.753,00				
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	9.269.657.753,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		9.269.657.753,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi	-	-	0,00				

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															birokrasi dan roadmap program prioritas									
	2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				150 Orang	300.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMLBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik, alat tulisi, cetak penggandaan, makan minum harian, dan rapat koordinasi ke luar daerah	-			12 Bulan	250.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	250.000.000,00					
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	120.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua	DANA ALOKASI	-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,				

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
													Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas				MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran Transport lokal perjalanan dalam daerah, jasa komunikasi, internet, air, listrik, peralatan perlengkapan kantor dan pembayaran honor sopir, tenaga keamanan dan kebersihan	-			12 Bulan	4.681.951.278,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	4.681.951.278,00		
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	770.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.911.951.278,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		3.881.951.278,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan dan operasional, BBM, pajak, dan pemeliharaan gedung kantor	-			12 Bulan	519.375.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	553.750.000,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	77.625.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															program prioritas									
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	358.750.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		358.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	13.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
2	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	-			12,25%	25.000.000,00						-	25.000.000,00					
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan.	-			50 Koperasi	25.000.000,00			-	Penguatan Landasan	-	-	25.000.000,00					

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 35 Koperasi dalam 1 Tahun								Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas									
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				75 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
3	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	-			4,54%	50.000.000,00						-	50.000.000,00					
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapsitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi bagi 180 SDM Koperasi	-			195 Orang	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	50.000.000,00					
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															birokrasi dan roadmap program prioritas					
4	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	-			0,25%	1.874.278.750,00					-	1.874.278.750,00		
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Berkembangnya 60 usaha mikro dalam berproduksi	-			75 Usaha Mikro	1.874.278.750,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	1.874.278.750,00	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	136.278.750,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		136.278.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				90 Unit Usaha	1.738.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		1.738.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															program prioritas					
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.251.000.000,00							2.126.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.251.000.000,00							2.126.000.000,00	
5	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	-			67 % 2 % 6,85 %	1.936.000.000,00					-		1.961.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	-			6 Pasar Daerah	1.911.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	1.936.000.000,00	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	1.911.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		1.936.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	25.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	25.000.000,00	

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															program prioritas									
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
6	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	-			90%	80.000.000,00						-	80.000.000,00					
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-			292 laporan	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	50.000.000,00					
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran	-			12 Laporan	30.000.000,00			-	Penguatan Landasan	-	-	30.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%								Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas								
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
7	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	-			126276147 US\$	200.000.000,00						-	50.000.000,00				
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk ekspor Unggulan yang Dibina	-			50 Pelaku Usaha	200.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	50.000.000,00				
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				50 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			

RENJA 2026| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															roadmap program prioritas						
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan															
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				20 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
8	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	-			95%	35.000.000,00						-	35.000.000,00		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	-			100 %	35.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	35.000.000,00		
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang															
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				5700 Unit	35.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	J U M L A H											19.221.262.781,00								18.830.637.781,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan RPJMD dan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 15.744.329.487,00 (96,52%), realisasi Belanja Modal sebesar 315.841.121,00 (92,89%), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 7.066.867.261(45,07%), realisasi Belanja Modal sebesar 0,00(0%) karena masih dalam proses pengadaan dan masih berjalan sehingga dapat dikatakan kinerja dalam semester I cukup baik karena sudah sesuai dengan target semesteran.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 19.221.262.781,- yang terdiri dari 8 program antara

lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh), Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009



RENJA 2026

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

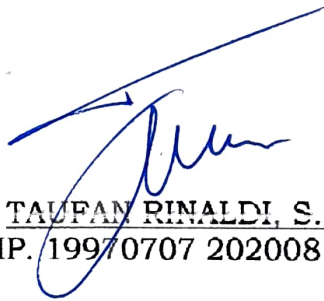
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : **31 Juli 2025**

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



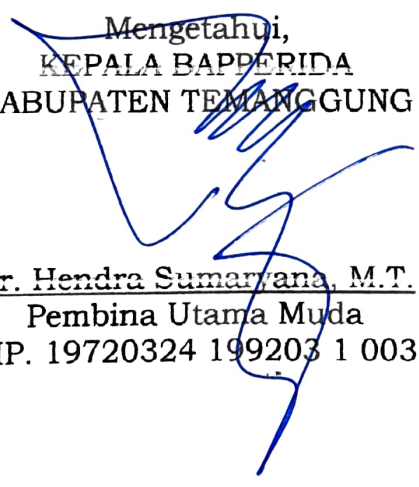
EWIEK KHAVIDA, S.STP,MM
NIP.19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



TAUFAN RINALDI, S.STP
NIP.19970707 202008 1 003

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. Hendra Sumaryana, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinpermades untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung, Renja mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas wewenang Dinpermades dan tindak lanjut dari Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029.

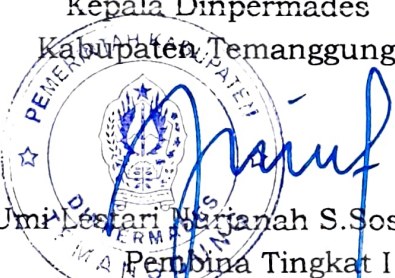
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Harjanah S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP.19660608 199603 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ...	1
1.2. Landasan hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	105
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	110
BAB V PENUTUP	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Tahun 2024.....	15
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan II Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung.....	33
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026.....	91
Tabel 2.6.	Usulan program dan kegiatan masyarakat.....	102
Tabel 2.7.	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2024-2025.....	102
Tabel 2.8.	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025.....	104
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	107
Tabel 4.1.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2026.....	111
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2026.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

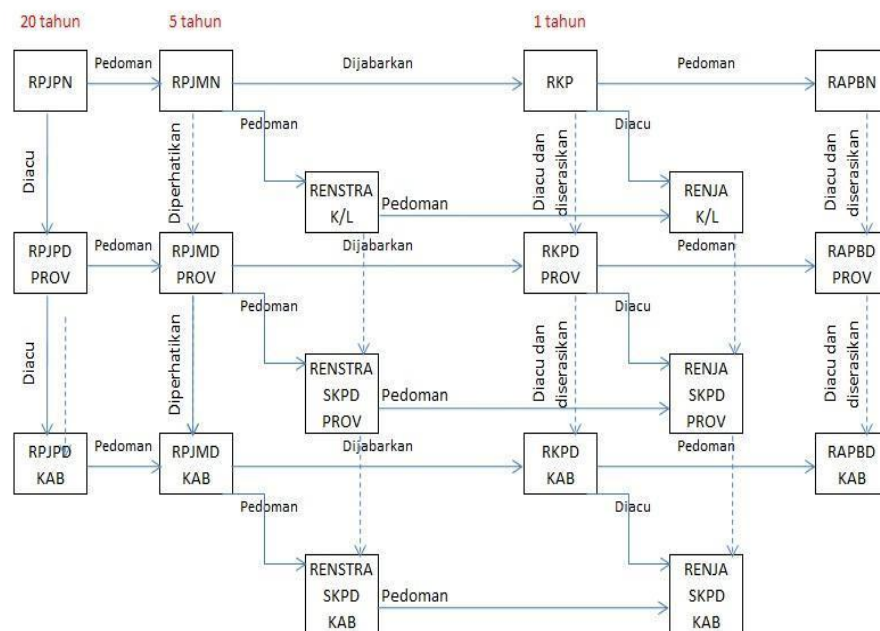
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinpermades Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinpermades Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinpermades, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinpermades;
- 2) Kondisi pelayanan Dinpermades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinpermades;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinpermades;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinpermades;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinpermades adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinpermades.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis

indikator dalam Renstra Dinpermades untuk kondisi tahun 2024-2026;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinpermades.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun lalu berdasarkan renstra Dinpermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinpermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinpermades;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinpermades;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinpermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian Kinerja Renstra Dinpermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermades;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades;
 - 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades;
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinpermades.
- Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:
- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
 - b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermades.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinpermades;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinpermades Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinpermades

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinpermades 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades
s.d Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					100	3.653.362.609	3.460.744.179	75	3.347.660.289	75	96,73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	bulan	12	2.895.771.018	12	2.922.988.609	2.799.486.939	12	2.711.545.708	100	96,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	4.000.000	12	4.000.000	100	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	20.000.000	12	50.000.000	76.000.000	12	69.100.000	100	90,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	24.000.000	12	23.997.200	100	99,99

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12.000.000	12	5.000.000	12.000.000	12	12.000.000	100	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan	12	30.000.000	12	25.000.000	50.000.000	12	49.624.400	100	99,25
	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	70.000.000	12	50.000.000	64.618.000	12	64.333.800	100	99,56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	2.000.000	12	1.991.500	100	99,58
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	bulan	12	20.176.116	12	17.000.000	19.000.000	12	18.411.304	100	96,90

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan	12	10.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	4.982.750	100	99,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan	12	156.195.000	12	386.256.000	299.639.240	12	286.881.127	100	95,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	80.000.000	12	75.796.500	100	94,75
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	12	30.000.000	12	67.500.000	25.000.000	12	24.996.000	100	99,98

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	PROGRAM PENATAAN DESA						25.000.000	15.000.000		13.189.500		87,93
		Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	70		50			100		100	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan san Penutupan TMMD Sengkuyung I, II,III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kodim 0706	unit		10.000.000	5	15.000.000	15.000.000	5	13.189.500	100	87,93

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						25.000.000	3.848.000.000		3.783.457.212		98,32
		Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	70		50			83, 46		100	
		Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	100		100			100		100	
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	90		70			71, 80		100	
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	41		37			89, 42		100	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	40,6		38,3 4			62, 41		100	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa,	desa		10.000.000	266	20.000.000	20.000.000,00	266	17.221.000	100 ,00	86,11
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	desa		20.000.000	266	22.000.000	10.000.000,00		9.613.000		96,13
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang		50.000.000	30	30.000.000	15.000.000,00	30	14.964.000	100 ,00	99,76
	Fasilitasi Pangangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan	desa		3.752.133.848	55	3.363.000.000	3.783.000.000 ,00	63	3.721.672.712	100 ,00	98,38

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa										
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokum en			266	20.000.000	20.000.000,00	266	19.986.500	100 ,00	99,93
D	PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							523.500.000,0 0		521.366.770,0 0		99,59
		Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD)	%	5		3,7			21, 43		100	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	60		50			22, 87		45, 74	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa		20.000.000	10	30.000.000	30.000.000,00	10	29.972.500	100,00	99,91
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	desa			6	40.000.000	55.000.000,00	6	54.079.000	100,00	98,33

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya										
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokum en		25.000.000	55	30.000.000	38.500.000,00	55	38.480.600	100 ,00	99,95
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	kecam atan		100.000.000	20	200.000.000	400.000.000,0 0	20	398.834.670	100 ,00	99,71
	JUMLAH							7.847.244.179		7.665.673.771		97.68

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades
s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100			27	848.342.636	52	1.724.879.848	52	42,47
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	orang/bula n			12	3.431.745.205	3.431.745.205	3	759.474.065	6	1.531.935.285	50	44,64
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket/Lapo ran			6	4.000.000	4.000.000	3	53.000	3	53.000	50	1,33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Paket/Lapo ran			7	24.000.000	24.000.000	1	305.000	1	305.000	14	1,27
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Paket/Lapo ran			1	12.000.000	12.000.000	3	156.500	3	156.500	30	1,30

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	Paket/Lapo ran			4	37.000.000	37.000.000	2	2.281.400	3	3.065.200	75	8,28
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Paket/Lapo ran			1	65.000.000	65.000.000	0	10.355.400	0	16.507.400	-	25,40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Laporan			4	2.000.000	2.000.000	2	54.000	2	54.000	50	2,70
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	Laporan			4	20.000.000	20.000.000	2	3.869.478	3	7.105.368	75	35,53
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	Laporan			4	8.000.000	8.000.000	1	482.000	1	482.000	25	6,03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	Laporan			12	288.621.800	288.621.800	3	46.175.793	6	136.021.095	50	47,13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	unit			22	85.000.000	85.000.000	5	23.936.000	6	27.995.000	27	32,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	unit			2	20.000.000	20.000.000	1	1.200.000	1	1.200.000	50	6,00
	PROGRAM PENATAAN DESA		%					15.000.000		2.089.000,00		2.224.000,00		
	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa					60			25		25			
	Penyelenggaraan Penataan Desa													
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan san Penutupan TMMD Sengkuyung I, II,III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kodim 0706	unit			5	15.000.000	15.000.000	2	2.089.000	2	2.224.000	40	14,83

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							3.575.000.000		906.897.020		1.811.731.420		
	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES		%			60					24,8		25	
	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa		%			100					100		100	
	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD		%			80					93,2		93,2	
	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa		%			39					100		100	
	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa		%			39,4 7					86,1		100	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		desa			266	25.000.000	25.000.000		2.480.700,00	55	4.195.700	20,6 8	16,78
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa			266	3.550.000.000	3.550.000.000		904.416.320,00	100	1.807.535.720	48,8 7	50,92

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									14.552.800,0 0		22.177.800,00		
	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)					4					21,4 3		100, 00	
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum					55					25,5 8		42,0 2	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000	30.000.000	20	1.175.000	25	8.800.000	45,4 5	29,33

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				55	200.000.000	200.000.000	5	13.377.800	5	13.377.800	25	6,69

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Program penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
 - b. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - e. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - f. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
 - g. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- h. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat
 - i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - j. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dgn sub kegiatan tidak ada.
 4. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program, masih ada 1 Program yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang belum tercapai 100% karena Faktor Penghambat : Proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa
 5. Rekomendasi tindaklanjut : Meningkatkan komunikasi dengan Kemendes terkait pendafaran BUMDes yang belum turun sertifikasi badan hukumnya, sebanyak 85 BUMDes
 6. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dgn sub kegiatan, tidak ada.
- Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang

ptimbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Sangat Baik*** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran ***“Meningkatnya Masyarakat Berbasis Pemberdayaan”*** telah mencapai 100%.

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinpermades dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinpermades Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2024	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
1	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewen angan desa	%	n.a	50	60	70	100	25		41,67					v
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	8	9	11	100	100		100	v				
3	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	100	50	60	70	83,46	50		83,33		v			
4	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	n.a	100	100	100	100	100		100	v				
5	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	n.a	70	80	90	71,80	60,90		76,13		v			
6	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	37	39	41	89,42	77,88		100	v				

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

7	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	36,84	38,34	39,47	40,6	62,41	46,24		100	v				
8	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	n.a	3,7	4	5	21,43	21,43		100	v				
9	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	n.a	50	55	60	22,87	29,26		53,84				v	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **sangat tinggi** ada 5 terdiri dari:
 - a. Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa
 - b. Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masa Jabatan Kades diperpanjang 2 tahun, yang semula pada Tahun 2024 ada 14 desa yang masa jabatannya habis maka ditunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan Tahun 2026
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (masa jabatan Kades diperpanjang 2 tahun)
 - c. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah kewajiban pengisian Evaluasi Perkembangan Desa yang ditetapkan oleh Kemendagri
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah kualitas data dalam pengisian evaluasi belum memenuhi syarat untuk menjadi desa berkembang
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah kualitas data dalam pengisian evaluasi belum memenuhi syarat untuk menjadi desa berkembang
- d. Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Telah ditetapkan peraturan bupati No.51 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - Sosialisasi kepada Kecamatan sdh dilaksanakan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum adanya Pemahaman akan kewajiban Desa untuk menyusun Perdes tentang LKD
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah optimalisasi pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi penyusunan perdes

2.2.2 Data Pokok

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

1. Persentase desa yang ber predikat Mandiri
 Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai:
(Pedidikan; Perkantoran; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah

m. Adanya aturan-aturan desa

n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia:
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam:
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar:
 - a) Produk yg dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Rumus dari penghitungan Persentase desa yang berpredikat Mandiri yaitu Jumlah desa yang berpredikat Mandiri dibagi Jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2025 Triwulan II

No	Kondisi Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Mandiri	10	15	26	55	101	101
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	3,76	5,63	9,77	20,68	37,97	37,97

Sumber data : Dinpermades 2025

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa data IDM pada Triwulan II Tahun 2025 adalah data Triwulan IV Tahun 2024 karena data IDM diolah pada pertengahan tahun sehingga pada Triwulan ketiga data selesai di input dan diolah yang akan memunculkan persentase desa yang berpredikat mandiri.

Tabel. 1.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2025

No	Kondisi Desa	2025
1	Desa Mandiri	101
2	Desa Maju	139
3	Desa Berkembang	26
4	Desa Tertinggal	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa

Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, dan pada Tahun 2023 jumlah Desa Mandiri ada 55 desa, sedangkan Tahun 2024 pada Triwulan IV ini ada 101 Desa yang sudah berstatus Mandiri dan untuk Tahun 2025 ini data olahan akan muncul di Triwulan III sehingga untuk pelaporan pada Triwulan II ini masih menggunakan data tahun sebelumnya., Adapun nama desa Mandiri tersebut antara lain

Tabel. 1.1.2
Nama desa berdasarkan status Desa Mandiri

No	Kecamatan	Desa	Status
1	BULU	BULU	Mandiri
2		TEGALURUNG	Mandiri
3		CAMPURSARI	Mandiri
4		TEGALREJO	Mandiri
5		GONDOSULI	Mandiri
6		NGIMBRANG	Mandiri
7		DANUPAYAN	Mandiri
8		MONDORETNO	Mandiri
9		PANDEMULYO	Mandiri
10		PAKUREJO	Mandiri
11		WONOSARI	Mandiri
12	TEMBARAK	TEMBARAK	Mandiri
13		MENGGORO	Mandiri
14	TEMANGGUNG	JOHO	Mandiri
15	PRINGSURAT	KEBUMEN	Mandiri
16		REJOSARI	Mandiri
17		NGIPIK	Mandiri
18		PINGIT	Mandiri
19		NGLOROG	Mandiri
20	KALORAN	KALORAN	Mandiri
21		TEGOWANUH	Mandiri
22		TEPUSEN	Mandiri
23	KANDANGAN	KANDANGAN	Mandiri
24		NGEMPLAK	Mandiri

No	Kecamatan	Desa	Status
25		KEDUNGUMPUL	Mandiri
26		ROWO	Mandiri
27		TLOGOPUCANG	Mandiri
28	KEDU	KEDU	Mandiri
29	PARAKAN	WANUTENGAH	Mandiri
30		NGLONDONG	Mandiri
31		DANGKEL	Mandiri
32		TEGALROSO	Mandiri
33		TRAJI	Mandiri
34		DEPOKHARJO	Mandiri
35	NGADIREJO	NGADIREJO	Mandiri
36		GONDANGWINANGUN	Mandiri
37		GANDUWETAN	Mandiri
38		NGAREN	Mandiri
39		MANGUNSARI	Mandiri
40		PURBOSARI	Mandiri
41		CAMPURSARI	Mandiri
42		TEGALREJO	Mandiri
43		GIRIPURNO	Mandiri
44		KATEKAN	Mandiri
45		BANJARSARI	Mandiri
46		MEDARI	Mandiri
47		KARANGGEDONG	Mandiri
48		PETIREJO	Mandiri
49		GEJAGAN	Mandiri
50	JUMO	JUMO	Mandiri
51		GUNUNGGEKPOL	Mandiri
52		BARANG	Mandiri
53		KETTANG	Mandiri
54	CANDIROTO	CANDIROTO	Mandiri
55		LEMPUYANG	Mandiri
56		BANTIR	Mandiri
57		KRAWITAN	Mandiri
58		BATURSARI	Mandiri
59		MUNENG	Mandiri
60		PLOSOGADEN	Mandiri
61	KRANGGAN	BADRAN	Mandiri
62		BENGKAL	Mandiri
63		PARE	Mandiri
64		SANGGRAHAN	Mandiri
65	TLOGOMULYO	TLOGOMULYO	Mandiri
66		CANDISARI	Mandiri
67		SRIWUNGU	Mandiri
68		TANJUNGSARI	Mandiri
69		KEROAN	Mandiri
70		TLILIR	Mandiri
71	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	Mandiri
72		KACEPIT	Mandiri

No	Kecamatan	Desa	Status
73		GAMBASAN	Mandiri
74		KEBONAGUNG	Mandiri
75		BAGUSAN	Mandiri
76	BANSARI	BANSARI	Mandiri
77		MOJOSARI	Mandiri
78		REJOSARI	Mandiri
79		GUNUNGSARI	Mandiri
80		MRANGGEN KIDUL	Mandiri
81		CAMPURANOM	Mandiri
82		GENTINGSARI	Mandiri
83		TANUREJO	Mandiri
84		KALIREJO	Mandiri
85	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	Mandiri
86		TLAHAB	Mandiri
87		PETARANGAN	Mandiri
88		CANGGAL	Mandiri
89		JAMBU	Mandiri
90		KRUWISAN	Mandiri
91		BATURSARI	Mandiri
92	BEJEN	BEJEN	Mandiri
93		JLEGONG	Mandiri
94		CONGKRANG	Mandiri
95		SELOSABRANG	Mandiri
96	WONOBOYO	WONOBOYO	Mandiri
97		KEBONSARI	Mandiri
98		SEMEN	Mandiri
99		WONOCOYO	Mandiri
100		REJOSARI	Mandiri
101	GEMAWANG	GEMAWANG	Mandiri

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa Mandiri di Kabupaten Temanggung tersebar pada 19 Kecamatan sedangkan 1 kecamatan masih belum ada yang Mandiri yaitu Kecamatan Tretep.

Faktor Pendorong tercapainya target yaitu meningkatnya kesadaran pemerintah desa melalui pendampingan yang intens dalam memenuhi 3 faktor indikator IDM yaitu meningkatnya Indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Adapun Faktor penghambatnya yaitu bahwa belum semua desa memenuhi syarat untuk menjadi desa Mandiri karena 3 indikator IDM yaitu Indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi tersebut masih rendah nilainya, Selain itu juga dikarenakan beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan memang belum tersedia di desa tersebut sehingga skore nilai menjadi rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk bisa meningkatkan persentase desa yang berpredikat Mandiri yaitu dengan cara sosialisasi ke Desa tentang arti pentingnya pemutakhiran data IDM dan mendorong desa untuk selalu aktif melakukan pemutakhiran data IDM, pendampingan input data, optimalisasi pemenuhan rekomendasi hasil verifikasi Kemendes terkait 3 indikator IDM.

INDIKATOR PROGRAM

2. Persentase Peraturan Desa tentang pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa

Peraturan desa tentang pungutan adalah salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mengatur tentang jenis, jumlah, dan cara pengenaan pungutan atau retribusi di wilayah desa. Peraturan ini dibuat berdasarkan kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan desa tentang pungutan merupakan instrumen penting dalam mengelola keuangan desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, penerapan peraturan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Rumus dari penghitungan Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan sesuai dengan kewenangan desa yaitu Jumlah Perdes yang tersusun dibagi jumlah desa yang merencanakan penyusunan Perdes dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Perdes yang telah tersusun di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan
yang sesuai dengan kewenangan desa (%)
Tahun 2025 Triwulan II

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perdes yang tersusun	n.a	n.a	n.a	n.a	177	2
2	Jumlah Desa yang merencanakan penyusunan Perdes	n.a	n.a	n.a	n.a	133	8
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100	25

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah desa yang merencanakan penyusunan Peraturan Desa dibanding dengan jumlah peraturan desa yang telah disusun tercapai 25% dari 8 desa yang merencanakan penyusunan Perdes baru 2 desa yaitu Desa Bansari Kecamatan Bulu dan Desa Gejagan Kecamatan Ngadirejo.

Faktor pendorong dari keberhasilan capaian target yang ditetapkan adalah dengan melakukan Sosialisasi dan Pendampingan tentang hal-hal yang menjadi kewenangan desa terutama terkait Perdes Pungutan.

Faktor penghambatnya yaitu bahwa Desa belum sepenuhnya paham apa saja yang boleh dijadikan obyek pungutan di desanya.

Upaya yang telah dilakukan adalah Evaluasi Peraturan Desa bersama bagian hukum.

Adapun Desa-desanya yang telah menetapkan Peraturan Desa Pungutan sampai dengan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Data Desa yang Menyusun Perdes

No	Kecamatan	Desa	Jenis
1	Bulu	Bansari	Perdes pungutas desa
2	Ngadirejo	Gejagan	Perdes pungutas desa

Sumber data : Dinpermades 2025

3. Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kerja sama antar-Desa dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan
- b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa maka dibentuk BKAD, yaitu badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. Dari kesepakatan tersebut maka menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES) adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Rumus dari penghitungan Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES adalah Jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES dibagi jumlah desa yang melaksanakan kerjasama desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3
Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Desa
dengan telah ditetapkan PERMAKADES (%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES	n.a	n.a	n.a	6	40	40
2	jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama desa	n.a	n.a	n.a	6	40	40
	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang melakukan Kerjasama antar Desa dengan telah menetapkan PERMAKADES pada Triwulan II Tahun 2025 ini masih menggunakan data Tahun 2024 Triwulan IV yaitu ada 40 Desa sudah tercapai 100%, 40 desa itu terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedu 14 desa, Kecamatan Kledung 13 Desa dan Kecamatan Jumo 13 desa.

Faktor pendorong adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.

Kerjasama antar desa merupakan hal yang penting untuk memperkuat hubungan antar wilayah, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa faktor pendorong kerjasama antar desa:

1. **Ketergantungan Sumber Daya:** Desa-desa seringkali saling bergantung satu sama lain dalam hal sumber daya seperti air,

tanah, atau sumber daya manusia. Ketergantungan ini dapat menjadi pendorong alami untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bersama-sama.

2. **Permasalahan Bersama:** Adanya permasalahan atau tantangan yang sama di beberapa desa dapat mendorong kerjasama antar desa untuk mencari solusi bersama. Misalnya, masalah terkait dengan irigasi, pengelolaan sampah, atau akses terhadap layanan kesehatan.
3. **Potensi Ekonomi:** Desa-desa yang saling berdekatan seringkali memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Kerjasama antar desa dalam hal pengembangan usaha pertanian, pariwisata, atau kerajinan dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran bersama.
4. **Kesamaan Budaya dan Tradisi:** Kesamaan budaya dan tradisi antar desa dapat menjadi fondasi untuk membangun kerjasama yang kuat. Ini dapat tercermin dalam kegiatan-kegiatan budaya bersama, pertukaran pengalaman, atau pembangunan infrastruktur keagamaan.
5. **Kehadiran Infrastruktur Penting:** Adanya infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, atau saluran irigasi yang melintasi beberapa desa dapat menjadi dorongan untuk bekerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur tersebut.
6. **Inisiatif Pemerintah:** Dukungan dan insentif dari pemerintah daerah atau nasional dalam bentuk program-program pembangunan atau insentif keuangan dapat mendorong desa-desa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu.

7. **Kolaborasi dalam Penanganan Bencana:** Desa-desa yang berdekatan seringkali terpapar risiko yang sama terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Kolaborasi antar desa dalam persiapan dan penanganan bencana dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan desa terhadap bencana tersebut.
8. **Kesadaran akan Keuntungan Bersama:** Kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama antar desa dalam hal pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan keamanan dapat menjadi faktor pendorong utama. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kerjasama antar desa dapat memperkuat kesadaran ini.
9. **Adanya Jaringan Kerjasama dan Pertukaran Pengalaman:** Terbentuknya jaringan kerjasama antar desa atau forum pertukaran pengalaman antar desa dapat mendorong kolaborasi dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pengelolaan lingkungan, atau pengembangan pariwisata.

Dengan adanya faktor-faktor ini, kerjasama antar desa dapat semakin terjalin kuat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas.

Faktor penghambat desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa.

Meskipun kerjasama antar desa memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif antar desa. Berikut adalah beberapa faktor penghambat kerjasama antar desa:

1. **Persaingan dan Perselisihan Kepentingan:** Desa-desa seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan

persaingan antar desa dalam hal alokasi sumber daya atau proyek pembangunan tertentu dapat menghambat terbentuknya kerjasama.

2. **Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi:** Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau warga desa dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidakjelasan dalam penyaluran informasi dan ketidaksesuaian dalam rencana pembangunan dapat memperburuk situasi.
3. **Ketidakpercayaan dan Konflik Antar warga:** Adanya konflik personal, perbedaan pandangan, atau sejarah konflik antarwarga dari desa yang berbeda dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidakpercayaan antarwarga juga dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan kerjasama yang solid.
4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Desa-desa dengan sumber daya yang terbatas mungkin cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan internalnya sendiri, sehingga mengurangi motivasi untuk bekerja sama dengan desa lain.
5. **Ketidaksetaraan Akses dan Pemahaman:** Desa-desa yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya atau informasi, serta desa yang kurang dalam hal kapasitas pengelolaan, mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain yang lebih maju.
6. **Kurangnya Inisiatif dan Kepemimpinan:** Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama antar desa dapat menghambat terbentuknya hubungan kerjasama yang efektif.

7. **Faktor Geografis dan Infrastruktur:** Desa-desa yang terletak di daerah terpencil atau sulit diakses secara geografis mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain karena keterbatasan infrastruktur dan transportasi.
8. **Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Mendukung:** Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung kerjasama antar desa, seperti adanya pembatasan dalam penggunaan dana desa untuk proyek bersama antar desa, dapat menjadi penghambat dalam upaya-upaya kolaborasi.
9. **Kesadaran dan Budaya Kolaborasi yang Rendah:** Kurangnya kesadaran akan manfaat kerjasama antar desa dan budaya kolaborasi yang rendah di antara masyarakat desa juga dapat menjadi faktor penghambat.

Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penghambat tersebut, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan membangun kerjasama yang lebih efektif antar desa.

Upaya yang telah dilakukan meningkatkan pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.

Untuk melakukan pendampingan dalam fasilitasi kerjasama antar desa, beberapa upaya konkret dapat dilakukan antara lain:

1. **Pendampingan:** Menugaskan pendamping desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan politik lokal untuk bekerja sama dengan desa-desa dalam memfasilitasi kerjasama. Pendamping ini dapat membantu masyarakat desa mengidentifikasi kepentingan bersama, menyelesaikan konflik, dan membangun keterampilan kerjasama.

2. **Pertemuan dan Diskusi Bersama:** Mengadakan pertemuan atau forum diskusi antar desa untuk membahas isu-isu bersama, berbagi pengalaman, dan merencanakan kerjasama dalam berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan ekonomi lokal.
3. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres kerjasama antar desa, untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi pendampingan sesuai kebutuhan.
4. **Pengembangan Rencana Kerja Bersama:** Mendorong desa-desa untuk mengembangkan rencana kerja bersama yang jelas dan terukur, yang mencakup prioritas pembangunan bersama, alokasi sumber daya, dan mekanisme kerjasama yang diatur.

Melalui upaya-upaya pendampingan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi kerjasama antar desa, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Tabel. 3.1
Data Desa yang telah melakukan Kerjasama antar Desa
dengan telah ditetapkan PERMAKADES

No.	Kecamatan	Uraian	Nomor	Tanggal
1.	Kedu	Peraturan Bersama Kepala Desa Bojonegoro, Kepala Desa Gondangawayang, Kepala Desa Ngadimulyo, Kepala Desa Karangtejo, Kepala Desa Candimulyo, Kepala Desa Kedu, Kepala Desa salamsari, Kepala desa Danurejo,	2 Tahun 2023	11 Desember 2023

		kepala Desa Mojotengah, Kepala Desa Kutoanyar, Kepala Desa Mergowati, kepala Desa Kundisari, kepala Desa Tegalsari, kepala Desa Bandunggede Tentang Pembentukan Badan Kerjasama antar Desa Kecamatan Kedu Kabupaten temanggung		
2.	Kledung	Peraturan Bersama Kepala Desa Kledung, Kepala Desa Batursari, Kepala Desa Jambu, Kepala Desa Kwadungan gunung, Kepala Desa Tkahab, Kepala Desa Jeketro, Kepala Desa Kwadungan jurang, Kepala Desa Paponan, Kepala Desa Kalirejo Kepala Desa Tuksari, Kepala Desa Petarangan, Kepala Desa Canggal Kepala Desa Kruwisan	1 Tahun 2024	11 Juni 2024
3.	Jumo	Peraturan Bersama Kepala Desa Morobongo, Kepala Desa Karangtejo, Kepala Desa Sukomarto, Kepala Desa Barang, Kepala Desa Padureso, Kepala Desa Kertosari, Kepala Desa Jumo, Kepala Desa Gedongsari, Kepala Desa Jamusan, Kepala Desa Gununggempol, Kepala Desa Giyono Kepala Desa Jombor, Kepala Desa Ketitang	2 Tahun 2024	Oktober 2024

Sumber data : Dinpermades 2025

4. Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES

Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis aset Desa meliputi

1. kekayaan asli milik Desa, meliputi:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Bangunan Desa;
 - e. Pelelangan hasil pertanian;
 - f. Mata air milik Desa;
 - g. Pemandian umum milik Desa; dan
 - h. lain-lain kekayaan asli milik Desa.
2. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. hasil kerjasama Desa; dan
6. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pentingnya pengelolaan aset desa dengan baik adalah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pengelolaan aset Desa meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pelaporan aset desa adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif terhadap aset desa. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pelaporan aset desa:

1. Inventarisasi Aset
 - a. Mengidentifikasi dan catat semua aset yang dimiliki oleh desa, termasuk tanah, bangunan, fasilitas umum, sumber daya alam, dan aset lainnya.
 - b. Melakukan pemetaan dan penilaian terhadap kondisi, lokasi, dan nilai aset secara periodik.
2. Penyusunan Daftar Aset
 - a. Menyusun daftar lengkap dari semua aset desa yang telah diidentifikasi, termasuk deskripsi detail, nilai, lokasi, dan kondisi aset.
 - b. mengklasifikasikan aset berdasarkan jenis dan tujuan penggunaannya.
3. Pembuatan Laporan Aset
 - a. Menyiapkan laporan aset desa yang mencakup semua informasi yang relevan, seperti inventarisasi, daftar aset, perubahan aset, dan evaluasi kondisi aset.
 - b. Memastikan laporan disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan pihak eksternal yang berwenang.
4. Verifikasi dan Validasi
 - a. Melakukan verifikasi terhadap semua data yang tercantum dalam laporan aset desa untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi.

- b. Memastikan bahwa laporan telah disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau lembaga pengawas desa.
5. Publikasi dan Akses Informasi
- a. Mempublikasikan laporan aset desa secara transparan kepada masyarakat desa dan pihak terkait lainnya, baik melalui media cetak maupun elektronik.
 - b. Memastikan bahwa informasi mengenai aset desa dapat diakses dengan mudah oleh publik untuk memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset.
6. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi dan penggunaan aset desa.
 - b. Mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset dan pertimbangkan perbaikan atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat desa.

Pelaporan aset desa merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan pemerintahan yang transparan di tingkat lokal. Dengan memastikan pelaporan yang akurat dan terpercaya, pemerintah desa dapat lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung telah melaksanakan desk aset kepada seluruh desa di Kabupaten Temanggung. Sehingga prosentase pengelolaan aset di desa se Kabupaten Temanggung yang sudah melaporkan asetnya pada tahun 2023 mencapai 100%.

Untuk Tahun 2024 ini indikator kinerja dalam pengelolaan aset diganti dengan Persentase kepatuhan pelaporan

Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES, dimana hasil indikator kinerja yang akan diperoleh dari capaian target kinerja dimaksud yaitu bahwa di desa tidak hanya kepatuhan pengelola aset dalam input di Aplikasi SIPADES tetapi juga sampai dengan Up dating data setiap ada perubahan terkait aset yang ada di desa.

Rumus dari penghitungan Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4
Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa
dalam Aplikasi SIPADES (%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah desa yang tertib mengelola aset	264	266	266	266	222	133
2	jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	99,24	100	100	100	83,46	50

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa yang tertib mengelola aset dengan mengisi aplikasi SIPADES sampai dengan Triwulan II ini ada 133 Desa atau 50%.

Faktor pendorong Kesadaran Pemerintah Desa untuk melaporkan aset Desa yang dimiliki.

Faktor penghambat karena belum semua Desa up date SIPADES versi 3.0 sehingga Desa masih menggunakan pelaporan secara manual.

Upaya yang telah dilakukan mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa agar selalu up date aset desa dan pelatihan/Bintek SIPADES Versi 3.0.

Tabel. 4.1
Jumlah desa yang tertib mengelola aset

	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	6
4	Kecamatan Tembarak	1
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	5
7	Kecamatan Kaloran	0
8	Kecamatan Parakan	11
9	Kecamatan Bansari	5
10	Kecamatan Kledung	12
11	Kecamatan Kedu	2
12	Kecamatan Bulu	17
13	Kecamatan Kandangan	13
14	Kecamatan Candirot	3
15	Kecamatan Bejen	13
16	Kecamatan Jumo	6
17	Kecamatan Gemawang	8
18	Kecamatan Tretep	3
19	Kecamatan Wonoboyo	0
20	Kecamatan Ngadirejo	0
	JUMLAH	133

Sumber data : Dinpermades 2025

5. Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka 14 Desa yang Kepala Desanya akan habis masa jabatannya pada bulan Desember tahun 2024 diperpanjang sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Oleh Karena itu Target Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sampai dengan Tahun 2025 ini sudah 100%.

6. Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD

Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu fungsi penting dari lembaga tersebut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengawasan tersebut:

1. Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa

Salah satu tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat, BPD dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

2. Menjamin Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi

BPD bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan perundang-

undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa.

Mereka melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa

Pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BPD dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan manfaat dan dampak positif dari penggunaan dana desa.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, BPD membantu meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD membantu memastikan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangannya.

5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Dengan memastikan penggunaan dana desa yang tepat dan efisien, BPD berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang berdampak positif bagi masyarakat desa.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Rumus dari penghitungan Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD adalah Jumlah laporan pengawasan oleh BPD dibagi jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 6
Persentase laporan pengawasan pengelolaan
keuangan desa oleh BPD (%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah laporan pengawasan oleh BPD	n.a	n.a	n.a	n.a	191	162
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	266	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	71,80	60,90

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD yaitu 60,90% atau 162 BPD telah membuat laporan walaupun hasilnya ada yang sudah sesuai 120 Desa dan tidak sesuai atau perlu perbaikan ada 42 desa.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh

BPD yaitu adanya keaktifan BPD dalam melaksanakan tupoksi, dengan BPD yang paham akan tupoksinya sehingga Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu fungsi penting dari lembaga tersebut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor penghambat dari tercapainya indikator kinerja diatas yaitu bahwa belum semua anggota BPD paham dan menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang maksimal, sehingga Laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa belum semua melaporkan.

Upaya yang telah dilakukan Mensosialisasikan tupoksi BPD dan membuat surat agar BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Tabel. 6.1
Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
oleh BPD

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	8
3	Kecamatan Kranggan	1
4	Kecamatan Tembarak	0
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	9
7	Kecamatan Kaloran	8
8	Kecamatan Parakan	10
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	8
11	Kecamatan Kedu	8
12	Kecamatan Bulu	10
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candirot	14
15	Kecamatan Bejen	12
16	Kecamatan Jumo	5

17	Kecamatan Gemawang	6
18	Kecamatan Tretep	3
19	Kecamatan Wonobojo	3
20	Kecamatan Ngadirejo	10
	JUMLAH	162

Sumber data : Dinpermades 2025

7. Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan tata usaha dan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
2. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Kesejahteraan
 - c. Seksi Pelayanan
3. Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara pengangkatan Perangkat Desa dan penataan antar Perangkat Desa. Rumus dari penghitungan Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa adalah Jumlah formasi Kekosongan yang terisi dibagi total jumlah formasi yang kosong tahun 2025 dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 7
Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa(%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah formasi Kekosongan yang terisi	n.a	n.a	n.a	n.a	93	88
2	total jumlah formasi yang kosong tahun 2024	n.a	n.a	n.a	n.a	104	113
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	89,42	77,8

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa pada Triwulan II ini telah tercapai 77,8%. Mekanisme pengisian kekosongan perangkat desa, melalui sebuah proses tahapan yaitu paling lama proses 2 (dua) bulan sejak kekosongan. Sehingga apabila terjadi kekosongan tidak bisa langsung diisi, karena ada tahapan pengisian yang harus dilalui, antara lain sosialisasi kekosongan, pembentukan panitia pengangkatan, penyusunan jadwal, pengumuman dan pendaftaran, penyaringan dan penjaringan, sampai dengan pelantikan. Sedangkan bila melalui mekanisme penataan antar Perangkat Desa perlu mendapat rekomendasi dari Camat.

Faktor pendorong dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait kekosongan formasi perangkat desa dan Desa Taat terhadap peraturan yang ada bahwa pengisian perangkat Desa maksimal diisi 2 bulan setelah kekosongan perangkat.

Faktor penghambat tahapan pengisian perangkat desa yaitu pada saat pelaksanaan ditunda karena ada keterbatasan anggaran apabila dalam 1 desa ada lebih dari 1 formasi kekosongan maka akan dilaksanakan setelah anggaran di usulkan dan akan dilaksanakan secara bersamaan, Belum teranggarkan karena kekosongan perangkat bukan karena purna tugas tetapi karena meninggal dunia.

Tabel. 7.1
Jumlah Desa yang telah melaksanakan
pengisian kekosongan perangkat desa

NO	KECAMATAN	DESA	FORMASI
1	KANDANGAN	KEDAWUNG	KADUS SIRANDU
2	KANDANGAN	GESING	KADUS SARANGAN
3	KANDANGAN	ROWO	KASI KESRA
4	KANDANGAN	ROWO	SEKRETARIS DESA
5	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	KADUS ROWO REJOSARI
6	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	KADUS TLOGOPUCANG UTARA
7	WONOBOYO	PATEKEN	KADUS PUSPO
8	WONOBOYO	PATEKEN	KASI PERENCANAAN
9	BANSARI	CANDISARI	KADUS BONGKOL
10	BANSARI	CANDISARI	KADUS TARUKAN
11	BANSARI	GENTINGSARI	KAUR PERENCANAAN
12	BANSARI	MOJOSARI	KASI KESRA
13	BANSARI	PURBOREJO	KASI KESRA
14	BANSARI	PURBOREJO	KADUS CEPIT
15	BANSARI	BANSARI	KAUR TU DAN UMUM
16	GEMAWANG	KARANGSENENG	KADUS SILEGOK
17	GEMAWANG	KALIBANGER	KADUS KALIBANGER
18	GEMAWANG	NGADISEPI	KADUS PELAHAN
19	JUMO	PADURESO	KADUS PIYUDAN
20	TEMBARAK	GREGES	SEKRETARIS DESA
21	TEMBARAK	GREGES	KAUR KEUANGAN
22	TEMBARAK	WONOKERSO	KADUS NGANDONGAN
23	TEMBARAK	WONOKERSO	KADUS WONOKERSO II
24	TEMBARAK	PURWODADI	KADU KEMIRI
25	TEMBARAK	TEMBARAK	SEKRETARIS DESA
26	TEMBARAK	JRAGAN	KASI PELAYANAN
27	TEMBARAK	DRONO	KASI PELAYANAN

NO	KECAMATAN	DESA	FORMASI
28	TLOGOMULYO	KEROKAN	KADUS KWADAKAN
29	TLOGOMULYO	SRIWUNGU	KASI PELAYANAN
30	TLOGOMULYO	CANDISARI	KADUS KREGAN
31	TLOGOMULYO	LEGOKSARI	KAUR TU DAN UMUM
32	TLOGOMULYO	LANGGENG	KAUR KEUANGAN
33	CANDIROTO	LEMPUYANG	KASI PELAYANAN
34	CANDIROTO	LEMPUYANG	KADUS PLAWANGAN
35	CANDIROTO	CANGGAL	KADUS JURANG
36	CANDIROTO	MENTO	KADUS MENTO TENGAH
37	CANDIROTO	CANDIROTO	KADUS DOTAKAN
38	CANDIROTO	GUNUNGPAYUNG	KAUR TU & UMUM
39	PRINGSURAT	KEBUMEN	KAUR PERENCANAAN
40	PRINGSURAT	KEBUMEN	KADUS KALIAMPO
41	PRINGSURAT	KARANGWUNI	KADUS KARANGWUNI
42	PRINGSURAT	KUPEN	KAUR PERENCANAAN
43	PRINGSURAT	SOROPADAN	KADUS BANGSARI
44	PRINGSURAT	SOROPADAN	KADUS KRAJAN III
45	PRINGSURAT	SOROPADAN	KAUR PERENCANAAN
46	PRINGSURAT	PINGIT	KADUS PINGIT DESA
47	TEMANGGUNG	LUNGGE	KASI KESRA
48	TEMANGGUNG	LUNGGE	KADUS LUNGGE UTARA
49	TEMANGGUNG	MUDAL	KADUS BENDAN
50	PARAKAN	DEPOKHARJO	KADUS BENDO
51	PARAKAN	TEGALROSO	KADUS TEGALWATU
52	PARAKAN	CAMPURSALAM	KAUR KEUANGAN
53	PARAKAN	NGLONDONG	KADUS KROYO
54	BEJEN	PRANGKOKAN	KASI PEMERINTAHAN
55	KEDU	KUTOANYAR	KADUS KEROKAN
56	KEDU	CANDIMULYO	KADUS NGIJINGAN
57	KEDU	CANDIMULYO	KAUR KEUANGAN
58	KEDU	MOJOTENGAH	KASI KESRA
59	KEDU	KEDU	KAUR TU DAN UMUM
60	KRANGGAN	BENGKAL	KADUS JETIS Cs
61	KRANGGAN	NGUWET	KADUS NGUWET
62	SELOPAMPANG	BUMIAYU	KAUR KEUANGAN
63	SELOPAMPANG	BUMIAYU	KADUS JEBENGAN
64	SELOPAMPANG	JETIS	KADUS JETIS II
65	SELOPAMPANG	KACEPIT	KASI PELAYANAN
66	SELOPAMPANG	KEBONAGUNG	KASI PELAYANAN
67	SELOPAMPANG	KEBONAGUNG	KASI KESRA

NO	KECAMATAN	DESA	FORMASI
68	SELOPAMPANG	BULAN	KADUS TLONDAN
69	SELOPAMPANG	GAMBASAN	KADUS GAMBASAN II
70	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	KAUR PERENCANAAN
71	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	KAUR TU DAN UMUM
72	NGADIREJO	MEDARI	SEKRETARIS DESA
73	NGADIREJO	GIRIPURNO	KADUS PRINGSEWU
74	NGADIREJO	PETIREJO	KAUR PERENCANAAN
75	KALORAN	TEMPURAN	KASI PEMERINTAHAN
76	KALORAN	KALORAN	KADUS KAMPUNG
77	KALORAN	KALORAN	KADUS DUKOH
78	KALORAN	TLOGOWUNGU	KAUR TU DAN UMUM
79	KALORAN	TLOGOWUNGU	KADUS DEPOK
80	KALORAN	TLOGOWUNGU	KADUS PENDEM
81	TRETEP	TEMPELSARI	KADUS SEKIDANG
82	KLEDUNG	BATURSARI	KASI PELAYANAN
83	KLEDUNG	TUKSARI	KADUS SANGKON
84	KLEDUNG	KALIREJO	KADUS BRANGKONGAN
85	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	KASI PELAYANAN
86	BULU	PUTAT	KAUR PERENCANAAN
87	BULU	PUTAT	KAUR TU DAN UMUM
88	BULU	PAKUREJO	KADUS PAGUTAN

Sumber data : Dinpermades 2025

8. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan,

Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ Desa Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ Desa Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja.

Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ Desa Berkembang

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau kabupaten dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Rumus dari penghitungan Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa adalah Jumlah Desa cepat berkembang dibagi Jumlah Desa dikali seratus persen.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 8
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)
Tahun 2025 Triwulan II

No	Kondisi Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	40	95	116	116	166	123
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
3	Persentase	15,03	35,71	43,61	43,61	62,41	46,24

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ada 123 desa cepat berkembang, atau 46,24%.

Faktor pendorong tercapainya target yaitu Pemerintah Desa sudah memahami kewajiban pengisian Evaluasi Perkembangan Desa yang ditetapkan oleh Kemendagri.

Faktor Penghambat yaitu kualitas data dalam pengisian evaluasi belum memenuhi syarat untuk menjadi desa berkembang.

Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi terkait peningkatan kualitas data yang akan diinput dalam aplikasi.

Berikut data jumlah desa yang cepat berkembang per Kecamatan :

Tabel. 8.1
Data Jumlah Desa yang Cepat berkembang
Per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa Cepat Berkembang
1	Temanggung	4
2	Tlogomulyo	10
3	Kranggan	3
4	Tembarak	0
5	Selopampang	8

6	Pringsurat	6
7	Kaloran	6
8	Parakan	14
9	Bansari	2
10	Kledung	2
11	Kedu	4
12	Bulu	11
13	Kandangan	4
14	Candiroto	7
15	Bejen	4
16	Jumo	1
17	Gemawang	10
18	Tretep	5
19	Wonoboyo	8
20	Ngadirejo	14
	JUMLAH	123

Sumber data : Dinpermades 2025

9. Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Jenis LKD terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPMD.

- Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah

masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

- Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok Dasa Wisma.
- Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan

aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

Rumus dari penghitungan Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah jumlah Perdes LKD yang ditetapkan dibagi jumlah Desa dikali seratus persen.

Sedangkan kondisi Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemsayarakat Desa di Kabupaten Temanggung sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 9
Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)%
Tahun 2025 Triwulan II

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perdes LKD yang ditetapkan	n.a	n.a	n.a	n.a	57	57
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	266	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	21,43	21,43

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 ini persentase Desa yang menetapkan Perdes tentang LKD sejumlah 21,43% atau 57 desa.

Faktor pendorong tercapainya target Telah di tetapkannya peraturan bupati No.51 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Sosialisasi kepada Kecamatan sudah dilaksanakan.

Faktor Penghambat tidak tercapainya target Belum adanya Pemahaman akan kewajiban Desa untuk menyusun Perdes tentang LKD.

Upaya pencapaian target kinerja dengan optimalisasi pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi penyusunan perdes.

Selain itu terdapat juga faktor yang mendukung sebagai berikut.

Faktor pendorong penyusunan peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain:

1. **Kebutuhan Masyarakat:** Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat untuk memiliki struktur formal yang mengatur kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa. Misalnya, untuk mengelola sumber daya, memfasilitasi pembangunan, atau memecahkan masalah-masalah lokal.
2. **Pembagian Peran dan Tanggung Jawab:** Luasnya manajemen pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan maupun ketertiban umum sehingga diperlukan peran dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan desa.
3. **Mendukung Demokrasi Lokal:** Meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi dan representasi masyarakat.
4. **Pengaturan Dana Desa:** Adanya dana desa atau sumber daya lain yang perlu dikelola dengan efisien dan transparan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk mengatur penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
5. **Perubahan Sosial dan Ekonomi:** Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi desa, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, atau perubahan dalam pola mata pencaharian, dapat

mendorong penyusunan peraturan untuk menyesuaikan lembaga kemasyarakatan desa dengan realitas baru.

6. **Tuntutan Hukum dan Regulasi:** Adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga perlu memiliki regulasi yang jelas tentang lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. **Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat:** Adopsi pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk memfasilitasi pendekatan tersebut.

Faktor penghambat dalam penyusunan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa antara lain:

1. **Ketidakpastian Hukum:** Ketidakjelasan atau keraguan mengenai kewenangan desa dalam mengatur lembaga kemasyarakatan desa dapat menjadi penghambat utama. Seperti apakah Linmas, Pokmas, Gapoktan dan sebagainya perlu dimasukkan dalam peraturan desa tentang LKD?.
2. **Kurangnya Kesadaran atau Pemahaman:** Kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya regulasi yang jelas untuk lembaga kemasyarakatan desa dapat menghambat upaya penyusunan peraturan. Ini bisa terjadi di antara para pemimpin desa, anggota lembaga kemasyarakatan, atau masyarakat umum.
3. **Konflik Kepentingan:** Adanya konflik kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh desa dapat menyulitkan proses penyusunan peraturan. Beberapa pihak mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan struktur dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa.

4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dapat menghambat kemampuan desa untuk menyusun peraturan yang komprehensif dan efektif. Desa mungkin tidak memiliki tenaga ahli yang memadai untuk membantu dalam proses penyusunan.
5. **Politik Lokal:** Dinamika politik lokal, termasuk persaingan kekuasaan antar tokoh desa atau kelompok politik, dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan menciptakan ketegangan atau konflik yang menghambat kerjasama.
6. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penyusunan peraturan dapat menyebabkan peraturan yang dihasilkan tidak mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
7. **Ketidakstabilan Sosial atau Konflik:** Lingkungan sosial yang tidak stabil atau adanya konflik internal di desa dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan mengalihkan perhatian dan sumber daya ke masalah-masalah yang mendesak.
8. **Ketidakmampuan untuk Berkoordinasi:** Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam desa, seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum, dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan menyebabkan ketidaksepakatan atau konflik antar mereka.

Upaya yang telah dilakukan Dinpermades untuk mendorong penyusunan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa yaitu:

1. **Pendampingan dan Bimbingan:** Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa, anggota lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan peraturan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau konsultasi dengan pihak terkait.
2. **Sosialisasi Peraturan:** Mengadakan sosialisasi kepada pihak terkait yaitu Kecamatan dan Desa tentang peraturan yang berlaku. Serta memberikan pengarahan tindak lanjut yang harus dilakukan.
3. **Monitoring:** untuk mendorong penyusunan LKD di Desa dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Bekerjasama dengan Pihak terkait:** Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan bagian Hukum Sekretarian Daerah untuk mendukung proses penyusunan peraturan desa tentang LKD.

Adapun data dukung Desa yang sudah menetapkan Perdes tentang LKD dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel. 9.1
Data Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No.	Kecamatan	Desa	Nomor	Tanggal
1.	Temanggung	Nampirejo	1 Tahun 2024	19 Januari 2024
2.	Temanggung	Lungge	2 Tahun 2024	25 Maret 2024
3.	Temanggung	Gilingsari	1 Tahun 2024	22 April 2024
4.	Temanggung	Joho	2024	2024
5.	Tlogomulyo	Tlogomulyo	2 Tahun 2024	8 Maret 2024
6.	Tlogomulyo	Candisari	1 Tahun 2024	10 Januari 2024
7.	Tlogomulyo	Sriwungu	2 Tahun 2024	5 Januari 2024
8.	Tlogomulyo	Balerejo	2 Tahun 2024	4 Maret 2024
9.	Tlogomulyo	Langgeng	3 Tahun 2024	13 Februari 2024

No.	Kecamatan	Desa	Nomor	Tanggal
10.	Tlogomulyo	Tlilir	2 Tahun 2024	20 Januari 2024
11.	Tlogomulyo	Losari	2 Tahun 2024	4 Maret 2024
12.	Tlogomulyo	Gedegan	2 Tahun 2024	19 Maret 2024
13.	Tlogomulyo	Kerokan	3 Tahun 2024	11 Maret 2024
14.	Tlogomulyo	Pagersari	2 Tahun 2024	18 Maret 2024
15.	Tlogomulyo	Legoksari	2 Tahun 2024	15 Maret 2024
16.	Ngadirejo	Ngadirejo	2 Tahun 2024	24 Januari 2024
17.	Ngadirejo	Katekan	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
18.	Ngadirejo	Pringapus	2 Tahun 2024	23 Januari 2024
19.	Tembarak	Tembarak	2 Tahun 2024	13 Januari 2024
20.	Tembarak	Menggoro	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
21.	Tembarak	Purwodadi	2 Tahun 2024	16 Febuari 2024
22.	Tembarak	Wonokerso	2 Tahun 2024	25 April 2024
23.	Tembarak	Gandu	2 Tahun 2024	26 Januari 2024
24.	Tembarak	Tawang Sari	2 Tahun 2024	8 Januari 2024
25.	Tembarak	Greges	2 Tahun 2024	25 Januari 2024
26.	Tembarak	Krajan	2 Tahun 2024	8 Januari 2024
27.	Tembarak	Jragan	4 Tahun 2024	25 Januari 2024
28.	Tembarak	Drono	2 Tahun 2024	13 Maret 2024
29.	Tembarak	Banaran	1 Tahun 2024	9 Januari 2024
30.	Tembarak	Botoputih	2 Tahun 2024	26 Januari 2024
31.	Tembarak	Kemloko	2 Tahun 2024	20 Mei 2024
32.	Kaloran	Kaloran	8 Tahun 2023	30 Des 2023
33.	Kaloran	Tlogowungu	1 Tahun 2024	4 Januari 2024
34.	Kaloran	Tleter	2 Tahun 2024	23 April 2024
35.	Kaloran	Getas	2 Tahun 2024	23 Januari 2024
36.	Kaloran	Kalimanggis	2 Tahun 2024	3 Januari 2024
37.	Kaloran	Tempuran	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
38.	Kaloran	Geblog	9 Tahun 2024	31 Januari 2024
39.	Kaloran	Tegowanuh	2 Tahun 2024	13 Januari 2023
40.	Kaloran	Keblukan	2 Tahun 2024	17 Mei 2024

No.	Kecamatan	Desa	Nomor	Tanggal
41.	Kaloran	Tepusen	5 Tahun 2024	13 Januari 2024
42.	Kaloran	Gandulan	10 Tahun 2024	31 Des 2023
43.	Kaloran	Kwarakan	1 Tahun 2024	6 Januari 2024
44.	Kaloran	Gandon	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
45.	Kaloran	Kemiri	2 Tahun 2024	1 April 2024
46.	Bulu	Tegalurung	2 Tahun 2024	7 Maret 2024
47.	Bulu	Campursari	2 Tahun 2024	15 Januari 2024
48.	Bulu	Pakurejo	1 Tahun 2024	4 Januari 2024
49.	Kandangan	Baledu	2 Tahun 2024	24 Januari 2024
50.	Kandangan	Caruban	2 Tahun 2024	17 April 2024
51.	Kandangan	Samiranan	1 Tahun 2024	6 Mei 2024
52.	Kandangan	Ngemplak	2 Tahun 2024	1 Maret 2024
53.	Kandangan	Margolelo	2 Tahun 2024	1 Juni 2024
54.	Kandangan	Kedungumpul	2 Tahun 2024	25 Januari 2024
55.	Ngadirejo	Tegalrejo	2024	2024
56.	Ngadirejo	Karanggedong	2024	2024
57.	Kedu	Gondangwayang	2024	2024

Sumber data : Dinpermades 2025

Berdasarkan data diatas dapat diketahui sudah ada lima puluh tujuh desa yang telah selesai menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun masih banyak Desa yang belum menyelesaikan peraturan dimaksud sehingga Dinpermades perlu lebih intensif dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan monitoring.

10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

(PP 11 Tahun 2021 pasal 3)

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Rumus dari Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum adalah Jumlah BUMDes yang berbadan hukum dibagi jumlah BUMDes dikali seratus persen.

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 10
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang berbadan Hukum Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah BUMDes yang berbadan hukum	n.a	n.a	n.a	n.a	59	77
2	jumlah BUMDes	n.a	n.a	n.a	n.a	258	260
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	22,87	48,12

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase BUMDes yang yang berbadan Hukum pada Triwulan II tahun 2025 ini masih sangat rendah 48,12% dari, hal tersebut dikarenakan dalam proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa.

Fakor pendorong tercapainya target adalah adanya upaya Pemerintah Desa dan BUMDes untuk mendaftarkan Badan Hukum.

Faktor penghambat tidak tercapinya target adalah Proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa, membutuhkan waktu yang lama.

Upaya yang dilakukan Meningkatkan komunikasi dengan Kemendes terkait pendaftaran BUMDesa yang belum turun ijin badan hukumnya, sebanyak 85 BUMDes.

Selain itu hal-hal yang mempengaruhi antara lain.

Faktor pendorong Upaya Pemerintah Desa dan Bumdes untuk mendaftarkan Badan Hukum

1. Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung:

- a. Adanya regulasi yang jelas dan mendukung, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang BUMDes.
- b. Kebijakan pemerintah yang mendorong pembentukan badan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Dukungan Pemerintah Daerah:

- a. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan.
- b. Penyediaan anggaran dari APBD untuk proses pembentukan dan operasional awal BUMDes.

3. Kesiapan Administratif:

- a. Dokumen-dokumen administratif yang lengkap seperti AD/ART, Surat Keputusan Kepala Desa, dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Data dan informasi yang jelas mengenai struktur organisasi, rencana bisnis, dan jenis usaha yang akan dijalankan.

4. Partisipasi Masyarakat:

- a. Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembentukan BUMDes, mulai dari perencanaan hingga operasional.
- b. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

5. Sumber Daya Manusia yang Kompeten:

- a. Pengurus BUMDes yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan usaha dan administrasi.
- b. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus dan anggota BUMDes untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional.

6. Modal Awal dan Sumber Pendanaan:

- a. Penyediaan modal awal yang memadai, baik dari dana desa, maupun sumber-sumber lain yang sah.
- b. Akses ke sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman bank, hibah, atau kemitraan dengan pihak ketiga.

7. Rencana Bisnis yang Jelas dan Realistis:

Penyusunan rencana bisnis yang detail dan realistis.

8. Infrastruktur yang Memadai:

- a. Ketersediaan sarpras seperti alat komunikasi, computer yang mendukung operasional BUMDes.
- b. Fasilitas fisik seperti kantor dan tempat usaha yang representatif.

9. Monitoring dan Evaluasi Berkala:

- a. Sistem monitoring dan evaluasi yang inten untuk memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai rencana.
- b. Evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung di atas, proses pendaftaran dan pembentukan badan hukum BUMDes dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi desa.

Faktor penghambat dalam mendapatkan Badan Hukum antara lain:

1. Birokrasi yang Rumit: Proses perizinan yang panjang menjadi penghambat utama karena Badan Hukum ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, selain itu banyaknya dokumen yang harus disiapkan dan berbagai tahapan yang harus dilalui seringkali membuat proses ini memakan waktu lama.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Informasi: Aparat desa atau pengelola BUMDes mungkin kurang memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan Badan Usaha. Sebagai contoh aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran mengalami down sehingga pemerintah desa tidak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Sumber Daya Manusia Terbatas: Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia di desa, terutama yang memahami aspek legal dan administratif, serta pengurus BUMDes yang hanya menjadi pekerjaan sampingan.
4. Persyaratan yang Ketat: Persyaratan administratif yang ketat, seperti keharusan memiliki NPWP, laporan keuangan, dan berbagai dokumen lain menjadi penghambat karena keberadaan unit usaha yang belum berjalan dengan baik. Sehingga belum memiliki dokumen yang diperlukan.
5. Koordinasi Antar Instansi: Proses pendaftaran Badan Hukum BUMDes melalui aplikasi yang dibangun oleh Kemendes PDTT sedangkan Badan Hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum sehingga perlu koordinasi dan komunikasi antar dua Kementerian, mungkin ini juga memperlambat proses.
6. Fasilitas dan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di desa, seperti akses internet yang terbatas atau

sarpas Komputer sehingga tidak dapat mengakses informasi maupun melakukan pendaftaran.

Upaya yang telah dilakukan Dinpermades antara lain:

1. Pendampingan dan Bimbingan: Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa dan BUMDes dalam melakukan pendaftaran Badan Hukum.
2. Pelatihan: Mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada pihak terkait yaitu Pengelola BUMDesa tentang peraturan yang berlaku dilakukan.
3. Monitoring: untuk memantau dan mendorong BUMDesa dalam memperoleh Badan Hukum dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Koordinasi dengan Pihak terkait: Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan Kemendes PDTT untuk mendukung proses mendapatkan Badan Hukum.

Adapun data dukung BUMDes yang sudah berbadan hukum dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel. 10.1
Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang berbadan Hukum Se Kabupaten Temanggung

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
1	BUM DESA TIRTO WENING	TEGALURUNG	BULU
2	BUM DESA TIRTO WENING MAKMUR	GONDOSULI	BULU
3	BUM DESA MULYOSARI	PANDEMULYO	BULU
4	BUM DESA MEKAR ABADI	JRAGAN	TEMBARAK
5	BUM DESA RESTU BAROKAH	JOHO	TEMANGGUNG
6	BUM DESA MAJU SEJAHTERA	LUNGGE	TEMANGGUNG
7	BUM DESA BERKAH BERSAMA	NGIPIK	PRINGSURAT
8	BUM DESA SUMBER RAHARJO	SOBOREJO	PRINGSURAT

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
9	BUM DESA MAJU SEJAHTERA	WONOKERSO	PRINGSURAT
10	BUMDESA REJO MANDIRI	REJOSARI	PRINGSURAT
11	BUM DESA BERKAH	KALORAN	KALORAN
12	BUM DESA SIDOMUKTI	TLOGOWUNGU	KALORAN
13	BUM DESA NGUDI LUHUR	BALEDU	KANDANGAN
14	BUM DESA AMURIH RAHARJO	CARUBAN	KANDANGAN
15	BUM DESA MURIH RAHAYU	NGEMPLAK	KANDANGAN
16	BUM DESA LESTARI SENTOSA	GESING	KANDANGAN
17	BUM DESA BLIMBING INDAH	BLIMBING	KANDANGAN
18	BUM DESA KEDUNG BUMI REJO KEDUNGUMPUL	KEDUNGUMPUL	KANDANGAN
19	BUM DESA SIDO MAKMUR	ROWO	KANDANGAN
20	BUM DESA MITRA UNGGUL	MALEBO	KANDANGAN
21	BUM DESA NGUDI MULYO	BANJARSARI	KANDANGAN
22	BUM DESA NGUDI BERKAH	KEDU	KEDU
23	BUM DESA CANDI SEJAHTERA	CANDIMULYO	KEDU
24	BUM DESA BINTANG MUDA	DANUREJO	KEDU
25	BUM DESA SIDO MAKMUR	GONDANGWAYANG	KEDU
26	BUM DESA WANUTENGAH JAYA	WANUTENGAH	PARAKAN
27	BUM DESA KEDUNG ARTA	NGLONDONG	PARAKAN
28	BUM DESA KARYA LESTARI	DANGKEL	PARAKAN
29	BUM DESA MANDIRI	MANDISARI	PARAKAN
30	BUM DESA SUMBER MAKMUR	TEGALROSO	PARAKAN
31	BUM DESA BUMI AJI	TRAJI	PARAKAN
32	BUM DESA MAJU MAKMUR	DEPOKHARJO	PARAKAN
33	BUM DESA JAYA MANDIRI	CATURANOM	PARAKAN
34	BUM DESA HALDOKO MULYO	GLAPANSARI	PARAKAN
35	BUM DESA PRADA MULIA	NGADIREJO	NGADIREJO

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
36	BUM DESA LANGGENG SARI	GANDU WETAN	NGADIREJO
37	BUM DESA BENING	MANGUNSARI	NGADIREJO
38	BUM DESA DADI MULYO	DLIMOYO	NGADIREJO
39	BUM DESA KALI LANGIT	PURBOSARI	NGADIREJO
40	BUM DESA GIRI MULYO	TEGALREJO	NGADIREJO
41	BUM DESA MAJU BERSAMA	MUNGGANGSARI	NGADIREJO
42	BUM DESA KARYA MANDIRI GONDANGWINANGUN	GONDANGWINANGUN	NGADIREJO
43	BUM DESA ARCA Mukti	PRINGAPUS	NGADIREJO
44	BUM DESA MAKMUR ABADI	KATAAN	NGADIREJO
45	BUM DESA LOH JINAWI	BARANG	JUMO
46	BUM DESA ARTHA PERWITA SARI	BATURSARI	CANDIROTO
47	BUM DESA MAKMUR MANDIRI	BADRAN	KRANGGAN
48	BUM DESA BERDIKARI	BENGKAL	KRANGGAN
49	BUM DESA BAROKAH	PARE	KRANGGAN
50	BUM DESA SEJAHTERA	NGUWET	KRANGGAN
51	BUM DESA BISO MAKMUR	NGROPOH	KRANGGAN
52	BUM DESA YUDISTIRA	PENDOWO	KRANGGAN
53	BUM DESA MANFAAT	SANGGRAHAN	KRANGGAN
54	BUM DESA BINA SEJAHTERA	KLEPU	KRANGGAN
55	BUM DESA MANUNGAL KARYA	KEMLOKO	KRANGGAN
56	BUM DESA BERDIKARI	GENTAN	KRANGGAN
57	BUM DESA TIRTO WENING	KRAMAT	KRANGGAN
58	BUM DESA LUMBUNG HARAPAN	PURWOSARI	KRANGGAN
59	BUM DESA CANDISARI MANDIRI	CANDISARI	TLOGOMULYO
60	BUM DESA MAWAR	LANGGENG	TLOGOMULYO
61	BUM DESA REJO JAYA	BALEREJO	TLOGOMULYO
62	BUM DESA JADI MAKMUR	TLILIR	TLOGOMULYO
63	BUM DESA SELO AGUNG	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
64	BUM DESA MEKAR ABADI	NGADITIRTO	SELOPAMPANG
65	BUM DESA LUHUR MAKMUR	KACEPIT	SELOPAMPANG
66	BUM DESA MITRA SEJAHTERA	GAMBASAN	SELOPAMPANG
67	BUM DESA RAHARJO	PLUMBON	SELOPAMPANG
68	BUM DESA TIRTA SEMBADA	BANSARI	BANSARI
69	BUM DESA JAYA PERKASA	GUNUNGSARI	BANSARI
70	BUM DESA SUMBER MULYO	GENTINGSARI	BANSARI
71	BUM DESA MANUNGGAL DADI MULYO	KWADUNGAN GUNUNG	KLEDUNG
72	BUM DESA MAKMUR SANTOSA	PETARANGAN	KLEDUNG
73	BUM DESA GEMA MANDIRI	GEMAWANG	GEMAWANG
74	BUM DESA KERTA WADANA	MUNCAR	GEMAWANG
75	BUM DESA SEJAHTERA BERSAMA	SUCEN	GEMAWANG
76	BUM DESA AMANAH LESTARI	KALIBANGER	GEMAWANG
77	BUM DESA NGUDI USAHA	KARANGSENENG	GEMAWANG

Sumber data : Dinpermades 2025

Dengan adanya tabel data ini, kita ketahui baru 77 BUMDes yang telah berbadan hukum. Jumlah tersebut baru 48,12 persen dari total jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Temanggung sehingga diperlukan dorongan, pendampingan yang inten kepada para pengelola BUMDes sehingga akan melakukan pendaftaran Badan Hukum, atau bagi yang sudah melakukan pendaftaran masih terdapat kekurangan dokumen segera dapat terpenuhi.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinpermades dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang

sudah mencapai target namun ada catatan, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades sebagaimana berikut:

1. Indeks desa
2. Aset desa
3. BUMDes transformasi ex PNPM-MD ke BUMDESMA
4. Batas desa

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, antara lain :

Lemahnya peran Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, yaitu:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di Desa belum optimal
- b. Belum semua BUMDes/BUMDesma berbadan hukum.
- c. Belum semua Desa menetapkan Perdes LKD.
- d. Penataan Desa di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- a. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- b. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
- c. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;

- d. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada

2.4 *Review terhadap rancangan awal RKPD*

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sama dengan Hasil penetapan RKPD hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran, namun demikian

ada satu kegiatan yang terdapat penambahan anggaran pada rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga setelah penetapan RKPD ada tambahan pagu anggaran yang disesuaikan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tar get Kin erja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tar get Kin erja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN						
	PEMBERDAYAAN							PEMBERDAYAAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	2.895.771.018	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	2.895.771.018	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	4.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	24.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	24.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	1	paket	12.000.000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	1	paket	12.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

			n yang Disediakan								n yang Disediakan				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lapor an	30.000.000			Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lapor an	30.000.000	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lapor an	70.000.000			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lapor an	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		2.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		2.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		20.176.116			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		20.176.116	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor yang Disediakan	12		10.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor yang Disediakan	12		10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		156.195.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		156.195.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12		80.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12		80.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/D irehabilitasi	12		30.000.000			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/D irehabilitasi	12		30.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	PROGRAM PENATAAN DESA								PROGRAM PENATAAN DESA						
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinper makes Kab.Te manggung		5		5.000.000			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinper makes Kab.Te manggung		5		10.000.000	
									Fasilitasi kerjasama antar desa	Dinper makes Kab.Te manggung					
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	266	desa	15.000.000			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	266	desa	10.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase pelaporan keuangan tepat waktu	266	desa	20.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase pelaporan keuangan tepat waktu	266	desa	20.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinper makes Kab.Te	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang	90	%	45.000.000			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinper makes Kab.Te	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang	90	%	50.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Pemerintah Desa	manggu ng	Berkinerja baik						Pemerintah Desa	mangg ung	Berkinerja baik				
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	100	%										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Presentase kehadiran perangkat Desa	90	%										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pengemban gan kompetensi	86, 95	%										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Presentase desa yang menerapkan pelayanan pemerintah an desa	100	%										

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

			berbasis digital												
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	114	desa										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pemilihan, Pengangkat an dan Pemberhent ian Kepala Desa	14	desa										
								Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa							

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinper mades Kab.Te manggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	%	3.752.133.848			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinper mades Kab.Te manggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	%	3.752.133.848	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinper mades Kab.Te manggung	Presentase BPD yang melaporkan Kinerja BPD	100	%	10.000.000			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinper mades Kab.Te manggung	Presentase BPD yang melaporkan Kinerja BPD	100	%	10.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Dinper mades Kab.Te manggung	Persentase laporan LKD	8,33	%	20.000.000			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Dinper mades Kab.Te manggung	Persentase laporan LKD	8,33	%	20.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat								PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat						
	Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	40, 60	%	30.000.000			Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	40, 60	%	25.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Pengelolaan Sampah)	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah pengelola BUMDesa yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan sampah	40 org/ 20 BU md es	orang	25.000.000			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah pengelola BUMDesa yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan sampah	40 org /20 BU md es	orang	15.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinpermades Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20	kecamatan	100.000.000			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinpermades Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20	kecamatan	100.000.000	
--	---	----------------------------	--	----	-----------	-------------	--	--	---	----------------------------	--	----	-----------	-------------	--

Sumber : DinpermadesKabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinpermades. Namun dalam proses ini Dinpermades mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.6
Usulan program dan kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
NIHIL					

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinpermades ada 4 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2024-2025

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Sipemdes	Dinpermades Desa	OPD APBD	Database perangkat desa	-Data Perangkat Desa dan	Tersedianya data perangkat desa	2017- sekarang

No .	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksa na/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				dan Kepala Desa	Kepala Desa -Data bengkok desa	dan Kepala Desa	
2	Sipades versi 3.0	Dinperma des Desa	OPD APBD	Database Aset desa	Data Aset Desa	Tersedianya data asset desa	2024- sekarang
3	Penetapan dan Penegasaan batas desa	Desa Tim Kabupaten	APBD APBDes	-	-	Tersedianya peta batas desa	2024- sekarang
4	Presensi android bagi Kades dan Perangkat Desa	Dinperma des Kominfo Desa	-	-	-	Tersedianya Fasilitas absensi Perangkat Desa	2024- sekarang

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades ada 5 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan n	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Gubernur	Daerah	Desa Salamrejo Kecamatan Selopampang
2	Lomba BUMDes Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Gubernur	Daerah	BUMDes Prada Mulia Kecamatan Ngadirejo (Juara 3)
3	Lomba Inovasi Pengelolaan Sampah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Gubernur	Daerah	Desa Tanurejo Kecamatan Bansari (Juara 2)
4	Lomba Desa Brilliant Tingkat Nasional Tahun 2024	BRI dan Kemendes	Nasional	Desa Bansari Kecamatan Bansari

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kesesuaian Agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan selaras dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Strategi Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDES menjadi program prioritas pemerintah yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Tujuan Dinpermades yang dirumuskan dalam Renstra Dinpermades 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kemadirian Desa” dengan sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinpermades.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka

melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu;

3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya kemandirian desa						
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat		Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	%	13,16	13,16
		Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	70	70
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	11	11
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	70	70
			Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	100	100

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	90	90
			Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	41	41
			Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	40,6	40,6
		Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	5	5
			Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	60	60

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinpermades Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinpermades Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA Dinpermades TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.404.590.302,00	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.404.590.302,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771.018,00	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771.018,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.771.018,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.771.018,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.000.000,00	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00		Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	238.819.284,00	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	238.819.284,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.176.116,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.176.116,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.643.168,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.643.168,00	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

RANCANGAN RENJA Dinpermades TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
B	PROGRAM PENATAAN DESA	10.000.000,00	B	PROGRAM PENATAAN DESA	10.000.000,00	
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	10.000.000,00	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	10.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	-		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	-	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10.000.000,00		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10.000.000,00	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	10.000.000,00	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	10.000.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.558.862.748,00	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.558.862.748,00	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748,00		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.000.000,00		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.000.000,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000,00		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	716.728.900,00		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	716.728.900,00	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.752.133.848,00		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.752.133.848,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10.000.000,00		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10.000.000,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

RANCANGAN RENJA Dinpermades TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	160.000.000,00	E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	160.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000,00		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000,00	
	JUMLAH	8.143.453.050,00		JUMLAH	8.143.453.050,00	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya anjuran pemerintah untuk efisiensi anggaran maka pagu indikatif Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sama dengan Pagu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan
Dinpermades Kab. Temanggung
Tahun 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Real isasi Cap aian REN JA OPD Tah un 202 4	Prak iraa n Cap aian Targ et REN JA OPD Tah un 202 5	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasio nal	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						8.143.453.050 ,00	8.143.453.050,00					0,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.143.453.050 ,00							0,00	
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.143.453.050 ,00							0,00	
1	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.404.590 .302,00	3.404.590. 302,00			100 %	3.404.590.302 ,00						-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

					DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	2	13	01	2 . 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771 .018,00	2.895.771. 018,00			27 orang	2.895.771.018 ,00			-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	0,00	
	2	13	01	2 . 0 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang /bulan	2.895.771.018 ,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	01	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedian ya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	-			6 kegiat an	160.000.000,0 0			-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	0,00	
	2	13	01	2 . 0 0 6 1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Kompone				2 Paket	4.000.000,00	Kab. Tema nggun	DANA ALOKASI	-	Penguata n tata kelola	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

						n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n						g, Tema nggun g, Kertos ari	UMUM (DAU)		pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas				MASYAR AKAT DAN DESA
	2	13	01	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
				0	0														
				6	2														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															roadmap program prioritas					
	2	13	01	2 . 0 6	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD				12 Lapor an	70.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	
	2	13	01	2 . 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	-			4 kegiat an	238.819.284,0 0			-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif	-	-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	01	2 . 0 8	0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat				2 Lapor an	2.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	2	13	01	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
				0	0						12	20.176.116,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA
	2	13	01	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				0	0															
				8	3															

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	
	2	13	01	2 . 0 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	206.643.168,0 0	Kab. Tema nggun g, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

												esa Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari			Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	01	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihar anya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	-			2 kegiat an	110.000.000,0 0			-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	0,00	
	2	13	01	2 . 0 9	0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

						Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya				12 Unit	80.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	
	2	13	01	2 . 0 0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						0				2 0	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentas e Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenang an Desa	-			70 %	10.000.000,00					-	0,00		
	2	13	02	2 . 0 1		Penyelenggaraan Penataan Desa	meningka tnya legalitas/ tertib administr asi wilayah antar Desa	-			6 Desa	10.000.000,00			-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata	Jumla h sarana dan prasar ana Desa yang terfasi litasi	-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

														dan berkualitas Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	02	2001	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				6 Unit	10.000.000,00	Kab. Tembung, Tembung, Kertosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Jumlah sarana dan prasarana Desa yang terfasilitasi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas				
3	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	-			11 %	10.000.000,00					-	0,00	
	2	13	03	2 . 0 1		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	meningkatkan kerjasama desa dengan ditetapkan PERMAKADES"				11 Desa	10.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan			

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

3	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentas e penyeleng garaan Pemilihan, Pengangk atan dan Pemberhe ntian Kepala Desa persentas e Desa Cepat Berkemba ng berdasark an Evaluasi Perkemba ngan Desa persentas e pengisian kekosong an Perangkat Desa persentas e kepatuha n pelaporan aset desa dalam aplikasi	-			100 % 40,60 % 41 % 70 % 90 %	4.558.862.748 ,00					-	0,00	
---	---	----	----	--	---	--	---	--	--	---	----------------------	--	--	--	--	---	------	--

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

							Sipades persentas e laporan pengawas an pengelola an keuangan desa oleh BPD												
	2	13	04	2 . 0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	meningka tnya pengelola an Administ rasi Pemerinta han Desa	-		108 Desa	4.558.862.748 ,00			-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap	Apara tur Pemer intah Desa yaitu Kepala Desa, Peran gkat Desa dan Badan Permu syawa ratan Desa (BPD)	-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

														program prioritas					
	2	13	04	2 . 0 0 1	0 0 0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusun an Perencana an Pembang unan Desa				266 Doku men	10.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekon omian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap	Apara tur Pemer intah Desa yaitu Kepala Desa, Peran gkat Desa dan Badan Permu syawa ratan Desa (BPD)		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

[illegible]

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

[illegible]

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				17 Laporan	716.728.900,00	Kab. Tema menggunakan, Tema menggunakan, Kertosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		"Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas"	Aparatur Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2011	0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							-				-	3.752.133.848,00	Kab. Tema menggunakan, Tema menggunakan, Kertosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan	Aparatur Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Badan Permu syawa ratan Desa (BPD)			
	2	13	04	2 . 0 1 4	0 0 1 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
										10.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)							
4	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentas e Desa yang menetapk an Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyar akatan Desa (LKD)	-		5 % 60 %	160.000.000,0 0				"Penguat an Landasan Tata Kelola Pemerinta han Berintegri tas Dan Dinamis Penguata n reformasi		-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

							persentas e Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum								birokrasi dan roadmap program prioritas"				
	2	13	05	2 . 0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningka tnya Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan, Lembaga Adat, dan Masyarak at Hukum Adat	-			60 Desa	160.000.000,0 0			-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															program prioritas				
	2	13	05	2 . 0 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberda yaan dan Pendayag unaan Kelembag aan Lembaga Kemasyar akatan Desa/Kelu rahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelu rahan dan Masyarak at Hukum Adat				9 Doku men	20.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	2	13	05	2	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
				0	0						40	25.000.000,00	Kab.	DANA	-	Penguata	-		0,00	DINAS
				1	5		Jumlah				Doku		Tema	ALOKASI		n				PEMBER
							Dokumen				men		nggun	UMUM		kapasitas				DAYAAN
							Hasil						g,	(DAU)		perekono				MASYAR
							Fasilitasi						Tema			mian yang				AKAT
							Pengemb						nggun			berdaya				DAN
							angan						g,			saing dan				DESA
							Usaha						Kertos			berkelanj				
							Ekonomi						ari			utan				
							Masyarak									berbasis				
							at dan									sektor				
							Pemerinta									unggulan				
							h Desa									didukung				
							dalam									dengan				
							Meningka									infrastruk				
							tkan									tur yang				
							Pendapat									merata				
							an Asli									dan				
							Desa									berkualita				
																s				
																Penguata				
																n				
																reformasi				
																birokrasi				
																dan				
																roadmap				
																program				
																prioritas				
	2	13	05	2	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
				0	0															

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

				01	06																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				20 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruk tur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.	00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

				01	09														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				20 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu r yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA
	J U M L A H									8.143.453.050,00							0,00		

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp. 7.847.244.179,- Realisasi Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp. 7.665.673.771,- atau sebesar 97,68%, Sisa anggaran Sebesar Rp. 181.570.408,- atau

sekitar 2,31% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp.3.561.013.068,- sebesar 45,18%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinpermades mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 8.143.453.050,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19660608 199603 2 004



RENCANA KERJA

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Temanggung
Tahun 2026



HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan,



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM.
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator,



PUTRI UTAMI RAHMANIA, S.T.
NIP. 19910316 201503 2 003

Mengetahui
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2026. Renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUPRIYANTO, A.P.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang.....1

 1.2. Landasan Hukum.....6

 1.3. Maksud dan Tujuan8

 1.4. Sistematika Penulisan9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....10

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026-202910

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan27

 2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)27

 2.2.2. Data Pokok34

 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan64

 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....64

 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....71

 2.6. Inovasi Perangkat Daerah71

 2.7. Penghargaan74

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN75

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional75

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan75

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN78

 4.1. Program dan Kegiatan.....78

BAB V PENUTUP90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d Tahun 2024	111
Tabel 2. 2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d Triwulan II Tahun 2025.....	19
Tabel 2. 3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	28
Tabel 2. 4	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Temanggung	35
Tabel 2. 5	Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2025 Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2025	35
Tabel 2. 6	Data Pokok Jumlah Peminjam dan Pemustaka Perpustakaan Tahun 2025	39
Tabel 2. 7	Persentase Perpustakaan Aktif Kabupaten Temanggung s.d Triwulan IV Tahun 2025	41
Tabel 2. 8	Data Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Temanggung.....	42
Tabel 2. 9	Daftar Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	42
Tabel 2. 10	Daftar Perpustakaan Kecamatan Aktif s.d. triwulan IV Tahun 2024	43
Tabel 2. 11	Daftar Perpustakaan Desa Aktif Tahun 2025	43
Tabel 2. 12	Daftar Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Aktif Tahun 2025	45
Tabel 2. 13	Daftar Perpustakaan Sekolah yang Aktif (SD/SMP) s.d. Triwulan II Tahun 2025	46
Tabel 2. 14	Persentase Penelusuran Naskah Kuno Tahun 2021 s.d 2025 sampai dengan Triwulan I.....	55
Tabel 2. 15	Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (Pkpkt) Tahun 2025	56
Tabel 2. 16	Indeks Manajemen Kearsipan s.d. Triwulan IV Tahun 2024	57
Tabel 2. 17	Rekapitulasi Nilai Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2024.....	58
Tabel 2. 18	Persentase Audit Internal Kearsipan s.d. triwulan II Tahun 2025	60
Tabel 2. 19	Persentase Arsip Vital Konvensional s.d Triwulan II Tahun 2025	61
Tabel 2. 20	Tabel Alih Media Arsip Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan I Tahun 2025	61
Tabel 2. 21	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026.....	65
Tabel 2. 22	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2025	71
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	76
Tabel 4. 1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Temanggung 2026.....	79
Tabel 4. 2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Temanggung Tahun 2026	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

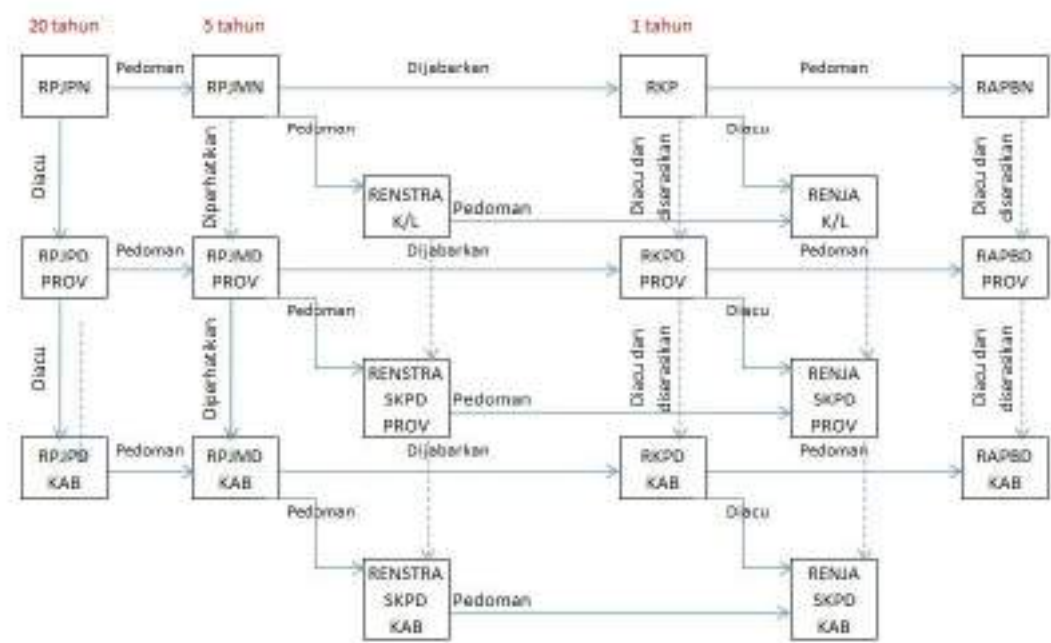
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2025 Triwulan II berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, Tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan);
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam

rancangan awal RKPD;

- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namun dalam proses ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akurat, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 Triwulan II terhadap capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
s.d Tahun 2024

Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.235.677.862	5.716.729.812		5.134.089.178		89,81	
02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.235.677.862	5.716.729.812		5.134.089.178		89,81	
02:23:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	4.336.241.312	4.336.240.812	100	3.828.972.609	100	88,30	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.766.251.712	3.766.251.712		3.303.798.857		87,72	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.766.251.712	3.766.251.712	14	3.303.798.857	100,00	87,72	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			87.142.000	77.141.500		68.432.742		88,71	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000	5.000.000	1	4.747.338	100,00	94,95	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10.995.500	14.995.500	3	14.835.000	100,00	98,93	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	8.000.000	8.000.000	2	7.999.950	100,00	100,00	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	33.150.000	13.150.000	12	7.888.150	100,00	59,99	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	29.996.500	35.996.000	12	32.962.304	100,00	91,57	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			384.236.600	384.236.600		354.625.521		92,29	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.000.000	5.000.000	12	485.000	100,00	9,70	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90.000.000	90.000.000	12	75.661.961	100,00	84,07	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	9.915.000	9.915.000	12	9.794.410	100,00	98,78	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	279.321.600	279.321.600	12	268.684.150	100,00	96,19	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.611.000	108.611.000	7	102.115.489		94,02	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	69.993.000	79.993.000	12	74.107.926	100,00	92,64	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	28.618.000	28.618.000	3	28.007.563	100,00	97,87	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Program A1								100,00		
			Predikat					Sangat Tinggi		
02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1.700.136.550	1.181.189.000		1.124.750.797		95,22	
		Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	82			0,29		100		
		Persentase perpustakaan yang aktif	35,35			100		100		
02.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			1.700.136.550	1.181.189.000	603	1.124.750.797		95,22	
02.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	4	317.215.050	317.215.050	100	307.370.000	100	96,90	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	1	518.947.550	518.947.550	1	493.868.470	100		
02.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	-	-	0	0	0,00		
02.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3	557.617.550	38.670.000	3,00	38.513.000	100	99,59	
02.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600	306.356.400	306.356.400	603,00	284.999.327	100	93,03	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET	
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Program A1		100,00			
			Predikat						Sangat Tinggi		
02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			-	-	0	0	-			
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	100			0	0	0	-		
02.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota			-	-	0	0	-			
02.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1	-	-	-	0	0,00			
						Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Program A1		-			
02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			199.300.000	199.300.000		180.365.772		90,50		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	67			71,85		100		
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	31,98			91,34		100		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota			149.300.000	149.300.000	0	130.820.272	87,62	87,62	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1	149.300.000	149.300.000	0,88	130.820.272	87,62	87,62	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota			-	-	0	0	-		
2.24.02.2.02.02			1	-	-	0	0	-		
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota			50.000.000	50.000.000	1	49.545.500		99,09	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1	50.000.000	50.000.000	0,99	49.545.500	99,09	99,09	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Program A1		93,36		
								Sangat Tinggi		
				6.235.677.862	5.716.729.812		5.134.089.178,00			
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah (%)	97,79	89,81	
							Predikat	Sangat Tinggi		
							Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	80,00		
		JUMLAH					Predikat	Sangat Tinggi		

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d Triwulan II Tahun 2025

Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.342.927.662	5.653.644.143		1.066.649.613	0	1.091.772.989		2.158.422.602		38,18	
02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.342.927.662	5.653.644.143		1.066.649.613	0	1.091.772.989		2.158.422.602		38,18	
02:23:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	4.411.519.712	4.369.006	100	1.060.717.113	0	982.314.489		2.043.031.602	0	46,76	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.766.251.712	3.759.126.478		909.984.698		891.083.602		1.801.068.300		47,91	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3.766.251.712	3.759.126.478	4	909.984.698		891.083.602	4	1.801.068.300	28,57	47,91	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				82.150.000	53.220.750		7.859.553		4.698.750		12.558.303		23,60	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	3.500.000	0	0		0	0	0	0,00	-	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.000.000	10.805.700	0,063855	690.000		1.062.000	0	1.752.000	6,39	16,21	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.500.000	3.300.000	0,222424	734.000		782.000	0	1.516.000	22,24	45,94	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	18.650.000	17.115.050	0,03	429.000		1.772.000	0	2.201.000	0,21	12,86	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	37.000.000	18.500.000	0,32	6.006.553		1.082.750	0	7.089.303	2,71	38,32	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				455.600.000	455.110.000		134.640.442		74.526.625	0	209.167.067		45,96	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	90.000.000	0,196448	17.680.310		14.154.437	0	31.834.747	1,64	35,37	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11.000.000	10.510.000		0		1.734.000	0	1.734.000	0,00	16,50	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	354.600.000	354.600.000	0,329837	116.960.132		58.638.188	0	175.598.320	2,75	49,52	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.518.000	101.548.800	3	8.232.420		12.005.512	3,00	20.237.932		19,93	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	87.518.000	81.548.800	0,100951	8.232.420		11.977.012	0	20.209.432	0,48	24,78	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	20.000.000	20.000.000	0	0		28.500	0	0	0,00	0,14	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
		Terpeliharanya 3 gedung kantor	bulan	12	20.000.000	20.000.000	0		0		0				
02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				911.407.950	1.206.394.115		4.390.000	0	104.593.500		108.983.500		9,03	
		Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	82							86,92		100		
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	35							56,68		100		
02.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				911.407.950	547.922.115		3.240.000		84.593.500	0	87.833.500		16,03	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat DaerahKab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesyai standar nasional peprustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	Perpustakaan	1	190.000.000	175.000.000		-		-	0				

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
02.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	12	517.210.000	10.799.550	0,194453	2.100.000		1.800.000	0,19	3.900.000	1,62	36,11	
02.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Perpustakaan	20	204.197.950	6.805.065	0,167522	1.140.000		760.000	0	1.900.000	0,837611397	27,92	
02.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	1	-	75.000.000		-		13.158.000	-	13.158.000			
02.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	310		280.317.500	0	-	0,00	70.675.500	-	70.675.500	0	25,51	
02.23,02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	658.472.000		1.150.000					-		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
02.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenaangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perpustakaanyang Dibangun dan Dipelihara di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Kupaten/Kota	Perpustakaan	1		47.272.000		1.150.000		2.650.000					
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ kota	orang	2		421.400.000		-		20.000.000					
2.23.02.2.02.0010	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	lokus	250		189.800.000		-		103.480.000					
02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				-	72.894.500		-		4.865.000	0	4.865.000	-		
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	100							100		100		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
02.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota				-	72.894.500	0,00	-	0,00	4.865.000	0	4.865.000	-		
02.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	1	-	72.894.500		-	0,00	4.865.000	0	4.865.000	0,00		
02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				20.000.000	5.349.500	0	1.542.500	0,00	-		1.542.500		28,83	
		Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	67							71,85		100		
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	31,98							36,05		100		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				16.000.000	5.349.500	0	1.542.500	0,00	-	0	1.542.500	29	28,83	
2.24.02.2.01.005	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		1	16.000.000	5.349.500	0,2883345	1.542.500	0,00	-	0,288344705	1.542.500	28,83447051	28,83	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2025				REALISASI 2025	CAPAIAN 2025			
							I		II						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota				4.000.000	-		-	0,00	-	-	0	0		
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	4.000.000	-		-		-	-	-	0	0	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026.

Dengan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tahun sebelumnya maka didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
 - c. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota
 - d. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota;
 - e. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota;
 - f. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan predikat sangat tinggi yaitu dengan nilai 89,81.

Dari Tabel 2.2. Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan II Tahun 2025 **(Laporan IKPD)** Kabupaten Temanggung

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																	
		1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	n.a	30,1	30,2	30,3	60,48	60,48		100					
				UPLM					0								
				AM					0								
INDIKATOR PROGRAM																	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	1	Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	na	0,25	0,25	0,5	0,29	-72,48606951		0					v
				Jumlah pengunjung sampai dengan triwulan tahun N					985382	178301							
				Jumlah pengunjung sampai dengan triwulan tahun N-1					982530	648039							
		2	Persentase jumlah peminjam perpustakaan	%	na	40	42	46	40,13	37,63916075		89,61704939		v			
				Jumlah peminjam tahun N					395429	67111							

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
				Jumlah pengunjung tahun N					985382	178301							
		3	Persentase perpustakaan yang aktif	%	na	34	35	36	55,18	40,76539101		116,47	v				
				Jumlah perpustakaan aktif					581	245							
				jumlah seluruh perpustakaan di tahun N					1053	601							
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4	Persentase penelusuran naskah kuno	%	n.a	100	100	100	100	100		100	v				
				Jumlah kegiatan penelusuran naskah kuno					4	4							
				Jumlah rencana kegiatan penelusuran naskah kuno					4	4							
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							100	0	0	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							76,52	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG PERPUSTAKAAN				5	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERPUSTAKAAN							88,26	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG KEARSIPAN																	
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																	

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
		1	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	70,93	68	70	72	73,54	0		0					v
				60% hasil audit kearsipan eksternal					49,72	0							
				40% hasil audit kearsipan internal					23,82	0							
INDIKATOR PROGRAM																	
	Program Pengelolaan arsip	1	Persentase arsip vital konvesional yang dialih mediakan	%	50	55	60	65	55,29	58,35		97,24			v		
				Jumlah arsip vital konvensional yang dialihmediakan					2709	2859							
				jumlah arsip vital konvensional					4900	4900							
		2	Persentase audit internal kearsipan	%	n.a	66,67	73,33	80	66,67	68,89		93,94			v		
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan audit kearsipan					30	31							
				jumlah Perangkat Daerah					45	45							
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							0	0	0	0	0	1
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				2	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							95,59	0	0	2	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG KEARSIPAN				3	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KEARSIPAN							47,80	0	0	2	0	1
JUMLAH TOTAL IKUPD				2	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							50,00	0	0	0	0	1
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM				6	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							86,06	2	1	2	0	1
JUMLAH TOTAL INDIKATOR DINPUSIP				8	RATA-RATA CAPAIAN DINAS DINPUSIP							68,03	2	1	2	0	2

Sumber: IKPD TW II 2025

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja dengan status sangat tinggi ada 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Persentase perpustakaan yang aktif
 - 1) Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah Penjaringan data lebih mudah menggunakan google spreadseheet. Faktor pembagi penghitungan persentase Jumlah perpustakaan aktif / jumlah seluruh perpustakaan di tahun N x 100.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum semua perpustakaan melaporkan data pokok perpustakaan, Banyak perpustakaan yang tidak aktif karena kurangnya tenaga perpustakaan dan tidak adanya jumlah koleksi perpustakaan yang menarik untuk perpustakaan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengadakan Sosialisasi terkait metode pengisian data IPLM melalui data.perpusnas.go.id.
 - b. Persentase penelusuran naskah kuno
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Informasi dari masyarakat dan media social terkait naskah kuno di kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami naskah kuno.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang naskah kuno.
2. Capaian indikator dengan status tinggi ada 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Persentase jumlah peminjam perpustakaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Penjaringan data lebih mudah menggunakan google spreadseheet.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak adanya koleksi bahan bacaan baru di perpustakaan yang menyebabkan pengunjung perpustakaan tidak tertarik untuk meminjam buku di perpustakaan, Adanya variasi layanan di perpustakaan yang ditawarkan menyebabkan pengunjung lebih tertarik memanfaatkan layanan perpustakaan yang lain dibanding meminjam buku. Diantaranya adalah adanya layanan eBook dan layanan internet serta wifi gratis di perpustakaan dan Keterbatasan jam buka layanan perpustakaan yang belum

konsisten.

- 3) Rekomendasi Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan agar mau menambah anggaran untuk pengadaan buku koleksi perpustakaan dan Mendorong perpustakaan binaan agar dapat melakukan penambahan bahan perpustakaan baik melalui pembelian maupun permohonan bantuan buku ke pihak swasta
3. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Telah disusun Surat Perintah melaksanakan alihmedia arsip vital dan masih dalam proses identifikasi arsip vital untuk dialihmediakan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum terdapat daftar arsip vital pada Perangkat Daerah sehingga perlu koordinasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah berkoordinasi dengan Bagian Aset BPKPAD selaku pemegang dokumen arsip vital konvensional terbanyak dan berkoordinasi dengan pencipta arsip vital pada Bagian Pemerintahan Setda.
 - b. Persentase audit internal kearsipan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Telah disusun PKPKT Tahun 2025 dan telah dilaksanakan audit kearsipan pada perangkat daerah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dikarenakan Tahun 2025 obyek pengawasan yang semula 2 UP pada setiap OPD untuk Tahun 2025 menjadi 3 Up sehingga arahan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah untuk melakukan audit kearsipan pada perangkat daerah selain kecamatan dan Keberadaan arsiparis yang sering melaksanakan tugas diluar tupoksi sehingga menghambat penerapan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan dan belum semua OPD memiliki arsiparis.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan kearsipan sesuai dengan Perka Anri No. 6 Tahun 2019 dan melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah
4. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 3 (tiga) terdiri dari:
 - a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pemerataan

layanan perpustakaan, ketercukupan jumlah koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan Masyarakat di perpustakaan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah penghitungan IPLM dilakukan setiap akhir tahun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan kegiatan pembinaan perpustakaan, meningkatkan kerja sama antar perpustakaan, mengadakan sosialisasi Si Petak secara rutin, membuat surat edaran Bupati mengenai kewajiban pelaporan data perpustakaan ke Dinpusip.
- b. Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut Penjaringan data lebih mudah menggunakan google spreadseheet.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum semua perpustakaan melaporkan data pokok perpustakaan dan Banyak perpustakaan yang tidak aktif karena kurangnya tenaga perpustakaan dan tidak adanya jumlah koleksi perpustakaan yang menarik untuk perpustakaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengadakan Sosialisasi terkait metode pengisian data IPLM melalui data.perpusnas.go.id.
- c. Indeks Manajemen Kearsipan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut Telah disusun PKPKT Tahun 2025 dan telah dilaksanakan audit kearsipan terhadap 25 PD.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil audit kerasipan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kabupaten Temanggung masih dalam proses verifikasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sedangkan dokumen audit kearsipan eksternal masih dinilai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan kearsipan sesuai dengan Perka ANRI No. 6 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kearsipan

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat peningkatan dalam jumlah pengunjung dan jumlah perpustakaan aktif, perpustakaan-perpustakaan yang mengisi data pokok perpustakaan baik melalui link google form maupun Si Petak bertambah. Sedangkan kegiatan penelusuran naskah kuno walaupun tidak ada anggaran tetapi tetap dilakukan dan kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024. Pada bidang kearsipan indikator program pengelolaan kearsipan juga terdapat peningkatan karena telah melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada beberapa Perangkat Daerah terkait pelaksanaan audit internal.

1) BIDANG PERPUSTAKAAN

a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah angka capaian tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaan, dalam rangka membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan meningkatkan literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung. Pembangun literasi masyarakat yang diukur dalam IPLM terdiri dari 7 unsur, yaitu :

- Pemerataan layanan perpustakaan
- Ketercukupan koleksi
- Ketercukupan tenaga perpustakaan
- Tingkat kunjungan masyarakat per hari
- Jumlah perpustakaan ber-SNP
- Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
- Anggota perpustakaan

IPLM Menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah mulai tahun 2024. Penghitungan angka IPLM dilakukan oleh Perpustakaan RI dan hasil penghitungan akan diumumkan setiap akhir tahun. Oleh karena itu angka IPLM Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 belum bisa diketahui, sehingga masih mengikuti angka IPLM Tahun 2024 yaitu 60,48. Berikut Tabel angka IPLM dalam 2 tahun terakhir:

Tabel 2. 4
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Temanggung

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	n.a	n.a	n.a	n.a
2023	n.a	n.a	n.a	n.a
2024	IPLM	Angka	60,48	100%
2025	IPLM	Angka	60,48	100%

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

b. Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Rumus persentase pertumbuhan jumlah pengunjung Perpustakaan yaitu $\frac{\text{Jumlah pengunjung Triwulan Tahun N} - \text{Jumlah Pengunjung Triwulan Tahun N-1}}{\text{Jumlah pengunjung triwulan tahun N-1}} \times 100$. Persentase pertumbuhan jumlah Pengunjung perpustakaan di Kabupaten Temanggung ditampilkan pada Tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2. 5
Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2025 Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2025

No	Uraian	Tahun / Orang				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pengunjung	63.080 (1 tahun)	699.588 (1 tahun)	982.530 (1 tahun)	648.039 (TW II Thn N-1)	178.301 (TW II)
2	Peningkatan/ penurunan	-97.462	636.508	282.942	-2.852	-469.738
3	Pertumbuhan (%)	-60,70	1.009,05	41.79	0,29	-72,486

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas 2.5 dapat dilihat bahwa Persentase Pertumbuhan Jumlah Pemustaka Kabupaten Temanggung tahun 2025 masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 0,25%. Hal ini karena ada perbedaan jumlah perpustakaan yang menjadi sasaran penjarangan data pokok perpustakaan. Pada tahun 2024 data pokok perpustakaan berasal dari data seluruh perpustakaan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional RI, maka penghitungan data pokok perpustakaan disesuaikan dengan amanat

UU Otonomi Daerah, yaitu hanya menjaring data dari perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu ada perubahan jenis dan jumlah perpustakaan yang menjadi sasaran penghitungan data pokok perpustakaan. Penghitungan data pokok perpustakaan untuk tingkat kabupaten hanya dilakukan untuk jenis perpustakaan umum yang meliputi Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan dan TBM. Selain itu juga Perpustakaan Sekolah yang meliputi Perpustakaan SD dan SMP. Faktor penghambat capaian pengunjung di tahun 2025 diantaranya adalah :

- Adanya perubahan sasaran perpustakaan yang menjadi target penghitungan data pokok perpustakaan tingkat Kabupaten.
- Tingkat pengisian data pokok perpustakaan oleh perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung masih di bawah 50% dari keseluruhan jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- Metode pengisian data pokok perpustakaan menggunakan melalui google spreadsheet masih kurang dipahami oleh pengelola perpustakaan sehingga pengisian tidak lengkap/tidak sesuai;
- Adanya peraturan dari Perpustakaan Nasional RI untuk menggunakan data.perpusnas.go.id sebagai metode pengumpulan data pokok perpustakaan. Sehingga memerlukan waktu untuk mensosialisasikan kepada pengelola-pengelola perpustakaan;
- Masih banyak perpustakaan yang belum memiliki pengelola khusus untuk perpustakaan sehingga perpustakaan tidak terkelola dengan baik;
- Tidak ada kegiatan yang menarik dan penambahan koleksi baru yang dilakukan secara rutin oleh perpustakaan sehingga antusiasme untuk berkunjung ke perpustakaan menurun.

Sedangkan faktor pendorong :

- Keputusan Perpustakaan Nasional RI untuk mengembalikan penjaringan data Perpustakaan sesuai dengan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah mengurangi beban Pemerintah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengumpulan data pokok perpustakaan
- Kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk memberikan pembinaan kepada pengelola perpustakaan terkait pembuatan dan pelaporan di akun data.perpusnas.go.id

- Adanya program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) yang menjadikan perpustakaan tidak hanya tempat membaca atau meminjam buku di perpustakaan tetapi juga menjadi tempat berkegiatan masyarakat/pemustaka.

Upaya yang akan dilaksanakan Bidang Perpustakaan dalam meningkatkan pertumbuhan pengunjung diantaranya :

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan kepada seluruh perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemkab;
- Membuat surat edaran Bupati Temanggung tentang kewajiban pelaporan data perpustakaan bagi perpustakaan-perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemkab.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan-perpustakaan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pengunjung adalah sebagai berikut :

1) Perpustakaan Kabupaten:

- Kegiatan promosi seperti pameran buku, kegiatan pelibatan masyarakat, lomba-lomba yang tidak ada sejak pandemi,
- Jumlah dan variasi koleksi buku digital masih kurang jumlahnya,
- Kemajuan Teknologi Informatika yang memudahkan dalam membaca buku secara elektronik tanpa harus bersusah payah ke Luar Rumah/Perpustakaan.

2) Perpustakaan Sekolah

- Belum semua perpustakaan sekolah memiliki tenaga khusus perpustakaan,
- Perpustakaan belum terkelola dengan baik,
- Jumlah koleksi perpustakaan yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar,
- Kegiatan promosi perpustakaan belum banyak dilakukan,
- Penambahan koleksi perpustakaan tidak dilakukan secara rutin,
- Fasilitas untuk pemustaka kurang memadai,
- Jam buka layanan perpustakaan tidak tentu.
- Kurangnya dukungan anggaran dari stakeholder

3) Perpustakaan Desa/Kelurahan

- Tidak ada pengelola khusus untuk perpustakaan desa/kelurahan,
- Tidak ada penambahan koleksi untuk menambah variasi bacaan,
- Tidak memiliki gedung perpustakaan untuk melakukan layanan perpustakaan,
- Fasilitas layanan untuk pemustaka kurang memadai,

- Jam buka layanan perpustakaan tidak tentu,
- Kegiatan promosi perpustakaan belum banyak dilakukan.
- Kurangnya dukungan anggaran dari stakeholder
- Perpustakaan Khusus (instansi/lembaga/ponpes/rumah ibadah)
- Tidak ada pengelola khusus perpustakaan untuk melakukan kegiatan layanan perpustakaan,
- Koleksi yang dimiliki terbatas dan kurang menarik pemustaka,
- Belum banyak dilakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan.
- Kurangnya dukungan anggaran dari stakeholder

Banyaknya kendala yang dihadapi masing-masing perpustakaan dalam melakukan layanan perpustakaan mengakibatkan penurunan tingkat kunjungan ke perpustakaan yang menyebabkan pula penurunan tingkat baca dan peminjaman di perpustakaan. Untuk itu perlu dilakukan upaya keras untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan, diantaranya adalah:

- Meningkatkan variasi dan kualitas layanan (Perpustakaan Keliling, Si Patuh, Sabar, I Pusda temanggung, i Temanggung, Layanan KOPI (Konsultasi Kepustakawanan dan Literasi), Layanan Story Telling/Mendoan Temanggung (Mendongeng Anak Temanggung), Layanan Komputer dan Internet, Layanan Cekatan (Cerita Kita Tentang Perpustakaan);
- Menambah Kegiatan Promosi Perpustakaan, diantaranya mengadakan pameran/bazaar buku, workshop, bimtek, lomba, seminar, kelas-kelas pelibatan masyarakat (kelas Beauty Class, Kelas Talikur, Kelas Theater, dll);
- Menambah Koleksi bahan perpustakaan;
- Menambah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan;
- Menambah SDM yang memadai untuk perpustakaan.

4) Persentase Peminjam Perpustakaan

Persentase peminjam perpustakaan adalah perbandingan antara peminjam dengan pemustaka. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan, sedang peminjam perpustakaan adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk

meminjam buku, baik untuk dipinjam di bawa pulang maupun untuk dibaca di tempat.

Rumus untuk menghitung persentase peminjam perpustakaan yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah peminjam perpustakaan}}{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun N}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6
Data Pokok Jumlah Peminjam dan Pemustaka Perpustakaan Tahun 2025

Uraian	Jumlah Peminjam dan Pemustaka				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Peminjam					
Perpustakaan Kabupaten	1.292	13.671	23.852	16.810	5263
Perpustakaan Sekolah (SD dan SMP)	20.773	427.755	529.642	196.034	57995
Perpustakaan Desa/Kelurahan	3.104	10.483	43.433	19.833	3503
Perpustakaan Kecamatan	0	228	433	433	78
Perpustakaan Madrasah	0	130.732	202.113	148.501	n.a
Perpustakaan Perguruan Tinggi	0	121	2.751	2.751	n.a
Perpustakaan Khusus	0	18.468	16.156	9.756	n.a
TBM	0	1.098	1.311	1.311	272
Jumlah	25.169	602.556	819.691	395.429	67111
Jumlah Pengunjung	63.080	699.588	982.530	985.382	178301
Persentase Peminjam di perpustakaan	75,38	86,13	83,42	40,13	37.67

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel di atas bisa dilihat jumlah peminjam pada tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024 karena data tahun 2024 merupakan hasil penghitungan persentase peminjam selama 12 bulan (1 tahun) sedangkan tahun 2025 merupakan penghitungan sampai dari januari s.d juni (triwulan II). Penurunan persentase peminjam dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- Penagihan pelaporan data pokok perpustakaan hanya melalui wa grup yang seringkali terabaikan oleh anggota grup;

- Kurangnya SDM/Pustakawan yang melakukan pendampingan kepada seluruh perpustakaan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Perubahan metode pelaporan dari Si Petak ke google spreadsheet dan data.perpusnas.go.id;
- Tingkat pelaporan data perpustakaan oleh perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung kurang dari 50%;
- Tidak ada kegiatan yang menarik dan penambahan koleksi baru yang dilakukan secara rutin oleh perpustakaan sehingga antusiasme untuk berkunjung ke perpustakaan menurun.

Sedangkan Faktor pendorong capaian indikator persentase jumlah peminjam perpustakaan adalah:

- Keputusan Perpustakaan Nasional RI untuk mengembalikan penjangkauan data Perpustakaan sesuai dengan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah.
- Adanya layanan perpustakaan keliling yang membantu perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung mengupayakan variasi bahan bacaan untuk pemustaka.

Upaya yang akan dilaksanakan Bidang Perpustakaan dalam meningkatkan pertumbuhan pengunjung diantaranya :

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan kepada seluruh perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemkab;
- Membuat surat edaran Bupati Temanggung tentang kewajiban pelaporan data perpustakaan bagi perpustakaan-perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemkab.

5) Persentase Perpustakaan yang aktif

Definisi Perpustakaan aktif menurut Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Nomor: 041/017/Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Kriteria Perpustakaan Aktif Kabupaten Temanggung adalah Perpustakaan yang secara aktif melakukan kegiatan layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku).

Untuk memperoleh angka persentase perpustakaan aktif digunakan rumus jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah perpustakaan dikali 100%.

Tabel 2. 7
Persentase Perpustakaan Aktif Kabupaten Temanggung
s.d Triwulan IV Tahun 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah perpustakaan aktif	204	505	781	581	245
Jumlah perpustakaan	517	517	1378	1053	601
Persentase	39,46	97,68	56,68	55,18	40,76

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025 (Triwulan II)

Dari data diatas pertumbuhan perpustakaan aktif pada triwulan II tahun 2025 masih belum memenuhi target yang seharusnya. Capaian target indikator persentase Perpustakaan Aktif tahun 2025 adalah 35% sedangkan pada triwulan I ini baru mencapai 20,23%. Faktor penghambat tercapainya indikator tersebut dikarenakan tingkat pelaporan data perpustakaan masih kurang dari 50% sehingga angka 20,23% belum menunjukkan angka yang sebenarnya di lapangan. Selain itu adanya perpustakaan-perpustakaan yang pada tahun sebelumnya masih berstatus aktif pada tahun ini pasif. Sedangkan faktor pendorong tercapainya target indikator persentase perpustakaan aktif pada tahun 2025 ini adalah keputusan Perpustakaan Nasional RI untuk mengembalikan pelaporan data perpustakaan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Upaya yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Kabupaten Temanggung untuk pencapaian target indikator tersebut diantaranya :

- Melakukan advokasi kepada penanggung jawab masing-masing perpustakaan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung agar dapat merekrut tenaga khusus untuk perpustakaan;
- Melaksanakan pembinaan perpustakaan untuk perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Membuat surat edaran Bupati Temanggung mengenai kewajiban melaporkan data pokok perpustakaan bagi seluruh perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Mengadakan kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan;
- Meningkatkan kegiatan promosi perpustakaan guna menambah minat baca masyarakat;
- Menambah kegiatan pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan atau mengadakan bimbingan teknis bagi petugas

perpustakaan;

- Mengadakan kerjasama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Koordinasi dengan dinas terkait.

Tabel 2. 8

Data Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah		
		Keseluruhan	Aktif	Tidak Aktif
Perpustakaan Umum				
1	Perpustakaan Kabupaten	1	1	0
2	Perpustakaan Kecamatan	2	2	0
3	Perpustakaan Desa	75	36	40
4	TBM	7	5	2
Jumlah		85	44	41
Perpustakaan Sekolah				
1	Perpustakaan SD	431	164	273
2	Perpustakaan SMP	83	46	41
Jumlah		514	210	304
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN		599	254	345

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025 (Triwulan II)

Berdasarkan Tabel diatas dapat kami sajikan daftar perpustakaan aktif berdasarkan jenis perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung yang aktif:

1) Perpustakaan Kabupaten

Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung secara aktif melakukan kegiatan layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku). Tahun 2025 Perpustakaan Kabupaten Temanggung merencanakan kegiatan-kegiatan peningkatan literasi masyarakat dengan sumber anggaran DAK Non Fisik Tahun 2025. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini diantaranya adalah Bimbingan Teknis, Lomba-lomba, Pendataan Perpustakaan, Bedah Buku, Lokakarya, Workshop dan Festival Literasi.

Tabel 2. 9

Daftar Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Nama Lembaga	Nama Perpustakaan	Kecamatan
Perpustakaan Kabupaten			

No.	Nama Lembaga	Nama Perpustakaan	Kecamatan
1	Perpustakaan Kabupaten	Perpustakaan Kabupaten Temanggung	Temanggung

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

2) Perpustakaan Kecamatan

Adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum. Tahun 2023 terdapat 2 (dua) perpustakaan kecamatan yang aktif di Kabupaten Temanggung yaitu Perpustakaan Kecamatan Bansari dan Perpustakaan Kecamatan Temanggung.

Tabel 2. 10
Daftar Perpustakaan Kecamatan Aktif s.d. triwulan IV Tahun 2024

No.	Kecamatan	Nama Perpustakaan	Kecamatan
1	Bansari	Perpustakaan Eling Mbansari	Bansari
2	Temanggung	Perpustakaan Cemara	Temanggung

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

3) Perpustakaan Desa

Merupakan perpustakaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sarana atau media untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pendidikan yang ada di masyarakat pedesaan.

Di Kabupaten Temanggung dari 266 desa baru ada 70 desa yang memiliki perpustakaan. Diantara 70 perpustakaan desa tersebut hanya 19 perpustakaan desa yang aktif.

Tabel 2. 11
Daftar Perpustakaan Desa Aktif Tahun 2025

Perpustakaan Desa			
No	Desa/Keluarahan	Nama Perpustakaan	Kecamatan
1	Rejosari	Perpustakaan Sumber Ilmu	Bansari
2	Tanurejo	Widya Pustaka	Bansari

Perpustakaan Desa			
No	Desa/Keluarahan	Nama Perpustakaan	Kecamatan
3	Campuranom	Perpustakaan Lestari	Bansari
4	Pandemulyo	Sumber Kawruh	Bulu
5	Sidoharjo	Maju Cerdas	Candiroto
6	Barang	Tunas Bangsa	Jumo
7	Giyono	Omah Bukuku	Jumo
8	Morobongo	Perpustakaan Desa Morobongo	Jumo
9	Tegowanuh	Ceria	Kaloran
10	Tlogowungu	Ngudi De Sastra	Kaloran
11	Gondang Wayang	Perpustakaan Melati	Kedu
12	Bandunggede	Perpustakaan Desa Bandunggede	Kedu
13	Danurejo	Perpustakaan Sumber Ilmu	Kedu
14	Kuthoanyar	Joyoprojo	Kedu
15	Karangtejo	Sumber Ilmu	Kedu
16	Candimulyo	Perpustakaan Anggrek Bulan	Kedu
17	Jeketro	Tunas Ilmu Manunggal	Kledung
18	Canggal	Mutiara Ilmu	Kledung
19	Gondang Winangun	Perpustakaan Cahaya Purnama	Ngadirejo
20	Parakan Kauman	Perpustakaan Kelurahan Parakan Kauman	Parakan
21	Nglorog	Perpustakaan Desa Ngudi Ilmu Nglorog	Pringsurat
22	Ngipik	Mutiara	Pringsurat
23	Bumiayu	Bumi Pustaka	Selopampang
24	Kacepit	Perpustakaan Desa Ngudi Ilmu Kacepit	Selopampang
25	Gambasan	Perpustakaan Cakrawala Ilmu	Selopampang
26	Lungge	Perpustakaan Cahaya Ilmu Lungge	Temanggung
27	Tlogorejo	Pustaka Pelita Ilmu	Temanggung
28	Mudal	Kreatif	Temanggung
29	Mungseng	Perpustakaan Desa Tunas Mekar	Temanggung
30	Kemloko	Mustika Arga Indah	Tembarak
31	Banaran	Perpustakaan Sumber Ilmu Banaran	Tembarak

Perpustakaan Desa			
No	Desa/Keluarahan	Nama Perpustakaan	Kecamatan
32	Tawang Sari	Pojok Baca	Tembarak
33	Sriwungu	Bina Wacana	Tlogomulyo
34	Losari	Perpustakaan Desa Losari	Tlogomulyo
35	Tanjungsari	Perpustakaan Sekar Tanjung	Tlogomulyo
36	Donorojo	Perpustakaan Ngudi Ilmu Donorojo	Tretep

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

4) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Adalah sebuah lembaga yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan kemampuan membaca dan belajar, selain itu bias untuk meminjam dan membaca buku, serta sebagai tempat untuk berkegiatan produktif.

Di Kabupaten Temanggung terdapat 8 (empat) TBM dan hanya 4 (empat) yang aktif melaporkan data pokok perpustakaanya di tahun 2024.

Tabel 2. 12
Daftar Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Aktif Tahun 2025

TBM			
NO	DESA/KELURAHAN	NAMA TBM	KECAMATAN
1	Butuh	Sari Ilmu	Temanggung
2	Madureso	TBM SINAR	Temanggung
3	Tegowanuh	TBM Bangga Pratama	Temanggung
4	Tempuran	Kampung Dongeng	Kaloran
5	Bonjor	TBM Lentera Pustaka	Tretep

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

5) Perpustakaan Sekolah

Merupakan semua perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah, baik PAUD, sekolah dasar, sekolah

menengah pertama, sekolah menengah atas serta termasuk sekolah madrasah Tingkat RA/BA, MI, MTs dan MA

Tabel 2. 13
Daftar Perpustakaan Sekolah yang Aktif (SD/SMP)
s.d. Triwulan II Tahun 2025

Perpustakaan SD			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
1	SD N Mranggen Kidul	OBOR ILMU	Bansari
2	SD N Rejosari	Sekaring Pakarti	Bansari
3	SD N Mojosari	NGUDI ILMU	Bansari
4	SD N Tanurejo	DIAN CENDEKIA	Bansari
5	SD N 1 Candisari	Ngudi Kawruh	Bansari
6	SD N Laranganluwok	Marsudi Ilmi	Bejen
7	SD N 1 Jlegong	BINA ILMU	Bejen
8	SD N Congkrang	Perpustakaan melati	Bejen
9	SD N Ngaliyan	Bina Bangsa	Bejen
10	SD N Ngimbrang	CAHAYA NINGRAT	Bulu
11	SD N Campursari	Bina Ilmu	Bulu
12	SD Muhammadiyah Parakan	Uulul Albab	Bulu
13	SD N Tegalrejo	CAKRAWALA KALBU	Bulu
14	SD N Pengilon	TUNAS BANGSA SDN PENGILON	Bulu
15	SD N 1 Gandurejo	SEKARING PAKARTI	Bulu
16	SD N 2 Gandurejo	MUTIARA ILMU	Bulu
17	SD N 3 Gandurejo	PERPUSTAKAAN WIYATA MANDHALA	Bulu
18	SD N 1 Bansari	PERPUSTAKAAN BINA CITRA	Bulu
19	SD N 2 Bansari	PERPUSTAKAAN MUTIARA ILMU SD N 2 BANSARI	Bulu
20	SD N 1 Gondosuli	PERPUSTAKAAN PUSPA TARUNA	Bulu
21	SD N 2 Gondosuli	BINA ILMU	Bulu
22	SD N 1 Wonotirto	Cahaya ilmu	Bulu
23	SD N 3 Wonotirto	LENTERA ILMU	Bulu
24	SD Santa Maria	PERPUSTAKAAN STAMA	Bulu
25	SD N 1 Candirototo	LENTERA BUANA	Candirototo
26	SD N Plosogaden	Cahaya Ilmu	Candirototo

Perpustakaan SD			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
27	SD N 1 Muneng	Cahaya Ilmu	Candiroto
28	SD N Ngabeyan	GEMERLAP	Candiroto
29	SD N Sidoharjo	Pustaka Ilmu	Candiroto
30	SD Mentisari	Cahaya ilmu	Candiroto
31	SD N 1 Batursari	Hanugrah Cahaya	Candiroto
32	SD N 2 Kentengsari	Sumber Ilmu	Candiroto
33	SD N Muntung	Wisma ilmu	Candiroto
34	SD N 1 Lempuyang	Cahaya Ilmu	Candiroto
35	SD N 2 Muneng	Perpustakaan Maju	Candiroto
36	SD N Krawitan	Nusa Indah	Candiroto
37	SD N Canggal Satu Atap	Sindoro Ilmu	Candiroto
38	SD N Gunung Payung	Lentera ilmu	Candiroto
39	SD N Mento	Mutiara Ilmu	Candiroto
40	SD N 3 Kemiriombo	SASANA ILMU	Gemawang
41	SD N Jambon	PERPUSTAKAAN CERIA	Gemawang
42	SD N 2 Ngadisepi	Kencana Ilmu	Gemawang
43	SD N 2 Kemiriombo	Gili Wasis	Gemawang
44	SD N Morobongo	Perpustakaan SD NEGERI MOROBONGO	Jumo
45	SD N Gunungempol	Dian Ilmu	Jumo
46	SD N Jamusan	WAHANA ILMU	Jumo
47	SD N Barang	NGUDI KAWRUH	Jumo
48	SD N 3 Getas	KHASANAH ILMU	Kaloran
49	SD N 1 Kaloran	SENDANG KAWRUH	Kaloran
50	SD N Keblukan	Sendang Ilmu	Kaloran
51	SD N 2 Gandulan	Terang Abadi	Kaloran
52	SD N 2 Kemiri	Telaga Ilmu	Kaloran
53	SD N 3 Kalimanggis	Remen Maos	Kaloran
54	SD N Tlogowungu	TELAGA ILMU	Kaloran
55	SD N 2 Kalimanggis	Bina Ilmu	Kaloran
56	SD N 1 Kemiri	Sumber Ilmu	Kaloran
57	SD N 2 Getas	Pundarika	Kaloran
58	SD N 2 Kembangsari	MELATISARI	Kandangan
59	SD Fatima Rawaseneng	Fatima	Kandangan
60	SD N Baledu	Rumah Cerdas	Kandangan
61	SD N 2 Tlogopucang	Sari Ilmu	Kandangan

Perpustakaan SD			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
62	SD N Blimbing	SENDHANG KAWERUH	Kandangan
63	SD N 1 Kedungumpul	Bina Ilmu	Kandangan
64	SD N 2 Kedungumpul	PERPUSTAKAAN SINAR MULIA	Kandangan
65	SD N Samiran	Candrawati	Kandangan
66	SD N 1 Malebo	INDRAKILA	Kandangan
67	SD N Banjarsari Kandangan	Ngudi Ilmu	Kandangan
68	SD N 1 Tlogopucang	Perpustakaan Bina Ilmu	Kandangan
69	SD N Caruban	Tunas Bangsa	Kandangan
70	SD N Wadas	Kuncup Mekar	Kandangan
71	SD N 1 Gesing	NGUDI ILMU	Kandangan
72	SD N 2 Gesing	Pusering Panuntun	Kandangan
73	SD N Kedawung	Cahaya Ilmu	Kandangan
74	SD N Margolelo	Sumber Ilmu	Kandangan
75	SD N 1 Ngemplak	Sendang Arum	Kandangan
76	SD N 1 Kembang Sari	NGUDI ILMU	Kandangan
77	SD N Kandangan	Perpustakaan SD NEGERI KANDANGAN	Kandangan
78	SD N 2 Malebo	NGUDI ILMU	Kandangan
79	SD N Rowo	SADEWA	Kandangan
80	SD N 2 Mojotengah	Cendekia	Kedu
81	SD N 1 Gondangwayang	CAHAYA ILMU	Kedu
82	SD N 1 Kedu	Sumber Ilmu	Kedu
83	SD N 2 Ngadimulyo	PESONA ILMU	Kedu
84	SD N 1 Ngadimulyo	NGUDI ILMU	Kedu
85	SD N 2 Mergowati	WIDYA PUSTAKA	Kedu
86	SD N 2 Kedu	Balai Ilmu Margi Siwi	Kedu
87	SD N 2 Bandunggede	BINA ILMU	Kedu
88	SD N 1 Bojonegoro	Mutiara Ilmu	Kedu
89	SD N 2 Bojonegoro	Lautan ilmu	Kedu
90	SD N 2 Candimulyo	Sumber Ilmu	Kedu
91	SD N 1 Mojotengah	Samudera Ilmu	Kedu
92	SD N 1 Mergowati	SUMBER ILMU	Kedu
93	SD N Karangtejo	ABADI	Kedu
94	SD N 1 Candimulyo	Wahana Ilmu	Kedu

Perpustakaan SD			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
95	SD N Salamsari	WACANA ILMU	Kedu
96	SD N Paponan	Lentera Ilmu	Kledung
97	SD N Tlahap	Jendela Ilmu	Kledung
98	SD N 2 Tuksari	KUSUMANING SIWI	Kledung
99	SD N Pare	Sumber Pekerti	Kranggan
100	SD N 2 Sanggrahan	Ngudi Ilmu	Kranggan
101	SD N 2 Gentan	Sumber Ilmu	Kranggan
102	SD N 1 Badran	PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU	Kranggan
103	SD N 2 Kramat	Jendela Ilmu	Kranggan
104	SD N 2 Kemloko	Gemilang Ilmu	Kranggan
105	SD N 2 Bengkal	SENANG BACA	Kranggan
106	SD N 2 Ngropoh	JENDELA ILMU	Kranggan
107	SD N 2 Purwosari	GURU SEJATI	Kranggan
108	SD N 2 Kranggan	ANUGRAH ILMU	Kranggan
109	SD N 1 Ngropoh	Cahaya Ilmu	Kranggan
110	SD N 1 Gentan	Perpustakaan Cahaya Ilmu	Kranggan
111	SD N 2 Badran	Sumber Ilmu	Kranggan
112	SD N 4 Kemloko	Gemilang Ilmu	Kranggan
113	SD N Manggong	Hardjo Soemarto	Ngadirejo
114	SD N Gejagan	Sumber ilmu	Ngadirejo
115	SD N 1 Tegalrejo	Cemara	Ngadirejo
116	SD N 3 Katekan	Cahata Ilmu	Ngadirejo
117	SD N 1 Mangunsari	Tunas Harapan	Ngadirejo
118	SD N Caturanom	MUTIARA ILMU	Parakan
119	SD N 3 Parakan Kauman	SMART LIBRARY/DWIJA GUNA	Parakan
120	SD N 2 Parakan Wetan	Sekar Kawruh	Parakan
121	SD N 1 Parakan Wetan	Bina Maju	Parakan
122	SD N 2 Traji	Mutiara Ilmu	Parakan
123	SD N Dangkel	Cahaya	Parakan
124	SD N 5 Parakan Kauman	KHAZANAH ILMU	Parakan
125	SD N Campursalam	Jendela Dunia	Parakan
126	SD Islam Terpadu Cahaya Insani Parakan	Perpustakaan SDIT cahaya insani	Parakan
127	SD N 1 Glapansari	Ngudi Ilmu	Parakan
128	SD N 3 Gowak	TALENTA	Pringsurat

Perpustakaan SD			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
129	SD N 3 Tuksongo	SUMBER KAWRUH	Pringsurat
130	SD N 3 Kebumen	DARUL ULUM	Pringsurat
131	SD N 3 Karangwuni	Pelangi Ilmu	Pringsurat
132	SD N 1 Gowak	Mutiara Sdagosa	Pringsurat
133	SD N 2 Klepu	JENDELA DUNIA	Pringsurat
134	SD N Selopampang	Bina Ilmu	Selopampang
135	SD N Plumbon	Marsudi Siwi	Selopampang
136	SD N Bumiayu	Jelajah Ilmu	Selopampang
137	SD N 2 Jetis	BAHANA CERIA	Selopampang
138	SD 2 Jampirejo	Perpustakaan Cerdas Ceria	Temanggung
139	SD 2 Banyuurip	Ngudi Ilmu	Temanggung
140	SD N Joho	Sumber Ilmu	Temanggung
141	SD N 2 Jampiroso	Perpustakaan Ceria	Temanggung
142	SD N 1 Jampiroso	PERPUSTAKAAN KARTINI	Temanggung
143	SD Muhammadiyah Temanggung	CAHAYA ILMU	Temanggung
144	SD N 1 Sidorejo	TUNAS HARAPAN	Temanggung
145	SD N Butuh	Perpustakaan SDN Butuh	Temanggung
146	SD N 2 Sidorejo	Perpustakaan Wahana	Temanggung
147	SD N 1 Mudal	Perpustakaan Siimud	Temanggung
148	SD N Tlogorejo	Perpustakaan Mandiri	Temanggung
149	SD N Giyanti	Cahaya Ilmu	Temanggung
150	SD N Purworejo	GEMPITA	Temanggung
151	SD N 2 Temanggung II	PERPUSTAKAAN SINAR	Temanggung
152	SD Universal	Perpustakaan Nurul Ilmi	Temanggung
153	SD Pangudi Utami	NGUDI ILMU	Temanggung
154	SD N 2 Greges	HARAPAN BANGSA	Tembarak
155	SD N 2 Jragan	Cahaya Ilmu	Tembarak
156	SD N Tembarak	HARAPAN BANGSA	Tembarak
157	SD N Tanjungsari	MEKAR MEWANGI	Tlogomulyo
158	SD N Langgeng	Abadi	Tlogomulyo
159	SD N 3 Pagersari	Perpustakaan Ceria	Tlogomulyo
160	SD N Tlogomulyo	Muara Ilmu	Tlogomulyo
161	SD N Legoksari	SARI ILMU	Tlogomulyo
162	SD N Tretep	NGUDI ILMU	Tretep

Perpustakaan SD			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
163	SD N Cemoro Satu Atap	perpustakaan SDN CEMORO SATU ATAP	Wonobo yo
164	SD N Pasantren	LENTERA ILMU	Wonobo yo

Perpustakaan SMP			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
1	SMPN 2 CANDIROTO SATU ATAP	Perpustakaan SMPN 2 CANDIROTO SATU ATAP	Candiroto
2	SMP Negeri 1 Tembarak	Perpustakaan SMP Negeri 1 Tembarak	Tembarak
3	SMP IT ISTIQOMAH TEMBARAK	Perpustakaan Ulin Nuha	
4	SMP Negeri 1 Tretep	SMP Negeri 1 Tretep	Tretep
5	SMP NEGERI 1 WONOBOYO	ADYA PUSTAKA	Wonobo yo
6	SMP N 2 Wonobo yo Satu Atap	Perpustakaan Cemara	Wonobo yo
7	SMP NEGERI 1 BANSARI	LENTERA CINDARA	Bansari
8	SMP NEGERI 1 KEDU	WIDYA PUSTAKA	Kedu
9	SMP Negeri 2 Kedu	Pandu Carita	Kedu
10	SMP NEGERI 3 KEDU	BINA CENDIKIA	Kedu
11	SMP Muhammadiyah 2 Kedu	Melati	Kedu
12	SMP Nida Al Quran Kedu	perpustakaan iqro	Kedu
13	SMP N 1 Jumo	Insan Cendekia	Jumo
14	SMP NEGERI 1 GEMAWANG	PERPUSTAKAAN GEMA SATU CITA	Gemawang
15	SMP Negeri 1 Tlogomulyo	LENTERA CENDEKIA	Tlogomulyo
16	SMP NEGERI 2 TLOGOMULYO	KHAZANAH ILMU	Tlogomulyo
17	SMP Negeri 1 Ngadirejo	Perpustakaan SMP N 1 Ngadirejo	Ngadirejo
18	SMPN 1 KRANGGAN	PERPUSTAKAAN BANGKIT	Kranggan

Perpustakaan SMP			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
19	SMP NEGERI 2 KRANGGAN	PERPUSTAKAAN SPEDUGAN	Kranggan
20	SMP PRAPANCA KRANGGAN	PERPUSTAKAAN PRAPANCA	Kranggan
21	SMP Negeri 1 Kaloran	Perpustakaan SMP Negeri 1 KALORAN	Kaloran
22	SMP NEGERI 2 KALORAN	PERPUSTAKAAN SMP N 2 KALORAN	Kaloran
23	SMP N 3 Kaloran	Perpustakan Spentika	Kaloran
24	SMP Islam Sudirman Kaloran	Sendang Kawruh	Kaloran
25	SMPN 1 KLEDUNG	WIDYA PUSTAKA	
26	SMP NEGERI 2 KELDUNG	GEMPITA	Kledung
27	SMP Negeri 1 Temanggung	Perpustakaan SMP Negeri 1 Temanggung	Temanggung
28	SMP NEGERI 2 TEMANGGUNG	R. MOEKIMAN MANGKUSUPARTO	Temanggung
29	SMP NEGERI 3 TEMANGGUNG	PERPUSTAKAAN JENIUS (Jendela Informasi untuk Semua)	Temanggung
30	SMP Negeri 4 Temanggung	Perpustakaan Kartini	Temanggung
31	SMP Negeri 6 Temanggung	Perpustakaan Ki Hajar Dewantara	Temanggung
32	SMP Masehi Temanggung	Logos Spemasi	Temanggung
33	SMP Negeri 1 Pringsurat	Perpustakaan SMP Negeri 1 Pringsurat	Pringsurat
34	SMP NEGERI 2 PRINGSURAT	WAHANA WACANA	Pringsurat
35	SMP NEGERI 1 PARAKAN	LENTERA PUSTAKA	Parakan
36	SMP Kristen Krista Citra Parakan	Edu Explorer	Parakan
37	SMP REMAJA PARAKAN	Perpustakaan SMP REMAJA Parakan	Parakan
38	SMP NEGERI 1 SELOPAMPANG	PERPUSTAKAAN LENTERA LITERASI	Selopampang
39	SMP N 1 Kandangan	GRISA PUSTAKA	Kandangan

Perpustakaan SMP			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PERPUSTAKAAN	KECAMATAN
40	SMP NEGERI 2 KANDANGAN	Perpustakaan SeSuKa (Sejuk Super BerKarakter)	Kandangan
41	SMPN 3 Kandangan	Jendela Ilmu	Kandangan
42	SMP N 1 Bulu	WASKITHA	Bulu
43	SMP N 2 Bulu	Cendekia Ceria	Bulu
44	SMP NEGERI 3 BULU	SENDANG KAHURIPAN	Bulu
45	SMP N 1 Bejen	Perpustakaan SMP N 1 Bejen	Bejen
46	SMP Negeri 2 Bejen	Perpustakaan SMP Negeri 2 Bejen	Bejen

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

2) Cakupan Naskah Kuno dan Koleksi Nasional di Kabupaten Temanggung yang dilestarikan

Koleksi Nasional menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi urusan Kabupaten/Kota adalah Program Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Koleksi Naskah Kuno menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.

Sedangkan koleksi budaya etnis nusantara menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia, baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan :

- Bahasa, mencakup 784 bahasa daerah termasuk di dalamnya tata bahasa/aksara, kamus, dan hasil kajian bahasa daerah
- Peralatan hidup/teknologi (arkeologi, pra-sejarah)
- Mata pencaharian hidup/ekonomi meliputi sistem bercocok tanam, sistem berburu, sistem berdagang.
- Organisasi sosial, organisasi adat, tata cara adat dan upacara adat
- Sistem pengetahuan meliputi ilmu obat-obatan tradisional, ilmu transformasi ajaran
- Religi meliputi sistem religi, semua ritual keagamaan
- Kesenian, meliputi antara lain seni tekstil tradisional, seni relief/ukir, seni arsitektur, seni tari, seni suara tradisional, seni bela diri, seni drama, seni masak, seni sastra, seni sastra lisan/folklor.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan kegiatan Pelestarian Naskah Kuno milik daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno mulai tahun anggaran 2021 melalui program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Penghitungan indikator Persentase penelusuran naskah kuno adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penelusuran naskah kuno yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana penelusuran naskah kuno}} \times 100\%$$

Tahun 2025 jumlah kegiatan penelusuran naskah kuno yang direncanakan adalah 20 kegiatan. Kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada awal semester 2 tahun 2025. Sehingga capaian pada triwulan I ini belum ada.

Faktor penghambat capaian indikator Persentase penelusuran naskah kuno tahun 2025 adalah :

- Kegiatan penelusuran baru akan dilaksanakan pada awal semester 2 tahun 2025;

Belum ada informasi keberadaan naskah kuno Temanggung sehingga rute penelusuran belum ditentukan.

Sedangkan faktor pendorong capaian indikator Persentase penelusuran naskah kuno tahun 2025 yaitu adanya dukungan anggaran yang berasal DAK Non Fisik Tahun 2025 untuk mengadakan kegiatan penelusuran naskah kuno. Adanya dukungan anggaran dari DAK Non Fisik tersebut, Perpustakaan Kabupaten Temanggung merencanakan mengadakan sosialisasi Naskah Kuno dengan sasaran seluruh OPD, Desa/Kelurahan, dan tokoh masyarakat Temanggung dengan tujuan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Temanggung mengenai naskah kuno dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan dan membagikan informasi yang mereka ketahui mengenai keberadaan naskah kuno kepada Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 14
Persentase Penelusuran Naskah Kuno Tahun 2021 s.d 2025
sampai dengan Triwulan I

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kegiatan Penelusuran Naskah Kuno	0	0	0	4	0
Rencana Kegiatan Penelusuran Naskah Kuno	NA	NA	NA	4	20
Persentase Penelusuran naskah kuno (%)	NA	NA	NA	100	0

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

3) BIDANG KEARSIPAN

a) Indeks Manajemen Kearsipan

Definisi Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan (Peraturan Kepala Arsip

Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan kearsipan).

b) Dasar penilaian Indeks Manajemen Kearsipan adalah :

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (pengganti Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan), dengan nilai dan kategori atas hasil audit kearsipan yang terdiri dari :

Nilai > 90 – 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)

Nilai > 80 – 90 dengan kategori A (memuaskan)

Nilai > 70 – 80 dengan kategori BB (sangat baik)

Nilai > 60 – 70 dengan kategori B (baik)

Nilai > 50 – 60 dengan kategori CC (cukup)

Nilai > 30 – 50 dengan kategori C (kurang)

Nilai > 0 – 30 dengan kategori D (sangat kurang).

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 152 tahun 2022 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Untuk memperoleh nilai audit kearsipan berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 tahun 2019, dimana nilainya diperoleh dengan penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40 % audit internal.

Tahapan pelaksanaan audit kearsipan terdiri dari pengisian formulir, verifikasi dan wawancara. Audit kearsipan internal dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung, sedangkan Audit kearsipan eksternal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung. Tahapan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 dimulai dengan penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan sebagaimana Tabel 2.15 sebagai berikut :

Tabel 2. 15
Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT)
Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan PKPKT	Januari-Februari	PKPKT	Bidang Karsipan
2.	Pembinaan	Februari	Laporan	Bidang Kearsipan
3.	Audit Internal Kearsipan	April-Mei	Laporan (RHAS)	Tim Pengawas Kearsipan Internal
4.	Entry meeting	Juni	Laporan	Tim Pengawas Kearsipan Internal
5.	Penyusunan LAKI Konsolidasi	Agustus	LAKI Konsolidasi	Tim Pengawas Kearsipan Internal
6.	Penyampaian LAKI Konsolidasi Ke ANRI	September	Dokumen LAKI Konsolidasi	Bidang Kearsipan

Data dukung Indeks Manajemen Kearsipan terdiri dari laporan audit kearsipan eksternal dan audit kearsipan internal tahun 2020 sampai dengan 2025. Tabel Indeks Manajemen Kearsipan Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 16
Indeks Manajemen Kearsipan s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target (angka)	63,00	66,00	66,60	67,00	68	70
Hasil Audit Internal	49,59	37,12	53,05	55,23	59,57 (23,82)	0
Hasil Audit Eksternal	76	65,30	68,74	81,39	82,87 (49,72)	0
Indeks Manajemen Kearsipan	65,44	54,02	62,47	70,93	73,54	0
Keterangan : perhitungan memakai rumus penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40 % audit internal.						

Sumber : Dinarpus Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.16 diatas, Indeks Manajemen Kearsipan Tahun 2025 dengan capaian 0 (nol). Hal ini disebabkan antara lain : Hasil audit kearsipan internal masih dalam proses verifikasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa tengah. Hasil audit

kearsipan eksternal masih dalam proses penilaian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 sebanyak 25 OPD eselon II yaitu :

(1) OPD eselon II

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat
- Dinas Penanaman Modal
- Bappeda
- BPKPAD
- Badan Kesbangpol
- Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Dinas Kesehatan
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Perhubungan
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Dinas Komunikasi Dan Informatika
- Dinas Koperasi dan Perdagangan
- Dinas Sosial
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- RSUD

Adapun hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 sebagaimana Tabel I.2. sebagai berikut :

Tabel 2. 17
Rekapitulasi Nilai Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI AKHIR	KATEGORI
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,866	BB (SANGAT BAIK)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,759	BB (SANGAT BAIK)
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	72,518	BB (SANGAT BAIK)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	72,162	BB (SANGAT BAIK)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,129	BB (SANGAT BAIK)
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70,123	BB (SANGAT BAIK)
7	Badan Pengelola keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	64,443	B (BAIK)
8	Dinas Perhubungan	64,065	B (BAIK)
9	Inspektorat	63,869	B (BAIK)
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	62,352	B (BAIK)
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61,272	B (BAIK)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60,990	B (BAIK)
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	60,814	B (BAIK)
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	60,172	B (BAIK)
15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	55,800	CC (CUKUP)
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55,166	CC (CUKUP)
17	Sekretariat Daerah	53,736	CC (CUKUP)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	52,576	CC (CUKUP)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51,498	CC (CUKUP)
20	Dinas Sosial	49,642	C (KURANG)
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	47,578	C (KURANG)

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI AKHIR	KATEGORI
22	Sekretariat DPRD	45,504	C (KURANG)
23	Dinas Penanaman Modal	43,056	C (KURANG)
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41,613	C (KURANG)

c) Persentase Audit Internal Kearsipan

Tahun 2025 baru melaksanakan pengawasan terhadap 6 (enam) kecamatan dan 25 (dua puluh empat) Perangkat Daerah.

Tabel 2. 18
Persentase Audit Internal Kearsipan s.d. triwulan II Tahun 2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	66.67	73.33
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan audit kearsipan	n.a	n.a	n.a	n.a	30	31
Jumlah Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	45	0
Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	66,67	68,89

Dari table 2.18 diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 31 Perangkat Daerah dengan capaian 68,89 dari target 73,33. Hal itu disebabkan oleh :

- Perubahan jumlah Unit Pengolah UP yang semula 2 (dua) menjadi 3 (tiga)
- Arahan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah prioritas adalah perangkat daerah eselon II.
- Terbatasnya arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melakukan audit kearsipan internal.

d) Persentase Arsip Vital Konvensional yang Dialihmediakan

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang (sumber undang-undang nomor 43 tahun 2009). Arsip konvensional merupakan arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Arsip vital

konvensional meliputi BPKB, sertifikat tanah, dan batas wilayah desa, kecamatan dan kabupaten.

Arsip vital konvensional yang dialihmediakan adalah proses pengelolaan arsip vital dari bentuk fisik kertas menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi.

Untuk memperoleh angka persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan dapat digunakan rumus angka jumlah arsip konvensional (vital) yang di alih mediakan di bagi jumlah arsip vital konvensional. Adapun capaian arsip vital konvensional yang dialihmediakan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2. 19
Persentase Arsip Vital Konvensional s.d Triwulan II Tahun 2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target %	20	30	40	50	55	60
Jumlah arsip vital konvensional yang dialihmediakan	980	1.471	1.965	2.454	2.709	2.809
Jumlah arsip vital konvensional	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Persentase	20	30,02	40,08	50,08	55,28	57,33

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa arsip vital konvensional yang dialihmediakan sampai dengan triwulan I tahun 2025 baru tercapai 57,33% dari target 60%.

Hal itu disebabkan antara lain :

- Belum ada regulasi (Peraturan Bupati) yang mengatur Pedoman Pengelolaan Arsip Vital diLingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sehingga masih menggunakan Peraturan Kepala ANRI dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
- Terbatasnya SDM kearsipan
- Persiapan pengawasan kearsipan

Data arsip vital konvensional yang telah dialih mediakan dari tahun 2020 s.d. Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 20
Tabel Alih Media Arsip Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan I Tahun 2025

NO	NAMA BERKAS	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Setda Bagian Umum		33				
2.	Setda		18				
3.	Sekretariat DPRD		23				
4.	Kecamatan Selopampang		19				
5.	Kecamatan Tretep		24				
6.	Kecamatan Wonobojo		20				
7.	Kecamatan Tlogomulyo		18				
8.	Kecamatan Kranggan		16				
9.	Kecamatan Kedu		18				
10.	Kecamatan Tembarak		20				
11.	Kecamatan Temanggung		41				
12.	Kecamatan Kandangan		22				
13.	Kecamatan Jumo		19				
14.	DKK		158				
15.	DPRKPLH		42				
16.	Setda Bagian Perekonomian	22					
17.	Pemerintah Kabupaten	22					
18.	KB	33		57			
19.	POLRES	13					
20.	Dinas Sosial	75					
21.	Dindikpora	75					
22.	RSUD	19					
23.	DPRD Kabupaten	10					
24.	Satpol	9					
25.	Kesbang	7					
26.	Kecamatan Pringsurat	20					
27.	Kecamatan Kledung	22					
28.	Kecamatan Ngadirejo	26					
29.	Kecamatan Parakan	20					
30.	BAPELUH	22					
31.	BAPERMADES	26					
32.	BAPPEDA	23					
33.	BKD	18					
34.	BLH	11					
35.	CAPIL	12					

NO	NAMA BERKAS	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.	DAMKAR	10					
37.	Arsip dan Perpustakaan						
38.	DPPKAD						
39.	KB						
40.	DINDIKBUD						
41.	DINPERTANBUNHUT						
42.	DINAKAN						
43.	DINBUDPORA						
44.	DINPERINDAG						
45.	DISNAKER						
46.	DPU						
47.	Dinas Kesehatan						
48.	Kecamatan Bansari						
49.	Kecamatan Bejen						
50.	Kecamatan Bulu						
51.	Kecamatan Candioto						
52.	Kecamatan Gemawang						
53.	Kecamatan Kaloran						
54.	Inspektorat			13			
55.	Dinhubkominfo			20			
B	SERTIFIKAT TANAH PEMDA						
1.	Sertifikat tanah Pemkab. Temanggung			403	490		
2.	BPBD					1	
3.	Perpustakaan dan Arsip					1	
4.	Dintanbunhut					5	
5.	Disnakan					7	
6.	Bapeluh					10	
7.	Disperindagkop					45	
8.	BPKPAD					57	150
9.	Temanggung					7	
10	Hibah					2	
11.	Tanah Pertanian dan Fasum					26	
C.	BERKAS PERMOHONAN SERTIFIKAT					94	

NO	NAMA BERKAS	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH		490	491	494	490	225	1550
JUMLAH TAHUN 2020 S.D 2025 (TW I)				2.859			

Sumber: Dinpusip Kab. Temanggung Tahun 2025

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam menentukan data pokok perpustakaan pada perpustakaan kecamatan, desa, sekolah dan TBM
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah kewenangan kabupaten Temanggung
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan literasi
- Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan dan pengembangan kearsipan
- Belum adanya kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan arsip
- - perpindahan dari budaya kerja konvensional menjadi budaya kerja digital (aplikasi) berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah tidak terdapat penambahan atau pergeseran kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2. 21
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
/	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah			
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung				3.766.251.712,00
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung				3.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung				16.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung				4.470.839,00

HASIL PENETAPAN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7
/	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah			
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung				3.766.251.712,00
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung				3.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung				16.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung				4.470.839,00

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung				8.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	23.538.500,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung				90.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung				8.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	298.141.200,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

HASIL PENETAPAN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung				8.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	23.538.500,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung				90.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung				8.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	298.141.200,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung				66.561.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	6.070.500,00
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase pengunjung di perpustakaan			
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perpustakaan yang aktif			
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				259.524.713,00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Temanggung				75.000.000,00

HASIL PENETAPAN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung				66.561.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	6.070.500,00
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase pengunjung di perpustakaan			
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perpustakaan yang aktif			
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				259.524.713,00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Temanggung				75.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	eksemplar	280.317.500,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Temanggung	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	0	Perpustakaan	2.728.000,00
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				47.272.000,00
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0	orang	421.400.000,00

HASIL PENETAPAN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	eksemplar	280.317.500,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Temanggung	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	0	Perpustakaan	2.728.000,00
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				47.272.000,00
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0	orang	421.400.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Temanggung				189.800.000,00
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Temanggung				74.014.500,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					9.000.000,00
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				

HASIL PENETAPAN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Temanggung				189.800.000,00
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Temanggung				74.014.500,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					9.000.000,00
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026							HASIL PENETAPAN 2026						
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
2	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Temanggung					2	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Temanggung				
						5.649.290.464,00							5.649.290.464,00

Sumber : Dinpusip Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namun pada tahun 2026 tidak ada usulan program dan kegiatan Masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada 12 (duabelas) inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 22
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2025

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Reward	Masyarakat	APBD	Pemberian Rewad/Penghargaan Kepada Pemustaka yang aktif memanfaatkan Perpustakaan Kabupaten	Pemustaka Teraktif	Peningkatan pengetahuan yang berdampak pada peningkatan pendidikan, ekonomi dan kesehatan	Bidang Perpustakaan /2019
2	CABE KERITING (Cara Belajar Kreatif dan Inovatif)	Masyarakat, Pelaku UMKM, Penerbit Buku, Komunitas, Pegiat Literasi	APBD	Pemberian pelatihan, workshop dan sejenisnya kepada masyarkat yang berupa pengetahuan dan ketrampilan (life skill) sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat	Masyarakat yang berdaya	Peningkatan pengetahuan yang berdampak pada peningkatan pendidikan, ekonomi dan kesehatan	Bidang Perpustakaan /2022
3	Bookfest	Masyarakat, Pelaku UMKM, Penerbit dan Agensi Buku, Komunitas, Pegiat Literasi	APBD	Pelaksanaan pameran buku, promosi kuliner dan non-kuliner, serta kegiatan literasi	Mayarakat, Pelaku UMKM, Penerbit dan Agensi Buku, Komunitas, Pegiat Literasi yang berdaya	Sarana mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan minat baca masyarakat, meningkatkan pengunjung perpustakaan dan semangat membaca masyarakat, sebagai wadah promosi penerbit dan agensi buku serta pelaku UMKM, sebagai sarana hiburan dan rekreasi masyarakat	Bidang Perpustakaan /2013

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
						serta untuk memfasilitasi penjualan langsung antara penerbit,agensi buku dan pelaku UMKM dengan masyarakat	
4	Tour de Library	Masyarakat (PAUD, SD kelas 1- 3)	APBD	Program bimbingan pemakai yang bertujuan memperkenalkan Perpustakaan kepada Pemustaka/Masyarakat	Masyarakat (PAUD, SD kelas 1- 3)	Program ini mengajak pemustaka untuk berkeliling ke perpustakaan dengan memperkenalkan fungsi setiap ruangan yang ada di Perpustakaan	Bidang Perpustakaan /2011
5	Tamasya pustaka	Masyarakat	APBD	Masyarakat (Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan lain yang berada di Kab. Temanggung	Masyarakat	Layanan koleksi perpustakaan, melalui kegiatan Perpustakaan Keliling dan kegiatan silang layan menggunakan armada perpustakaan keliling di Wilayah Kabupaten Temanggung	Bidang Perpustakaan /2022
6	Layanan PaTuh	Masyarakat (usia minimal 13 tahun)	APBD	Pelaksanaan Layanan peminjaman buku dimasa Pamdemi Covid-19	Masyarakat (usia minimal 13 tahun)	Sarana peminjaman, pengambilan dan pengembalian buku dimasa Pandemi Covid 19 melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan Protokol kesehatan secara ketat dan memilih koleksi perpustakaan yang akan dipinjam di katalog online bibliotеча.temanggungkab.go.id	Bidang Perpustakaan /2021
7	Gesbuk	Masyarakat	-	Gerakan menyumbangkan buku oleh,dari dan	Masyarakat	Hasil dari Gesbuk akan didistribusikan	Bidang Perpustakaan /2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				untuk masyarakat melalui kotak sumbangan yang berada di Perpustakaan Kabupaten.		oleh Perpustakaan Kabupaten Temanggung ke Perpustakaan Desa di Kabupaten temanggung yang masih kekurangan koleksi buku.	
8	I-Pusda Tmg	Masyarakat	APBD	Pelaksanaan Layanan Koleksi Digital Perpustakaan untuk pemustaka yang berbentuk buku digital/elektronik book	Masyarakat	Sarana Layanan koleksi digital berbentuk buku digital/elektronik book yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi android dan dekstop.	Bidang Perpustakaan /2018
9	Layanan Sabar	Masyarakat	APBD	Layanan peminjaman dan pengembalian buku serta layanan baca ditempat yang dilakukan secara terbatas sesuai prokes pada masa pandemi covid 19	Masyarakat	Layanan peminjaman dan pengembalian buku serta layanan baca ditempat yang dilakukan secara terbatas sesuai prokes pada masa pandemi covid 19 dengan pembatasan pengunjung sebanyak 20 orang per jam dan sarpras sesuai prokes.	Bidang Perpustakaan 2022
10	MENDOA N TEMANGG UNG	Masyarakat (Paud dan SD)	APBD	MENDOAN TEMANGGUNG adalah mendongeng anak Temanggung secara berkala dengan sumber cerita muatan lokal Temanggung yang menjadi koleksi Perpustakaan Kab. Temanggung	Masyarakat (Paud dan SD	MENDOAN TEMANGGUNG adalah mendongeng anak Temanggung secara berkala dengan sumber cerita muatan lokal Temanggung yang menjadi koleksi Perpustakaan Kab. Temanggung dan selama pandemi dilaksanakan melalui channel youtube	Bidang Perpustakaan /2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
						DINPUSIP pada minggu ke dua dan keempat	
11	Layanan pengembangan kepastawanan melalui inovasi layanan kopi (Konsultasi Kepustakawanan dan Literasi)	Pengelola Perpustakaan, Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Umum	APBD	Pemberian layanan KOPI kepada Pengelola Perpustakaan, Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Umum yang ingin belajar mengenai teknis pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, kepastakawan dan literasi	Pengelola Perpustakaan, Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Umum yang memahami tentang teknis pengelolaan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, kepastakawan dan literasi	Peningkatan pengetahuan teknis kepastakawan dan lieterasi	Bidang Perpustakaan /2022
12	Si Petak (Sistem Informasi Pendataan Perpustakaan)	Pengelola perpustakaan	APBD	Sistem pelaporan data pokok perpustakaan melalui aplikasi Si Petak	Data pokok perpustakaan dari perpustakaan yang berada di Wilayah kabupaten Temanggung	Data pokok perpustakaan yang tervalidasi, pencapaian target indikator program bidang perpustakaan	Bidang Perpustakaan /2023
BIDANG KEARSIPAN							
1	Layar Batik (Layanan Arsip Berbasis Tehnologi)	Masyarakat (Arsip Keluarga)	APBD	Layanannyang digunakan untuk membantu masyarakat mengalihmediakan Arsip Keluarga	Arsip Keluarga (KK, Akt Kelahiran, Setifikat Tanah,dll)	Pelayanan Arsip ini membantu masyarakat dalam penyimpanan yang lebih praktis, aman dan dapat dilihat dimana saja)	

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, tidak ada penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung 2025-2029 adalah “Meningkatnya budaya literasi masyarakat dan Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan ” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 ”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan Sasaran RPJMD yang relevan: 1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Kualitas Manajemen Kearsipan		1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60,61	60,73	60,86	60,98	61,11	61,23	
			2. Indeks Manajemen Kearsipan	73,55	73,56	73,57	73,58	73,59	74	
		Meningkatnya Kegemaaran membaca serta	1. Tingkat Kegemaran Membaca	69,29	69,54	69,79	70,04	70,29	70,54	
		Pemanfaatan perpustakaan	2. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	
		Meningkatnya Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	59,58	59,59	59,6	59,61	59,62	59,63	
		Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	1. IKM Perangkat Daerah	80,88	80,90	81	81,2	81,4	81,6	
			2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,72	69,74	69,76	69,78	69,8	69,82	

Sumber : RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan dan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Temanggung 2026

RANCANGAN RENJA DINPUSIP TAHUN 2026			RKPD DINPUSIP TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.766.251.712,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.766.251.712,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.470.839,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.470.839,00	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.538.500,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.538.500,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.200.000,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.200.000,00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.141.200,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.141.200,00	+ 72.000.000,00

RANCANGAN RENJA DINPUSIP TAHUN 2026		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.561.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.070.500,00
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	259.524.713,00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	75.000.000,00
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	280.317.500,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	2.728.000,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	47.272.000,00

RKPD DINPUSIP TAHUN 2026		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.561.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.070.500,00
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	259.524.713,00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	75.000.000,00
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	280.317.500,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	2.728.000,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	47.272.000,00

(+/-)
Pagu Indikatif
-
-
-
-
-
-
-

RANCANGAN RENJA DINPUSIP TAHUN 2026		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	421.400.000,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	189.800.000,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	74.014.500,00
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	9.000.000,00
		5.577.290.464,00

RKPD DINPUSIP TAHUN 2026		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	421.400.000,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	189.800.000,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	74.014.500,00
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	9.000.000,00
		5.649.290.464,00

(+/-)
Pagu Indikatif
-
-
-
-
+ 72.000.000,00

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp. 72.000.000,00,- dikarenakan ada penambahan anggaran yang bersumber dari dana DAU yaitu pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula di rancangan awal renja 2026 dengan anggaran Rp. 226.141.200,00.

Tabel 4. 2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Temanggung Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						5.649.290.464,00							4.238.998.464,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.649.290.464,00								4.238.998.464,00	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.649.290.464,00								4.229.998.464,00	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.290.233.751,00						-	4.218.233.751,00		
					[Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian]	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	1	1	1	1	4.290.233.751,00							4.218.233.751,00		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.766.251.712,00									
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						16.000.000,00								
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.470.839,00								
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.000.000,00								
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	23.538.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		23.538.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.000,00								
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.200.000,00								
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	298.141.200,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		226.141.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						66.561.000,00								
					-	-	-	-	-	-								4.218.233.751,00	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas				3 Unit	6.070.500,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.070.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
					[Terlaksananya pembinaan perpustakaan]	Persentase pengunjung di perpustakaan Persentase perpustakaan yang aktif	40 45	0.29 55.18	20 35	25 36	617.570.213,00							10.644.713,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						259.524.713,00								
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						75.000.000,00								
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Eksemplar	280.317.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PENGEMB ANGAN PROGRAM PERPUSTA KAAN DAERAH	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				0 Perpustakaan	2.728.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PENGEMB ANGAN PROGRAM PERPUSTA KAAN DAERAH	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						47.272.000,00								
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang	421.400.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						189.800.000,00								
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-			-	74.014.500,00						-	1.120.000,00	
					[Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]													1.120.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-				-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	1.120.000,00	
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						74.014.500,00								
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						9.000.000,00							9.000.000,00	
J U M L A H																		4.238.998.464,00	
					-	-	-	-	-	-	9.000.000,00							9.000.000,00	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	9.000.000,00	
2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						-				-	9.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	JUMLAH									5.649.290.464,00							4.238.998.464,00		

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 5.649.290.464,00 yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno serta Program Pengelolaan Arsip.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpusip dengan mengintegrasikan prinsip Pengurusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut menjadi strategi penting dalam menciptakan pelayanan public yang responsive, inklusif dan adil sehingga DINPUSIP dapat memberikan layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan investasi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat tercapai

dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUPRIYANTO, A.P., M.M.

Pembina Utama muda

NIP. 19751128 199402 1 001



**Njo Investasi
Mayar Iztine**
DPMPTSP MENUJU WBBM

#AKHLAK
Berakhlak
Investasi Pelayanan Berakhlak Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DPMPTSP
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RENJA
TAHUN 2026

HUBUNGI KAMI :



dpmptsp.temanggungkab.go.id



dpmptsp.temanggungkab



dpm_temanggungkab

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42, Temanggung



24/7

+62 851-8484-1817

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumberdaya Alama, dan
Infrastruktur,



ADI WIBOWO, SH.
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



ARIYANTO PURWOKO SIWI, S.E.
NIP. 199401222019031004

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DR. HENDRA SUMARYANA, T.
Kepala Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan (guideline) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap PD termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kabupaten Temanggung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temanggung, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	20
2.3 Data Pokok	28
2.4 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
2.7 Inovasi Perangkat Daerah	50
2.8 Penghargaan	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	53
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Tujuan dan Sasaran renja DPMPTSP	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	56
4.1 Program dan Kegiatan.....	56
BAB V PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s.d Tahun 2024 13

TABEL 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung..... 21

TABEL 2.3 Realisasi Investasi Tahun 2020-2025 TW II 28

TABEL 2.4 Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2020-2025 29

TABEL 2.5 Persentase Perusahaan yang Bermitra Tahun 2020-2025 30

TABEL 2.6 Persentase Promosi Penanaman Modal Tahun 2020-2025..... 31

TABEL 2.7 Persentase Pelayanan Perizinan Elektronik Tahun 2020-2025 32

TABEL 2.8 Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2020-2025 33

TABEL 2.9 Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan Tahun 2020-2025..... 34

TABEL 2.10 Persentase Pengaduan OSS Tahun 2020-2025 34

TABEL 2.11 Rekap Pengaduan Tahun 2025 Triwulan II 36

TABEL 2.12 Rekap Pengaduan OSS Tahun 2025 Triwulan II 36

TABEL 2.13 Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan Tahun 2020-2025 37

TABEL 2.14 Persentase Pengaduan OSS Tahun 2020-2025 37

TABEL 2.15 Rekap Pengaduan Tahun 2025 Triwulan II 39

TABEL 2.16 Rekap Pengaduan OSS Tahun 2025 Triwulan II 39

TABEL 2.17 Persentase Perusahaan Tahun 2020-2025 41

TABEL 2.18 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2020-2025 42

TABEL 2.19 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026..... 45

TABEL 2.20 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50

TABEL 2.21 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 50

TABEL 2.22 Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025 52

TABEL 3.1 Tujuan, Sasaran, indikator Sasaran, Target Kinerja
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 54

TABEL 3.2 Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung
Tahun 2026 55

TABEL 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP
Kabupaten Temanggung Tahun 2026 57

TABEL 4.2 Daftar Program Prioritas DPMPTSP dalam Mendukung
Program Bupati Tahun 2026 59

TABEL 4.3 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten
Temanggung Tahun 2026 62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

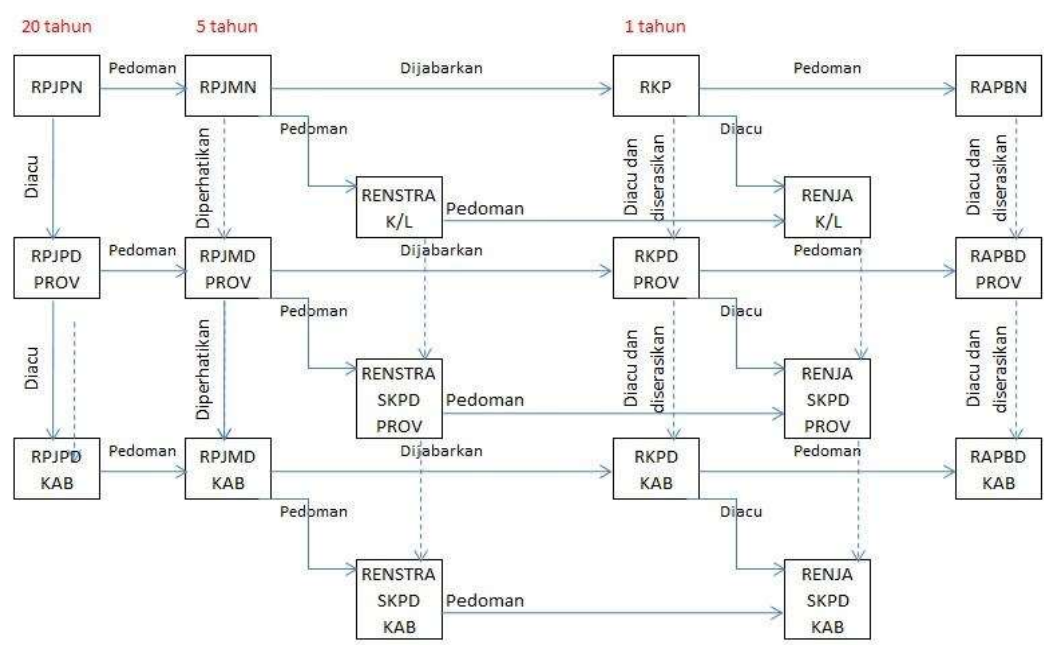
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan

bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
s.d Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	3,5		2,5			4,8		4,8	
A	PENANAMAN MODAL						1.354.629.400	806.107.200		798.065.150		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						150.000.000	25.000.000		24.422.300		24.422.300
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100		100			100		100	
		Persentase perusahaan yang bermitra	%	50		60			70		70	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupatn/kota											
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60.300.500	1	20.000.000	0	1	0	1	0
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
		Persentase promosi Penanaman modal	%	25		50			75			
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab.Kota											
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	180.901.500	1	60.000.000	7.000.000	1	6.957.200	1	6.957.200

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						409.629.400	407.907.200		404.497.489		
		Persentase pelayanan perizinan secara elektronik	%	100		100			100	-	100	
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100			100	-	100	
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	%	100		100			100	-	100	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	12.000	1.025.108.500	3.000	3.340.000.000	3.239.985.800	10.783		10.783	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesaikannya Pengaduan dan Gugatan di Pengadilan	Pelaku Usaha	200	30.150.250	200	10.000.000	7.000.000	176		176	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
		Persentase pengendalian penanaman modal	Persen	100		100			100	-	100	

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengdalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/kabupaten											
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya pemantauan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	15	180.901.500	10	50.000.000	102.774.000	149	96.555.250	149	96.555.250
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	terlaksananya BIMTEK/ Sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis Resiko	Pelaku Usaha	150	980.486.130	150	325.200.000	222.729.000	152	217.258.880	152	217.258.880
	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	15	120.601.000	10	40.000.000	79.458.000	140	55.624.172	140	55.624.172
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	30.150.250	1	10.000.000		1		1	
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	Administrasi Keuangan											

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	264	6.831.082.125	216	2.265.680.094	2.129.933.220	216	2.081.446.072	216	2.081.446.072
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	150	673.016.896	150	223.221.000	650.000.000	150	598.408.684	150	598.408.684
	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	36	18.090.150	12	6.000.000	6.999.000	15	6.811.000	15	6.811.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	90.450.750	12	30.000.000	30.000.000	12	29.949.001	12	29.949.001
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	36	90.450.750	12	30.000.000	30.000.000	12	29.709.250	12	29.709.250
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	420	105.525.875	140	35.000.000	35.000.000	140	34.843.250	140	34.843.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	90.450.750	12	30.000.000	33.735.000	12	32.880.511	12	32.880.511
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.567.613	12	4.500.000	740.000	12	725.000	12	725.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet			271.352.250	12	90.000.000	95.000.000	12	78.403.919	12	78.403.919

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	45.225.375	12	15.000.000	15.980.000	12	15.790.000	12	15.790.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.370.491.312	12	454.553.880	449.553.880	12	360.344.103	12	360.344.103
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	180.901.500	14	50.000.000	53.000.000	14	46.350.933	14	46.350.933
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	75.375.625	1	25.000.000	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	60.300.500	1	20.000.000	15.000.000	1	14.734.000	1	14.734.000

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan publik
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan;
 - b. Persentase perusahaan yang bermitra;
 - c. Persentase promoso penanaman modal;
 - d. Persentase Pelayanan Perizinan secara elektronik;
 - e. Persentase pelayanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu;
 - f. Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani;
 - g. Persentase Pengendalian Penanaman Modal;
 - h. Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- d. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - f. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha;
 - g. Pengawasan Penanaman Modal;
 - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi;
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - j. Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan;
 - k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - m. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - n. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - o. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - r. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
 - s. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - t. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - u. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Tidak ada Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 5. Tidak ada Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
 6. Tidak ada Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
 7. Tidak ada Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2025 **(Laporan IKPD)**
Kabupaten Temanggung

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Taret Kinerja Tahun 2025	
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah					
A. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																						
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																						
		1	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	2,5	3	3,5	4,83	-41,8		58,22				V		Pertumbuhan Investasi = Investasi tahun ini - investasi tahun lalu, dibagi investasi tahun lalu, kali 100%	Terbentuknya MPP dengan 132 layanan dan 12 inovasi	Lahan KPI yang masih tersedia berada dibelakang dan belum ada akses masuk	Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan kajian lahan KPI tersebut. Melaksana kanjemput bola OSS	
					Pembilang : Realisasi Investasi Daerah				2,145	1,286												
					Penyebut : Target Realisasi Investasi Daerah				2,097	2,209												
INDIKATOR PROGRAM																						
1	Program Penguatan Iklim Penanaman Modal	1	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	100	100		100	V					Jumlah Informasi peluang usaha yang disediakan di bagi jumlah peluang usaha sektor unggulan di kali 100%	Tersedianya data pendukung peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Temanggung	Tidak tersedianya anggaran untuk membuat Kajian Potensi Investasi	Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung	
				Pembilang : Jumlah Informasi peluang usaha				5	5													
				Penyebut : jumlah peluang usaha sektor unggulan				5	5													
		2	Persentase perusahaan yang bermitra	%	n.a	50	60	70	100	200		100	V					jumlah perusahaan yang bermitra dibagi jumlah perusahaan yang berkomitmen dikali seratus	Adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk bermitra dengan UMKM Kesadaran perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM cukup tinggi	Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan fasilitasi kemitraan	Melakukan Koordinasi langsung dengan perusahaan besar untuk mendorong perusahaan bermitra dengan UMKM	
				Pembilang : jumlah perusahaan yang bermitra				1	2													
				Penyebut : jumlah perusahaan besar				1	1													

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Taret Kinerja Tahun 2026
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
2	Program Promosi Penan Modal	3	Persentase promosi penanaman modal	%	n.a	25	50	75	100	100		100	V					Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan dibagi jumlah event promosi yang diikuti	Terbentuknya MPP dengan 132 layanan dan 12 inovasi	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaa n kegiatan promosi penanama n modal, belum adanya I-Pro yang siap ditawarkan kepada investor	Akan melakukan promosi bersama pada CJIBF yang diselenggara kan oleh DPMTSP Prov. Jawa Tengah
				Pembilang : Jumlah Kegiatan Promosi					3	1											
				Penyebut : Jumlah event promosi yang harus diikuti					1	1											
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	4	Persentase Pelayanan Perizinan Elektrokin	%	n.a	100	100	100	100	100		100	V					Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik di bagi dengan semua Perizinan yang masuk kali 100%	Adanya inovasi Jempol Boss dan Gampil yang mendukung proses pelaksanaan pelayanan perizinan	Adanya pemotongan anggaran untuk pelayanan perizinan, di satu sisi DPMTSP harus mem berikan layanan publik yang optimal dalam rang ka mening katkan kua litas layanan publik khususnya di bidang perizinan	Untuk laya Nan konsul tasi bisa di laksanakan secara online dan memaksimal kan call center melalui wa untuk pendam pingan layanan
				Pembilang : Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik					10.116	9,544											
				Penyebut : Semua Perizinan yang Masul					10.116	9,544											
		5	Persentase Perizina diterbitkan tepat W	%	100	100	100	100	100	100		100	V					Jumlah Izin yang diterbit kan tepat waktu dibagi jumlah	Adanya beberapa inovasi yang sangat mendukung	Kurang nya sosialisasi terkait regulasi yang ada di	Mengguna kan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi
				Pembilang : Perizinan yang terbit tepat waktu					10.959	9.544											
				Penyebut : Jumlah pengajuan perizinan					10.959	9.544											

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Taret Kinerja Tahun 2025	
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah					
																		permohonan izin dikali 100%	proses pelayanan perizinan kepada masyarakat sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan izin usaha secara tepat waktu sesuai dengan SOP	dinas teknis (RTRW, PBG, Persetujuan Lingkungan, dan regulasi teknis lain nya) sehingga pelaku usaha belum men dapatkan gambaran mengenai proses perizinan	terkait regulasi baru di bidang perizinan yang bersifat teknis	
		6	Persentase Pengajuan Masyarakat yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100		100	V						Menggunakan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi terkait regulasi baru di bidang perizinan yang bersifat teknis	Adanya fasilitas layanan aduan di MPP yang memberikan kemudahan bagi masyarakat jika akan melakukan pengaduan	Tidak ada anggaran yang khusus untuk menangani aduan, biaya yang ada menggunakan kegiatan fasilitas layanan konsultasi perizinan	Mengguna Kan layanan aduan on line melalui google form,WA, email
				Pembilang : Jumlah pengaduan yang tertangani							176	1										
				Penyebut : Pengaduan Masyarakat							176	1										
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	%	n.a	12	16	20	100	125		100	V					Jumlah perusahaan yang didampin gi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun / Jumlah Perusahaan Wajib LKPM * 100%	1. Adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melaku kan pelaporan LKPM 2. Kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM	Tidak tersedia nya anggaran pelaksanaan kegiatan pendamping an LKPM	Melakukan Pendamping an LKPM secara online	
				Pembilang : Jumlah Perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun							149	15										
				Penyebut : Jumlah Perusahaan Wajib LKPM							149	12										

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8	Persentase Pengelolaan dan Informasi Penanaman Modal	%	n.a	100	100	100	100	100		100						jumlah dokumen yang disajikan jumlah dokumen data yang wajib disajikan dikali 100%	Tersedianya data di Sistem OSS-RBA	Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data	Menjalin koordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat terkait sistem OSS
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							58	0	0	0	1	0				
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				8	RATA-RATA CAPAIAN INDIKTOR PROGRAM							100	8	0	0	0	0				
JUMLAH TOTAL INDIKTOR PERANGKAT DAERAH				9	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH							79,11	8	0	0	1	0				
					KRETERIA PENILAIAN REALISASI							TINGGI									

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 8 terdiri dari:
 - a. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya data pendukung peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk membuat Kajian Potensi Investasi baru'
 - 3) Upaya Pencapaian Target Kinerja indikator tersebut adalah melakukan koordinasi dengan PD pengampu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung.
 - b. Persentase perusahaan yang bermitra.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk bermitra dengan UMKM dan kesadaran perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM cukup tinggi.
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk melakukan fasilitasi kemitraan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi langsung dengan perusahaan besar untuk mendorong perusahaan bermitra dengan UMKM.
 - c. Pesentase Promosi Penanaman Modal
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terbentuknya MPP (Mal Pelayanan Perizinan) dengan 132 layanan dan 12 Inovasi
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal dan belum adanya I Pro yang siap ditawarkan kepada investor.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan promosi bersama pada CJIBF yang diselenggarakan oleh DPMPSP Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya inovasi Jempol Boss dan Gampil yang mendukung proses pelaksanaan pelayanan perizinan.
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah adanya pemotongan anggaran untuk pelayanan perizinan, di satu sisi DPMPTSP harus memberikan layanan Publik yang optimal dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya di bidang perizinan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk layanan konsultasi bisa dilaksanakan secara online dan memaksimalkan call center melalui WA untuk pendampingan layanan.
- e. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya beberapa inovasi yang sangat mendukung proses pelayanan perizinan kepada masyarakat sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan izin usaha secara tepat waktu sesuai dengan SOP.
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah kurangnya sosialisasi terkait regulasi yang ada di dinas teknis (RTRW, PBG, Persetujuan Lingkungan, dan regulasi teknis lainnya) sehingga pelaku usaha belum mendapatkan gambaran mengenai proses perizinan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menggunakan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi terkait regulasi baru di bidang perizinan yang bersifat teknis.
- f. Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya fasilitas layanan aduan di MPP yang memberikan kemudahan bagi masyarakat jika akan melakukan pengaduan.
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak ada anggaran yang khusus untuk menanggapi aduan dan biaya yang ada menggunakan kegiatan fasilitasi layanan konsultasi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

menggunakan layanan aduan online melalui google form, WA, Email.

- g. Persentase Pengendalian Penanaman Modal
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan pelaporan LKPM dan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM.
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendampingan LKPM
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendampingan LKPM secara Online.
- h. Persentase Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya data di Sistem OSS-RBA
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menjalinkan koordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat terkait sistem
2. Capaian indikator dengan status Sangat rendah tidak ada.
3. Capaian indikator dengan status rendah ada 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Pertumbuhan realisasi investasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terbentuknya MPP dengan 1332 layanan dengan 12 inovasi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah lahan KPI yang masih tersedia berada dibelakang dan belum memiliki akses masuk
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan PD terkait untuk melakukan kajian lahan KPI dan melaksanakan kegiatan Jemput Bola OSS.

2.3. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Penanaman Modal dan Data Pokok Bidang Perizinan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Data Pokok Bidang Penanaman Modal
 - a. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan

Tabel 2.3
Realisasi Investasi Tahun 2020-2025 TW II
(Dalam Milyar)

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Nilai investasi tahun berjalan	1.245	1.496	1.836	2.046	2.145	94
2	Nilai investasi PMDN	1.2456	1.486	1.529	1.326	1.923	1,191
3	Nilai investasi PMA	-	10	306	719	221	1.286

Sumber : OSS.go.id

- b. Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan
Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung.
Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.
Rumus Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan adalah :

Jumlah Informasi peluang usaha yang disediakan

X 100%

Jumlah peluang usaha sektor unggulan

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2023 hingga tahun 2025 Triwulan II jumlah peluang usaha yang sudah diinformasikan sudah 100 % dari jumlah Peluang usaha yang ada.

Tabel 2.4
Persentase Kajian Teknis Investasi
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah informasi yang disediakan	3	3	5	5	5	5
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	5	5	5	5	5	5
	Persentase	60	60	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan II

c. Persentase Perusahaan yang Bermitra

Perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah perlu ditunjang dengan kemitraan antara usaha Mikro, Kecil , dan Menengah di daerah dengan kekerjasama dengan perusahaan besar yang ada didaerah.

Tujuan dilaksanakan kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;

- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri;
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Wujud Kerjasama adalah memberikan fasilitasi dengan koordinasi dengan dinas terkait (Dindagkop Kabupaten Temanggung) terkait dengan data UMK yang telah lengkap memiliki izin seperti NIB, SPPIRT, Halal. Langkah berikut memilih produk makanan terkait kualitas produk, kemasan dan perizinan. Setelah itu membantu pelaku usaha UMK untuk memasarkan poduknya dengan pihak ke tiga. Sejak tahun 2023 pihak ketiga yang dipilih adalah dari perusahaan besar di kabupaten Temanggung Lariz swalayan dan Mahkota Swalayan. Produk yang telah lolos uji kualitas dan perizinan akan dipasarkan oleh pihak ketiga tersebut.

Rumus presentase perusahaan yang bermitra adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang bermitra}}{\text{Jumlah perusahaan yang berkomitmen}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Persentase Perusahaan Yang Bermitra
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Yang Bermitra	n.a	n.a	2	2	1	2
2	Jumlah Perusahaan Yang berkomitmen	n.a	n.a	2	2	1	1
	Persentase	n.a	n.a	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II (data diolah)

d. Persentase Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal merupakan salah satu program dan kegiatan bidang penanaman modal yang meliputi analisis potensi investasi, perencanaan strategi promosi, pengembangan materi promosi, partisipasi dalam acara promosi, pelayanan informasi dan

kerjasama dengan pihak eksternal. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan realisasi investasi. Rumus Presentase Promosi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah event promosi yang harus diikuti}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Persentase Promosi Penanaman Modal
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Jumlah Promosi yang diikuti	1	3	8	3	3	1
2	Jumlah Event Promosi yang harus diikuti	1	1	1	1	1	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa *Event* Promosi yang mengikuti dari tahun 2020 – 2025 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2020 kegiatan Promosi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan. Kegiatan Promosi pada tahun 2025 disamping melalui event-event, prososi juga dilaksanakan melalu media sosial yang ada.

2. Data Pokok Bidang Perizinan

a. Persentase Pelayanan Perizinan Secara Elektronik

Pelayanan perizinan secara elektronik adalah sistem yang memudahkan proses pengajuan, pengolahan, dan penerbitan izin melalui aplikasi. Pelayanan perizinan secara elektronik merupakan langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih responsif dan akuntabel.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial.Rumus indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik}}{\text{Semua Perizinan yang masuk}} \times 100\%$$

Tabel 2.7
Persentase Pelayanan Perizinan Elektronik
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah permohonan Elektronik yang terlayani	6.023	10.124	11.566	13.781	10.959	9.988
2	jumlah permohonan Elektronik yang masuk	6.575	10.124	11.791	13.781	10.959	9.988
	Persentase	91,60	100	98,09	100	100	100

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go.id, mppd

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan Elektronik pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan Elektronik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi Simbg, MPPD dan *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara elektronik.

Pada tahun 2021 data perizinan elektronik Dinas Penanaman Modal dan Peyanan Terpadu Satu Pintu yang terlayani sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan setiap pengajuan perizinan secara elektronik langsung terlayani oleh sistem.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara elektronik dan data keseluruhan permohonan izin.

Untuk tahun 2022 data perizinan eletronik sebanyak 11.566 dari keseluruhan izin sebanyak 11.791 atau sebesar 98,09 %.

Untuk tahun 2023 data perizinan elektronik sebanyak 13.781 dari keseluruhan izin sebanyak 13.781 atau sebesar 100%.

Tahun 2024 data perizinan elektronik sebanyak 10.959 dari keseluruhan izin sebanyak 10.959 atau sebesar 100%.

Tahun 2025 data perizinan elektronik triwulan II permohonan yang terbit sebanyak 9.988 dari keseluruhan pengajuan atau sebesar 100%.

b. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100.

Tabel 2.8
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2020-2025
d.

NO	URAIAN	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Izin tepat waktu	6091	10.294	11,791	13.781	10.959	10.959
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	6575	10.294	11,791	13.781	10.959	10.959
3	Persentase	92,64	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

c. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidak sesuaian standar proses perizinan atau ketidak sesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Jumlah pengaduan yang tertangani

Jumlah Pengaduan Masyarakat

X 100%

Tabel 2.9
Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan
Tahun 2020-2025
d.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	12	12	4	3	6	1
2	Jumlah Pengaduan	12	12	4	3	6	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II

Tabel 2.10
Persentase Pengaduan OSS
Tahun 2020-2025
e.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20

2	Jumlah Pengaduan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : Oss.go.id

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Peyanan Terpadu Satu Pintu dan Peyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang

jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan, pada tahun 2022 aduan yang masuk sejumlah 4 pengaduan, Sedangkan pada tahun 2023 pada 6 Pengaduan. Sedangkan di tahun 2024 pengaduan yang masuk sejumlah 6 pengaduan yang masuk dan semuanya tertangani.

Data Rekap pengaduan DPMPSTSP dan OSS tahun 2025 triwulan II yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Rekap Pengaduan
Tahun 2025 Triwulan II

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	1	1	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	JUMLAH	1	1	

Sumber : DPMPSTSP 2025 triwulan II

Tabel 2.12
Rekap Pengaduan OSS
Tahun 2025 Triwulan II

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	20	20	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	JUMLAH	20	20	

Sumber : DPMPSTSP 2025 triwulan II

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas

penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparaturnya pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidaksesuaian standar proses perizinan atau ketidaksesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Jumlah pengaduan yang tertangani

Jumlah Pengaduan Masyarakat

X 100%

Tabel 2.13
Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan
Tahun 2020-2025
f.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	12	12	4	3	6	1
2	Jumlah Pengaduan	12	12	4	3	6	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV

Tabel 2.14
Persentase Pengaduan OSS
Tahun 2020-2025
g.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20

2	Jumlah Pengaduan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : Oss.go.id

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan.

Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan, pada tahun 2022 aduan yang masuk sejumlah 4 pengaduan, Sedangkan pada tahun 2023 pada 6 Pengaduan. Sedangkan di tahun 2024 pengaduan yang masuk sejumlah 6 pengaduan yang masuk dan semuanya tertangani. Data Rekap pengaduan DPMPTSP dan OSS tahun 2025 triwulan II yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Rekap Pengaduan
Tahun 2025 Triwulan II

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	1	1	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	JUMLAH	1	1	

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II

Tabel 2.16
Rekap Pengaduan OSS
Tahun 2025 Triwulan II

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	20	20	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	JUMLAH	20	20	

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II

e. Persentase Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian Penanaman Modal adalah proses pengawasan dan pengaturan investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa investasi yang masuk ke suatu negara atau daerah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Tujuan dari pengendalian ini meliputi:

- 1. **Mendorong Investasi yang Berkualitas:** Memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif.
- 2. **Meminimalkan Risiko:** Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari investasi, seperti dampak lingkungan atau sosial.
- 3. **Mematuhi Regulasi:** Memastikan bahwa semua investasi mematuhi hukum dan peraturan yang ada, termasuk perizinan dan ketentuan perpajakan.
- 4. **Meningkatkan Transparansi:** Mendorong keterbukaan dalam proses investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor.
- 5. **Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:** Mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman modal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dapat langsung melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada DPMPTSP provinsi.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan terhadap Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan/atau Perizinan yang diterbitkan melalui SPIPISE.

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota atas kegiatan usaha PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;

Rumus Presentase Pengendalian Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Perusahaan Wajib LKPM}} \times 100$$

Tabel 2.17
Persentase Perusahaan
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Perusahaan yang didampingi	n.a	n.a	n.a	n.a	149	15
2	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	n.a	n.a	n.a	n.a	12	12
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMP TSP 2024 triwulan IV

f. Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data terkait investasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal:

- Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data yang relevan mengenai proyek investasi, termasuk informasi tentang investor, sektor industri, lokasi, dan dampak ekonomi.
- Pengolahan Data:** Memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengolahan data.
- Penyimpanan Data:** Mengelola database yang terstruktur dengan baik agar data dapat diakses dengan mudah. Keamanan data juga menjadi perhatian penting untuk melindungi informasi sensitif.
- Penyebaran Informasi:** Membagikan informasi kepada stakeholder, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui laporan, situs web, dan platform lainnya.
- Pemantauan dan Evaluasi:** Mengawasi perkembangan investasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan investasi di masa depan.
- Kerjasama Lintas Sektor:** Mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang penanaman modal.

Dengan pengelolaan yang efektif, data dan informasi penanaman modal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rumus Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen data yang disajikan}}{\text{Jumlah dokumen data yang wajib disajikan}} \times 100$$

Tabel 2.18
Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Data Yang Disajikan	n.a	1	1	1	1	1
2	Jumlah Data Yang Wajib Disajikan	n.a	1	1	1	1	1
	Persentase	n.a	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP data diolah tahun 2025 TW II

Dari tabel diatas pengelolaan data dan informasi penanaman modal sejak tahun 2021 hingga 2025 tersedia 1 (satu) data yaitu Sistem OSS-RBA.

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 8 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Pertumbuhan realisasi investasi

Hal ini disebabkan karena baru diukur dalam triwulan II dan investasi akan tercapai bahkan melebihi target saat memasuki triwulan IV.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

- Lahan KPI yang masih tersedia berada di belakang dan belum ada sarana dan prasarana terutama akses jalan masuk;
- Kajian potensi investasi masih kurang saat ini baru ada 5 kajian potensi investasi;
- Belum dapat melaksanakan fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dikarenakan belum tersedia anggaran;
- Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal masih sangat sedikit sehingga promosi investasi belum maksimal;
- Belum ada I-Pro yang siap ditawarkan kepada investor;
- Adanya pemotongan anggaran untuk pelayanan perizinan, sehingga pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- Kurangnya sosialisasi terkait regulasi yang ada di dinas teknis (RTRW, PBG, Persetujuan Lingkungan, dan regulasi teknis lainnya) sehingga pelaku usaha belum mendapatkan gambaran mengenai proses perizinan;
- Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan kajian lahan KPI tersebut;
- Melaksanakan jemput bola OSS;
- Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung;
- Melakukan koordinasi langsung dengan perusahaan besar untuk mendorong perusahaan bermitra dengan UMKM;

- Menggunakan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak teranggarkan atau minim anggaran.

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.19
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026								RANCANGAN AWAL RKPD 2026 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	KE T
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah			2.345.666.263			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah			2.345.666.263	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang/bulan	2.345.666.263			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang/bulan	2.345.666.263	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	150.000.000			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	150.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.365.500			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.365.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.365.500			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.365.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	75	Paket	25.000.000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	75	Paket	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	30.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	30.000.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			458.860.000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			556.756.335	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	150.000.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	268.360.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	401.256.335	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			604.995.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	15.000.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	604.995.500	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Unit	80.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Unit	15.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	182	Unit	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	182	Unit	15.000.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	92	%	6.000.000			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	92	%	100.000.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota			6.000.000			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota			100.000.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	6.000.000			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	20.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			80.000.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			-			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80.000.000	
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	92	%	500.000.000			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			92	%	700.000.000	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					500.000.000			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota					700.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	500.000.000			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	400.000.000	

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	1	Dokumen	300.000.000	
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	92	%	212.000.000		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			92	%	212.000.000	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			212.000.000		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			212.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	1	Dokumen	20.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	1	Dokumen	20.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000	Pelaku Usaha	212.000.000		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000	Pelaku Usaha	182.000.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	10.000.000		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	10.000.000	
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Temanggung	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	92	%	100.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			92	%	99.000.000	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			99.000.000	
	Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kabupaten Temanggung	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	Kegiatan usaha	10.000.000			Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Kegiatan usaha	10.000.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	Pelaku USaha	60.000.000			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	Pelaku USaha	60.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	Kegiatan Usaha	30.000.000			Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50	Kegiatan Usaha	29.000.000	
	JUMLAH					3.833.891.763			JUMLAH					4.974.783.598	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Tidak ada usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun dalam proses ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.20
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			N I H I L		

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Guna mendukung pencapaian Indiktor Kinerja selama kurun waktu tahun 2024-2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat 14 (empat belas) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2024-2025

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN
1.	JEMPOL BOSS	Kegiatan pembuatan NIB untuk pelaku usaha UMKM terutama di luar Kecamatan Temanggung untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan izin usaha (NIB)
2.	KARPARK	Memastikan pemohon yang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Temanggung mendapatkan kartu parkir agar pemohon lebih nyaman dan tenang saat melakukan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Temanggung
3.	QR CODE PBG	Plakat Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan DPMPTSP tidak lagi diketik secara

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN
		manual terkait data bangunan gedungnya, melainkan sudah menggunakan QR CODE untuk mempermudah pengawasan bangunan gedung
4.	NGOBRAS (Ngobrol Santai)	Obrolan santai kemajuan kinerja pegawai DPMPTSP untuk menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi dan meningkatkan kinerja semua pegawai
5.	SIBARENG (Sistem Informasi Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung)	pembayaran untuk membantu proses pembayaran retribusi PBG dengan kode bayar yang dikirim ke akun SIMBG pemohon secara langsung
6.	TUAN KAMI (Waktu Anda Kami Hargai)	Pelayanan Penambahan 1 KBLI di OSS-RBA khusus untuk UMK hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit
7.	LAPOR BU! (Layanan Pendampingan OSS RBA Badan Usaha)	Membantu pelaku usaha dengan melakukan pendampingan pembuatan NIB khusus Badan Usaha setiap hari Selasa dan Kamis
8.	BOSUKMA (Barcode Survey Kepuasan Masyarakat)	Mempermudah masyarakat dalam memberikan penilaian kepada DPMPTSP dengan memberikan barcode SKM di meja pelayanan.
9.	CAKITAS (Catatan kaki Integritas)	Membubuhi <i>footnote</i> atau catatan kaki untuk seluruh surat keluar yang menginformasikan bahwa “Pegawai DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap”
10.	LAZOOM	Layanan Via Zoom Pelayanan 24/7 bagi masyarakat untuk layanan konsultasi secara daring melalui aplikasi ZOOM
11.	24/7	Pelayanan Selain Jam Kerja Via Whatsapp
12.	LAYANAN MULTIHHELIX	Layanan Permohonan Izin tanpa turun dari kendaraan (Latatur/Layanan Tanpa Turun)
13.	SIAP TANAM	Aksi Pendampingan Penanaman Modal
14.	GAMPIL	Gerakan Pendampingan Pelayanan Perizinan
15.	SIPITE	Sistem Informasi Potensi Investasi Kabuten Temanggung
16.	SIPDEG	Sistem Presensi dengan GPS
17.	POP-INVEST	Pesan Otomatis Promosi Investasi Temanggung
18.	RETALiate	Rekap Data Online dan Terintegrasi
19.	OME GOOD	One Minute Education Good
20.	Si KOALA	Solusi Kolaboatif untuk Sinkronisasi Data Reklame

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu tahun 2024-2025, Penghargaan yang telah diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22
Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPSTP Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Tahun Perolehan
1.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokari	Nasional	2024
2.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Nilai : 95,40 (Kualitas Tertinggi)	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Nasional	2024
3.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kementerian Ivestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Nasional	2024
4.	Juara I KRENOVA	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
5.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
6.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
7.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
8	Peringkat I KRENOVA Kategori Perangkat Daerah	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2025
9	Peringkat III KRENOVA Kategori ASN	Kabupaen Temanggung	Kabupaten	2025
8	Top 10 IDEA Jateng 2025 (GAMPIL)	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	2025
9	Top 10 IDEA Jateng 2025 (JEMPOL BOSS)	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	2025
10	Finalis KIPP Tingkat Nasional 2025 (JEMPOL BOSS)	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	Nasional	2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029 adalah “MENINGKATKAN IKLIM REALISASI INVESTASI DAN KUALITAS PELAYANAN MPP (MAL PELAYANAN PUBLIK)” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI, MENINGKATKAN SISTEM LAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK, DAN MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2030
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)			Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Milyar	2.150	2.162
	Meningkatnya Proyek Investasi		Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN	Proyek		5.060
	Meningkatnya Jumlah Layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)		Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	Persen	90	98
			Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di MPP	Layanan	1	3
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	94	98
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persen	94	98
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non berizinan Bebas Calo	Persen	94	98
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Persen	92	98

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Hal tersebut sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No.	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Diversifikasi Perekonomi untuk penghidupan yang stabil	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	Peningkatan Investasi	Peningkatan investasi sektor strategi dengan memberikan kemudahan perizinan dan Promosi Peluang Investasi kepada Investor
			Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)	Menambah jumlah layanan di MPP sebanyak 1 jenis layanan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+/-)
No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263	-
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	-
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah		c	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.500		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.500	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	-
d	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Sarana prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	604.995.500		Pengadaan Sarana prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	604.995.500	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.256.335		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.256.335	-
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	-
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		

RANCANGAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026		
No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000
b	Pembuatan Peta Potens Investasi Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	80.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	300.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
a	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20.000.000
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	182.000.000
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10.000.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	60.000.000
	Pengawasan Penanaman Modal	29.000.000
	JUMLAH	4.974.783.598

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+/-)
No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000	-
b	Pembuatan Peta Potens Investasi Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	80.000.000	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	300.000.000	-
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
a	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20.000.000	-
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	182.000.000	-
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	-
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10.000.000	-
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	60.000.000	-
	Pengawasan Penanaman Modal	29.000.000	-
	JUMLAH	4.974.783.598	

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2026.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati Temanggung menetapkan **Peningkatan Jumlah Layanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP)** sebagai salah satu program prioritas tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menciptakan iklim investasi yang inklusif, mempercepat pelayanan perizinan, serta mendorong keterlibatan multipihak dalam pembangunan daerah.

Mal Pelayanan Publik tidak hanya menjadi pusat layanan administratif, tetapi juga dioptimalkan sebagai pintu masuk strategis untuk meningkatkan promosi investasi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan identitas ekonomi lokal Temanggung. Untuk mendukung prioritas tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan beberapa inisiatif utama yang dapat dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Daftar Program Prioritas DPMPTSP Dalam Mendukung Program Bupati Tahun 2026

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan jumlah layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik	Peningkatan jumlah jenis layanan perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu di MPP Kabupaten Temanggung	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Perzinan	Tahun 2026 1. Layanan DPMPTSP 8 jenis 2. Layanan MPP 132 jenis Anggaran Rp. 150.000.000,-

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
2	Promosi dan menjaring Multipihak dalam kerjasama pembangunan	Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanama Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tahun 2026 Rp. 325,000,000,-
3	Penyelenggaraan Forum Promosi dan Investasi Secara Reguler	Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanama Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tahun 2026 Rp. 155,000,000,-

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pengembangan Brand Temanggung sebagai Pusat Tembakau & Kopi	Meningkatnya Pendapatan Petani dan Pelaku Usaha dengan Kenaikan harga jual hasil tembakau dan kopi seiring dengan peningkatan permintaan melalui strategi promosi yang dilaksanakan.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tahun 2026 Rp. 300.000.000
6	Menjaring Investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan UMKM dan lapangan kerja	Kegiatan Kemitraan Usaha Nasional Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Tahun 2026 Rp. 20.000.000

Tabel 4.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung
Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional 1	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.974.783.598,00								4.933.580.939,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.974.783.598,00							4.933.580.939,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.974.783.598,00							4.933.580.939,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.863.783.598,00						-	3.482.480.939,00	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.345.666.263,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	2.580.232.889,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.345.666.263,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		2.580.232.889,00
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	150.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	165.000.000,00
	2	18	01	2.05	0010	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBHCHT	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		165.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	111.365.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	122.502.050,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.365.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		7.002.050,00	
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	1	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	25.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00
	2	1	01	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00
	2	1	01	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	30.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		33.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													program prioritas			
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	604.995.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	16.500.000,00
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	604.995.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		16.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	556.756.335,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	488.246.000,00
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		550.000,00
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		165.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	25.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	401.256.335,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		295.196.000,00
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	95.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	110.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	1	01	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	75.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		88.000.000,00
	2	1	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		16.500.000,00
	2	1	01	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		5.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													program prioritas			
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	100.000.000,00						-	94.600.000,00
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	20.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	6.600.000,00
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		6.600.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	88.000.000,00
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		88.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional 1	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase promosi penanaman modal	75 %	700.000.000,00						-	900.000.000,00		
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi yang diikuti	1 Kegiatan	700.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	900.000.000,00		
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		550.000.000,00		
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota												
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		350.000.000,00		
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	212.000.000,00						-	346.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	212.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	346.500.000,00
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah										
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		22.000.000,00
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	182.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		313.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko												
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		11.000.000,00		
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	99.000.000,00						-	110.000.000,00		
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	99.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	110.000.000,00		
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		11.000.000,00		
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha												
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		66.000.000,00		
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal												

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional 1				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			300				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	29.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		33.000.000,00
	J U M L A H								4.974.783.598,00							4.933.580.939,00

BAB V

PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026, dapat disampaikan beberapa hal penting:

1. Keselarasan dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

RENJA DPMPTSP telah dirancang untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung periode 2025–2029, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan investasi, perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terjangkau. Dokumen ini selaras dengan isu strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026;

2. Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP yang termuat dalam RENJA diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan strategis Kabupaten Temanggung, yaitu: terwujudnya masyarakat berkualitas dan berdaya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik KKN;

3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Investasi

Dengan penerapan sistem perizinan berbasis elektronik (OSS), One-Stop Service yang lebih responsif, serta kemitraan strategis dengan dunia usaha dan masyarakat, RENJA ini mendorong percepatan investasi dan kewirausahaan lokal, sekaligus mempermudah UMKM untuk berdaya saing serta mengangkat perekonomian lokal yang inklusif.

4. Sinergi dengan Stakeholder dan Lintas Sektor

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, OPD perangkat daerah, akademisi, sektor swasta, hingga komunitas lokal—telah menjadi bagian penting dalam penyusunan RENJA ini. Proses Musrenbang hingga Forum Perangkat Daerah memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan lintas sektor pembangunan.

5. Komitmen Terhadap Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan Berkelanjutan

RENJA ini dilengkapi dengan indikator kinerja dan target operasional yang jelas, serta mekanisme evaluasi berkala dan audit

internal. Komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mendapat kepercayaan publik.

Dengan demikian, RENJA DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terintegrasi secara kuat dengan arah pembangunan daerah dan ditujukan agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Temanggung.

Harapan kami semoga RENJA ini menjadi acuan kerja yang kokoh bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam menyediakan layanan publik yang prima, mendukung iklim investasi yang kondusif, dan memperkuat pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Bersama seluruh *stakeholder*, mari wujudkan **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, DAN AMAN** melalui sinergi dan inovasi dalam pelayanan publik.

Temanggung, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,


DWI SUKARMEI, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740608 200312 1 008

RENCANA KERJA
(R E N J A)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2026



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2026

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

EWIEK KHAVIDA S.STP, M.M.
NIP. 19730501 199603 2 004

Verifikator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

RIMA ADHI HAPSARI S.Sos.
NIP. 19971019 202202 2 002

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 1992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 disusun untuk menjalankan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk dilakukan review.

Akhirnya kami berharap semoga Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pencapaian visi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DPPPAPPKB



DRA. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M

NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

HALAMAN VERIFIKASI..... 2

KATA PENGANTAR..... 3

DAFTAR ISI..... 4

DAFTAR TABEL..... 5

BAB I PENDAHULUAN 6

 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan 6

 1.2. Landasan hukum..... 11

 1.3. Maksud dan Tujuan 13

 1.3. Sistematika Penulisan 14

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB 15

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 dan capaian
 Renstra Tahun 2024 -2026 15

 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB 50

 2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) DPPPAPPKB 50

 2.2.2 Data pokok..... 59

 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB..... 109

 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD..... 111

 2.5 Penelaahan Usulan Program dam Kegiatan Masyarakat..... 127

 2.6. Inovasi Perangkat Daerah..... 127

 2.7 Penghargaan 128

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 129

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 129

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB..... 129

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 133

 4.1 Program dan Kegiatan 133

BAB V PENUTUP..... 154

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB s/d Tahun 2023.....	16
Tabel	2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB s/d Triwulan I Tahun 2024	32
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPPAPPKB Triwulan I Tahun 2024.....	51
Tabel	2.4	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.....	60
Tabel	2.5	PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD.....	61
Tabel	2.6	Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah	69
Tabel	2.7	Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	70
Tabel	2.8	Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD.....	72
Tabel	2.9	Pervalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	73
Tabel	2.10	Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan.....	75
Tabel	2.11	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	76
Tabel	2.12	Persentase Desa sayang ibu dan bayi	78
Tabel	2.13	Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi	80
Tabel	2.14	Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung	82
Tabel	2.15	Persentase anak korban kekerasan kabupaten Temanggung.....	83
Tabel	2.16	Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung	85
Tabel	2.17	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan....	86
Tabel	2.18	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	88
Tabel	2.19	PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmet need).....	89
Tabel	2.20	PUS < 20 TH	91
Tabel	2.21	PUS Dibawah 20 Tahun Kabupaten Temanggung	91
Tabel	2.22	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th.....	93
Tabel	2.23	ASFR 15 – 19 TH Kabupaten Temanggung	94
Tabel	2.24	Persentase PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern	95
Tabel	2.25	PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern.....	95
Tabel	2.26	Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung	96
Tabel	2.27	Persentase kepesertaan KB aktif/Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun.....	97
Tabel	2.28	Persentase PUS MKJP Kabupaten Temanggung.....	98
Tabel	2.29	Jumlah Pus yang menggunakan alokon MKJP.....	100
Tabel	2.30	Presentase Kampung KB	104
Tabel	2.31	Data Kampung KB.....	105
Tabel	2.32	Indek Pembangunan Keluarga Temanggung.....	109
Tabel	2.33	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.....	112
Tabel	2.34	Usulan program dan kegiatan masyarakat.....	127
Tabel	2.35	Daftar Inovasi Perangkat Daerah.....	127
Tabel	2.36	Daftar Penghargaan	138
Tabel	3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	130
Tabel	4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan	134
Tabel	4.2	Rencana Program dan Kegiatan	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

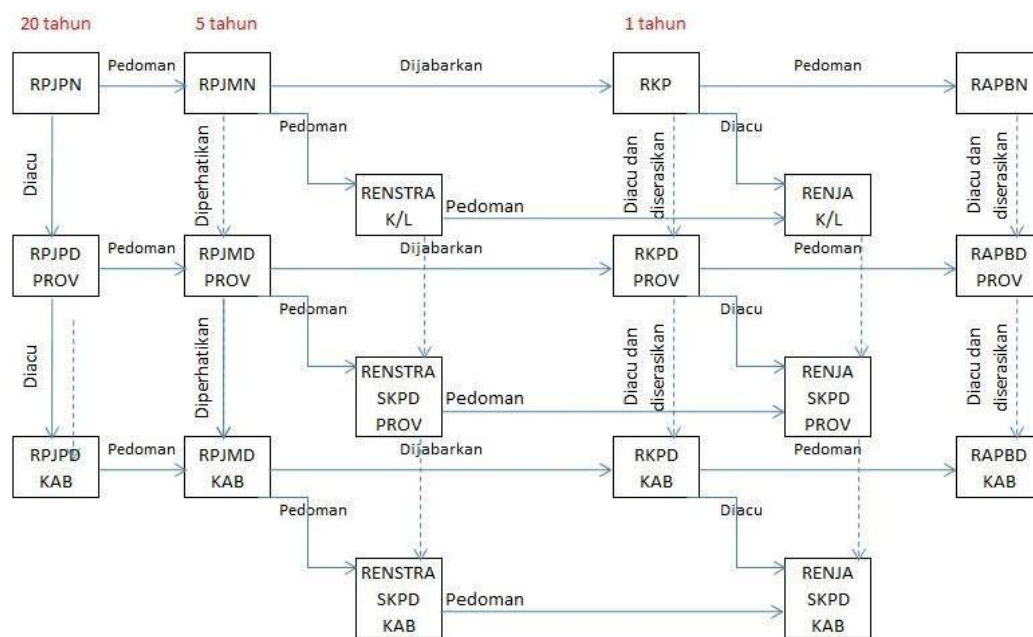
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja DPPPAPPKB juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja DPPPAPPKB disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di DPPPAPPKB berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab DPPPAPPKB.

Rencana Kerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung, serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu di Tahun 2026.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan serta kondisi pelayanan di DPPPAPPKB;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025;
- 3) Data Pokok Pembangunan pada DPPPAPPKB;
- 4) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan;
- 5) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; serta
- 6) Informasi lain terkait pelayanan pada DPPPAPPKB.

b. Analisis Gambaran Pelayanan DPPPAPPKB

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPPPAPPKB untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB

c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun Lalu Berdasarkan Renstra DPPPAPPKB

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DPPPAPPKB);
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DPPPAPPKB);
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DPPPAPPKBsampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan DPPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPPAPPKB. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Seauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi (DPPPAPPKB
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB);
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- g. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- h. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- i. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPPAPPKB).

g. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

h. Perumusan Kegiatan Prioritas dan Strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja DPPPAPPKB

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja (Perangkat

DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja DPPPAPPKB Dengan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DPPPAPPKB Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP DPPPAPPKB Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2024-2026

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025, diperlukan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-satu pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB
s.d Tahun 2024

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target akhir Renstra 2026		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp				IV					
				K	Rp	K	Rp. (Renja)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			9	10	11	18	19	20	21	22	23
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								406						
208.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.234.486.573	4.489.938.912		966.012.902		4.238.566.860		94,40
20801202	Administrasi Keuangan					14	3.215.218.573	3.499.540.912		725.190.983	14,00	3.411.795.317	100,00	97,49
2080120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			29 orang /14 bulan	3.215.218.573	3.499.540.912	3,00	725.190.983	14	3.411.795.317	100,00	97,49
20801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah						85.000.000	79.580.000		20.166.850		60.040.150		75,45
2.08.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			8	3.000.000	3.000.000	3	2.100.000	8	2.901.000	100,00	96,70
2.08.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			11	11.000.000	15.580.000	3	7.853.000	10	13.795.000	90,91	88,54
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			12	8.000.000	8.000.000	3	2.821.350	12	7.786.150	100,00	97,33

2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			12	13.000.000	13.000.000	3	6.097.500	12	11.586.000	100,00	89,12
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			12	50.000.000	40.000.000	3	1.295.000	12	23.972.000	100,00	59,93
20801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	843.368.000	791.189.000		177.222.069	9	657.704.393	75,00	83,13
2080120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			12	8.000.000	8.000.000	3	1.897.000	12	7.725.500	100,00	96,57
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	35.000.000	37.400.000	3,000	10.189.499,00 0	12	31.400.467	100,00	83,96
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			12	7.000.000	7.000.000	3,000	4.020.000,000 0	12	6.536.000	100,00	93,37
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	793.368.000	738.789.000	3	161.115.570	12	612.042.426	100,00	82,84
20801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.900.000	119.629.000		43.433.000		109.027.000		
2080120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			2	15.000.000	18.000.000	2	4.850.000	2	15.415.000	100,00	85,64

2.08.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			49	40.900.000	47.006.000	21	20.613.000	49	45.158.000	100,00	96,07
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			2	25.000.000	30.000.000	2	4.970.000	2,00	27.513.000	100,00	91,71
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			2	10.000.000	24.623.000	2	13.000.000	2,00	20.941.000	100,00	85,05
Rata Rata Capaian Kinerja													99,30	
Predikat													sangat tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						155.000.000	250.000.000		72.673.050		122.660.300		49,06
20802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						55.000.000	35.000.000		17.971.500		23.681.500		118
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%			2,65			2,27		2,27		85,53	
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%			100					100		100	

20802201	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000	10.000.000	46	3.880.500	46	3.880.500	100,00	38,81
2080220103	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			46	30.000.000	10.000.000	46	3.880.500	46	3.880.500	100,00	38,81
20802203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000	25.000.000	40	14.091.000	40	19.801.000	100	79
2080220302	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang			40	25.000.000	25.000.000	40	14.091.000	40	19.801.000	100,00	79,20
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													Sangat Tinggi	
20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						30.000.000	75.000.000	3	16.750.250	12	21.003.750	100	6

		Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%			0,0029			0,0055		0,0055		9,59	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%			0,0029			0,003		0,0030		97,91	
20803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					12	30.000.000	75.000.000	3	16.750.250	12	21.003.750	100,00	5,67
2080320202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	dokumen			12	30.000.000	75.000.000	3	16.750.250	12	21.003.750	100,00	28,01
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	
20804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						45.000.000	35.000.000	5	16.169.750	47	29.800.750	200	166
		Persentase desa sayang ibu dan bayi	%			62,28			100		100		100,00	
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%			100			57		56,67		56,67	
20804201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000	10.000.000	5	6.877.750	7	7.757.750	100	78

2080420102	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen			7	20.000.000	10.000.000	5,0000	6.877.750	7	7.757.750	100,00	77,58
20804202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000	25.000.000		9.292.000	40	22.043.000	100	88,17
2080420202	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang			40	25.000.000	25.000.000		9.292.000	40	22.043.000	100,00	88,17
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	
20806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						25.000.000	10.000.000		3.400.000		9.114.000		57
		Kabupaten Layak Anak	kategori			nindya	madya		nindya		nindya		madya	100,00
20806202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000	10.000.000		3.400.000	0	5.714.000	-	57

2080620201	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak			25	25.000.000	10.000.000	25	3.400.000	25	9.114.000	100,00	91,14
Rata Rata Capaian Kinerja													100	
Predikat													sangat tinggi	
20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						0	95.000.000		18.381.550		39.060.300		
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%			0,004			0,0040		0,0040		99,57	
20807201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						0	20.000.000	0		46	18.988.750	100	0
2080720104	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Orang			46	0	20.000.000	0		46	18.988.750	100,00	94,94
20807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							75.000.000	3	18.381.550	12	20.071.550	100	26,76
2080720205	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	anak			12		75.000.000	3	18.381.550	12	20.071.550	100,00	26,76
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.792.817.000	11.998.410.000		4.331.100.953		10.569.754.426		88,09
21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						96.000.000	423.256.000		114.774.060		413.532.152		97,70
		Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%			100			100		100		100	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%			10,05			7,60		7,60		100	
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%			2			0,37		0,37		100	
		Angka kelahiran remaja usia 15- 19 th (ASFR 15- 19th)	%			14,1			9,13		9,13		100	
21402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						96.000.000	423.256.000		114.774.060		413.532.152		
2140220212	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan			12	-	217.800.000	3	57.850.000	12	217.350.000	100,00	99,79
2140220213	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen			12	96.000.000	205.456.000	3	56.924.060	12	196.182.152	100,00	95,49
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	

21403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						6.425.917.000	7.301.754.000		2.548.429.993		6.000.055.574		82,17
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%			88,50			90,36		90,36		100	
		Persentase kepesertaan KB aktif	%			75,75			81,85		81,85		100	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%			46,1			46,45		46,42		100	
		Persentase kampung Keluarga berkualitas	%			23,53			28,45		28,45		75,11	
21403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1.275.400.000	1.790.619.000		436.127.696		1.389.979.188		
2140320108	Pengendalian Program KKBPK		laporan			4	80.000.000	80.000.000		29.776.500	2	53.546.500	50,00	66,93
2140320110	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan			12	770.400.000	1.055.144.000		250.893.621	9	932.969.463	75,00	88,42

2140320111	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan			12	260.000.000	300.000.000		80.917.450	9	186.502.300	75,00	62,17
2140320112	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen			12	0	71.825.000		43.312.375	9	66.565.325	75,00	92,68
2140320113	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen			12	10.000.000	83.650.000		6.073.750	9	56.678.750	75,00	67,76

2140320114	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi			15	155.000.000	200.000.000		25.154.000	7	93.716.850	46,67	46,86
21403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						578.000.000	2.228.001.000	0	1.466.662.650	1.935	2.186.934.600	100,10	98,16
2140320204	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	kader			1933	578.000.000	821.525.000		469.455.000	1.933	817.445.000	100,00	99,50
2140320206	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan			7	0	1.406.476.000		997.207.650	2	1.369.489.600	28,57	97,37

21403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						3.556.017.000	2.503.784.000		403.814.097	0	1.843.118.736		
2140320301	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan			12	27.900.000	30.000.000		9.429.500	9	29.260.000	75,00	97,53
2140320303	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang			6120	1.994.982.000	2.075.434.000		378.118.097	5.069	1.436.576.736	82,83	69,22
2140320306	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit			11	1.516.035.000	363.350.000		80.000,00	11	347.199.250	100,00	95,56
2140320308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan			12	17.100.000	35.000.000		16.186.500,00	9	30.082.750	75,00	85,95
21403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat						1.016.500.000	779.350.000		241.825.550		580.023.050		74,42

	Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2140320402	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen			6	9.000.000	5.314.000		4.568.500	0	4.568.500	0,00	85,97
2140320406	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung			67	1.007.500.000	774.036.000		237.257.050	50	575.454.550	74,63	74,34
Rata Rata Capaian Kinerja													66,62	
Predikat													sangat sedang	
21404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						4.270.900.000	4.273.400.000		1.667.896.900		4.156.166.700		
		Indek Pembangunan Keluarga	%			55,98								
21404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						4.230.900.000	4.173.400.000		1.599.657.400		4.071.224.700		
2140420116	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		laporan			12	0	19.200.000	3	7.157.900	5	7.657.900	41,67	39,88

2140420117	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan			6	15.000.000	17.500.000	2	7.410.250	5	15.931.750	83,33	91,04
2140420118	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit			25	360.000.000	300.000.000	25	282.446.000	25	286.296.000	100,00	95,43
2140420124	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kader			1.827	3.855.900.000	3.836.700.000		1.302.643.250	1.827	3.761.339.050	100,00	98,04
21404202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan						40.000.000	100.000.000		68.239.500		84.942.000		

	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2140420202	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisas i			20	40.000.000	100.000.000		68.239.500,00	20	84.942.000	100,00	84,94
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	85,00	
												Predikat	tinggi	
JUMLAH							15.182.303.573	16.738.348.912		5.369.786.905		14.930.981.586		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	83,44		
													PREDIKAT	tinggi
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	91,98		
													PREDIKAT	sangat tinggi

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB
s.d Triwulan II Tahun 2025

N o	Bidang/ Progra/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026		Realisai S/D 2024		Target 2025			Realisasi Per Triwulan Th. 2025				Realisasi 2025		Capaian 2025		Realisasi S/D 2025		Capaian S/D 2025	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	24 (7+20)	25 (8+21)	26 (24/5*100)	27 (25/6*100)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.003.066.815		5.065.338.403		4.576.461.471	4.710.946.649		1.114.140.995		1.312.720.515		2.426.861.510				7.490.804.713		62,41
1	Administrasi Keuangan			1260	9.701.326.815	406	4.238.566.860	392	3.615.772.671	3.772.982.849	112	876.674.310	108	1.175.654.581	220	2.052.328.891	56	54,40	626	6.290.895.751	49,68	64,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	1260	9.701.326.815	406	4.238.566.860	392	3.615.772.671	3.772.982.849	112	876.674.310	108	1.175.654.581	220	2.052.328.891	392	54,40	626	6.290.895.751	49,68	64,85
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36	197.000.000	12	60.040.150	12	62.000.000	39.275.000	3	3.585.497	3	3.465.700	6	5.655.997	50	14,40	18	65.696.147	50,00	33,35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	36	6.000.000	12	2.901.000	12	2.000.000	1.400.000	3	225.000	0	0	6	225.000	50,00	16,07	18	3.126.000	50,00	52,10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	36	34.000.000	12	13.795.000	12	11.000.000	6.815.000	3	0	3	0	6	0	50,00	0,00	18	13.795.000	50,00	40,57
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	36	19.000.000	12	7.786.150	12	7.000.000	4.200.000	3	900.200	3	739.200	6	900.200	50,00	21,43	18	8.686.350	50,00	45,72
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	36	46.000.000	12	11.586.000	12	12.000.000	11.860.000	3	298.000	3	656.000	6	298.000	50,00	2,51	18	11.884.000	50,00	25,83

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	92.000.000	12	23.972.000	12	30.000.000	15.000.000	3	2.162.297	3	2.070.500	6	4.232.797	50,00	28,22	18	28.204.797	50,00	30,66
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	1.855.040.000	12	657.704.393	12	822.788.800	822.788.800	3	227.330.188	3	128.014.734	6	355.344.922	50	43,19	18	1.013.049.315	50,00	54,61
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	36	28.000.000	12	7.725.500	12	7.000.000	7.000.000	3	564.000	3	118.000	6	682.000	50,00	9,74	18	8.407.500	50,00	30,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	121.800.000	12	31.400.467	12	32.500.000	32.500.000	3	6.516.736	3	6.826.875	6	13.343.611	50,00	41,06	18	44.744.078	50,00	36,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	36	21.000.000	12	6.536.000	12	6.000.000	6.000.000	3	920.000	3	1.250.000	6	2.170.000	50,00	36,17	18	8.706.000	50,00	41,46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	1.684.240.000	12	612.042.426	12	777.288.800	777.288.800	3	219.329.452	3	119.819.859	6	339.149.311	50,00	43,63	18	951.191.737	50,00	56,48
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198	249.700.000	55	109.027.000	55	75.900.000	75.900.000	4	6.551.000	15	5.585.500	19	12.136.500	35	15,99	74	121.163.500	37,37	48,52
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	46.000.000	2	15.415.000	2	15.000.000	15.000.000	2	2.700.000	0	1.740.000	2	4.440.000	100	29,60	4	19.855.000	66,67	43,16

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	180	124.000.000	49	45.158.000	49	35.900.000	35.900.000	2	3.851.000	15	3.845.500	17	7.696.500	34,69	21,44	66	52.854.500	36,67	42,62
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	79.700.000	2	27.513.000	2	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	27.513.000	33,33	34,52
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	0	2	20.941.000	2	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	20.941.000	33,33	0,00
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												69,76		61,57		47,83	0
																Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				180.901.500		23.681.500		35.000.000	35.000.000		295.000		300.000		595.000				24.276.500		
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,67		2,65		2,66			2,74		2,74		2,74		100		2,74		100	

		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100			46			46,00		46		46		100		46,00		100		
5	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			138	90.451.500	46	3.880.500	46	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	46	3.880.500	33,33	4,29	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	138	90.451.500	46	3.880.500	46	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	46	3.880.500	33,33	4,29	
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			120	90.450.000	40	19.801.000	40,00	25.000.000	25.000.000	40,00	295.000	-	300.000	40,00	595.000	100,00	2,38	80	20.396.000	66,67	22,55
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	120	90.450.000	40	19.801.000	40	25.000.000	25.000.000	40	295.000	0	300.000	40	595.000	100	2,38	80	20.396.000	66,67	22,55
					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program											50,00		63,00		50,00	0	
																Sangat Rendah	Rendah		Sangat Rendah			

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					90.601.500		21.003.750		42.842.200	38.394.370		0		825.000		825.000				21.828.750		
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,0027		0,0029	0,0055	0,0028			0,0037		0,0055		0,0055		2,60					
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,0027		0,0029	0,0030	0,0028			0,0010		0,0022		0,0022		100					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			15	90.601.500	5	21.003.750	5	42.842.200	38.394.370	0	0	1	825.000	1,00	825.000	0,00	2,15	6	21.828.750	40,00	24,09
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	15	90.601.500	5	21.003.750	5	42.842.200	38.394.370	0	0	1	825.000	1	825.000	20,00	2,15	6	21.828.750	40,00	24,09
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program	20,00		6,00		40,00	
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					90.451.500		21.003.750		25.000.000	18.959.200		95.000		0		95.000				21.098.750		
		Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	62,98		62,28		62,63			100		100		100		100,00		63,28		100	
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100		100		100			56,67		56,67		56,67		56,67		100		56,67	

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				120	90.451.500	40	21.003.750	40	25.000.000	18.959.200	40	95.000	0	0	40,00	95.000	100,00	0,50	80	21.098.750	66,67	23,33
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	120	90.451.500	40	21.003.750	40	25.000.000	18.959.200	40	95.000	0	-	40	95.000	100	0,50	80,00	21.098.750	66,67	23,33	
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program											100,00		80,00		66,67			
															Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			90.451.500		9.114.000		25.000.000	40.335.500		-		-		-			9.114.000				
	Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya		nindy	nindya	nindya			nindya		nindya		nindya		nindya		nindya		100,00		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			90	90.451.500	30	9.114.000	30	25.000.000	40.335.500	30	0	0	0	30,00	0	100,00	0,00	60	9.114.000	66,67	10,08	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	90	90.451.500	30	9.114.000	30	25.000.000	40.335.500	30	0	0	0	30	0	100	0,00	60,00	9.114.000	66,67	10,08	
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program											100,00		60,00		66,67			

																	Sangat Tinggi		Rendah		Sedang	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				115.525.875		39.060.300		35.000.000	30.569.400		1.014.000		-		1.014.000				40.074.300		
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0038		0,004	0,004	0,0039			0,0018		0,0045		0,0045		0,0018		85,53		85,53	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			46	10.000.000	46	18.988.750	46	10.000.000	8.494.600	2	0	0	0	2,00	0	4,35	0,00	48	18.988.750	104,35	189,89
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	46	10.000.000	46	18.988.750	46	10.000.000	8.494.600	2	0			2	0	4	0,00	48,00	18.988.750	104,35	189,89
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36	105.525.875	12	20.071.550	12	25.000.000	22.074.800	4	1.014.000	0	0	4,00	1.014.000	33,33	4,59	16	21.085.550	44,44	19,98
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	anak	36	105.525.875	12	20.071.550	12	25.000.000	22.074.800	4	1.014.000	0	0	4	1.014.000	33	4,59	16,00	21.085.550	44,44	19,98
					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program											18,84		32,00		74,40		
																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sedang		

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			815.600.240		413.532.152		96.000.000	493.800.000		24.132.723		3.500.000		27.632.723				441.164.875	
	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100		100	100				100			100		100			100	100	
	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	10		10,5	7,60	10,3			7,43			7,42		10,30			7	100	100
	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,75		2,00	0,37	1,85			0,32			0,33		1,85			0	100	100
	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	12,4		12,6	9	12,5			0,91			8,75		12,50			9	100	100
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		36	815.600.240	12	413.532.152	12	96.000.000	493.800.000	3	24.132.723	3	3.500.000	6	27.632.723	25	5,60	18,00	441.164.875	50
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	36	198.200.000	12	0	12	0	60.000.000	3	4.950.000	3	3.500.000	6	8.450.000	25	14,08	18,00	8.450.000	50
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	36	617.400.000	12	217.350.000	12	-	217.800.000	3		3		6	0	50	0,00	18,00	217.350.000	50
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	36	240	12	196.182.152	12	96.000.000	216.000.000	3	19.182.723	3		6	19.182.723	50	8,88	18,00	215.364.875	50

				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												41,67		18,00		50,00	
																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					15.224.479.385		5.755.944.886		5.193.232.000	7.474.989.000		484.945.640		616.027.392		1.100.973.032			6.856.917.918		
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	88,7		88,5		88,60		90,20		90,40		90,40		100		100,00		100,00	
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	75,85		75,75		76,80		82,00		82,22		82,22		100		100,00		100	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,2		46,1		46,2		46,45		47,36		46,45		100		100		100	
		Persentase kampung Keluarga berkualitas	%	53,03		38,88		45,45		36,40		105,36		105,36		100,00		100		100,00	#DIV/0!
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					3.975.683.385		1.510.619.000		1.195.400.000	1.924.160.000		166.088.704		133.465.088	0	299.553.792		15,57	0,00	1.810.172.792	45,53
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	36	2.311.200.000	12	1.055.144.000	12	770.400.000	1.139.160.000	3	166.088.704	3	111.522.088	6	277.610.792	25	24,37	18,00	1.332.754.792	50	57,67

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	36	780.000.000	12	300.000.000	12	260.000.000	400.000.000	3	0	3	20.850.000	6	20.850.000	25	5,21	18,00	320.850.000	50	41,13
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen	12	483.112.985	12	71.825.000	12	0	125.000.000	3	0	3	0	6	0	25	0,00	18,00	71.825.000	150	14,87
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen	12	250.000.000	12	83.650.000	12	10.000.000	10.000.000	3	0	3	1.093.000	6	1.093.000	50,00	10,93	18,00	84.743.000	150,00	33,90
Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	45	151.370.400	15		15	155.000.000	250.000.000	15	0		0	15	0	100	0,00	30,00	0	67	0,00

	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			5.806	2.097.350.000	1.940	2.186.934.600	1.937	941.350.000	2.874.672.000	1.933	8.300.000	-	223.100.000	1933	231.400.000	100	8,05	3.873,00	2.418.334.600	67	115,30
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	kader	5799	1.734.000.000	1.933	817.445.000	1933	578.000.000	2.176.840.000	1933	8.300.000		223.100.000	1933	231.400.000	100	10,63	3.866,00	1.048.845.000	67	60,49
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	7	363.350.000	7	1.369.489.600	4	363.350.000	697.832.000	0	0	0		0	0	0,00	7,00	1.369.489.600	100	376,91	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			18.432	6.119.946.000	-	1.482.936.736	6.144	2.039.982.000	2.126.757.000	582	310.556.936	3.156	259.462.304	3.738	570.019.240	9	27	3.738	2.052.955.976	20	34
	Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	36	83.700.000		29.260.000	12	27.900.000	33.300.000	3	790.000	3	8.075.000	6	8.865.000	25	26,62	6,00	38.125.000	17	45,55
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	orang	18360	5.984.946.000		1.436.576.736	6120	1.994.982.000	2.063.307.000	576	309.001.936	3150	251.387.304	3726	560.389.240	9	27,16	3.726,00	1.996.965.976	20	33,37

Panjang (MKJP)	Jangka Panjang (MKJP)																				
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	36	51.300.000		17.100.000	12	17.100.000	30.150.000	3	765.000	3		6	765.000	25	2,54	6,00	17.865.000	17	34,82
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			272	3.031.500.000	68	575.454.550	68	1.016.500.000	549.400.000	68	-	68	-	136	-	100	-	204	575.454.550	75	19
Fasilitas pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	dokumen	68	9.000.000	0	0	68	9.000.000	275.000.000	68	0	68	0	68	0	100	0,00	68,00	0	100	0,00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung	204	3.022.500.000	68	575.454.550	68	1.007.500.000	274.400.000	68	0	68	-	68	0	100	0,00	68,00	575.454.550	33	19,04
															Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program	48,70		654,08		68,36	
																Sangat Rendah				Sedang	

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				5.290.100.000 4.182.981.050 4.258.600.000 4.249.053.450 274.939.500 318.405.300 593.344.800														4.776.325.850				
		Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	angka	56		55,98		56			63,17		63		63,17		100		100		100	-
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			154	1.284.200.000	73	336.700.000	64	199.200.000	198.298.000	3	100.000	3	1.200.000	6	1.300.000	5	1	79	338.000.000	51	26
	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	90	150.000.000	30	0	30	15.000.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30,00	0	33	0,00
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	28.800.000	3	100.000	3	1.200.000	6	1.300.000	25	4,51	18,00	20.500.000	150	106,77
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	12	35.000.000	6	17.500.000	12	35.000.000	25.998.000	0	0		0	0	0	0,00	6,00	17.500.000	50	50	

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit	40	1.080.000.000	25	300.000.000	10	130.000.000	130.000.000	0	0			0	0	0	0,00	25,00	300.000.000	63	27,78
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1842	4.005.900.000	1840	3.846.281.050	1840	4.059.400.000	4.050.755.450	1828	274.839.500	1.829	317.205.300	3.657	592.044.800	99	15	5.497	4.438.325.850	298	111
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisasi	3	150.000.000	1	84.942.000	1	40.000.000	31.355.450	-	0			0	0	0	0,00	1,00	84.942.000	33	56,63

	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																					
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	%	1827	1.827.000.000	1827	1.827.000.000	1.827	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827	94.239.500	1.827	99.285.300	1827	193.524.800	100	10,59	1.827,00	2.020.524.800	100	110,59	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	%	12	2.028.900.000	12	1.934.339.050	12	2.192.400.000	2.192.400.000	1	180.600.000	2	217.920.000	3	398.520.000	8	18,18	15,00	2.332.859.050	125	114,98	
			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												19,05		274,57		79,17			
			Sangat Rendah												Tinggi							
JUMLAH				33.901.178.315	15.531.659.791	#### ##	14.287.135.671	17.092.047.569		1.899.562.858		2.251.778.207		4.151.341.065	51,24	10,74		19.681.605.656				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH														46,80	24,29							
PREDIKAT														Sangat Rendah								

	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	67,74				
	PREDIKAT	sedang				

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 belum sesuai target yang ditetapkan.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB berupa:

- 1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah belum semua memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, Capaian Kinerja : **80,62%**, dengan kategori Tinggi.

Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk Capaian Kinerja: **73,62%**, dengan kategori sedang.

- 2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah belum semua memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Capaian Kinerja: **92,83%**, dengan kategori Tinggi;
 - b. Program Perlindungan Perempuan Capaian Kinerja: **53,75%**, dengan kategori rendah;
 - c. Program peningkatan kualitas keluarga Capaian Kinerja: **78,34%**, dengan kategori tinggi;
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak/PHA) Capaian Kinerja: **100%**, dengan kategori sangat Tinggi;
 - e. Program perlindungan khusus anak Capaian Kinerja: **99,57%**, dengan kategori sangat Tinggi;
 - f. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga Capaian Kinerja: **100%**, dengan kategori sangat Tinggi;

- g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Capaian Kinerja: **100%**, dengan kategori sangat Tinggi.
3. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Capaian Kinerja : 100 %, dengan kategori sangat Tinggi.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja : 100 %, dengan kategori sangat Tinggi.
 - c. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
 - d. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
 - e. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
 - f. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.

- g. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
- h. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Capaian Kinerja: 98,16%, dengan kategori sangat Tinggi.

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) DPPPAPPKB

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPPAPPKB Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2024	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala nilai perangkat daerah				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,71	95,75	95,77	95,85	95,71	96,27		100	V				
2	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,18	2,65	2,66	2,67	8,28	2,78		27,61					V
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,42	2,65	2,66	2,67	2,24	2,74		100	V				
4	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
5	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,005	0,0029	0,0028	0,0027	0,0018	0,0055		2,60					V
6	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,0017	0,0029	0,0028	0,0027	0,001	0,0010		100	V				
7	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	100	62,28	62,63	62,98	100	100		100	V				
8	Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100	100	100	100	53,33	56,67		56,67				V	
9	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Nindya		100	V				
10	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0035	0,004	0,0039	0,0038	0,0009	0,0018		100	V				
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,65	0,63	0,6	0,55	0,69	0,77		71,67			V		
12	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100	100	100	100	100		100	V				

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2024	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala nilai perangkat daerah				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
13	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	8,6	10,5	10,3	10	8,08	7,42		100	V				
14	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,02	2	1,85	1,75	0,74	0,33		100	V				
15	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	14,1	14,1	13,81	13,5	14,1	8,75		100	V				
16	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	80,14	88,5	88,6	88,7	80,71	90,14		100	V				
17	Persentase kepesertaan KB aktif	%	80,14	75,75	75,8	75,85	80,71	82,22		100	V				
18	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	45,77	46,1	46,15	46,2	45,86	47,36		100	V				
19	Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	%	52,71	37,88	45,45	53,03	52,71	105,26		100	V				
20	Indek Pembangunan Keluarga	%	58,19	55,98	55,99	56	62,08	63,17		100	V				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 15 terdiri dari:

a. Indek Pembangunan Gender

b. Presentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah

1. Faktor Pendorong :

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan memperluas peluang untuk bekerja di lembaga pemerintah;

2. Faktor Penghambat :

Budaya Patriaki, yang menganggap laki laki lebih layak bekerja;

3. Rencana tindak lanjut :

Mengakses data perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintahan, BKPSDM, BLUD, SETWAN, dan PEMDES.

c. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD

1. Faktor Pendorong:

Telah dilaksanakannya pelatihan bagi perencana PD dalam menyusun ARG;

2. Faktor Penghambat:

Belum tersusunnya RAD pengarusutamaan gender dan kurangnya pembekalan penyusunan ARG bagi Tim Teknis maupun Tim Focal Point;

3. Rencana tindak lanjut:

Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG.

d. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan

1. Faktor Pendorong :

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor Penghambat :

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas.

3. Rencana tindak lanjut :

Penguatan dalam melakukan pendampingan kecamatan ramah anak (kelana) dan desa/kelurahan ramah anak (dekela).

e. Persentase desa sayang ibu dan bayi

1. Faktor pendorong:

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor penghambat:

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas fasilitasi.

3. Rencana tindak lanjut:

Penguatan dan advokasi dan sosialisasi tentang GSIB bersama mitra kerja terhadap semua pemangku kepentingan untuk melakukan Penggerakan Sayang Ibu dan Bayi.

f. Kabupaten Layak Anak

1. Faktor pendorong :

Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).

2. Faktor penghambat:

belum adanya forum anak di tingkat kecamatan.

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi Masyarakat.

g. Persentase kasus kekerasan terhadap anak

1. Faktor pendorong :

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor penghambat :

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping

h. Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga

1. Faktor pendorong :

Adanya kegiatan pendataan dan *up dating* data keluarga.

2. Faktor penghambat :

Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT.

3. Rekomendasi tindak lanjut:

Melakukan pendataan mikro keluarga dan perlunya perda tentang pengendalian penduduk dan KB.

i. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed}

1. Faktor pendorong:

- Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk menjadi akseptor KB;
- Meningkatnya Koordinasi kepada Kampung KB dalam pelayanan KB.

2. Faktor penghambat:

Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT.

3. Rekomendasi tindak lanjut:

Melakukan pendataan mikro keluarga dan perlunya perda tentang pengendalian penduduk dan KB.

j. Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

1. Faktor pendorong :

- terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja;
- meningkatkan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral;
- pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga.

2. Faktor penghambat :

Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja Masih aturan pemerintah yang berbeda antar OPD

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Melakukan promosi, KIE melalui media cetak, Elektronik

k. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)

1. Faktor pendorong :

- Pengembangan life skill bagi remaja;
- Tingkat pendidikan wajar 12 tahun.

2. Faktor penghambat :

Belum adanya laporan baku kelahiran oleh remja usia 15 sampai 19 tahun.

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Up dating data sebagai perhitungan ASFR.

l. Persentase kepesertaan KB aktif

1. Faktor pendorong :

- Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB;
- Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder;
- Mobilisasi media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi.

2. Faktor penghambat :

- Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern
- PUS muda yang menikah di usia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alat kontrasepsi. Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan target .

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Inovasi pelaporan, pencatatan dan pemantauan dengan aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana), Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB.

m. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

1. Faktor pendorong :

- Tingginya Animo Masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi Implan;
- Meningkatnya KIE kepada PUS untuk Ber-KB oleh tenaga lini lapangan dari tingkat Kecamatan oleh PKB ,desa, RW dan RT.

2. Faktor penghambat :

- Masih tingginya rumor kegagalan IUD di masyarakat;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi Pria/MOP.

3. Rekomendasi tindak lanjut:

Meningkatkan KIE tentang Kontrasepsi bagi PUS Muda oleh tenaga lini lapangan di tingkat RW/RT.

n. Indeks Pembangunan Keluarga

1. Faktor pendorong :

meningkatnya faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan dalam keluarga.

2. Faktor penghambat :

lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga.

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK, karena perhitungan bukan wewenang PD.

2. Capaian indikator dengan status sedang ada 1 Indikator yaitu :

Laju Pertumbuhan Penduduk

1. Faktor pendorong: meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang pengendalian penduduk;
2. Faktor penghambat: masih tingginya angka kelahiran (CBR).
3. Rekomendasi tindak lanjut: meningkatkan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK baik oleh pemerintah maupun swasta dengan melakukan advokasi dan bintek kepada kades/lurah dalam program KKBPK.

3. Capaian indikator dengan status rendah ada 1 Indikator yaitu :

Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender

1. Faktor Pendorong :
Telah dilaksanakannya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan.
2. Faktor Penghambat :
Belum semua proses perencanaan kegiatan yang berbasis anggaran menggunakan analisa GAP dan GBS
3. Rencana Tindak lanjut :
Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG

4. Capaian indikator dengan status sedang ada 1 indikator yaitu :

Persentase kampung KB berkembang dan Mandiri

1. Faktor pendorong :
Potensi kader dalam mendukung Program mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah.
2. Faktor penghambat :
Belum adanya Perbup tentang kampung KB
3. Rekomendasi tindak lanjut :
Peningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB.

5. Capaian indikator dengan status rendah ada 1 yaitu :

Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas

1. Faktor pendorong :

Adanya komitmen manajemen Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan hak anak, pendekatan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga psikososial

2. Faktor penghambat :

Tidak adanya kebijakan yang jelas dari manajemen Rumah Sakit/Puskesmas untuk menerapkan standar ramah anak dan regulasi yang mendorong Rumah Sakit/Puskesmas untuk memenuhi kriteria ramah anak.

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Perlunya regulasi tentang Rumah Sakit dan Puskesmas ramah anak

6. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 2 yaitu :

a. Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender

1. Faktor pendorong :

- Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan;
- Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam Pnyusunan RKA

2. Faktor Penghambat :

Banyak perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran.

3. Rencana tindak lanjut :

Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG dan sosialisasi dan bmtk kembali bagi perencana dalam penyusunan ARG.

b. Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan

1. Faktor pendorong :

Semakin meningkatnya pemahaman orang tua dan anak tentang perlindungan anak perempuan;

2. Faktor Penghambat :

Kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak.

3. Rencana tindak lanjut :

Sosialisasi pelaporan kasus dengan aplikasi *SIPESAN PERAK* dan *WAGE*.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada DPPAPPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu data pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta data pokok bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a. Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Peningkatan pemberdayaan perempuan upaya yang dilakukan untuk memperkuat posisi kapasitas dan peran perempuan agar dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat secara setara dalam berbagai aspek kehidupan baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, maupun hukum.

Pengarustamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa isu dan perspektif gender menjadi bagian integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Untuk memperoleh angka Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari persentase jumlah anggaran responsif gender pada belanja operasional dan modal APBD dibandingkan dengan jumlah anggaran operasional dan modal APBD secara keseluruhan, dikalikan 100.

Tabel 2.4
 Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan
 pengarusutamaan gender
 Kabupaten Temanggung,
 Tahun 2020 SD 2025 triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	N.A	N.A	N.A	232.540.315.305	29.496.530.560	46.691.185.312
2	Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	N.A	N.A	N.A	5.312.431.154.870	358.678.943.856	1.679.089.694.258
3	Persentase					8,22	2,78

Sumber data: DPPPAPPKB Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran responsif gender di semua Perangkat Daerah dibandingkan dengan jumlah belanja operasional dan belanja modal anggaran APBD secara keseluruhan, sesuai dengan tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5

PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 Triwulan II

N0	OPD	ARG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	INSPEKTORAT	1	Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	9.055.000.000,00
2	DINAS SOSIAL	6	Penanganan Warga Megara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Pidana Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000,00
			Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilita Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilita Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	45.000.000,00
			Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilita Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	566.611.362,00
			Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		3.452.183.000,00
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	1.126.000.000,00

3	DINPERMADES	1	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.000.000,00
4	DINKOPDAG	3	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000,00
			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		10.000.000,00
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		400.000.000,00
5	DINDIKPORA	2	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Peningkatan Ketrampilan SKB		100.000.000,00
6	BPKPAD	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	83.300.000,00
7	BPBD	1	Penanggulanagan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	45.000.000,00
8	DPMPTSP	1	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	180.000.000,00
9	BANKESBANGPOL	1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi		415.000.000,00

				Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
10	BAPPEDA	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000,00
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	20.000.000,00
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	397.472.000,00
11	SETDA	1	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	63.743.000,00
12	DPUPR	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000,00
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Operasi dan Pemeliharaan sistem penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00
13	DPRKPLH	1	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000,00

14	DKPPP	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	235.000.000,00
15	SEKRETARIAT DPRD	1	Layanan dan Administrasi Keuangan	Pendalaman Tugas DPRD		2.827.544.500,00
16	RSU		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		3.000.000,00
17	DINDUKCAPIL	1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		693.500.000,00
18	BKPSDM	1	KEPEGAWAIAN	Pengembangan Kompetensi ASN		25.000.000,00
19	DPPPAPPKB	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.075.434.000,00
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000,00
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	25.000.000,00
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/kota	25.000.000,00
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	42.842.200,00

				Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangna kab/kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	
			Program Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kab/kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kab/kota	45.000.000,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	10.000.000,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	25.000.000,00
20	DINKES	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	10.000.000,00
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	6.452.500.000,00
21	DINPERINAKER	1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		
22	DINBUDPAR	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16.100.000,00

23	DINPUSIP	1	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	9.995.000,00
24	SATPOL PP DAMKAR	1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kab/Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	75.000.000,00
25	DINHUB	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota		100.000.000,00
26	DINKOMINFO	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kab/Kota		0
27	KECAMATAN TLOGOMULYO	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		23.023.000,00
28	KECAMATAN TEMBARAK	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		10.400.000,00
29	KECAMATAN PARAKAN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		65.000.000,00
30	KECAMATAN NGADIREJO	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.200.000,00
31	KECAMATAN KRANGGAN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		19.035.000,00

32	KECAMATAN KLEDUNG	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		20.835.000,00
33	KECAMATAN KANDANGAN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.641.000,00
34	KECAMATAN JUMO	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.120.000,00
35	KECAMATAN TRETEP	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		50.000,00
36	KECAMATAN SELOPAMPANG	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		9.195.000,00
37	KECAMATAN BULU	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		28.686.000,00
38	KECAMATAN BEJEN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		24.965.000,00
39	KECAMATAN PRINGSURAT	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		9.865.000,00
40	KECAMATAN WONOBOYO	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.800.000,00
41	KECAMATAN BANSARI	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.000.000,00
42	KECAMATAN KEDU	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		24.279.500,00
43	KECAMATAN CANDIROTO	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.280.000,00

44	KECAMATAN GEMAWANG	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.800.000,00
45	KECAMATAN KALORAN	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		38.251.000,00
46	KECAMATAN TEMANGGUNG	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		20.000.000,00
JUMLAH						46.691.185.312

Sumber data: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasar tabel dari anggaran APBD Tahun 2024 anggaran yang responsif gender dari 46 OPD sejumlah Rp 29.502.650.562 dari total semua anggaran APBD sejumlah Rp 1679.089.694.257 atau 2,78%, Penyusunan anggaran responsif gender, dalam penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Pendorongnya adalah
 - Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan;
 - Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam Pnyusunan RKA.
2. Faktor Penghambatnya adalah
 - Perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran;
 - Implemantasi ARG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah, karena tanpa dukungan ini maka ARG hanya menjadi formalitas;
 - Beberapa Pihak menganggap ARG hanya sebagai beban adminstarsi tambahan, bukan bagian penting dari perencanaan yang berkualitas;
 - ARG belum mnjadi bagian yang menyatu dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan secara luas, sehingga penerapannya tidak konsisten.

b. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan yang dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah. Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah *besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.*

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2024 sampai Triwulan IV sebanyak 2,27 % dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	3.536	3.349	3.349	5.313	5.216	6.046
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	174.643	187.543	185.816	219.154	230.123	220.519
3	Persentase	2,02	1,79	1,80	2,42	2,27	2,74

Sumber : DPPAPPKB 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung diperoleh data dari :

- Jumlah ASN yang ada di data BKPSDM : 5214
- Jumlah perempuan yang bekerja di BLUD : 269
- Jumlah perempuan yang bekerja sebagai perangkat desa, data dari DIPERMADES : 563 adapun jumlah perempuan dalam lembaga pemerintah per SKPD, BLUD dan Pemdes dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
Kabupaten Temanggung tahun 2025 sampai Triwulan II

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	71	40	111
2	Sekretaris DPRD	12	8	20
3	BAPPEDA	22	17	39
4	BKPSDM	21	15	36
5	DINPERMADES	9	13	22
6	Inspektorat	22	29	51
7	DPRKPLH	86	40	126
8	RSUD	126	319	445
9	DPPPAPPKB	10	16	26
10	Dinkominfo	24	12	36
11	BPBD	17	7	24
12	Dindukcapil	16	20	36
13	Dinkes	183	971	1154
14	BPPKAD	29	29	58
15	Dindikpora	1.536	3299	4835
16	Dishub	41	8	49
17	Disperindagkop UMKM	67	15	82
18	Dintan Pangan	103	115	218
19	Dinsos	13	23	36
20	Disnaker	20	23	43
21	DPU	89	21	110
23	Dinbudpar	20	11	31
24	Dinarpus	12	16	28
25	Kesbangpol	13	9	22
26	Satpol PP Damkar	52	8	60
28	DPMPTSP	6	11	17
29	Kec.Bansari	8	6	14
30	Kec.Bejen	8	5	13
31	Kec.Bulu	8	5	13
32	Kec.Candiroto	10	5	15
33	Kec.Gemawang	8	2	10
34	Kec.Jumo	10	3	13
35	Kec.Kaloran	9	6	15
36	Kec.Kandangan	9	4	13
37	Kec.Kedu	7	4	11
38	Kec.Kledung	9	4	13
39	Kec.Kranggan	14	7	21
40	Kec.Ngadirejo	19	3	22
41	Kec.Parakan	19	4	23
42	Kec.Pringsurat	8	8	16
43	Kec.Selopampang	10	3	13
44	Kec.Temanggung	63	33	96
45	Kec.Tembarak	8	4	12

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
46	Kec.Tlogomulyo	10	6	16
47	Kec.Tretep	13	1	14
48	Kec.Wonoboyo	9	3	12
	Sub jumlah	2.871	5214	8085
	Blud		269	
	Pemdes		563	
	JUMLAH		6.046	

Sumber: BKPSDM, BLUD dan Pemdes Tahun 2025

Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Pendorongnya adalah
 - Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan memperluas peluang untuk bekerja dilembaga pemerintah
2. Faktor Penghambat adalah:
 - Budaya Patriaki, yang menganggap laki laki lebih layak memimpin
 - Ketimpangan akses terhadap informasi politik dan pemerintahan bagi perempuan

c. Rasio Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsive Gender dalam Penyusunan Renja SKPD

Perencanaan Responsif Gender menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah Pasal 1, bahwa perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki. Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipasif
3. Control, dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengeintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah/statistik gender dan untuk menyusun Anggaran

Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan.

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100% dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2.8
Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan ARG	21	38	46	46	46	46
2	Jumlah Perangkat Daerah yang ada	48	46	46	46	46	46
3	Persentase	43,75	82,61	100	100	100	100

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Perangkat Daerah yang menerapkan Anggaran responsif Gender pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II sejumlah 46 PD atau 100% dari target yang ada.

Rasio PD yang menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung ada beberapa faktor pendorong dan penghambat proses pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Faktor Pendorongnya adalah
 - Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan
 - Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam Pnyusunan RKA
2. Faktor Penghambatnya adalah
 - perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran
 - Implemantasi ARG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari pimpinan Lembaga atau daerah, tanpa dukungan ini ARG , hanya menjadi formalitas,

- Beberapa Pihak menganggap ARG hanya sebagai beban adminstarsi tambahan, bukan bagian penting dari perencanaan yang berkualitas
- ARG belum mnjadi bagian yang menyatu dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan secara luas, sehingga penerapannya tidak konsisten
- Adapun Perangkat Daerah yang telah melaporkan anggaran ARG seperti pada Tabel 2.8

3. Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus: Jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah anak perempuan yang ada kali 100%

Tabel 2.9
Pervalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan	24	5	3	5	6	6
2	Jumlah anak perempuan yang ada	113.700	114.319	107.733	297.635	108.656	108.553
3	Persentase	0,0211	0,0044	0,0028	0,0017	0,0055	0,0055

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 2.9 terlihat semua kasus yang melapor sudah tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur, dari jumlah seluruh kasus yang terjadi pada anak perempuan pada Tahun 2023 sebanyak 5 kasus atau 0,0017 dari semua jumlah anak perempuan, sedangkan pada tahun 2025 triwulan I ada 4 kasus atau 0,0037 dari jumlah anak perempuan sejumlah 108.553. dari beberapa kasus

kekerasan terhadap anak perempuan di kabupaten Temanggung, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi diantaranya adalah :

a. Faktor Pendorong adalah :

- semakin meningkatnya pemahaman orang tua dan anak tentang perlindungan anak perempuan
- Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas

b. Faktor Penghambatnya adalah :

- kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak

Untuk kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan
Kabupaten Temanggung sampai Triwulan Ii Tahun 2025

Sumber: Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Jenis Kasus	KECAMATAN																				2024
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candiroto	Bejen	Wonoboyo	Tretep	
1	KDRT																					
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan																					
3	Perkosaan																					
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma																					
5	Bullying/Perundungan																					
6	Pembuangan Anak																					
7	Penelantaran																					
8	Perzinaan																					
9	Kekerasan terhadap TKW																					
10	Kekerasan dalam Pacaran																					
11	(ABH)																					
12	Sodomi																					
13	Kekerasan seksual Anak						1		1													
14	Kekerasan Seksual (disabil)																					
15	Pelecehan Seksual								1		2				1							
16	Kekerasan fisik	2															1		1			
17	Persetubuhan Anak																					
18	Membawa Lari anak																					
19	Pencabulan																					
20	TPPO/Trafficking																					
21	Bunuh diri Anak																					
22	Penganiayaan																					
23	Perampasan																					
	Jumlah	2					1		2		2				1		1		1			

4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan Korban Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah perempuan yang ada kali 100%

Capaian persentase perempuan korban kekerasan sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.11
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan	42	11	22	13	12	9
2	Jumlah perempuan yang ada	509.853	506.308	516.213	514.578	05.320	407.885
3	Persentase	0,0082	0,0022	0,0043	0,0025	0,0030	0,0022

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Adapun jenis kasus perempuan yang mengalami kekerasan di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini:

Tabel 2.11 b
Jumlah Perempuan yang Mengalami Kekerasan
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Kasus	Kasus Perempuan
1	KDRT	2
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan	1

No	Jenis Kasus	Kasus Perempuan
3	Perkosaan	
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma	
5	Bullying/Perundungan	
6	Pembuangan Anak	
7	Penelantaran	
8	Perzinaan	
9	Kekerasan terhadap TKW	
10	Kekerasan dalam Pacaran	
11	(ABH)	
12	Sodomi	
13	Kekerasan seksual Anak	6
14	Kekerasan Seksual (disabil)	
15	Pelecehan Seksual	
16	Kekerasan fisik	
17	Persetubuhan Anak	
18	Membawa Lari anak	
19	Pencabulan	
20	TPPO/Trafficking	
21	Bunuh diri Anak	
22	Penganiayaan	
23	Perampasan	
	Jumlah	

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorong adalah:

Faktor sosial budaya: sistem patriaki yang menganggap laki laki lebih kuat dari perempuan yang memicu diskriminasi dan kekerasan dan faktor ekonomi yaitu kestabilan ekonomi dapat meningkatkan stres dalam rumah tangga

2. Faktor Penghambat:

Stigma sosial yaitu korban seringkali merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan karena adanya stigma negatif dari masyarakat, minimnya akses ke pengaduan. kurangnya layanan atau fasilitas pendukung seperti rumah aman, konseling dan pendampingan hukum.

5. Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang merupakan gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, dilaksanakan bersama-sama yakni antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Rumus: jumlah desa yang telah memiliki satgas gerakan sayang ibu dan bayi dibandingkan jumlah desa yang ada dikalikan 100

Capaian Desa sayang ibu dan bayi dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini:

Tabel 1.12
Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d Tahun 2025
Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan GSIB	82	91	115	289	289	289
2	Jumlah desa/kelurahan yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Persentase	28,37	31,49	39,79	100	100	100

Sumber: DPPAPPKB Tahun 2025

Dari tabel diatas, jumlah Desa yang sudah mempunyai satgas GSI dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 Triwulan I sejumlah 289 Desa/100% dari jumlah Desa sebanyak 289.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD/Forum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah:

- a. Faktor pendorongnya Peningkatan komitmen Pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan bayi dengan mensosialisasi 3T (Terlambat mengambil keputusan, sehingga terlambat untuk mendapatkan penanganan, Terlambat sampai ke fasilitas kesehatan karena kendala transportasi, Terlambat mendapat penanganan karena terbatasnya sarana dan sumber daya manusia) dan 4 terlalu (Kehamilan terlalu muda/hamil dibawah 20 tahun, Usia yang terlalu tua untuk hamil/diatas 35 tahun, Jarak kehamilan terlalu dekat/kurang dari 2 tahun, Kehamilan terlalu banyak/lebih dari 3 anak);
 - b. Faktor Penghambatnya masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan.
6. Persentase Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit dan Puskesmas

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Untuk mendukung keberhasilan gerakan tersebut, juga didukung oleh pelayanan ramah anak dan perempuan di bidang perumahan, serta pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas.

Rumus persentase Rumah Sakit dan Puskesmas sayang ibu dan bayi: Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas sayang ibu dan bayi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada dikalikan 100%.

Adapun presentase Rumah Sakit dan Puskesmas sayang ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini:

Tabel 2.13

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah RS dan Puskesmas yang menerapkan pelayanan ramah anak	N.A	N.A	N.A	16	17	17
2	Jumlah RS dan Puskesmas yang ada	N.A	N.A	N.A	30	30	30
3	Persentase				53,33	56,67	56,67

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas, Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan yang mendukung gerakan sayang ibu dan anak di Kabupaten Temanggung pencapaiannnya 56,67%, atau baru 17 yang menerapkan pelayanan ramah anak, 17 Puskesmas yang melayani dan peduli akan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menurunkan AKB dan AKI.

Adapun Rumah Sakit dan Puskesmas ramah anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Tabel 2.13b dibawah ini:

Tabel 2.13b

Puskesmas ramah anak

Kabupaten Temanggung Tahun 2025

PUSKESMAS	KECAMATAN
Puskesmas Temanggung	Kecamatan Temanggung
Puskesmas Dharmarini	Kecamatan Temanggung
Puskesmas Ngadirejo	Kecamatan Ngadirejo
Puskesmas Parakan	Kecamatan Parakan
Puskesmas Kedu	Kecamatan Kedu
Puskesmas Candirototo	Kecamatan Candirototo
Puskesmas Kandangan	Kecamatan Kandangan
Puskesmas Bansari	Kecamatan Bansari
Puskesmas Bulu	Kecamatan Bulu
Puskesmas Kranggan	Kecamatan Kranggan

Puskesmas Pare	Kecamatan Pare
Puskesmas Bejen	Kecamatan Bejen
Puskesmas Tlogomulyo	Kecamatan Tlogomulyo
Puskesmas Kaloran	Kecamatan Kaloran
Puskesmas Rejosari	Kecamatan Pringsurat
Puskesmas Pringsurat	Kecamatan Pringsurat

7. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak menurut Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga.
2. Pengasuhan alternatif.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
5. Perlindungan khusus.

Untuk mengukur keberhasilan KLA dapat dilihat dari kategori yang diperoleh Kabupaten terhadap evaluasi dan penilaian Kabupaten Layak Anak, dimana kategori tersebut meliputi: Madya, Nindya dan Utama.

Adapun ukuran penilaian perkategori adalah:

- Kategori Pratama, dengan nilai : 500 – 600
- Ketegori Madya, dengan nilai : 601 – 700
- Kategori Nindya, dengan nilai : 701 – 800
- Kategori Utama, dengan Nilai : 801 – 900

Adapun kondisi KLA di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 Triwulan I inikator

penilaian mandiri Tahun 2024, nilai nya diatas 810, dengan kategory NINDYA. Untuk kondisi KLA Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2.14
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	kategori Kabupaten Layak Anak	N.A	N.A	Madya	Madya	nindya	nindya

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Adapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukungnya adalah adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
2. Faktor penghambatnya adalah masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak), belum semua Kecamatan terbentuk Forum Anak.

8. Persentase Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Rumus Persentase anak korban kekerasan: jumlah kekerasan terhadap anak (usia dibawah 18) dibagi dengan jumlah seluruh anak dikalikan 100%.

Jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 sampai pada Tahun 2025 Triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Persentase Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s/d Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah anak yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan	33	6	11	8	9	10
2	jumlah anak yang ada		75.587	232.967	231.111	230.860	223.993
3	Presentase		0,0437	0,0026	0,0048	0,0035	0,0045

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2020 sampai Triwulan II Tahun 2025, persentase kasus kekerasan naik turun, .sedangka pada tahun 2025 truwulan II ada 10 kasus yang melapor atau 0,0045 dari jumlah anak sebanyak 223.993 dan jumah korban tersebut adalah anak perempuan

Adapun jumlah kekerasan terhadap anak sesuai jenis kasusnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan I seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.15b
Jumlah Anak yang Mengalami Kekerasan
Tahun 2025 s.d Triwulan I

No	Jenis Kasus	Kasus Anak
1	KDRT	
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan	2
3	Perkosaan	
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma	
5	Bullying/Perundungan	
6	Pembuangan Anak	
7	Penelantaran	
8	Perzinaan	
9	Kekerasan terhadap TKW	
10	Kekerasan dalam Pacaran	
11	(ABH)	
12	Sodomi	2
13	Kekerasan seksual Anak	6
14	Kekerasan Seksual (disabil)	
15	Pelecehan Seksual	

16	Kekerasan fisik	
17	Persetubuhan Anak	
18	Membawa Lari anak	
19	Pencabulan	
20	TPPO/Trafficking	
21	Bunuh diri Anak	
22	Penganiayaan	
23	Perampasan	
	Jumlah	10

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Adapun faktor pendorong dan penghambatnya dalam penanganan kasus terhadap anak adalah :

a. Faktor Pendorong adalah :

- Adanya regulasi dan kebijakan nasional yang mengatur perlindungan terhadap anak.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak
- Adanya layanan pengaduan kekerasan terhadap anak, lewat Aplikasi SIPESAN PERAK
- Keterlibatan berbagai sektor: hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama dalam menangani kasus anak.

b. Faktor Penghambat adalah :

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak hak anak
- Minimnya pelaporan karena Anak

9. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 Tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus: jumlah penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$r = \{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1\} \times 100$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 0,54 % seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
 Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
 Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk	791.264	791.264	799.764	799.764	799.764	799.764
2	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,98	0,71	0,69	0.86	0,80	0,77

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, pada Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan I laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung masih menggunakan angka yang sama sesuai data yang dipublikasikan oleh BPS sebesar 0,80 turun dari tahun 2023, sebesar 0,06 namun masih kurang dari target yang ditentukan sebesar 0,60 .

Adapun kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorong adalah: Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang Pengendalian penduduk;
2. Faktor Penghambat adalah: Masih tingginya angka kelahiran (CBR).

10. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri-ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali.

Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah Dokumen data mikro keluarga yang ada dan yang disajikan dibagi dengan jumlah desa yang ada x 100%.

Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d 2024 Triwulan III dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2021	2023	2024	2025
1	Jumlah dokumen Keluarga yang yang disajikan	289	289	289	289	289	289
2	Jumlah Desa	289	289	289	289	289	289
3	Presentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing Kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan Kecamatan pada Tahun 2019 s.d 2024 Triwulan IV,

jumlah Desa tidak mengalami tambahan, adapun data yang kita gunakan sekarang masih menggunakan data yang masih berjalan.

Dalam penyajian data mikro program Bangga Kencana di Kabupaten Temanggung, berdasarkan laporan Pendataan Keluarga 2021, yang diupdate setiap tahun. Namun demikian penyajian data ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Faktor Pendorong adalah:

Adanya kegiatan Pendataan dan Up dating data keluarga;

2. Faktor Penghambat adalah: Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT.

11. Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi/Unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (Tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). *Rumus presentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS) dibagi pasangan usia subur x 100%.* Adapun data Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.18 dibawah ini :

Tabel 2.18
 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB
 tidak terpenuhi (Unmetneed)
 Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PUS Unmetneed	17.948	17.012	15.084	11.059	9.493	9.129
2	Jumlah PUS	130.415	130.996	131.516	128.266	124.978	123.076
3	Presentase	13,76	12,99	11,47	8,62	7,60	7,42

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode Tahun 2020 s/d Tahun 2025 Triwulan II, unmetneed angka di Kabupaten Temanggung semakin menurun, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan baik dari tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Adapun data PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (Unmetneed)
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

NO	KECAMATAN	INGIN ANAK DITUNDA (IAT)	TIDAK INGIN ANAK LAGI (TIAL)	JUMLAH	JUMLAH PUS	%
1	2	3	4	5=klm 3+4	6	7= klm 5/6
1	B U L U	282	185	467	7.958	5,87
2	TEMBARAK	191	198	389	4.762	8,17
3	TEMANGGUNG	452	395	847	10.198	8,31
4	PRINGSURAT	317	322	639	8.688	7,35
5	KALORAN	227	309	536	6.945	7,72
6	KANDANGAN	291	225	516	8.571	6,02
7	K E D U	469	333	802	9.147	8,77
8	PARAKAN	375	433	808	7.198	11,23
9	NGADIREJO	392	338	730	8.952	8,15
10	J U M O	126	163	289	4.725	6,12
11	TRETEP	145	213	358	4.181	8,56
12	CANDIROTO	150	231	381	5.321	7,16
13	KRANGGAN	312	209	521	8.099	6,43
14	TLOGOMULYO	118	157	275	4.010	6,86
15	SELOPAMPANG	161	72	233	3.387	6,88
16	BANSARI	171	91	262	4.000	6,55
17	KLEDUNG	168	180	348	4.867	7,15
18	B E J E N	130	122	252	3.290	7,66
19	WONOBOYO	117	252	369	4.386	8,41
20	GEMAWANG	233	238	471	6.293	7,48
	JUMLAH	4.827	4.666	9.129	123.076	7,42

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari capaian Unmet Need pada tahun 2025 sebesar 7,42 semakin menurun/semakin baik dibandingkan pada tahun 2024, hal ini karena adanya peningkatan KIE kepada masyarakat tentang perlunya berKB baik kepada PUS yang masih muda maupun kepada PUS yang merasa sudah tua. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor Pendorong adalah peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral, terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja, inya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja

- b. Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
- c. Pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga.

Faktor Penghambat adalah: Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja.

12.Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun

PUS (Pasangan Usai Subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 tahun adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun (UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8).

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th<dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 2.20
PUS < 20 TH
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PUS < 20 TH	2.038	1.332	1.322	1.311	460	409
2	Jumlah PUS	130.145	130.966	130.068	128.622	124.978	123.076
3	Persentase	1,57	1,02	1,02	1,02	0,37	0,33

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun pada 2023 sampai tahun 2024 triwulan IV mengalami penurunan, dibuktikan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
PUS dibawah 20 Tahun
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15-19 TH	%
1	2	3	4	5
1	B U L U	7.958	43	0,64
2	TEMBARAK	4.762	6	0,13
3	TEMANGGUNG	10.198	23	0,27
4	PRINGSURAT	8.688	22	0,31
5	KALORAN	6.945	9	0,13
6	KANDANGAN	8.571	35	0,58

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15-19 TH	%
7	K E D U	9.147	27	0,33
8	PARAKAN	7.198	20	0,28
9	NGADIREJO	8.952	23	0,29
10	J U M O	4.725	10	0,21
11	TRETEP	4.181	20	0,53
12	CANDIROTO	5.321	25	0,56
13	KRANGGAN	8.099	20	0,25
14	TLOGOMULYO	4.010	14	0,35
15	SELOPAMPANG	3.387	13	0,38
16	BANSARI	4.000	22	0,55
17	KLEDUNG	4.867	10	0,21
18	B E J E N	3.290	10	0,30
19	WONOBOYO	4.386	36	0,91
20	GEMAWANG	6.293	22	0,35
	TOTAL	123.076	409	0,33

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

13. Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15–19 Tahun)

ASFR (Age Specifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu. Sedangkan ASFR 15–19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15–19 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya.

Rumus dari pada ASFR 15-19 tahun adalah:

$$ASFR\ 15-19^{th} = (B\ 15-19\ TH) / (Pf\ 15-19\ th) \times 1000$$

B 15 – 19 TH : Jumlah kelahiran didalam kelompok umur 15 – 19 tahun Selama 1 tahun
 Pf 15 – 19 th : Jumlah perempuan kelompok umur 15- 19 tahun pada Pertengahan tahun yang sama

Untuk perhitungan ASFR di Kabupaten

Temanggung yang bersumber di Dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil pendataan yang dilakukan 5 tahun sekali dan dari perkembangan laporan selama 1 tahun dari penyuluh KB di Kecamatan dapat dilihat ada Tabel 22 dibawah ini:

Tabel 2.22
 Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
 Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelahiran oleh kelompok umur 15 – 19 th	N.A	616	276	177	316	284
2	Jumlah wanita usia 15 – 19 th	N.A	28.899	28.166	26.553	22.414	31.098
3	Persentase		21,32	9,80	6,67	14,10	9,13

Sumber data : DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa ASFR 15–19 TH di Kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut, hal ini bisa dilihat dari presentase pernikahan dini yang masih tinggi dan di Dinas PPPAPPKB selalu berupaya menurunkannya dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/Sekolah Siaga Kependudukan dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja), Sosialisasi jo kawin bocah. Namun, dilihat dari pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 th angkanya semakin menurun, hal ini menunjukkan hasil dari peningkatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Adapun kelahiran oleh wanita usia subur antara 15–19 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23
 ASFR 15–19 Tahun
 Data Kelahiran Oleh Wanita Usia 15–19th
 Kabupaten Temanggung
 Tahun 2025

No	Puskesmas	DATA DASAR	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA	
		15-18 thn	REMAJA YANG HAMIL	JUMLAH REMAJA YANG MELAHIRKAN
1	Parakan	2.230	24	20
2	Kledung	809	23	18
3	Bansari	884	10	5
4	Bulu	2.027	21	20
5	Temanggung	3.729	16	12
6	Tlogomulyo	917	25	23
7	Tembarak	1.174	11	6
8	Selopampang	743	15	11
9	Kranggan	2.052	5	4
10	Pringsurat	1.911	10	9
11	Kaloran	1.725	15	13
12	Kandangan	2.103	15	3
13	Kedu	2.461	6	5
14	Ngadirejo	2.202	24	31
15	Jumo	1.209	8	5
16	Gemawang	1.461	10	8
17	Candiroto	1.096	7	4
18	Bejen	701	9	9
19	Tretep	662	9	5
20	Wonoboyo	1.002	21	18
Jumlah		31.098	284	229

Sumber data : DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Dinas Kesehatan

14. Persentase PUS yang Mempunyai Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Semua Jenis Kontrasepsi Modern

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu tentang semua alat kontrasepsi dari proses pemasangan, jangka waktu penggunaan, efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut.

Rumus persentase adalah: jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel 2.24
 PUS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Semua
 Jenis Kontrasepsi Modern
 Tahun 2020 s/d Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	107.739	98.622	100.714	103082	112.924	111.313
2	Jumlah PUS	130.415	130.966	131.516	128622	124.978	123.076
3	Persentase	82,61	75,30	76,58	80,14	90,36	90,44

Sumber data : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel *tersebut* dapat dilihat bahwa pengetahuan PUS tentang alokon modern cenderung naik diandingkan pada tahun 2024. Setiap PUS mau menggunakan alat kontrasepsi karena tahu tentang jenis, jangka waktu dan efek sampaiing alokon yang akan digunakan, adapun pencapain perkecamatan adalah:

Tabel 2.25
 Jumlah PUS Yang Memiliki Pengetahuan Kontrasepsi Modern
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Triwulan II

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODERN
1	BULU	7.958	8530	6765
2	TEMBARAK	4.762	3316	3909
3	TEMANGGUNG	10.198	6445	8039
4	PRINGSURAT	8.688	3912	7045
5	KALORAN	6.945	2592	5835
6	KANDANGAN	8.571	6809	7272
7	KEDU	9.147	6008	7379
8	PARAKAN	7.198	5484	5735
9	NGADIREJO	8.952	3371	7221
10	JUMO	4.725	3879	4125
11	TRETEP	4.181	7436	3501
12	CANDIROTO	5.321	6511	4352
13	KRANGGAN	8.099	6902	6682
14	TLOGOMULYO	4.010	4285	3384
15	SELOPAMPANG	3.387	2839	2765
16	BANSARI	4.000	4093	3464
16	KLEDUNG	4.867	5043	3927

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODERN
18	BEJEN	3.290	3483	2882
19	WONOBOYO	4.386	3616	3674
20	GEMAWANG	6.293	6820	5126
	TOTAL	124.978	111.313	90,44

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

15. Persentase Kepesertaan KB Aktif/Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP.

Rumus: Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100.

Adapun Tabel peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 sampai dengan 2025 triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.26
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta KB Aktif	107.739	98.622	100.714	103.082	102.297	101.194
2	Jumlah PUS	130.415	130.966	131.516	128.622	124.978	123.076
3	Persentase	82,61	75,30	76,58	80.14	81,85	82,22

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data setiap bulan dari laporan lini lapangan oleh kader dan Penyuluh KB di Kecamatan melalui aplikasi Simantap Kon KB kondisinya semakin naik. Hasil laporan Simantap kon KB sampai kondisi triwulan II Tahun 2025 peserta KB di Kabupaten Temanggung sejumlah 101.194 atau 82,22% dari

jumlah PUS 123.076, hal ini disebabkan faktor meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur 49 ketas sudah tidak masuk kategori PUS) yang berakibat juga menurunnya jumlah peserta KB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27
 Persentase Kepesertaan KB Aktif/Angka Pemakaian Kontrasepsi/
 CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun
 Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

NO	KECAMATAN	PUS	TOTAL PA	%
1	B U L U	7958	6672	83,84
2	TEMBARAK	4762	3855	80,95
3	TEMANGGUNG	10198	8021	78,65
4	PRINGSURAT	8688	6966	80,18
5	KALORAN	6945	5692	81,96
6	KANDANGAN	8571	7129	83,18
7	K E D U	9147	7444	81,38
8	PARAKAN	7198	5540	76,97
9	NGADIREJO	8952	7358	82,19
10	J U M O	4725	4029	85,27
11	TRETEP	4181	3494	83,57
12	CANDIROTO	5321	4426	83,18
13	KRANGGAN	8099	6589	81,36
14	TLOGOMULYO	4010	3383	84,36
15	SELOPAMPANG	3387	2784	82,20
16	BANSARI	4000	3302	82,55
17	KLEDUNG	4867	3986	81,90
18	B E J E N	3290	2762	83,95
19	WONOBOYO	4386	3638	82,95
20	GEMAWANG	6293	5227	83,06
		123.076	101.194	82,22

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari capai Peserta KB aktif sebesar 82,22, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor Pendorong adalah :
 - a. Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB
 - b. Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder
 - c. Mobilias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasespsi

- 2. Faktor Penghambat adalah :
 - a. Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern
 - b. PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon

16.Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).

Rumus: Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Jumlah Peserta KB MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta KB MKJP	107.739	98.622	100.714	47.176	47.514	47.927
2	Jumlah (PUS) yang berKB	130.415	130.966	131.516	103.082	102.297	101.194
3	Persentase	82,61	75,30	76,58	45,77	46,45	47,36

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2020–2025 triwulan II, namun dubandingkan dengan target di tahun 2025 , sudah tercapai 100 %, hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi. Seiring dengan hasil kegiatan updatting Pendataan Tahun 2023/PK23. Pencapaian peserta KB Kabupaten

Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024 sampai TW IV, capaian peserta KB berdasar hasil laporan SIMANTAP KON KB tercapai 47. 514 atau 47,45% dari peserta KB sebanyak 102.297. Adapun Permasalahan turunnya MKJP adalah:

1. Masih tingginya Rhumor kegagalan IUD di masyarakat
2. Dukungan anggaran pencabutan Implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi, menjadi PUS DO
3. Masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB MOW dan MOP.
4. Peserta KB MKJP MOW dan MOP sudah banyak yang DO.
5. Meningkatnya kemandirian menggunakan alat kontrasepsi suntik

Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Temanggung per Kecamatan Tahun 2023 s.d 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.29
Jumlah Pus yang Menggunakan Alokon MKJP

NO	KECAMATAN	TOTAL PA	CAPAIAN PA MKJP	%	
1	B U L U	6672	2.891	43,33	
2	TEMBARAK	3855	1.468	38,08	
3	TEMANGGUNG	8021	3.726	46,45	
4	PRINGSURAT	6966	3.554	51,02	
5	KALORAN	5692	3.099	54,44	
6	KANDANGAN	7129	3.704	51,96	
7	K E D U	7444	3.238	43,50	
8	PARAKAN	5540	2.610	47,11	
9	NGADIREJO	7358	2.996	40,72	
10	J U M O	4029	2.058	51,08	
11	TRETEP	3494	941	26,93	
12	CANDIROTO	4426	1.888	42,66	
13	KRANGGAN	6589	4.118	62,50	
14	TLOGOMULYO	3383	1.413	41,77	
15	SELOPAMPANG	2784	1.466	52,66	
16	BANSARI	3302	1.451	43,94	
17	KLEDUNG	3986	1.675	42,02	
18	B E J E N	2762	1.249	45,22	
19	WONOBOYO	3638	1.346	37,00	
20	GEMAWANG	5227	2.623	50,18	
		101.194	47.927	47,36	

17. Persentase kampung KB berkembang dan Mandiri

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu,dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis .

Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dan Mandiri dikalikan 100 %.

Indek Desa Membangun adalah Indeks Kompusit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS) ,Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan

Indeks Ekologi (IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri .

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa; dan
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indek Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis ,yang terjabar dalam demensi sosial, demensi ekonomi dan demensi ekologi, yang mana dari demensi–demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator, sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa, yang berhitungannnya dari rata –rata dari IKS,IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL, terdiri dari

- A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- B. Desa Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta

kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama ($<$ dan $=$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.

C. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memilikim potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

D. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memilki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya, desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,59889, dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

E. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya .desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memilkindeks desa membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Dilihat dari kriteria desa diatas, dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa. Indeks desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM, berdasarkan data dari Dipermades tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa, menjadi 100 desa
2. Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung dari 195 menjadi 27
3. Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 61, menjadi 139
4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada, dan
5. Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Adapun data persentase kampung KB di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 sampai dengan 2024 Triwulan IV dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
 Persentase kampung KB
 Kabupaten Temanggung tahun 2020 s/d 2025 triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kampung Berkualitas	NA	NA	NA	67	68	280
2	Jumlah desa dengan IDM Kategori berkembang dan mandiri	NA	NA	NA	266	239	266
3	Persentase	N.A	NA	NA	25,19	28,45	105,26

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Jumlah kampung berkualitas di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016 sampai Tahun 2024 sudah dicanangkan sebanyak 68 Desa, Namun pada tahun 2025 sampai triwulan II sebagian besar sudah dibentuk di semua desa dan kelurahan , namun kegiatannnya masih bersifat optimalisasi kegiatan yang sudah ada, diantara lain kegiatan program Bangga Kencana masih belum memaksimalkan lintas sektoral.

Adapun faktor pendorong dan penghambatnya antara lain:

- Faktor Penghambat Kampung KB
 1. Belum adanya Perbup Kampung KB
 2. Kurangnya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor OPD
 3. Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan Kampung KB
 4. Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, Pokja Kampung KB, linsek kec dan masyarakat
 5. Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB
 6. Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa
 7. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB

- Faktor Pendorong dalam Kampung KB
 1. Adanya potensi kader di kampung Kb yang bisa di berdayakan
 2. Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB
 3. Adanya dukungan dari masyarakat
 4. Adanya dukungan dari stakeholder, toma, dan toga
 5. Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten
- Rencana Tindak Lanjut Kampung KB
 1. Meningkatkan frekuensi advokasi dan KIE bagi lintas sektor atau OPD
 2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengembangan kampung KB pada Pokja Kampung KB, linsek, masyarakat.
 3. Mengadakan pelatihan bagi Pokja Kampung KB
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan di Kampung KB
 5. Mengadakan Monev kampung KB

Desa-desa di Kabupaten Temanggung yang sudah mencanangkan Kampung KB sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Data Kampung KB
Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI		PENCANANGAN	SATATUS IDM
	KECAMATAN	DESA/KEL	TANGGAL	
1	2	4	5	6
1	Bansari	Desa Mranggen Kidul	21/03/2016	Mandiri
2	Bansari	Desa Campuranom	31/07/2017	Mandiri
3	Bansari	Desa Rejosari	15/11/2018	Mandiri
4	Bejen	Desa Kemuning	17/02/2016	Maju
5	Bejen	Desa Selosabrang	25/07/2017	Mandiri
6	Bejen	Desa Lowungu	26/09/2018	Berkembang

7	Bejen	Desa Ngaliyan	02/10/2019	Berkembang
8	Bulu	Desa Wonotirto	23/02/2016	Maju
9	Bulu	Desa Wonosari	27/04/2017	Mandiri
10	Bulu	Desa Tegalrejo	29/08/2018	Mandiri
11	Candiroto	Desa Ngabeyan	29/03/2016	Maju
12	Candiroto	Desa Muntung	03/05/2017	Maju
13	Candiroto	Desa Sidoharjo	08/05/2018	Maju
14	Candiroto	Desa Batur Sari Kec. Candiroto	22/08/2019	Mandiri
15	Gemawang	Desa Gemawang	11/01/2016	Mandiri
16	Gemawang	Desa Kemiriombo	15/05/2017	Berkembang
17	Gemawang	Desa Kalibanger	11/08/2018	Maju
18	Jumo	Desa Ketitang	27/02/2016	Mandiri
19	Jumo	Desa Karangtejo	09/08/2017	Berkembang
20	Jumo	Desa Jombor	20/08/2018	Maju
21	Kaloran	Desa Gandon	24/02/2016	Maju
22	Kaloran	Desa Kemiri	27/04/2017	Maju
23	Kaloran	Desa Geblog	13/09/2018	Maju
24	Kandangan	Desa Gesing	01/03/2016	Maju
25	Kandangan	Desa Baledu	01/08/2017	Maju
26	Kandangan	Desa Ngemplak	30/10/2018	Mandiri
27	Kedu	Desa Karangtejo	29/02/2016	Maju
28	Kedu	Desa Kundisari	03/08/2017	Maju
29	Kedu	Desa Tegalsari Kec. Kedu	19/11/2018	Berkembang
30	Kedu	Desa Bandunggede	08/04/2019	Berkembang
31	Kledung	Desa Jeketro	30/03/2016	Maju
32	Kledung	Desa Kalirejo	30/08/2017	Mandiri
33	Kledung	Desa Kruwisan	16/11/2018	Mandiri
34	Kranggan	Desa Kemloko	23/01/2016	Maju
35	Kranggan	Desa Kramat	10/05/2017	Berkembang
36	Kranggan	Desa Ngropoh	14/11/2018	Maju
37	Kranggan	Desa Klepu	21/11/2018	Maju

38	Kranggan	Desa Purwosari	04/04/2019	Maju
39	Ngadirejo	Desa Gondang Winangun	28/01/2016	Mandiri
40	Ngadirejo	Desa Banjarsari	26/05/2017	Mandiri
41	Ngadirejo	Desa Mungungsari	09/11/2018	Maju
42	Parakan	Desa Traji	27/02/2016	Maju
43	Parakan	Desa Glapansari	13/07/2017	Mandiri
44	Parakan	Desa Bagusari	31/07/2018	Maju
45	Pringsurat	Desa Rejosari	24/02/2016	Mandiri
46	Pringsurat	Desa Soborejo	26/04/2017	Maju
47	Pringsurat	Desa Pagergunung	10/10/2018	Maju
48	Selopampang	Desa Bulan	17/02/2016	Maju
49	Selopampang	Desa Jetis	21/08/2017	Maju
50	Selopampang	Desa Salam Rejo	28/11/2018	Maju
51	Temanggung	Kelurahan Jampiroso	23/05/2017	
52	Temanggung	Kelurahan Walitelon Utara	28/01/2016	
53	Tembarak	Desa Tawang Sari	23/01/2016	Maju
54	Tembarak	Desa Menggoro	04/05/2017	Mandiri
55	Tembarak	Desa Purwodadi	04/10/2018	Berkembang
56	Tlogomulyo	Desa Kerokan	23/10/2017	Mandiri
57	Tlogomulyo	Desa Pagersari	10/07/2018	Maju
58	Tlogomulyo	Desa Langgeng	14/01/2016	Maju
59	Tretep	Desa Sigedong	13/01/2016	Berkembang
60	Tretep	Desa Tempelsari	27/04/2017	Berkembang
61	Tretep	Desa Bojong	29/10/2018	Berkembang
62	Wonoboyo	Desa Wonoboyo	26/01/2016	Mandiri
63	Wonoboyo	Desa Tening	18/05/2017	Maju
65	Bulu	Desa Malangsari	26/8/2019	Mandiri
66	Gemawang	jambon	2020	Maju
67	Bansari	Tlagawera	2023	Maju
68	Parakan	Nglondong	2024	Maju

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sedangkan pada Tahun 2025 triwulan II , yang sudah mencanangkan kampung Keluarga Berkualitas total semua sebanyak 280 desa dan kelurahan atau 105,65 dari jumlah desa sebanyak 266 .

18. Indek Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indek Pembangunan Keluarga atau I Bangga.

Adapun Indek Pembangunan Keluarga adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh I Bangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Variabel, 3 demensi yang ditentukan mencakup :

1. Demensi Ketentraman
2. Demensi Kemandirian
3. Demensi Kebahagiaan

Setelah semua nilai – nilainya distandarisasi dengan menggunakan persamaan diatas, selanjutnya menghitung nilai komposif masing-masing demensi dengan menggunakan persamaan berikut :

$$D_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

Rata rata aritmatika

Langkah terakhir adalah menghitung nilai

indeks Pembangunan Keluarga dengan menggunakan rata-rata :

$$IBangga = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 D_i$$

Tabel 2.32
Indek Pembangunan Keluarga Temanggung
Tahun 2020 s.d Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indek Pembangunan Keluarga	N.A	55,97	58,19	62,08	63,17	63,17

Sumber data: BKKBN Tahun 2025

Indek Pembangunan Keluarga Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 63,17 perhitungan ini dilakukan oleh BKKBN dengan menggunakan dasar PK24 atau pendataan Tahun 2024, yang dipublikasikan pada akhir Tahun 2024. Angka tersebut diukur berdasarkan perhitungan dari 3 dimensi yaitu :

- 1. Dimensi Ketemtraman dengan nilai 60,18
- 2. Dimensi Kemandirian 55,56 dan
- 3. Dimensi Kebahagiaan 70.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB sebagaimana berikut:

- 1. Peningkatan Komitmen terhadap penyusunan anggaran responsif gender;
- 2. Peningkatan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi terhadap KB pasca persalinan; dan

4. Peningkatan komitmen lintas sektoral dalam percepatan penurunan stunting

2.4 Tingkat kinerja DPPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu:

Indikator Persentase keberhasilan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Hal ini disebabkan adanya faktor faktor penghambat antara lain :

1. Wilayah tertentu cenderung ke KB mandiri/non MKJP : Tretep. Wonobojo, kledung,bansari,tembarak
2. Masih adanya bidan yang mempromosikan alat kontrasepsi Suntik dibandingkan dengan MKJP
3. PUS yang menikah diusia dini belum siap untuk ber KB
4. Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP , karena efek dari Rumor penggunaannya
5. Karena pasangannya bekerja diluar daerah sehingga tidak mau ber KB

2.5 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB antara lain :

- A Bidang Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 1. Belum Optimalnya Jejaring Lembaga Pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 2. Belum tersedianya data pilah gender sebagai dasar penyusunan anggaran responsif Gender ;
- B Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
 1. Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
 2. Masih rendahnya komitmen pelaksana kegiatan pelayanan KB.

- C Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - 1. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun;
 - 2. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA);

2.6 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan penambahan anggaran dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Temanggung, yaitu kegiatan kampanye *jo kawin bocah* dan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, yang meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.33

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025(

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH						1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	umlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	28	Orang	3.615.772.671	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	umlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	28	Orang	3.615.772.671	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	2.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	2.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12	Laporan	7.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12	Laporan	7.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Penggandaan yang Disediakan			
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12.000.000
6	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	27.949.520
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	32.500.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	6.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Penggandaan yang Disediakan				
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12.000.000	
6	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	27.949.520	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	6.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	32.500.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	641.266.000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	641.266.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	15.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit	35.900.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit	35.900.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	unit	12.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	unit	12.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	" Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 yang Dipelihara/Direh abilitasi	2	unit	5.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						30
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000
1	Advokasi dan sosialisasi penyelenggara an PUG kewenangan Kabupaten/Kot a	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	46	PD	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	" Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 yang Dipelihara/Dire habilitasi	2	unit	5.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan						10.000.000	
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggara an PUG kewenangan Kabupaten/Ko ta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	46	PD	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000
1	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40	Orang	20.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
1	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	1	Paket kegiatan layanan rujukan kekerasan terhadap perempuan	10.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000	
1	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40	orang	20.000.000	gow
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Ko tadan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	1	Paket kegiatan UPT	10.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	20.000.000		peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/KotaInformasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	20.000.000	dw
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/KotaDaerah Kabupaten/Kota							Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			300.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Pelayanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				300.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	"Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"					
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah					
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a							Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta						
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a					42.842.200		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta					42.842.200	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot a	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	5	Kegiatan	35.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Ko ta	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	5	Kegiatan	35.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Khusus Kewenangan			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	laporan	217.800.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	laporan	205.456.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	"Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja"	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Kegiatan	200.000.000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kab. Temanggung, Semua	"Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan	4	Kegiatan	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Khusus Kewenangan				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	laporan	217.800.000	DAK Non Fisik
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	laporan	205.456.000	DAK Non Fisik
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						
	"Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja"	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Kegiatan	200.000.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Kab. Temanggung, Semua	"Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan	4	Kegiatan	83..650.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kecamatan, Semua Kelurahan	Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya					(KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kecamatan, Semua Kelurahan	Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya				
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Lokal"	Terlaksannnya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Kegiatan			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Lokal"	Terlaksannnya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Kegiatan	71.825.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	laporan			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	laporan	300.000.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Luar Ruang"	Terlaksannnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	12	Laporan			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Luar Ruang"	Terlaksannnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di	12	Laporan	1.055.144.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyuluhan KKBPK		Penyuluhan KKBPK			
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Pengendalian Program KKBPK	4	Kegiatan	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi	10	Laporan	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian	12	Laporan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyuluhan KKBPK		Balai Penyuluhan KKBPK				
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Pengendalian Program KKBPK	4	Kegiatan	80.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi	10	Laporan	821.525.000	Dak non fisik
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					1.399.956.000	DAK Fisik
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengendalian Pendistribusia n Alat dan	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian	12	Laporan	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terwujudnya Peningkatan Kesertaan	12	Laporan			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terwujudnya Peningkatan Kesertaan	12	Laporan	2.075.434.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	Laporan			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	Laporan	362.000.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	35.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dppppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	Kegiatan	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	Laporan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					0
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	lokus stunting kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	Kegiatan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dppppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	Kegiatan	5.314.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	Laporan	774.036.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					19.200.000	dak non fisik
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	lokus stunting kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	Kegiatan	300.000.000	Pengadaa n Sarana Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga (BKB, BKR,

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Ekonomi Keluarga/UPPK S)					
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	Laporan	0
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Kecamatan Kranggan , desa Kranggan	"Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2	Kegiatan	35.000.000
	"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)						BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberd ayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	Laporan	3.836.700.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Kecamatan Kranggan , desa Gentan	"Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2	Kegiatan	35.000.000	
	"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi						

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"							Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"						
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan	0		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan	50.000.000	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.7 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Desa dan bukan DPPPAPPKB. Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabe.34

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.8 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPPAPPKB ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 .35
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2022-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SIMANTAP KON KB	PKB, Kader IMP		Pencataan dan pelaporan penyuluhan dan pelayanan KB	Pencataan dan pelaporan	Masyarakat dan PUS	DPPPAPPKB TAHUN 2021
2	SIPESAN PERAK	DPPPAPPKB, masyarakat	APBD	Sisten Pelaporan kasus oleh masyarakat	DPPPAPPB, Masyarakat	Terlapornya kasus kekerasan terhadap masyarakat dan anak	DPPPAPPKB TAHUN 2022
3	AKSI PENTING	PKB dan satgas Stunting		Pemantauan intervnsi penurunan Stunting	DPPPAPPKB, Satgas dan Masyarakat	Terpantauannya, pelaporan pemberian PMT dan TTD selama 90 HARI BERTURUT	DPPPAPPKB TAHUN 2022
4	Optimalisasi pertanggung jawaban keuangan dengan	ASN	0	Pembuatan dan form chek list SPJ	Pemakaian buku saku	SPJ	Tahun 2022

	pembuatan E-Book saku dan form cek list						
5	Anter Ceting Kamu	ASN	0	Penyuluhan terpadu pencegahan stunting dan nikah muda	Masyarakat dan remaja	Terlaksanya penyuluhan dalam rangka pencegahan stunting dan meurunnya nikah muda	Tahun 2022

2.9 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPPAPPKB ada 6 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel .2.36
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Puskesmas Ramah Anak	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPPAPPKB
2	Penyuluh KB Teladan Tingkat jawa Tengah juara i	Perwakilan BKKBN jawa tengah	Propinsi Jawa tengah	DPPPAPPKB
53	Pelayanan KB dalam rangka .harii muslimat juara I tingkat propinsi ...	Perwakilan BKKBN jawa tengah	Propinsi Jawa tengah	DPPPAPPKB
4	Juara IMP teladan Juara III	Perwakilan BKKBN jawa tengah	Propinsi Jawa tengah	DPPPAPPKB
5	Terbaik II Regional Jawa Bali kategori capaian KB MKJP Tertinggi terhadap Total Pelayanan KB pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak di Pasar Tradisional	Kemendukbangga /Kepala BKKBN	Nasional	DPPPAPPKB

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPPAPPKB lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di DPPPAPPKB dalam rangka akuntabilitas kinerja DPPPAPPKB.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPPKBKab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 DPPPAPPKBKabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga		Indeks Ketimpangan Gender			angka	0,191	0,186
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)			angka	64,79	68,07
	Meningkatnya kesetaraan Gender	indek Pemberdayaan Gender			%	74,35	74,95
			Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	9,21	10,5
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,35	2,55
	Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak			%	100	100
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100
				Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	angka	5,15	4,17
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	76,92	100

		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	nindya	nindya	utama
			Prosentase terbentuknya DRPPA	%	30,1	85,47
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pernikahan usia anak	%	0.092	0,059
			Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	100
			Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,48	6,69
Meningkatnya keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			%	0,78	0,74
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,58	7,54
	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)		Median usia kawin pertama (Mukp)	angka	20,1	20,5
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15- 19 TH)	angka	9,22	8,7
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,8	59,20
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,95	47,95
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,8	80

			Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	15,91	18,68
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,75	46,03
			Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,4	87,8
			Indeks lansia berdaya	angka	58	58,4

Kebijakan dan strategi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025 - 2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran DPPPAPPKB Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan DPPPAPPKBTahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPPAPPKBTahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2026 (SUMBER SIPD PENETAPAN)

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.576.461.471		URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.576.461.471	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.576.461.471		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.576.461.471	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.772.671		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.772.671	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.788.800		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.788.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.288.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.288.800	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.900.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.900.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	10.000.000			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	10.000.000		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	42.842.200			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	42.842.200		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000		

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	35.000.000			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	45.000.000		+ 10.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000		+ 10.000.000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000		+ 10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	52.842.200			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	52.842.200		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10.000.000			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10.000.000		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	423.256.000			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	423.256.000		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	423.256.000			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	423.256.000		

	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	205.456.000			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	205.456.000		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.293.884.000			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.293.884.000		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.790.619.000			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.790.619.000		
	"Pengendalian Program KKBPK	80.000.000			Pengendalian Program KKBPK	80.000.000		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.055.144.000			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.055.144.000		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000		
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	71.825.000			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	71.825.000		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.650.000			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.650.000		
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.221.481.000			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.221.481.000		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	821.525.000			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	821.525.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.399.956.000			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.399.956.000		

	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.502.434.000			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.502.434.000		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.075.434.000			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.075.434.000		
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	362.000.000			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	362.000.000		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.000.000			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.000.000		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	779.350.000			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	779.350.000		
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.314.000			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.314.000		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	774.036.000			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	774.036.000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.245.900.000			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.245.900.000		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.205.900.000			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.205.900.000		
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.000.000			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.000.000		

	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300.000.000			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300.000.000		
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	3.836.700.000			"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	3.836.700.000		
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15.000.000			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15.000.000		
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20.000.000			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	40.000.000		+20.000.000
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.000.000		+ 20.000.000
		16.670.185.871				16.700.185.871		

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Operasional dikarenakan Kebutuhan dalam rangka peningkatan kegiatan Generasi Berencana dan Forum Anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan usia anak dalam pencegahan stunting dan penurunan stunting di kabupaten Temanggung

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan DPPPAPPKBKab. Temanggung
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana 2026			
						Lokasi Output Kegiatan	target capaian kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Sum- ber Dana	target kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							program	keluaran sub kegiatan	hasil kegiatan	DAU	DAK			tolak ukur	target	
					URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH					4.576.461.471	-				4.679.872.671	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.576.461.471	-				4.679.872.671	
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.615.772.671	-				3.615.772.671	
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN DPPPAPPKB sebanyak 30 orang, untuk 14 bulan	3.615.772.671		DAU	ada yang pensiun 2 orang	"Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan	14 bulan	3.615.772.671
X	XX	0 1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.000.000	-				95.000.000	
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tercukupi kebutuhan penerangan bangunan kantor	2.000.000		DAU		tercukupi kebutuhan penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.000.000
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya 3 Unit laptop dan 3 Unit Printer	11.000.000		DAU	belum tercukupi peralatan perlengkapan kantor, karena sudah lama tidak ada pengadaan,d an sudah banyak yang kondisi rusak	Tersedianya 3 Unit laptop dan 3 Unit Printer	100% dari usulan	20.000.000

X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tersedianya ATK ,pendukung perkantoran	7.000.000		DAU		tersedianya ATK ,pendukung perkantoran	12 bulan	12.000.000
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tersedianya barang cetakan dan p3nggadaan ,pendukung perkantoran	7.000.000		DAU		tersedianya barang cetakan dan p3nggadaan ,pendukung perkantoran	12 bulan	12.000.000
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tercukupi kebutuhan minum pegawai sebanyak 37 orang , fasilitas tamu	12.000.000		DAU		tercukupi kebutuhan minum pegawai sebanyak 37 orang , fasilitas tamu	12 bulan	30.000.000
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercukupi kegiatan perjalanan dinas luar daerah	30.000.000		DAU		tercukupi kegiatan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	30.000.000
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					822.788.800	-					824.100.000
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bln	7.000.000		DAU				15.000.000
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bln	32.500.000		DAU				39.100.000
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya service alat perlengkapan kantor	6.000.000		DAU	anggaran tidak mencukupi perlengkapan kantor yang membutuhka n service	Tercukupinya service alat perlengkapan kantor	laptop, PC, dan printer	10.000.000

X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tercukupi gaji SS, Penjaga malam balai ,satpam , tersedianya kebutuhan kebersihan kantor dan tercukupinya lembur ASN	777.288.800		DAU	Belum memenuhi standar UMR SS 12X6X20000 00	Terpenuhinya honorarium bagi SS (rincian), Satpam, Penjaga 12 Bulan	12 bulan	760.000.000
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.900.000	-					145.000.000
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	tercukupi, service, BBM dan pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 2 unit	15.000.000		DAU		tercukupi, service, BBM dan pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 2 unit	12 bulan	15.000.000
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tercukupi, pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 75 unit., dan service mobil operasional	35.900.000				tercukupi, pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 75 unit., dan service mobil operasional	12 bulan	40.000.000
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	20.000.000				tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	12 bulan	70.000.000
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	10.000.000				tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	12 bulan	20.000.000

					Bangunan Lainnya		Darat Tak Bermotor									
2	0.8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					160.684.400						235.150.000
2	0.8	2	201		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					10.000.000	-					30.150.00
2	0.8	2	201	0	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000	-					30.150.000
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.)Pertemuan Teknis Penyusunan ARG , 2) advokasi APE 3) Pertemuan Pokja PUG 4) Monev APE	10.000.000		DAU	anggaran di tahun 2023 , dilaksanakan untuk mendukung kegiatan lain dan tidak mendukung capaian Target indikator PD	1.)Pertemuan Teknis Penyusunan ARG , 2) advokasi APE 3) Pertemuan Pokja PUG 4) Monev APE	4 kegiatan	30.150.000
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					42.842.200						50.000.000
2	8	3	2.01		Penyediaan layanan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasa yang Memerlukan koordinasi tingkat kabupatn					42.842.200	42842200					50.000.000

2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket Kegiatan layanan kasus terhadap perempuan	42.842.200		DAU	Pelayanan , Pengaduan , penjangkauan korban dan penyediaan tempat penampungan sementara	1 Paket Kegiatan layanan kasus terhadap perempuan	12 bulan	50.000.000
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					25.000.000						55.250.000
2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000						25.000.000
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1) advokasi 2) Sosialisasi, 3) Pembentukan Kecamatan dan Desa GSIB dan Monev GSI	10.000.000		DAU	kegiatan dalam rangka mendukung capaian indikator Upaya keras	1) advokasi 2) Sosialisasi, 3) Pembentukan Kecamatan dan Desa GSIB	4 kegiatan	25.000.000
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.000.000	-					25.125.000
2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					25.000.000	-					25.125.000

2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket Kegiatan FAKTA	45.000.000		DAU		1 Paket Kegiatan FAKTA	4 kegiatan	40.000.000
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					42.842.200	400.000.000					90.000.000
2	8	7	2.01		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					42.842.200	400.000.000					50.000.000
2	8	7	2.01	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan terhadap AMPK Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pengaduan bagi AMPK	42.842.200		DAU	tahun 2023, tidak ada anggarannya, di tahun 2022 ada anggaran dari DAK	advokasi, sosialisasi sipesan perak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	4 kegiatan	50.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						11.158.817.000					
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						423.256.000					423.256.000
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					-	366.000.000					216.350.000
2	14	02	202	11	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pencatatan dan penguulan data keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedi	Honor PPKBD dan Faskes (Pencatatan Pelaporan)		217.800.000	DAK non Fisik		Honor PPKBD dan Faskes (Pencatatan Pelaporan)	12 bulan	217.800.000
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Belanja Penyediaan Jasa Internet untuk Balai KB		205.456.000	DAK non Fisik		Belanja Penyediaan Jasa Internet untuk Balai KB	12 bulan	205.456.000

								Lapangan dan Pelayanan KB								
2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						7.293.884.000				7.293.884.000
2	14	3	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						1.790.619.000				1.790.619.000
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	1) Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten dan Kecamatan 2) Mini Loka Karya Stunting 3) Rembug Stunting 4) Penunjang Pelayanan KB		200.000.000	DAK non Fisik				200.000.000
2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Layanan KIE Keliling	10.000.000	73.650.000	DAK non Fisik dan DAU	sejak tahun 2020, kegiatan ini tidak ada anggaran, harapannya untuk peningkatan kie kepada masyarakat sesuai kearifan lokal masyarakat, dengan memanfaatkan mobil penerangan	Layanan KIE Keliling	4 kegiatan	25.000.000

2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Penyediaan Bahan KIE (Leaflet, Poster, Banner, Baliho, Spanduk, Media Elektronik, Sticker, Media Promosi)		71.825.000	DAK non Fisik		Penyediaan Bahan KIE (Leaflet, Poster, Banner, Baliho, Spanduk, Media Elektronik, Sticker, Media Promosi)	5 kegiatan	71.825.000
2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	rapat koordinasi program bangsa kebcana dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa		300.000.000	Dak non fisik		rapat koordinasi program bangsa kebcana dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa	12 bulan	300.000.000

2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Operasional Balai KB di 20 Kecamatan		1.055.144.000			Operasional Balai KB di 20 Kecamatan	12 bulan	1.055.144.000
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1) Audit Stunting		80.000.000			1) Audit Stunting	4 kegiatan	80.000.000
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) as Lapangan KB (PKB/PLKB)					-	2.221.481.000					1.399.037.250
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 kec	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Honor Sub PPKBD sebanyak 1700 orang		821.525.000	DAK non Fisik		Honor Sub PPKBD sebanyak 1627 dan PPLBD sebanyak 289 orang	4 tribulan	821.525.000

					Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	8 kecamatan	Terlaksannya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah fasilitasi kegiatan penyuluhan dan penggerakan program Keluarga Berencana oleh Penyuluh KB	Rehab balai penyuluh KB		1.399.956.000	DAK Fisik		Rehab balai penyuluh KB	8 kegiatan	1.399.956.000
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					-	2.502.434.000					2.502.434.000
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pendistribusian Alokasi di Faskes		30.000.000	DAK non Fisik		Pendistribusian Alokasi di Faskes	12 bulan	30.000.000
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan KB MKJP dalam moment strategis dan pelayanan rutin di faskes		2.075.434.000	DAK non Fisik		Pelayanan KB MKJP dalam moment strategis dan pelayanan rutin di faskes	12 bulan	2.075.434.000

2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	pengadaan 10 motor Op. Lini lapangan, 8 rehab dan kelengkapan balai, dan sarana pelayanan KB di 30 faskes		362.000.000	DAK Fisik		pengadaan 10 motor Op. Lini lapangan, 8 rehab dan kelengkapan balai, dan sarana pelayanan KB di 30 faskes	100%	362.000.000
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes Jaringan dan Jejaringnya		35.000.000			Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	35.000.000
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				-		779.350.000				bulan	779.350.000
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dpppappkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.314.000		9.000.000			9.000.000	12 bulan	20.000.000
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	774.036.000		1.007.500.000			1.007.500.000	12 bulan	1.139.700.000

2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					105.000.000	4.215.900.000					4.103.040.000
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					65.000.000	4.215.900.000					3.953.040.000
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Pengadaan BKB KIT untuk 25 locus stunting		300.000.000			Pengadaan BKB KIT untuk 20 locus stunting	100%	300.000.000
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Operasional Tim Pendamping Keluarga		3.836.700.000			Operasional Tim Pendamping Keluarga	12 bulan	3.533.040.000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Kranggan , desa Kranggan	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	sosialisasi pencegahan Stunting	35.000.000			hasil Musrenbang Kecamatan	sosialisasi pencegahan Stunting	2 kegiatan	30.000.000

					Keluarga/UPP KS)		Keluarga/ UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)								
					Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kecamatan candiroto dan tembarak	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pusat konselling dan pelayanan bangga kencana di Balai Penyuluhan		19.200.000				12 bulan	19.200.000
2	14	4	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Operasional Pemilihan Duta Genre dan Pembinaan Forgen	15.000.000				Operasional Pemilihan Duta Genre dan Pembinaan Forgen	3 kegiata n	60.000.000
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					40.000.000	-					150.000.000

2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR	40.000.000		DAU		Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR	12 bulan	150.000.000
TOTAL										5.141.368.871	11.558.817.000					
										16.700.185.871						

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun awal politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 12.054.174.367 (82,73%), realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.443.324.226 (96,65%), belanja Daerah sebesar Rp. 13.497.498.593 atau 84,03% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 4.295.498.553 (28,41%), realisasi Belanja Modal sebesar 0 {00,00%}, belanja Daerah Sebesar Rp. 4.295.498.553 (25,49%).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 DPPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16.700.185.871,- yang terdiri dari 9 program antara lain program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- b. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- c. Program Perlindungan Perempuan

- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- e. Program Pemenuhan Hak Anak /PHA
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
- g. Program Pengendalian Penduduk
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



DRA. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M
NIP. 19700730 199001 2 002



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

T A H U N 2 0 2 6

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

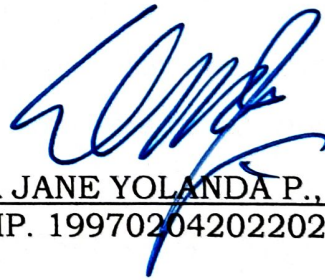
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam,
dan Infrastruktur,



ADI WIBOWO, S.T.
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator,



ELMA JANE YOLANDA P., S.P.W.K.
NIP. 199702042022022001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pemula Utama Muda
NIP. 197203241992031003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2026.

Penyusunan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan, serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan pembangunan, evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, dan masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Renja ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang responsif, adaptif, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Melalui Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026, DPRKPLH Kabupaten Temanggung bertekad untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan dokumen Renja ini dalam rangka mendukung Tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

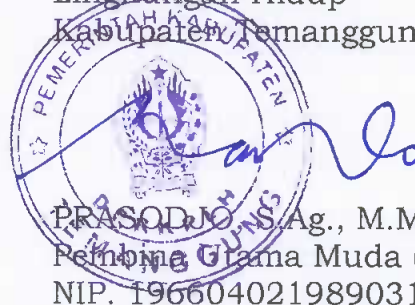
Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, data, dan masukan konstruktif dalam proses penyusunannya mulai dari jajaran pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, staf teknis, hingga para mitra kerja dan masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Semoga dengan kerja keras, komitmen, dan sinergi bersama, kita mampu mewujudkan cita-cita pembangunan menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung secara berkelanjutan.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab.

Temanggung, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029...	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	39
2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	111
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	128
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	128
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	135
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	140
4.1 Program dan Kegiatan	140
BAB V PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Sampai dengan Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Temanggung	40
Tabel 2.4	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung	56
Tabel 2.5	Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dari Tahun 2020-2025.....	57
Tabel 2.6	Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	60
Tabel 2.7	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	62
Tabel 2.8	Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni.....	63
Tabel 2.9	Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2020-2025.....	64
Tabel 2.10	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	66
Tabel 2.11	Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2020-2025	67
Tabel 2.12	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	69
Tabel 2.13	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.....	70
Tabel 2.14	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.....	72

Tabel 2.15	Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan	51
Tabel 2.16	Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025..	75
Tabel 2.17	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	78
Tabel 2.18	Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	80
Tabel 2.19	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	82
Tabel 2.20	Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung.	84
Tabel 2.21	Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2020-2025.....	85
Tabel 2.22	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2020-2025.....	87
Tabel 2.23	Persentase Usaha yang Memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3.....	89
Tabel 2.24	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.....	90
Tabel 2.25	Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung.....	93
Tabel 2.26	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2025.....	94
Tabel 2.27	Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2020-2025.....	96
Tabel 2.28	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	101

Tabel 2.29	Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2020-2025.....	102
Tabel 2.30	Daftar Depo Transfer Tahun 2025.....	103
Tabel 2.31	Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung.....	104
Tabel 2.32	Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan Kabupaten Temanggung.....	105
Tabel 2.33	Daftar Alat Pengolah Sampah di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung.....	106
Tabel. 2.34	Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis.....	110
Tabel 2.35	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.....	113
Tabel 2.36	Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
Tabel 2.37	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2025.....	125
Tabel 2.38	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025.....	126
Tabel 3.1	Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.....	134
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	136
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	141
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	145

- **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

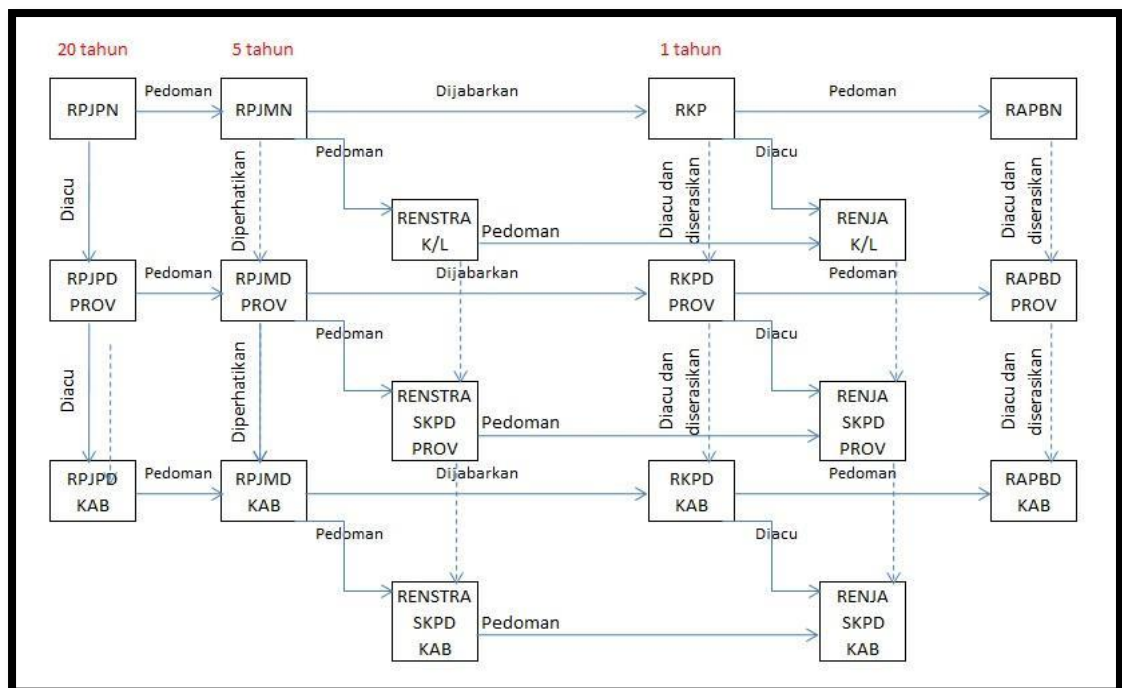
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja DPRKPLH Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPRKPLH Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPRKPLH, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPRKPLH, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPRKPLH;
- 2) Kondisi pelayanan DPRKPLH;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH;
- 4) Data Pokok Pembangunan DPRKPLH;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPRKPLH;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan DPRKPLH.

b. Analisis gambaran pelayanan DPRKPLH;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPRKPLH adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPRKPLH.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPRKPLH untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPRKPLH.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun lalu berdasarkan Renstra DPRKPLH;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPRKPLH. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPRKPLH dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPRKPLH tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra DPRKPLH;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra DPRKPLH;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun sebelumnya, serta

capaian kinerja Renstra DPRKPLH.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPRKPLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPRKPLH;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRKPLH;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPRKPLH;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPRKPLH.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPRKPLH.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPRKPLH;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPRKPLH merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH;

Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPRKPLH dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPRKPLH dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPRKPLH yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPRKPLH untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DPRKPLH Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPRKPLH Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPRKPLH Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2024 terhadap capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025**. Evaluasi terhadap capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Sampai dengan Tahun 2024

Indikator Sasaran RPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat daerah :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD) :

1. Persentase Perumahan dan Permukiman layak huni

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.000.000.000	10.469.879.000	-	10.469.518.341	-	100	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100			100		100		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000.000	10.469.879.000		10.469.518.341		100	
	-	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	1.006	5.000.000.000	10.469.879.000	1012	10.469.518.341	100	100	Terdapat pengembangan karena sebagian yang menerima bantuan sudah memiliki bilik sehingga alokasi anggaran untuk pembuatan bilik dialihkan ke penerima bantuan yang lain
			Terlaksananya Pembangunan Tangki Septic Individu	%	100			100		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.201.800.000	1.010.076.140		946.483.302		93,70	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,46			3,69		100		
			Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	88,30			95,29		100		
	a.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.201.800.000	1.010.076.140		946.483.302		93,70	
	-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	72	1.201.800.000	1.010.076.140	72	946.483.302	100	93,70	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7.385.738.800	8.032.124.790		7.867.280.889		97,95	
			Persentase Rumah Layak Huni	%	95,54			96,31		100		
			Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,84			3,63		100		
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100			100		100		
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100			100		100		
	a.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				7.385.738.800	8.032.124.790		7.867.280.889		97,95	
	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	308	7.385.738.800	8.032.124.790	308	7.867.280.889	100	97,95	Terdapat anggaran untuk pembangunan sebanyak 7 RTLH yang dikembalikan yang disebabkan: 1. Pengunduran diri dari penerima karena

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
												a. Penerima bantuan belum memiliki legalitas tanah b. Penerima bantuan status tanahnya dalam sengketa keluarga c. Penerima bantuan tidak siap swadaya 2. Penerima bantuan sudah mendapat bantuan pembangunan RTLH dari sumber lain
			Jumlah Jamban yang dibangun	Unit	30			30		100		Desa Samiran Kecamatan Kandangan
			Jumlah rumah yang diplester lantai	Unit	44			44		100		Desa Sungginsari Kecamatan Parakan dan Desa Kebonsari Kecamatan Wonobojo
			Jumlah rumah yang dipasang listrik	Paket	125			125		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										
			Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100			100		100		
	5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				200.000.000	200.000.000		197.449.700		98,72	
			Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100			100		100		
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100			100		100		
	a.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000	50.000.000		47.789.550		95,58	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	-	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	50.000.000	1	47.789.550	100	95,58	
	b.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				150.000.000	150.000.000		149.660.150		99,77	
	-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	150.000.000	150.000.000	1	149.660.150	100	99,77	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (4) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				799.999.950	452.954.550		409.445.966		90,39	
			Indeks Kualitas Air		52,70			59,63		100		
			Indeks Kualitas Udara		83,82			87,84		100		
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,067			3,09		100		
	a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				399.999.950	252.955.150		243.940.193		96,44	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	50.000.000	30.000.000	1	29.553.500	100	98,51	
	-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan	Dokumen	25	349.999.950	222.955.150	25	214.386.693	100	96,16	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Dokumen Mutu yang Dilaksanakan									
	b.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				400.000.000	199.999.400		165.505.773		82,75	
	-	Pelaksanaan rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1	400.000.000	199.999.400	64,65	165.505.773	100	82,75	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.300.000.000	1.387.500.000		1.336.637.497		96,33	
			Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	63,90			92,02		100		
	a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.300.000.000	1.387.500.000		1.336.637.497		96,33	
	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	7,96	1.200.000.000	1.287.500.000	7,96	1.238.046.232	100	96,16	
			Terpeliharanya Taman Kota	Bulan	12			12		100		
	-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	100.000.000	100.000.000	1	98.591.265	100	98,59	
			Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda	Bulan	12	90.864.000		12		100		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis	%	100			100		100		

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengelolaan Limbah B3									
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				50.000.000	35.738.800		31.575.583		88,35	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100			100		100	88,35	
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	35.738.800		31.575.583		88,35	
	-	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	50	50.000.000	35.738.800	50	31.575.583	100	88,35	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN										

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,60			28,93		100		
	11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				50.000.000	50.000.000		49.527.584		99,06	
			Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100			100		100		
	a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	50.000.000		49.527.584		99,06	
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	50.000.000	50.000.000	1	49.527.584	100	99,06	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
	12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100			100		100		
	13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				12.085.000.000	9.127.499.700		7.520.958.149		82,40	
			Persentase sampah yang tertangani	%	60,21			62,91		100		
			Cakupan layanan persampahan	%	64,71			74,39		100		

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	a.	Pengelolaan Sampah				12.085.000.000	9.127.499.700		7.520.958.149		82,40	
	-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	198	400.000.000	400.000.000	215	307.126.444	100	76,78	
	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhri	Unit	5	5.000.000.000	2.912.499.700	5	1.514.071.383	100	51,99	
			Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bulan	12			12		100		
	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	90.279	6.685.000.000	5.815.000.000	93.204,56	5.699.760.322	100	98,02	
			Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bulan	12			12		100		
			Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bulan	12			12		100		
			Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan	Bulan	12			12		100		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
				K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Prasarana dan Sarana Persampahan									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)									100		
Predikat									Sangat Tinggi		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.973.835.806	12.757.561.989		12.513.598.866		98,09	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100			100		100		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.099.413.456	11.845.144.939		11.669.704.195		98,52	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1599	12.099.413.456	11.845.144.939	1.599	11.669.704.195	100	98,52	
			Orang	123							
			Bulan	13							
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah				110.996.250	106.993.150		93.446.830		87,34	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.999.750	8.997.000	12	8.596.230	100	95,55	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.000.000	22.000.000	12	19.387.000	100	88,12	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	20.000.000	12	19.928.100	100	99,64	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	25.997.500	25.997.150	12	21.849.600	100	84,05	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	29.999.000	29.999.000	12	23.685.900	100	78,96	
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				617.000.000	626.999.700		586.118.311		93,48	

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	2.000.000	12	1.294.000	100	64,70	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	110.000.000	12	87.523.252	100	79,57	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Laporan	12	525.000.000	514.999.700	12	497.301.059	100	96,56	
	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.426.100	178.424.200		164.329.530		92,10	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	78.000.000	100.000.000	24	86.901.800	100	86,90	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	60.426.100	65.424.200	1,00	64.551.730	100	98,67	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	8.000.000	13.000.000	13	12.876.000	100	99,05	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (10) (%)										100		
Predikat										Sangat Tinggi		
						RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH				100	94,99	
						PREDIKAT				Sangat Tinggi		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Keterangan
				K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		100		
							PREDIKAT		Sangat Tinggi		
	JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN				41.046.374.556	43.523.334.969		41.342.475.877			
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang menjadi kendala maupun hambatan dapat diselesaikan sejak awal							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:		1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain							
	Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut	:		Perencanaan secara optimal pada pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang berorientasi pada hasil							
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/ Kota berikutnya	:		Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2025 mendatang dengan mengacu dan berkesinambungan dengan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026							

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
s.d Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran RPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat daerah :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD) :
1 Persentase Perumahan dan Permukiman layak huni
2 Indeks Kualitas Air (IKA)
3 Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.536.400.000		-		-		0	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				-	2.536.400.000		-		-		0	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS yang dibangun	Ton/Hari	2		2.536.400.000	0		0	-	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)											0		
Predikat											Sangat Rendah		
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				10.419.879.000	6.655.398.000		5.953.000		5.953.000		0	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100			100		100		100		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.419.879.000	6.655.398.000		5.953.000		-		0	

No	-	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	I		K	Rp.	K	Rp.	
								K	Rp.					
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Ruma h Tangg a	517	10.419.879.000	6.655.398.000	0	5.953.000	0		0	0	
			Terlaksananya Pembangunan Tangki Septic Individu	%	100			0		0		0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)												0		
Predikat												Sangat Rendah		
3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				316.091.000	316.091.000		45.711.991		45.711.991		14,46	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,11			3,69		3,69		100		
			Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	88,40			95,29		95,29		100		
	a	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				316.091.000	316.091.000		45.711.991		45.711.991		14,46	
	-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Doku men	72	316.091.000	316.091.000	18	45.711.991	18	45.711.991	25,00	14,46	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)												25,00		
Predikat												Sedang		
4		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.113.909.000	1.209.000.000		-		-		0,00	
			Persentase Rumah Layak Huni	%	95,89			96,31		96,31		100		
			Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,82			3,63		3,63		100		
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100			100		100		100		
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program	%	100			100		100		100		

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni											
	a .	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				6.113.909.000	1.209.000.000		-		-		0,00	
	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	57	6.113.909.000	1.209.000.000		-	0	-	0	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (4) (%)												0		
Predikat												Sangat Rendah		
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
			Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100			100		100		100		
	5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000	50.000.000	0	1.298.500		1.298.500		2,60	
			Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100			0		0		0		
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100			100		100		100		
	a .	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000	50.000.000		1.298.500		1.298.500		2,60	

No	-	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	50.000.000	0,30	1.298.500	0	1.298.500	30,00	2,60	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)												30,00		
Predikat												Tinggi		
	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				250.000.000	345.000.000		850.000		850.000		0,25	
			Indeks Kualitas Air		53,30			59,63		59,63		100		
			Indeks Kualitas Udara		83,87			87,84		87,84		100		
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,067			3,27		3,27		100		
	a	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				115.000.000	330.000.000		-		-		0,00	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	25.000.000	30.000.000	0		0	-	0	0	
	-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	25	90.000.000	300.000.000	2	-	2	-	8,00	0	
	b	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				135.000.000	15.000.000		850.000		850.000		5,67	
	-	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota	Ha	1	135.000.000	15.000.000	16,70	850.000	16,70	850.000	100	5,67	

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			yang menjadi kewenangan kabupaten/kota											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)												36,00		
Predikat												Tinggi		
	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				375.000.000	175.000.000		23.964.600		23.964.600		13,69	
			Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	65,00			73,61		73,61		100		
	a	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				375.000.000	175.000.000		23.964.600		23.964.600		13,69	
	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5,76	375.000.000	175.000.000	5,76	23.964.600	5,76	23.964.600	100	13,69	
			Terpeliharanya Taman Kota	Bulan	12			3		3		25,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)												62,50		
Predikat												Sangat Tinggi		
	8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100			100		100		100		
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				10.000.000	10.000.000		575.000		575.000		5,75	
			Persentase Pembinaan dan	%	100			20,00		20		20,00	5,75	

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.					
			Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup											
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	10.000.000		575.000		575.000		5,75	
	-	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	50	10.000.000	10.000.000	10	575.000	10	575.000	20,00	5,75	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%)												20,00		
Predikat												Rendah		
	10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,60			28,93		28,93		100		
	11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				70.000.000	25.000.000		1.210.500		1.210.500		4,84	
			Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100			0		0		0		

No		Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
								I						
					K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	a .	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000	25.000.000		1.210.500		1.210.500		4,84		
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	70.000.000	25.000.000	0	1.210.500	0	1.210.500	0	4,84	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)												0		
Predikat												Sangat Rendah		
	1 2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100			
	1 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				3.500.000.000	6.000.000.000		513.144.377		513.144.377		8,55	
			Persentase sampah yang tertangani	%	60,50		60,75		60,75		100			
			Cakupan layanan persampahan	%	66,44		76,12		76,12		100			
	a .	Pengelolaan Sampah				3.500.000.000	6.000.000.000		513.144.377		513.144.377		8,55	
	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	Unit	5	1.600.000.000	4.100.000.000	5	94.497.900	5	94.497.900	100	2,30	

No			Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
									I						
						K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhi												
			Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bula n	12			3		3		25,00			
	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	91.485	1.900.000.000	1.900.000.000	22.496	418.646.477	22.495,58	418.646.477	24,59	22,03		
			Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bula n	12			3		3		25,00			
			Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bula n	12			3		3		25,00			
			Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Bula n	12			3		3		25,00			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (10) (%)												37,43			
Predikat												Tinggi			
	14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.252.379.584	18.765.078.131		4.958.942.666		4.958.942.666		26,43		

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan	
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	I							
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA													
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100			100		0		0			
	a .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.436.291.184	12.948.989.731		3.201.080.741		3.201.080.741		24,72		
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/ Bula n	161 2	12.436.291.184	12.948.989.731	372	3.201.080.741	372	3.201.080.741	23,08	24,72	
			Oran g	124										
			Bula n	13										
	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah			112.998.500	112.998.500		5.569.297		5.569.297		4,93		
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6.000.000	6.000.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.000.000	22.000.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	20.000.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	12	25.000.000	25.000.000	3	2.467.500	3	2.467.500	25,00	9,87	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	12	39.998.500	39.998.500	3	3.101.797	3	3.101.797	25,00	7,75	
	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				41.000.000	41.000.000		-	0	-	0	0,00	

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan	
							I							
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Urusan Pemerintah Daerah												
	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	16.000.000	16.000.000		-	0	-	0	0,00	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	25.000.000	25.000.000		-	0	-	0	0,00	
	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.482.090.700	5.482.090.700		1.741.851.128		1.741.851.128		31,77	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	2.000.000	3	390.000	3	390.000	25	19,50	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	105.000.000	105.000.000	3	22.390.964	3	22.390.964	25	21,32	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.375.090.700	Rp5.375.090.700	3	1.719.070.164	3	1.719.070.164	25	31,98	
	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				179.999.200	179.999.200		10.441.500		10.441.500		5,80	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	100.000.000	100.000.000	6	5.946.500	6	5.946.500	25,00	5,95	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	69.999.200	69.999.200	0,25	2.145.000	0,25	2.145.000	25,00	3,06	
	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	12	10.000.000	10.000.000	4	2.350.000	4	2.350.000	33,33	23,50	

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satua n	Target 2025			Realisasi per Triwulan Tahun 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Keterangan
							I						
				K	RENJA Rp.	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Dipelihara/Direhabilitasi											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (11) (%)											20,43		
Predikat											Rendah		
						RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH					21,03	15,38	
						PREDIKAT					Rendah		
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH					82,73		
						PREDIKAT					Sangat Tinggi		
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN					39.357.258.584	36.086.967.131		5.551.650.634		5.551.650.634			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				:	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang menjadi kendala maupun hambatan dapat diselesaikan sejak awal								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				:	1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain 3. Sistem pembayaran dengan KKPD belum dapat dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 4. Pencairan termin I untuk pelaksanaan kegiatan fisik DAK Tahun 2025 pada triwulan I belum dapat dilaksanakan								
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut				:	Akselerasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan II dengan tetap memperhatikan timeline perencanaan								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/ Kota berikutnya				:	Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2025 serta mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Kepala Daerah agar dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan								

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan rincian indikator sebagai berikut:
 - Persentase perumahan dan Permukiman layak huni
 - Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
 - Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
 - Persentase rumah layak huni
 - Persentase kawasan kumuh perkotaan
 - Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
 - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)
 - Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)
 - Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan

- Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
 - Indeks Kualitas Air
 - Indeks Kualitas Udara
 - Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis
 - Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani
 - Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3
 - Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
 - Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan
 - Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup
 - Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
 - Persentase sampah yang tertangani
 - Cakupan Pelayanan persampahan
4. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota
5. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Pelaksanaan rehabilitasi
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
 6. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran : Nihil
 7. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program : Nihil
 8. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan : Nihil

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **“Memuaskan”** yaitu dengan nilai **100%** apabila dengan menggunakan pembanding target tahun 2024. Hal tersebut didukung dengan

data capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian Kinerja 100 % (Kategori Memuaskan).

Apabila pembandingan dengan menggunakan target akhir RPD Tahun 2024-2026 capaian kinerja dengan kategori **“Memuaskan”** dengan nilai **99,30%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 99,30% (Kategori Memuaskan).

Dari Tabel 2.1. dan 2.2 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW I 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
INDIKATOR SASARAN															
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,83	65,41	65,66	65,87	68,25	68,25		100	V				
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)															
1	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,12	99,02	99,03	99,03	99,34	99,34		100	V				
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	64,07	52,70	53,30	53,80	59,63	59,63		100	V				
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,10	83,82	83,87	83,92	87,84	87,84		100	V				
INDIKATOR PROGRAM															
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,50	4,46	4,11	3,75	3,69	3,69		100	V				
2	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	94,39	88,30	88,40	88,50	95,29	95,29		100	V				
3	Persentase rumah layak huni	%	94,5	95,54	95,89	96,25	96,31	96,31		100	V				
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,86	4,84	4,82	4,8	3,63	3,63		100	V				
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100		100	V				

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW I 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
8	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
9	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	0		0					V
10	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
11	Indeks Kualitas Air	Angka	64,07	52,70	53,30	53,80	59,63	59,63		100	V				
12	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,10	83,82	83,87	83,92	87,84	87,84		100	V				
13	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	2,46	0,067	0,067	0,067	3,09	3,27		100	V				
14	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	n.a	63,90	65,00	70	92,02	73,61		100	V				
15	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
16	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	20,00		20,00					V
17	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,87	28,6	30	31,3	28,93	28,93		96,44	V				
18	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	166,67	0		0					V
19	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
20	Persentase sampah yang tertangani	%	61,26	60,21	60,50	61,00	62,91	60,75		100	V				
21	Cakupan Pelayanan persampahan	%	68,51	64,71	66,44	68,17	74,39	76,12		100	V				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. INDIKATOR SASARAN

Terdapat 1 Indikator Sasaran dengan status capaian Sangat Tinggi yaitu:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Faktor pendorong : Sinergitas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara

Faktor penghambat : Dari hasil pengujian terdapat kualitas air sungai yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan di beberapa titik pemantauan dan Kualitas udara yang masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan status capaian Sangat Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Faktor pendorong : Pembangunan RTLH menjadi RLH dengan sumber dana APBD dan Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program DAK Sanitasi

Faktor penghambat : Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi, kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan perencanaan awal

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan kualitas air yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan yang kualitas udaranya masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD

3. INDIKATOR PROGRAM

A. Capaian program dengan status capaian Sangat Tinggi terdapat sebanyak 18 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Faktor pendorong : Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

- Sumber APBD Kabupaten Temanggung sejumlah 57 Unit
 - Sumber APBD Provinsi Jawa Tengah melalui BankeuPemdes sejumlah 584 unit
- Faktor penghambat : Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi, kuantitas/ jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data
- Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH layak huni

b. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi

- Faktor pendorong : Potensi Pembangunan Tahun 2025 dalam bidang sanitasi dengan sumber dana DAK Sanitasi Tahun 2025 sejumlah 517 Unit di 13 Desa
- Faktor penghambat : Kuantitas atau jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data
- Rekomendasi dan tindaklanjut : Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung

c. Persentase Rumah Layak Huni

Faktor pendorong : Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

- Sumber APBD Kabupaten Temanggung sejumlah 57 Unit
- Sumber APBD Provinsi Jawa Tengah melalui BankeuPemdes sejumlah 584 unit

Faktor penghambat : Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi, kuantitas/ jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH layak huni

d. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Faktor pendorong : Melalui kegiatan perbaikan RTLH dan pembangunan infrastruktur sanitasi

Faktor penghambat : Terbatasnya Anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman

Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan

e. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)

Faktor pendorong : Penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana

Faktor : Belum adanya pos anggaran pada penghambat DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban apabila terjadinya bencana

Rekomendasi dan : Identifikasi mitigasi bencana dan tindaklanjut menyiapkan lahan relokasi

f. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Faktor pendorong : Usulan program RUSPIN kepada pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Faktor : warga calon penerima harus memiliki penghambat tanah tersedia untuk relokasi dan Kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah

Rekomendasi dan : Meningkatkan sinergitas dengan tindaklanjut Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

g. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)

Faktor pendorong : Penanganan ODF di Kabupaten Temanggung

Faktor : Masih banyaknya jamban belum penghambat berseptitank

Rekomendasi dan : - Mempersiapkan prasarana dan sarana tindaklanjut lebih lengkap lagi
- Program jamban keluarga

h. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan

Faktor pendorong : Adanya koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian fasilitasi pertanahan

Faktor penghambat : - Ketidaksesuaian peruntukkan tanah
 Surat administrasi tanah tidak lengkap
 Rekomendasi dan tindaklanjut : Rapat koordinasi dan mediasi dengan pihak terkait

i. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Diterbitkan :
 - Persetujuan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung
 - PKPLH Kegiatan Perbaikan Dinding Penahan Tebing (DPT) dan Groundsill Sungai Galeh Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
 - Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kedu

Faktor penghambat : Adanya aplikasi baru berupa sistem Amdalnet yang masih dalam proses pengintegrasian dan penerapan aplikasi terhadap sistem OSS menjadi faktor penghambat dalam pelayanan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Melakukan koordinasi dengan KLHK dan DPMPTSP

j. Indeks Kualitas Air (IKA)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan kualitas air yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

k. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan yang kualitas udaranya masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi dan tindaklanjut : Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD

1. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung

Faktor pendorong : - Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan upaya penanganan lahan kritis seluas 334.41 Ha
- Adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, KLHK, OPD terkait, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat dan organisasi relawan yang berpartisipasi dalam Gerakan Penanaman³. Musim hujan yang datang lebih awal sehingga memungkinkan dilakukannya penanaman lebih awal

Faktor penghambat : Diperlukan dana/anggaran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan penanganan lahan kritis serta penyesuaian jadwal penanaman yang tepat.

Rekomendasi dan tindaklanjut : - Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintahan, maupun masyarakat umum
 - Identifikasi masalah untuk penentuan tematik penanaman
 - Melakukan inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya
 - Melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya
 5. Perawatan bibit yang lebih intensif, sehingga bibit siap didistribusikan ketika dibutuhkan oleh masyarakat

m. Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani

Faktor pendorong : Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin

Faktor penghambat : Luasan RTH milik pemerintah daerah pada tahun 2024 bertambah menjadi 108.550,21 m². Penambahan RTH diantaranya Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan dan Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Pemeliharaan rutin tahun ini tidak dapat dilaksanakan maksimal hal ini disebabkan karena :

- Kurangnya sarana prasarana dalam pemeliharaan RTH
- Jumlah SDM yang terbatas
- Hutan kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya

Rekomendasi dan : Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada tindaklanjut

n. Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Faktor pendorong : Adanya regulasi yang mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis atau standar tempat penyimpanan limbah B3

Faktor penghambat : Kegiatan dan/atau Usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PerMen LHK turunannya

Rekomendasi dan : Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan tindaklanjut untuk membuat rincian teknis atau standar teknis penyimpanan limbah B3

o. Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Faktor pendorong : Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah

	Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan
Faktor penghambat	: Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata
Rekomendasi dan tindaklanjut	: 1. Mendorong dan memaksimalkan potensi sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata 2. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

p. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Faktor pendorong	: Adanya sinergitas antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung
Faktor penghambat	: Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
Rekomendasi dan tindaklanjut	: Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup

q. Persentase Sampah yang Tertangani

Faktor pendorong : Terdapat penambahan cakupan pelayanan, Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa

Faktor penghambat : Belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah dan terdata, belum optimalnya pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah (TPS3R, TPSD, bank Sampah), Budaya buang sampah sembarang masih ada di masyarakat

Rekomendasi dan tindaklanjut : Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat desa serta koordinasi dan pendampingan pengelolaan sampah di fasilitas

r. Cakupan Layanan Persampahan

Faktor pendorong : Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa

Faktor penghambat : Belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah, terbatasnya armada dan SDM pengangkut sampah

Rekomendasi dan tindaklanjut : Menghimbau pengelola sampah desa agar melakukan pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri, Koordinasi dengan Pemerintah Desa.

- B. Capaian program dengan status capaian Tinggi : nihil
- C. Capaian program dengan status capaian Sedang : nihil
- D. Capaian program dengan status capaian Rendah : nihil
- E. Capaian program dengan status capaian Sangat Rendah sebanyak 3 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Pada tahun 2025 Kabupaten Temanggung akan menyusun dokumen lingkungan sebanyak 1 dokumen lingkungan hidup yaitu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Saat ini Dokumen IKPLHD Tahun 2025 sedang dalam proses pengumpulan data dan proses penyusunan.

Faktor penghambat : Data pendukung masih belum update

Rekomendasi dan tindaklanjut : Menyusun SK Tim penyusun dokumen

b. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Faktor pendorong :

- Adanya tim Pembinaan dan Peengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi Usaha dan/atau kegiatan di DPRKPLH Kab. Temanggung
- Adanya pengumpulan data secara online untuk pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung"

Faktor penghambat : Belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

Rekomendasi dan tindaklanjut : - Melakukan permintaan data Update terkait pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya pengawasan secara tidak langsung.

- Membuat daftar target prioritas untuk pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

c. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup

Faktor pendorong : Usulan Penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang sudah diajukan pada triwulan I tahun 2025:

- Penghargaan Kalpataru
- Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah

Faktor penghambat : - Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun

- Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun

Rekomendasi dan tindaklanjut : - Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang

2.2.2 Data Pokok

lingkungan hidup lainnya baik tingkat provinsi maupun nasional

- Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup
- Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
- Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
- Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan

Data Pokok pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu:

- a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Bidang Pertanahan
- d. Bidang Lingkungan Hidup

Rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

A. INDIKATOR SASARAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus serta klasifikasi dan rentang Nilai IKLH dapat sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Sangat Baik	90 - 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

*Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024
KLHK*

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IKLH	65,61	69,51	69,86	74,83	68,25	68,25
1	IKU	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84	87,84
2	IKA	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63	59,63
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	46,81	46,81
Perhitungan Rumus Lama		Perhitungan Rumus Baru					
IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)		IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)					

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Nilai IKLH tahun 2025 apabila di bandingkan dengan tahun 2024 masih sama karena data yang digunakan merupakan data tahun 2024.

B. IKU PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. PERSENTASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
LAYAK HUNI

Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Sebagai landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Rumus indikator kinerja menggunakan 16 indikator kumuh dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikali 100%.

Tabel 2.5
Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman
Layak Huni dari Tahun 2020-2025

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Luas Kawasan Permukiman non Kumuh	13.560,42	13.598,74	13.598,74	13.615,85	13.646,72	13.646,72
Luas Permukiman Wilayah Kabupaten	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26
Persentase (%)	98,71	98,99	98,99	99,12	99,34	99,34

Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni tahun 2025 triwulan I yaitu 99,34%. Realisasi tersebut masih sama dengan tahun 2024 karena sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih dalam proses persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal sehingga target kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni adalah Pembangunan RTLH menjadi RLH dengan sumber dana APBD dan Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program DAK Sanitasi. Sedangkan penghambatnya antara lain

1. Penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi,
2. Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

2. INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$: IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

- $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan
- $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang
- $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Tabel 2.6
Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63	59,63

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 nilai IKA masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sebesar 59,63 hal ini disebabkan karena jadwal pengujian kualitas air belum dilaksanakan pada awal tahun 2025. Faktor Pendorong lainnya Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan. Upaya untuk mencapai target antara lain dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

3. INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,

- b. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota:
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- c. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e. Mengacu pada baku mutu EU yaitu $SO_2 = 20 \mu g/m^3$ dan $NO_2 = 40 \mu g/m^3$,
- f. $I_{eu} = 50\% \text{Indeks}NO_2 + 50\% \text{Indeks}SO_2$,
- g. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84	87,84

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai IKU dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024, hal ini disebabkan karena belum ada jadwal pengujian kualitas udara ambien dari Kementerian LHK. Faktor pendorong antara lain dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan.

C. INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sebagai dasar hukumnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus yaitu jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%. Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah RTLH (unit)	17.535	13.125	11.421	9.828	8.098	8.098
2	Jumlah Rumah se-Kabupaten Temanggung (unit)	215.918	216.785	217.652	218.519	219.386	219.386
3	Persentase (%)	8,12	6,05	5,25	4,5	3,69	3,69

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah RTLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2025. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih sama dengan data tahun 2024 hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH belum dimulai pada triwulan I tahun 2025. Pembangunan RTLH menjadi RLH diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten serta CSR. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2025 melalui Program Bankeupemdes 584 unit dan APBD 57 unit rumah.

Upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 diantaranya meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni.

2) CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES SANITASI

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dapat diketahui dengan formulasi perhitungan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikalikan 100%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2020-2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga terlayani sanitasi	181.568	186.290	198.531	254.145	261.907	261.907
2	Jumlah seluruh rumah tangga	196.536	225.325	225.325	269.251	274.845	274.845
3	Persentase (%)	92,38	82,68	88,11	94,39	95,29	95,29

Berdasarkan tabel di atas jumlah rumah tangga bersanitasi layak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 yaitu sejumlah 274.845 rumah tangga atau secara persentase sebesar 95,29% hal ini disebabkan karena pada triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan pembangunan dalam bidang

sanitasi, masih dalam tahap sosialisasi dan pembentukan KSM.

Keberhasilan jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak didukung oleh program nasional 100-0-100. Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen fasilitas sanitasi. Faktor pendorong capaian indikator ini tahun 2025 antara lain adalah DAK Sanitasi 13 desa untuk 517 kepala keluarga.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3) PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama 5 tahun terakhir adalah pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Rumah layak huni merupakan bagian lain atau kebalikan dari rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga angka rumah layak huni diperoleh dari jumlah rumah dikurangi RTLH. Rumus untuk memperoleh persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun

n dikali 100%. Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	177.349	179.150	206.231	208.691	211.288	211.288
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	217.652	218.519	219.386	219.386
3	Persentase (%)	90,24	91,15	94,75	95,50	96,31	96,31

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2024 jumlah rumah layak huni sebanyak 211.288 unit dari 219.386 unit rumah di Kabupaten Temanggung atau secara persentase sebesar 96,31%. Sedangkan kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH belum dimulai pada triwulan I tahun 2024. Pembangunan RTLH menjadi RLH diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten serta CSR. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2025 melalui Program Bankeupemdes 584 unit dan APBD 57 unit rumah. Upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 diantaranya meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait.

4) PERSENTASE KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

Kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang

umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Wilayah di Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi Kawasan Kumuh yang ada sehingga untuk lebih mengintensifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh, Dasar Hukumnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus Luas Kawasan Kumuh dibagi dengan luas Kawasan Perkotaan dikali 100 % ($138,52 \text{ Ha} \div 2.495,69 \text{ Ha} \times 100\%$) = 5,55%. Capaian dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan
Tahun 2020-2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	176,84	138,52	121,41	121,41	90,54	90,54
2	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2495,69	2495,69
3	Persentase (%)	7,09	5,55	4,86	4,86	3,63	3,63

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan realisasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan luasan kawasan kumuh perkotaan mengalami penurunan. Capaian tahun 2025 masih

sama dengan kondisi tahun 2024 karena pada awal tahun 2025 pelaksanaan kegiatan belum dimulai. Faktor penghambat capaian indikator di atas antara lain terbatasnya anggaran untuk peningkatan kualitas lingkungan kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman. Faktor pendorong capaian indikator di atas antara lain melalui kegiatan perbaikan RTLH dan pembangunan infrastruktur sanitasi, sedangkan upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

5) PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana

dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani (unit)	Na	0	0	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena bencana (unit)	Na	0	0	0	0	0
3	Persentase (%)	Na	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun tahun 2021 sampai dengan triwulan I tahun 2025 tidak ada rumah kena bencana yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%. Salah satu faktor penghambat indikator ini adalah belum tersedianya pos anggaran pada DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban bencana. Faktor pendorong terkait capaian indikator ini adalah penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana.

6) PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu

merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Persentase warga negara yang terkena relokasi
akibat program pemerintah daerah yang memperoleh
fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah relokasi yang tertangani (unit)	37	0	0	24	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena relokasi (unit)	27	0	0	24	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2025 dengan capaian 100%. Sebagai upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah diusulkan melalui program RUSPIN yang ada pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah selain itu dengan meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

PUPR, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi sedangkan masih terdapat sebagian warga belum memiliki tanah untuk relokasi rumah. Selain itu kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni merupakan dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau warga negara yang terdampak akibat adanya Program Pemerintah sehingga dapat meminimalkan dampak sosial masyarakat untuk kelancaran Program Pemerintah.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7) PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi

Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n) dibagi Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun (n) dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator tersebut di atas dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n)	Na	Na	Na	811.798	820.736	820.736
2	Jumlah total warga Negara yang harus dilayani di tahun n	Na	Na	Na	811.798	820.736	820.736
3	Persentase (%)	Na	Na	Na	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Kondisi sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara persentase capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong dari capaian indikator ini adalah

1. Penanganan ODF di Kabupaten Temanggung
2. Tersedianya Truck Tinja dan IPLT.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

1. Masih menunggu penetapan Perda Retribusi
2. IPLT belum berfungsi optimal
3. Masih banyaknya jamban belum berseptitank

Untuk tindaklanjutnya antara lain dengan mempersiapkan prasarana dan sarana lebih lengkap lagi serta dengan program jamban keluarga.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

8) **PERSENTASE PENYELESAIAN FASILITASI PERTANAHAN**

Penyelesaian fasilitas pertanahan adalah program penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dihitung dengan membagi jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan teratasi dibagi jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan dikalikan 100%.

Realisasi persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan teratasi	8	39	8	18	8	0
2	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan	8	39	8	18	8	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui mulai tahun 2020 sampai dengan triwulan I tahun 2025 capaian indikator program persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dapat terealisasi 100%. Faktor pendorong

capaian indikator ini adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian fasilitasi pertanahan untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan, sedangkan penghambat ataupun kendala terkait capaian indikator ini diantaranya:

1. Ketidaksesuaian peruntukkan tanah
2. Surat administrasi tanah tidak lengkap.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

9) PERSENTASE DOKUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan Dokumen yang memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Formulasi yang digunakan pada indikator tersebut di atas adalah jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dibagi jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%.

Tabel 2.16
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2021-2025

Uraian	Capaian sampai dengan				
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	3	0
Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1	1	1	3	1
Persentase (%)	100	100	100	100	0

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung telah menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054 sebagai upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai tahun 2024 s.d tahun 2054 di Kabupaten Temanggung. Saat ini Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054 sudah disahkan dengan Nomor Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024. Sedangkan untuk capaian pada awal tahun 2025 masih 0% hal ini disebabkan karena data pendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) belum update sehingga masih dalam tahap proses pengumpulan data dan proses penyusunan.

10) PERSENTASE PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Amdal. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL UPL. Sebelum terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 Izin Lingkungan yang dikeluarkan merupakan persetujuan rekomendasi sedangkan setelah terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 persetujuan lingkungan yang dikeluarkan adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan persetujuan.

Dasar Hukum indikator program di atas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikali dengan 100%. Capaian indikator program dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	Na	0	1	3	9	3
2	Jumlah Usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	Na	0	1	3	9	3
3	Persentase	Na	0	100	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas diketahui capaian indikator mulai tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2025 tercapai 100%. Faktor pendorong capaian tersebut pada tahun 2025 antara lain telah diterbitkannya :

1. Persetujuan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung
2. PKPLH Kegiatan Perbaikan Dinding Penahan Tebing (DPT) dan Groundsill Sungai Galeh Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
3. Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kedu.

Faktor penghambat dari capaian indikator ini antara lain adanya aplikasi baru berupa sistem Amdalnet yang masih dalam proses pengintegrasian dan penerapan aplikasi terhadap sistem OSS sehingga menjadi faktor penghambat dalam pelayanan. Sedangkan upaya tindaklanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan KLHK dan DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

11)INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada

lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam

Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan

$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang

$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Tabel 2.18
Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63	59,63

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 nilai IKA masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sebesar 59,63 hal ini disebabkan karena jadwal pengujian kualitas air belum dilaksanakan pada awal tahun 2025. Faktor Pendorong lainnya Dukungan kegiatan pengujian kualitas air oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan. Upaya untuk mencapai target antara lain dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air

12)INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar

Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- h. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- i. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota:
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- j. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- k. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- l. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- m. $I_{eu} = 50\% \text{IndeksNO}_2 + 50\% \text{IndeksSO}_2$,
- n. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84	87,84

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai IKU dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024, hal ini disebabkan karena belum ada jadwal pengujian kualitas udara ambien dari Kementerian LHK. Faktor pendorong antara lain dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan.

13) PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS TERTANGANI TERHADAP TOTAL LUAS LAHAN KRITIS

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem

yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,
3. Kebakaran hutan,

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi

tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.20
Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50	-	-	-	2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70	-	-	4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35	-	-	4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11	-	-	-	3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21	-	-	2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04	-	-	-	2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64	-	-	2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11	-	-	2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06	-	573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45	-	411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66	-	523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58		-	372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41		722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83	-	-	696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36	-	-	620.94	3,769.24
16	Kranggan	-	-	2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat	-	13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36	-	-	-	980.15	3,324.84
19	Tretep	-	-	2,800.32	828.99	-	93.90	3,723.21
20	Wonoboyo	-	-	4,008.03	-	-	256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52
Sumber: Inventarisasi Kekritisian Lahan TA 2017 Kab. Temanggung								

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar

8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha.

Untuk mengetahui capaian proporsi luasan lahan kritis di Kabupaten Temanggung yang diupayakan penanganannya digunakan formulasi perhitungan luas lahan kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Tabel 2.21
Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,17	0,10	1,75	2,46	3,09	3,27
Luas Lahan Kritis yang diupayakan Penanganannya	Ha	12,89	12,89	180,275	253,063	317,708	334,41
Luas Lahan Kritis	Ha	Na	7.566,5	7.566,5	10.280,46	10280,46	10223,96

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan upaya penanganan lahan kritis seluas 334.41 Ha hal ini terlaksana karena adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, KLHK, OPD terkait, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat dan organisasi relawan yang berpartisipasi dalam Gerakan Penanaman. Selain itu musim hujan yang datang lebih awal sehingga memungkinkan dilakukannya penanaman lebih awal. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain diperlukan dana/anggaran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan penanganan lahan kritis serta penyesuaian jadwal

penanaman yang tepat. Upaya tindak lanjut terkait indikator di atas antara lain:

1. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintahan, maupun masyarakat umum
2. Identifikasi masalah untuk penentuan tematik penanaman
3. Melakukan inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya
4. Melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya
5. Perawatan bibit yang lebih intensif, sehingga bibit siap disistribusikan ketika dibutuhkan oleh masyarakat.

14) PERSENTASE LUAS RTH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG TERTANGANI

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dengan target capaian adalah Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani. Sebagai Landasan Hukum menggunakan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Formulasi perhitungan Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani menggunakan rumus luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani dibagi dengan luas RTH Milik Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani maupun luas RTH Milik Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tahun 2020-2025

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025
Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	92,02	73,61
Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani (M ²)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.352,21	79.901,75
Luas RTH Milik Pemerintah Daerah (M ²)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.628,3	86.232,21	108.550,21

Capaian indikator tersebut di atas mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena luasan RTH milik pemerintah daerah bertambah menjadi 108.550,21 M2 sedangkan penanganan RTH milik Pemerintah Daerah belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Penambahan RTH diantaranya Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan dan Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Pemeliharaan rutin tahun ini tidak dapat dilaksanakan maksimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana dalam pemeliharaan RTH
2. Jumlah SDM yang terbatas

3. Hutan kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya.

Untuk rekomendasi dan tindak lanjut dari indikator persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani antara lain dengan pengelolaan RTH Publik yang sudah ada. Data Taman Kota di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

15) PERSENTASE USAHA YANG MEMILIKI RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib membuat rincian teknis limbah B3 sehingga dapat diketahui persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, dengan formulasi perhitungan menggunakan jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%. Sebagai landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

- a) Peraturan Menteri Lingkungann Hidup dan Kehutanan Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH.

Capaian indikator persentase usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3 dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Persentase Usaha yang Memiliki
Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025
Persentase kajian teknis penyimpanan limbah B3	Na	100	100	100	100	100
Jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3	Na	0	1	10	10	6
Jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan	Na	0	1	10	10	6

Berdasarkan tabel capaian tahun 2020 tidak diketahui sedangkan capaian mulai tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2025 tercapai 100%. Faktor capaian indikator ini antara lain adanya regulasi yang mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis atau standar tempat penyimpanan limbah B3 sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaku kegiatan dan/atau usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PerMen LHK beserta turunannya. Upaya tindaklanjutnya antara lain Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan untuk membuat rincian teknis atau standar teknis penyimpanan limbah B3.

16) PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA/KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan

hidup merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup:

$$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan}}{\text{Target Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan}} \times 100 \%$$

Tabel 2.24
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

No	Tahun	Capaian				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	50	50	10
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	50	50	50
3	Capaian (%)	100	100	100	100	20,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian indikator mulai tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2025. Capaian tahun 2025 belum sesuai target yang telah ditetapkan karena belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung. Sedangkan faktor pendorongnya antara lain :

1. Adanya tim Pembinaan dan Peengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung
2. Adanya pengumpulan data secara online untuk pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

Sebagai upaya tindaklanjut dalam mencapai target indikator di atas:

1. Melakukan permintaan data Update terkait pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya pengawasan secara tidak langsung.
2. Membuat daftar target prioritas untuk pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung.

17)CAKUPAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal

65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Sebagai Dasar Hukumnya adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Formulasi perhitungan jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi total sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikali 100%. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Sekolah Adiwiyata	193	205	209	209	217	217
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	750	750	750	750	750
Persentase (%)	26,48	27,33	27,87	27,87	28,93	28,93

Capaian sampai triwulan I tahun 2025 masih sama dengan kondisi tahun 2024 yaitu sebesar 28,93%, karena pada awal tahun 2025 calon sekolah-sekolah Adiwiyata Kabupaten masih dalam masa pembinaan dan belum dilakukan penilaian. Faktor pendorong capaian indikator ini diantaranya sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Faktor penghambat antara lain rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata sehingga dalam upaya meningkatkan capaian indikator ini dengan mendorong dan memaksimalkan potensi sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. Selain itu juga melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

18) PERSENTASE PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/ Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklim (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim.

Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	-	14	11	16	25	0
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	-	17	13	9	15	2
Persentase (%)	-	82,35	84,62	178	166,67	0

Keterangan:

Jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup yang diusulkan tiap tahun berbeda-beda.

Formulasi perhitungan yang di gunakan yaitu dengan

rumus berikut:

Rumus Perhitungannya :

$$\text{Presentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup} = \frac{\sum \text{Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diperoleh}}{\sum \text{Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas pada awal tahun 2025 belum ada penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperoleh dari 2 (dua) usulan penghargaan yang diusulkan. Hal ini dikarenakan beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional masih dalam proses pengusulan dan/atau masih menunggu pengumuman pengusulan. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup antara lain:

1. informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun
2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan setiap tahun.

Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup
3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan.

19)PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%.

Tabel 2.27
Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	7	12	14	12	11	3
Jumlah pengaduan yang masuk	7	12	14	12	11	3
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif. Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain adanya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang ada. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

20) PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung

berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

- a. Pengurangan Sampah (waste minimization) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. Penanganan sampah (waste handling) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta

kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau container sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan memanfaatkan serta yang diskumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan terdiri dari :

1. Pengurangan sampah

Pengurangan yang tercatat yaitu hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan bank sampah.

2. Penanganan sampah

- a. Persentase sampah tertangani di Sumber

yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

b. Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), dan pengelolaan lindi.

c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan. Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

Rumus Persentase sampah tertangani adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

3. Persentase Pengoperasian TPA

Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penanganan gas metan

Timbulan sampah terkelola di Kabupaten Temanggung pada triwulan I tahun 2025 sebesar 60,75%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sampah terkelola sebesar 22.495,58 ton dari jumlah timbulan sampah sebesar 37.030 ton.

Tabel 2.28
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (Ton)	44.003,97	58.419,03	86.263,87	90.276,62	93204,56	22.495,58
Jumlah Timbulan Sampah (Ton)	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358	148.153	37.030
Persentase (%)	24,23	32,00	59,06	61,26	62,91	60,75

Berdasarkan tabel di atas capaian dari tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena terdapat penambahan cakupan pelayanan serta meningkatnya pengelolaan sampah di tingkat desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang harus dihadapi antara lain :

1. belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah dan terdata
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah (TPS3R, TPSD, bank Sampah)
3. Budaya buang sampah sembarang masih ada di masyarakat.

Dalam menghadapi hambatan tersebut diperlukan upaya tindak lanjut dalam penyelesaian masalah agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya tersebut antara lain sosialisasi pengelolaan sampah tingkat desa serta dengan koordinasi dan pendampingan pengelolaan sampah.

21)CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus perhitungan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.29
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2020-2025

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	289
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	131	155	177	198	215	220
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	45,33	53,63	61,24	68,51	74,39	76,12

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator cakupan pelayanan persampahan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami peningkatan, hal

ini disebabkan karena terdapat penambahan cakupan pelayanan serta meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang dihadapi antara lain belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah serta terbatasnya armada dan SDM pengangkut sampah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menghimbau pengelola sampah desa agar melakukan pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri serta koordinasi dengan Pemerintah Desa.

22)TERSEDIANYA FASILITAS SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN YANG MEMADAI

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa menggunakan barang-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah. Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil pick up, dump truck, arm roll truck. Fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
Daftar Depo Transfer Tahun 2025

No	Nama Barang	Ukuran Bangunan	Luas Tanah	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1	Depo Transfer Parakan Kauman	7 m x 7 m	21 m x 10 m	1 unit	Parakan Kauman	Bangunan Permanen
2	Depo Transfer Seklontong	2 m x 4 m	7 m x 10 m	1 Unit	Temanggung II	Semi Permanen
3	Depo Transfer Banyuurip	4 m x 5 m	7 m x 10 m	1 Unit	Banyuurip	Bangunan Permanen
4	Depo Transfer Jampirejo	2 m x 4 m	7 m x 5 m	1 Unit	Jampirejo	Semi Permanen

Tabel 2.31
Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/ PENGELOLA
1	TPS3R Kebonsari	Temanggung	APBN	2012	Kembangasri
2	TPS3R Madureso	Temanggung	APBN	2015	Madu Asri
3	TPS3R Nguwet	Kranggan	APBN	2015	Usaha Mandiri
4	TPS3R Morobongo	Jumo	APBD	2015	Indah Lestari
5	TPS3R Parakan Kauman	Parakan	APBD	2016	Parakan Kauman
6	TPS3R Muntung	Candiroto	APBD	2017	Saras Sejahtera
7	TPS3R Selopampang	Selopampang	APBN	2018	Seloyudho Makmur
8	TPS3R Menggoro	Tembarak	APBN	2018	Goro Makmur
9	TPS3R Kedu	Kedu	APBN	2018	Kedu Gumilar
10	TPS3R Kledung	Kledung	APBN	2018	Kledung Sido Asri
11	TPS3R Gondosuli	Bulu	DAK	2019	Resik Makmur
12	TPS3R Kundensari	Kedu	DAK	2019	Kebon Agung
13	TPS3R Mudal	Temanggung	APBD	2019	Desa Mudal
14	TPS3R Mondoretno	Bulu	APBD PROV	2020	Almond
15	TPS3R Jlegong	Bejen	APBN	2020	Jlegong Lestari
16	TPS 3R Traji	Parakan	DAK	2021	Madani
17	TPS 3R Sriwungu	Tlogomulyo	APBN	2021	Sriwungu Asri
18	TPS 3R Purbosari	Ngadirejo	APBN	2021	Purbo Asri
19	TPS 3R Balesari	Bansari	APBN	2021	Sehati
20	TPS 3R Walitelon Utara	Temanggung	KOTAKU	2021	Besus
21	TPS 3R Parakan Kauman	Parakan	KOTAKU	2021	Parakan Kauman
22	TPS 3R Parakan Wetan	Parakan	KOTAKU	2021	Bambu Runcing
23	TPS 3R Pandemulyo	Bulu	APBN	2022	Pandemulyo Barokah
24	TPS 3R Losari	Tlogomulyo	APBN	2022	Bersih Bersinar
25	TPS 3R Kranggan	Kranggan	DAK	2022	Sinar Progo
26	TPS 3R Keblukan	Kaloran	DAK	2022	Ngrumat Resik
27	TPS 3R Bandunggede	Kedu	DAK	2022	Manunggal Ngudi Resik
28	TPS 3R Mangunsari	Ngadirejo	DAK	2022	Sumber Arum
29	TPS 3R Kedungumpul	Kandangan	APBN	2023	Bumi Rejo
30	TPS 3R Getas	Kaloran	APBN	2023	Sumber Berkah
31	TPS 3R Mandisari	Parakan	DAK	2023	Laksita Sekar Mandiri
32	TPS 3R Joho	Temanggung	DAK	2023	Joho Resik Sejahtera
33	TPS 3R Danurejo	Kedu	DAK	2023	Danurejo Sumber Karya Manunggal
34	TPS 3R Ngaditirto	Selopampang	DAK	2023	Bhumi Tirta Abadi
35	TPS 3R Gambasan	Selopampang	DAK	2023	Bhakti Bhumi Sembawang
36	TPS 3R Pare	Kranggan	DAK	2023	Abdi Manunggal Karya
37	TPS 3R Kaloran	Kaloran	DAK	2023	Berkah Resikan Kaloran
38	TPS 3R Petirejo	Ngadirejo	DAK	2023	Bersih Jaya Mandiri
39	TPS 3R Bansari	Bansari	APBN	2024	Bansari Sehat
40	TPS 3R Mojosari	Bansari	APBN	2024	Srikandi
41	TPS 3R Purborejo	Bansari	APBN	2024	Purborejo Maju
42	TPS 3R Tanurejo	Bansari	APBN	2024	Berkah Mandiri
43	TPS 3R Giripurno	Ngadirejo	APBN	2024	Giri Indah
44	TPS 3R Tuksari	Kledung	APBN	2024	Tirta Panca Manunggal

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/ PENGELOLA
45	TPS 3R Karangtejo	Kedu	APBN	2024	Karangtejo Asri
46	TPS 3R Kupon	Pringsurat	APBN	2024	Sumber Raharjo

Tabel 2.32
Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Alat Berat	7	7	7	7	7	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	17	17	17	17	17	17	Unit	8 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	7	11	11	11	11	11	Unit	Baik, (3 Milik Dindagkop, 4 pengadaan 2021)
4	Pick Up	9	9	9	9	9	9	Unit	4 Rusak Berat
5	Sepeda Motor	2	2	2	2	2	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	29	34	34	34	34	34	Unit	7 Rusak Berat
	o Roda 3 Kecamatan Temanggung (DPRKPLH)	14	18	18	18	18	18		
	o Roda 3 TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/ TPA	6	7	7	7	7	7		
	o Roda 3 Cadangan	8	4	1	1	1	1		
	o Roda 3 Rusak Berat	1	5	7	7	7	7		
7	Gerobak Sampah	59	59	59	59	59	59	Unit	6 unit layak operasi 53 rusak
	a. Gerobak Sampah TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	10	10	10	10	10	10		
	b. Gerobak Sampah Cadangan	4	4	4	4	4	4		
	c. Gerobak Sampah Temanggung	29	29	29	29	29	29		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Kranggan 3, Bulu 2, Kedu 1, Jumo 1 dan Tembarak 1)	8	8	8	8	8	8		
	e. Gerobak Sampah Rusak Berat	n/a	8	8	8	8	8		
8	Kontainer Sampah	28	28	33	32	32	32	Buah	
	a. Kontainer TPS 3R	5	5	6	6	6	6		
	b. Kontainer Armroll	4	4	7	7	7	7		
	c. Kontainer Depo Transfer	5	5	4	4	4	4		
	d. Kontainer Lainnya	6	6	9	9	9	9		
	e. Kontainer Rusak Berat	1	1	1					
	f. Kontainer Pasar	7	7	7	7	7	7		Milik Dinperindagkop
9	Tangki IPLT	2	2	2				Unit	Baik

Tabel 2.33
Daftar Alat Pengolah Sampah
di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset						Kondisi
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Excavator	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Rusak Berat
2	Buldozer	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Baik
3	Mesin Pencacah (Kompos/Organik)	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rusak Ringan
4	Mesin Pirolisis	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
5	Mesin Pencacah An Organik /Plastik	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak Berat
6	Mesin Press Plastik	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
7	Jembatan Timbang	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak/dalam perbaikan

2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdapat indikator yang sudah mencapai target namun pada sisi yang lain masih ada indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan upaya keras, selain itu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dari 25 indikator (1 indikator sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama dan 21 indikator program terdapat 3 indikator dengan status capaian Sangat Rendah yaitu sebagai berikut:

a. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hal ini disebabkan karena Dokumen IKPLHD Tahun 2025 dalam proses pengumpulan data dan proses penyusunan

b. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Hal ini disebabkan karena pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

c. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup

Hal ini disebabkan karena informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun serta ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan setiap tahun.

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPRKPLH antara lain:

- Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung
- Terdapat backlog perumahan
- Belum adanya acuan pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh
- Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung
- Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian tanah obyek reforma agraria (TORA)
- Rendahnya akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Temanggung
- Belum optimalnya pendampingan peningkatan PSU perdesaan dan perkotaan
- Belum adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penunjang kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (ASN, Non ASN, TFL, KSM, Perangkat Desa, dll)
- Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi) dan Perumahan Rakyat
- Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman
- Kemudahan investasi

- Pengelolaan RTH Perkotaan
 - Indeks kualitas lingkungan hidup
 - Luasan lahan kritis
 - Emisi gas rumah kaca (GRK)
 - Pelestarian sumber mata air
 - Pengelolaan sampah yang belum optimal
 - Kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan persampahan
 - Rendahnya tingkat pengurangan sampah dari sumbernya
 - Pelayanan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa yang belum optimal
 - Belum optimalnya tata kelola Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemda
 - Kelayakan Infrastruktur prasarana, sarana, dan utilitas umum Rusunawa
 - Di Kabupaten Temanggung belum ada Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi
 - Capaian sanitasi aman yang masih jauh dari target
 - Belum tersedianya temporary landfill pada saat pembangunan TPST
 - Belum tersedianya tenaga operasional terlatih pada TPST
 - Belum optimalnya operasional pengelolaan sampah residu di TPST.
3. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung. Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel. 2.34
Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1. Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan 2. Belum meratanya penyediaan perumahan 3. Belum tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara optimal 4. Akses sanitasi aman masih rendah 5. Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal 6. Luasan ruang terbuka hijau permukiman terbatas 7. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana yang tangguh pada kawasan permukiman	Peningkatan Layanan Akses Dasar dan Sanitasi	1. Peningkatan akses air baku yang aman dan adil untuk semua 2. Peningkatan akses dan kualitas sanitasi yang memadai untuk semua 3. Infrastruktur persampahan belum optimal	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Temanggung berada di bagian hulu Jawa Tengah, sehingga mempunyai posisi penting dalam menjaga konservasi dan keseimbangan sumber daya alam. Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap sumber daya air yaitu terdapat hampir seribu mata air	1. Kualitas Lingkungan di Kabupaten Temanggung menurun, khususnya pada kualitas lahan 2. Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis 3. Masih rendahnya akses sanitasi aman yang berkelanjutan 4. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup ramah lingkungan 6. Pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung belum optimal 7. Kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan masih belum optimal	Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Risiko Bencana	Pelestarian dan perlindungan sumber daya alam Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Krisis Lingkungan: Tiga Krisis Lingkungan (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan	Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	Keberlanjutan Lingkungan Hidup Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan pada hasil penetapan Renja Tahun 2025 terhadap Rancangan Awal Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi yang menangani urusan tata ruang.
2. Terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - e. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - g. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPД per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.35
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			38.465.529.424	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.464.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	Persentase jumlah TPS 3R	17.30 %	-	-
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS 3R yang dibangun/ dipelihara	10 Unit	-	
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0 Ton/hari	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	
	-	-	-	-	-

HASIL PENETAPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			38.465.529.424	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.464.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	Persentase jumlah TPS 3R	17.30 %	-	-
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS 3R yang dibangun/ dipelihara	10 Unit	-	
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0 Ton/hari	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			-	
	-	-	-	-	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	500 Unit	-	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	- M ³ /H ari	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.464.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			330.000.000	
	[Meningkatkan Hunian Layak]	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 %	330.000.000	-
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100 Unit	30.000.000	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dilakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Unit	300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	500 Unit	-	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	- M ³ /Ha ri	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.464.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			330.000.000	
	[Meningkatkan Hunian Layak]	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	330.000.000	-
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100 Unit	30.000.000	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dilakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Unit	300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
		0 0 0	300.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Kertosari Kab. Temanggung , Kranggan, Kranggan Kab. Temanggung , Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Wetan Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2.134.000.000	
	[Meningkatkan Kawasan Permukiman]	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	48.81 69.06 80.03 96.43	2.134.000.000	-
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit	2.134.000.000	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
		0 0 0	2.134.000.000	Kab. Temanggung , Kedu, Semua Kel/Desa	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.001.529.424	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1.04.02.2.05.000 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
		0	0 0	300.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2.134.000.000	
	[Meningkatkan Kawasan Permukiman]	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	48.81 69.06 80.03 96.43	2.134.000.000	-
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit	2.134.000.000	
1.04.03.2.03.000 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
		0	0 0	2.134.000.000	Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.001.529.424	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			36.001.529.424	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.583.261.174	
	-	-	-	13.583.261.174	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	12 Lapor an	12.436.291.184	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang /bula n	12.436.291.184	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perkantoran	12 Lapor an	96.000.000	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapor an	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			36.001.529.424	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.583.261.174	
	-	-	-	13.583.261.174	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	12 Lapora n	12.436.291.184	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang /bulan	12.436.291.184	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perkantoran	12 Lapora n	96.000.000	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora n	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	30.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	2 Paket	40.000.000	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	15.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Lapor an	840.969.990	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapor an	1.500.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapor an	105.000.000	Kab. Temanggung , Sidorejo Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapor an	734.469.990	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	3 Paket	170.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	30.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	2 Paket	40.000.000	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	15.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 Lapora n	840.969.990	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapora n	1.500.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	105.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	734.469.990	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	3 Paket	170.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pemerintahan Daerah				
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	90.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	10.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			45.000.000	
	[Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup]	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	45.000.000	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 Doku men	45.000.000	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Doku men	45.000.000	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			220.000.000	
	[Meningkatnya Pengendalian	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Lahan kritis tertangani	15.7 23.3	220.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pemerintahan Daerah				
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	90.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	10.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			45.000.000	
	[Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup]	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	45.000.000	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 Doku men	45.000.000	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Doku men	45.000.000	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			220.000.000	
	[Meningkatnya Pengendalian	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Lahan kritis tertangani	15.7 23.3	220.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	4 60.03 7.40		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.54 angka	130.000.000	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Doku men	30.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25 Doku men	100.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi				
		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	Kab. Temanggung , Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung , Tlogomulyo, Semua Kel/Desa
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			15.230.000.000	
	[Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	80	15.230.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	4 60.03 7.40		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.54 angka	130.000.000	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Doku men	30.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25 Doku men	100.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi				
		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	90.000.000	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			15.230.000.000	
	[Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	80	15.230.000.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			10.000.000	
	[Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	10.000.000	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	50 usaha /keg iatan	10.000.000	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Bada n Usah a	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan,

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5.76 Ha	15.230.000.000	Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			10.000.000	
	[Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	10.000.000	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	50 usaha /keg iatan	10.000.000	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Badan Usaha	10.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
					Semua Kel/Desa
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			20.000.000	
	[Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30.93	20.000.000	-
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup disekolah	5 Sekol ah	20.000.000	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lemb aga	20.000.000	-
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			10.000.000	
	[Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	10.000.000	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	15 Pengh argaa n	10.000.000	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entita s	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
					Semua Kel/Desa
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			20.000.000	
	[Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30.93	20.000.000	-
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup disekolah	5 Sekola h	20.000.000	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lemba ga	20.000.000	-
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			10.000.000	
	[Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	10.000.000	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	15 Pengha rgaan	10.000.000	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	10.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10.000.000	
	[Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup]	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	10.000.000	-
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	10.000.000	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			6.873.268.250	
	[Meningkatkan Pengelolaan Persampahan]	Cakupan Layanan Persampahan Persentase sampah yang terkelola Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34.14 64.07 77.85	6.873.268.250	-
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	9621 7,5 Ton	6.873.268.250	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	400.000.000	-
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	5121 7,5 Ton	1.398.268.250	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10.000.000	
	[Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup]	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	10.000.000	-
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	10.000.000	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	10.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			6.873.268.250	
	[Meningkatkan Pengelolaan Persampahan]	Cakupan Layanan Persampahan Persentase sampah yang terkelola Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34.14 64.07 77.85	6.873.268.250	-
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	96217, 5 Ton	6.873.268.250	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	400.000.000	-
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	51217, 5 Ton	1.398.268.250	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
		0	4500 0 0	5.075.000.000	Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan
J U M L A H				38.465.529.424	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
			TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
		PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
		0	45000 0	5.075.000.000	Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan
J U M L A H				38.465.529.424	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.36
Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ BESARAN	CATATAN
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10				
	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kedu	Jumlah tidak layak huni yang diperbaiki	34 Unit	
	b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kranggan	Jumlah tidak layak huni yang diperbaiki	29 Unit	
	c. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kaloran	Jumlah tidak layak huni yang diperbaiki	32 Unit	

2.4. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2025

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Dukungan				
1	Integrasi Kawasan Kumuh Melalui “Doktor Pekape” untuk Memenuhi Kebutuhan Kawasan Permukiman yang Layak Huni di Kabupaten Temanggung	DPRKPLH, Kecamatan, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD dan DAK Bidang Sanitasi	Penentuan kondisi awal kawasan kumuh selanjutnya penyusunan profil kawasan kumuh Kabupaten Temanggung, peta kawasan kumuh selanjutnya Penetapan Kawasan Kumuh di Kabupaten Temanggung	Pembangunan SPALDS	Berkurangnya kawasan kumuh	DPRKPLH 2024

2.5. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan skala provinsi dan nasional yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2025

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2025		
2	2024	1. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 1 Kandungan 2. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 2 Temanggung 3. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMA N 1 Parakan 4. Sekolah Adiwiyata Nasional: SD Muhammadiyah Parakan 5. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Giyono, Kec. Jumo 6. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Gilingsari, Kec. Temanggung 7. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Pratama: Desa Jumo, Kec. Jumo 8. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Madya Tingkat Provinsi: Desa Balesari Kecamatan Bansari 9. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Desa Jumo Kecamatan Jumo 10. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung 11. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 5 Temanggung 12. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 1 Tembarak 13. Sekolah Adiwiyata Provinsi MTs N 2 Temanggung 14. Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MPP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) (MPA Abdi Bumi Desa Batusari Kec. Kledung) 15. Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup atas nama Sukoyo (Dsn. Krecek Ds. Getas Kec. Kaloran) 16. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup Kelompok Pecinta Alam (KPA) Azora Desa Batusari Kec. Kledung 17. Inovasi Proklm (Kategori Video Inovasi ProKlim Terbaik 1 (Desa Gununggempol Kec. Jumo))	
3	2023	1. Penghargaan Nirwasita Tantra	

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		2. Terbaik I Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional, atas nama R. Gravita Eka Purnama 3. Pemenang pertama Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi, atas nama R. Gravita Eka Purnama 4. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional. 5. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Provinsi 6. Juara harapan IV Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo 7. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SMP Negeri 1 Kaloran 8. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Jumo 9. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SD Muhammadiyah Parakan 10. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak 11. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 : SMP N 6 Temanggung 12. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 : SD N 3 Tuksongo 13. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Ketitang Kecamatan Jumo 14. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Batusari, Kecamatan Kledung 15. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya: Desa Petarangan, Kecamatan Kledung 16. Penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup atas nama Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran, Kecamatan Tembarak.	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 **“Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi”**. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, pelaksanaan pembangunan akan diwujudkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Penataan garis imajiner, dengan program aksi:
 - a. Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprpto, Jl M.T. Haryono
 - b. Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman
 - c. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun
 - d. Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala
 - e. Revitalisasi Taman Kartini
 - f. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala
 - g. Pembangunan citywalk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)
 - h. Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)

- i. Revitalisasi Pasar Kliwon
2. Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
 - b. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
 - c. Penerapan merit system dan talent pool
 - d. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
 - e. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
 - f. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)
 - g. Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW
 - h. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola kelurahan)
3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, dengan program aksi:
 - a. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
 - b. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
 - c. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
 - d. Regenerasi petani
 - e. Penyediaan bibit ternak dan ikan
 - f. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan
 - g. Pembangunan greenhouse
4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan, dengan program aksi:
 - a. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
 - b. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
 - d. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik

- e. Penyediaan air bersih dan sanitasi
- f. Penyediaan rumah layak huni
- 5. Optimalisasi pasar daerah, dengan program aksi:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
 - b. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
- 6. Penguatan dan pelestarian seni budaya, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan dewan kesenian
 - b. Pertemuan pegiat seni dan budaya
 - c. Penghargaan pada seniman dan budayawan
 - d. Pentas seni di ruang publik
 - e. Pelaku seni dan budaya lokal go to school
 - f. Pemakaian baju adat khas Temanggung
 - g. Festival seni dan budaya tahunan Temanggung
 - h. Informasi dan promosi pariwisata
 - i. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
 - j. Rebranding Temanggung
- 7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan Satgas PPA
 - b. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
 - c. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
 - d. Pemberdayaan ekonomi perempuan
 - e. Penyediaan hotline/panic button
- 8. Pelayanan dasar bidang pendidikan, dengan program aksi:
 - a. Akses pendidikan untuk semua warga
 - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
 - c. Pimpinan daerah sambang sekolah
 - d. Penguatan database pendidikan
 - e. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
 - f. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
 - g. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
 - h. Pemberdayaaan PAUD
 - i. insentif kepada Guru Keagamaan

- j. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
 - k. Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah
9. Pelayanan dasar bidang kesehatan, dengan program aksi:
 - a. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
 - b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)
 - c. Pemeriksaan kesehatan gratis
 - d. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
 - e. Peningkatan kualitas layanan RSUD
 - f. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak
 - g. Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo
 10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan, dengan program aksi:
 - a. Penataan data program perlindungan sosial
 - b. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
 - c. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal
 - d. Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
 11. Pelayanan perijinan dan administrasi, dengan program aksi:
 - Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik
 12. Integrasi data, dengan program aksi:
 - a. Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar PD
 - b. Sinkronisasi dan integrasi data
 13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam, dengan program aksi:
 - a. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
 - b. Pembentukan desa tangguh bencana
 - c. Peningkatan kapasitas relawan bencana
 - d. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
 - e. Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
 - f. Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
 - g. Penyediaan early warning system

- h. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
- 14. Digitalisasi dan smart city, dengan program aksi:
 - a. Digitalisasi dan integrasi layanan digital
 - b. Lapor Bupati
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM
 - d. Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa
 - e. Pembuatan superapps mobile
 - f. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan
 - g. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis
- 15. Pelestarian lingkungan hidup, dengan program aksi:
 - a. Perlindungan sumber mata air
 - b. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
 - c. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
 - d. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
 - e. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
 - f. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
 - g. Aksi bersih lingkungan
 - h. Penghijauan di lokasi lahan kritis
 - i. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
 - j. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
- 16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi, dengan program aksi:
 - a. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
 - b. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
 - c. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala

- d. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi - BUMD Sehat
- 17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah, dengan program aksi:
 - a. Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan ormas
- 18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga, dengan program aksi:
 - a. Pemajuan cabang olahraga unggulan
 - b. kesejahteraan dan profesionalitas atlet
 - c. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara professional
- 19. Peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan program aksi:
 - a. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
 - b. Peningkatan hubungan industri

Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan Tupoksi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026	Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Indikator Sasaran	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah
Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Pembangunan rumah	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman
Kedaulatan Pangan dan Energi	Pengelolaan sampah yang terpadu	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka Tujuan dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2025 adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman serta Ketahanan terhadap Perubahan Iklim

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2026 ini sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim
2. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan pada tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu dan meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026

VISI	:	TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)
MISI	:	MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEJAHTERA, PARTISIPATIF, SETARA, BERWAWASAN LINGKUNGAN, MUDAH MENGAKSES LAYANAN PUBLIK DAN ADANYA RASA AMAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
					TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2029	KETERANGAN
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKUPD)					
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	74,27	74,57	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,01	85,04	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	79	80,5	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	75	76,5	
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TON CO2 EQ	1.129.065,77	2.135.079,11	
		Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	72,47	74,78	
		INDIKATOR PROGRAM					
		Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
					TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2029	KETERANGAN
		Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,43	96,6	
			Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,81	48,84	
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	69,06	75,6	
			Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,03	80,35	
		Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100	
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	13,06	28,06	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,3	18,34	
		Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,03	60,06	
			Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4	4,75	
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,4	8,33	
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	23,3	30,2	
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7	17,6	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
					TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2029	KETERANGAN
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	80	95	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	
		Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,93	32,93	
		Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	
		Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	%	34,14	40	
			Persentase sampah yang terkelola	%	64,07	65,47	
			Cakupan Pelayanan persampahan	%	77,85	83,04	

Kebijakan dan strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, hal tersebut dalam rangka upaya menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada penyesuaian pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	38.465.529.424
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.464.000.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	0
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.464.000.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	330.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.134.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.134.000.000
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.134.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36.001.529.424
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.001.529.424
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.583.261.174
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.436.291.184
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.436.291.184

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SELISIH (RP)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	38.465.529.424	0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.464.000.000	0
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	0
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	0	0
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	0	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	0
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.464.000.000	0
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	330.000.000	0
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	0
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	0
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000	0
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	300.000.000	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.134.000.000	0
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.134.000.000	0
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.134.000.000	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36.001.529.424	0
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.001.529.424	0
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.583.261.174	0
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.436.291.184	0
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.436.291.184	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.000.000
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.969.990
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.469.990
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	45.000.000
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	45.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	220.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	130.000.000
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	100.000.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.000.000
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	90.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.230.000.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15.230.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.230.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SELISIH (RP)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.000.000	0
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	0
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	0
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	0
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	0
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	0
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	0
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.969.990	0
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	0
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.469.990	0
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000	0
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	0
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	0
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000	0
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	45.000.000	0
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	45.000.000	0
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	220.000.000	0
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	130.000.000	0
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000	0
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	100.000.000	0
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.000.000	0
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	90.000.000	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.230.000.000	0
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15.230.000.000	0
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.230.000.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	20.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.873.268.250
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.873.268.250
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.398.268.250
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.075.000.000
J U M L A H		38.465.529.424

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SELISIH (RP)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.000.000	0
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000	0
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000	0
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	0
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	20.000.000	0
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.000.000	0
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000	0
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	0
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.873.268.250	0
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.873.268.250	0
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	0
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.398.268.250	0
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.075.000.000	0
J U M L A H		38.465.529.424	0

Berdasarkan tabel di atas alokasi anggaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada Rancangan Renja dan RKPD sama yaitu sebesar Rp38.465.529.424.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						38.465.529.424							37.988.835.552
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.464.000.000							6.530.000.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0							0
37.989	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						0						-	0
	[Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional]	Persentase jumlah TPS 3R	18.69	15.57	16.96	17.30	0	-	-	-	-	-	-	0
1.03.04 .2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TPA/TPS 3R yang dibangun/ dipelihara	-			10 Unit	0			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	0
1.03.04 .2.01.0 020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R													
		Kapasitas TPA/TPST/ SPA/ TPS3R yang dibangun				0 Ton/hari	0	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK- BIDANG S ANITASI- REGUL ER	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		0
38.355	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						0						-	0
	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
1.03.05 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	-			500 Unit	0			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan	Masyarakat	-	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat													
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				- M²/Hari	0	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2.464.000.000							6.530.000.000
37.260	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						330.000.000						-	530.000.000
	[Meningkatnya Hunian Layak]	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baikPersentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	100	100	100	330.000.000	-	-	-	-	-	-	530.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang terdata	-			100 Unit	30.000.000			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat korban bencana/Re lokasi Program Kabupaten	-	30.000.000
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis	Masyarakat korban bencana/Re lokasi Program Kabupaten		30.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dilakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-			6 Unit	300.000.000			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat Penghuni Rusunawa	-	500.000.000
1.04.02.2.05.002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
		0				0 0	300.000.000	Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung , Kranggan, Kranggan Kab. Temanggung , Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung , Temanggung , Kertosari Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat Penghuni Rusunawa		500.000.000
37.625	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						2.134.000.000						-	6.000.000.000
	[Meningkatkan Kawasan Permukiman]	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	48.85 77.78 80.45 96.66	48.80 64.7 79.82 96.31	48.80 66.88 79.93 96.37	48.81 69.06 80.03 96.43	2.134.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-			100 Unit	2.134.000.000			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg	Masyarakat Kabupaten Temanggun g	-	6.000.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										kewirausah aan, mege mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
1.04.03.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
		0				0 0	2.134.000.000	Kab. Temanggung , Kedua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mege mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat Kabupaten Temanggun g		6.000.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.001.529.424							31.458.835.552
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						36.001.529.424							31.458.835.552
36.933	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.583.261.174						-	18.803.835.552
	-	-	-	-	-	-	13.583.261.174	-	-	-	-	-	-	18.803.835.552
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	-			12 Laporan	12.436.291.184			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	ASN DPRKPLH	-	12.622.835.552
2.11.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bula n	12.436.291.184	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi	ASN DPRKPLH		12.622.835.552

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
											birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perkantoran	-			12 Laporan	96.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH	-	126.000.000
2.11.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		7.500.000
2.11.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		24.000.000
2.11.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdava	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		22.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administras i Perkantoran DPRKPLH		27.000.000
2.11.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administras i Perkantoran DPRKPLH		45.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	-			2 Paket	40.000.000			Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sarana dan Prasarana DPRKPLH	-	70.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.11.01.2.07.005	Pengadaan Mebel													
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	15.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sarana dan Prasarana DPRKPLH		35.000.000
2.11.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sarana dan Prasarana DPRKPLH		35.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	840.969.990			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH	-	5.613.000.000
2.11.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPRKPLH		3.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Adminstras i Perkantoran DPRKPLH		110.000.000
2.11.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	734.469.990	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan Adminstras i Perkantoran DPRKPLH		5.500.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	-			3 Paket	170.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Aset DPRKPLH	-	372.000.000
2.11.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				26 Unit	90.000.000	Kab. Temanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan	Penguatan Landasan Perekonom	Aset DPRKPLH		110.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Temanggung , Sidorejo		lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			
2.11.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Aset DPRKPLH		250.000.000
2.11.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				14 Unit	10.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Aset DPRKPLH		12.000.000
37.298	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						45.000.000						-	50.000.000
	[Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup]	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPersentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	100	100	100	45.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	-			1 Dokumen	45.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	50.000.000
2.11.02.2.01.002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	45.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		50.000.000
37.663	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						220.000.000						-	750.000.000
	[Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Lahan kritis tertangani Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	19.6 32.6 5 60.07 8.65	- 46.81 7.08	15.7 20.9 3.75 60.02 7.08	15.7 23.3 4 60.03 7.40	220.000.000	-	-	-	-	-	-	750.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-			75.54 angka	130.000.000			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	400.000.000
2.11.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	-			50.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
										masyarakat yang adil dan makmur.				
2.11.03.201.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				25 Dokumen	100.000.000	Kab. Temanggung , Temanggung , Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas			350.000.000
2.11.03.203	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	-			4 Ha	90.000.000			-	-	-	-	350.000.000
2.11.03.203.009	Pelaksanaan rehabilitasi													
		<i>luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				4 Ha	90.000.000	Kab. Temanggung , Tlogomulyo, Semua Kel/Desa Kab.Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000
38.028	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						15.230.000.000						-	2.100.000.000
	[Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	100	73.61	74.00	80	15.230.000.000	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000
2.11.04.201	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	-			5.76 Ha	15.230.000.000			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	2.100.000.000
2.11.04.201.004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				5.76 Ha	15.230.000.000	Kab. Temanggung , Parakan, Parakan Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin	-	Masyarakat		2.100.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
								Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
38.759	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						10.000.000						-	25.000.000
	[Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	100	100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	-			50 usaha/kegiatan	10.000.000			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan dan/atau usaha di	-	25.000.000
2.11.06.2.01.009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				50 Badan Usaha	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Kegiatan dan/atau usaha		25.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
39.489	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						20.000.000						-	100.000.000
	[Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	33.60	28.93	30.26	30.93	20.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup disekolah	-			5 Sekolah	20.000.000			Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sekolah	-	100.000.000
2.11.08.2.01.005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
		Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	20.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Sekolah		100.000.000
39.855	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						10.000.000						-	150.000.000
	[Meningkatkan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat]	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	100	100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	-			15 Penghargaa n	10.000.000			Memperkua t penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	150.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.09.2.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		150.000.000
40.220	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						10.000.000						-	10.000.000
	[Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup]	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	-			1	10.000.000			Memperkua t penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	10.000.000
2.11.10.2.01.009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola				1 Pengaduan	10.000.000	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		10.000.000
40.585	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						6.873.268.250						-	9.470.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
										NASIONAL	DAERAH			
	{ Meningkatkan Pengelolaan Persampahan}	Cakupan Layanan Persampahan Persentase sampah yang terkelola Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	45.00 67.27 84.78	32.98 62.91 74.39	33.34 63.27 76.12	34.14 64.07 77.85	6.873.268.250	-	-	-	-	-	-	9.470.000.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	-			96217,5 Ton	6.873.268.250			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat	-	9.470.000.000
2.11.11.2.01.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				10 Kelompok	400.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		500.000.000
2.11.11.2.01.017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				51217,5 Ton	1.398.268.250	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		2.970.000.000
2.11.11.2.01.020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
		0				45000 0	5.075.000.000	Kab. Temanggung , Kranggan, Sanggrahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonom ian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkel anjutan Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Masyarakat		6.000.000.000	
J U M L A H							38,465,529,424								37,988,835,552

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya nanti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan pada Tahun 2026.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.342.475.877 (94,99%) terdiri dari belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi Rp41.092.202.157 (94,96%)
 - a. Belanja Pegawai Rp11.673.529.195 (98,49%)
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp23.058.672.962 (92,52%)

- c. Belanja Hibah Rp200.000.000 (100%)
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp6.160.000.000 (97,86%)
- 2. Belanja Modal Rp250.273.720 (99,14%)
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp250.273.720 (99,14%)

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I sebesar Rp10.534.675.161 (29,43%) terdiri dari belanja sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi Rp10.527.200.161 (31,63%)
 - Belanja Pegawai Rp6.263.324.947 (48,37%)
 - Belanja Barang dan Jasa Rp4.263.875.214 (22,19%)
- 2. Belanja Modal Rp7.475.000 (0,30%)
- 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp7.475.000 (19,96%)

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 DPRKPLH Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran Belanja Program sebesar Rp38.465.529.424 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 2. Program Pengembangan Perumahan
- 3. Program Kawasan Permukiman
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
12. Program Pengelolaan Persampahan.

Temanggung, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung Kodepos 56221 Telepon/Faximili (0293) 4901569
surat elektronik : dprkplh.temanggungkab@gmail.com laman : <https://dprkplh.temanggungkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/75 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
b. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

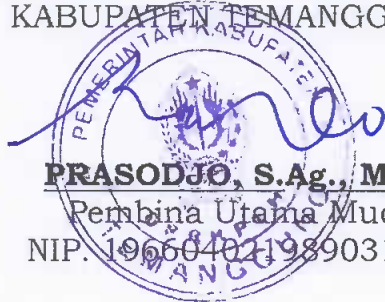
Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
 - Merumuskan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dipandang perlu akan dilakukan penggantian, dan segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 21 Juli 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 - Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPRKPLH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050/75/2025
TANGGAL : 21 JULI 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala DPRKPLH	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris DPRKPLH	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
6.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan	Anggota
8.	Ka. UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Ka. UPT Pengelolaan TPA - IPLT	Anggota
10.	Ka. UPT Rusunawa	Anggota
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Staf Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,


PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2026



**PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

DINAS KESEHATAN

Jln. Jendral Sudirman No 81
TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP., M.M.
NIP. 19831118 200212 2 001

Verifikator



PUTRI UTAMI RAHMANIA, S.T.
NIP. 19910316 201503 2 003

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan Rencana Strategis antara tahun 2025-2029 yang disusun dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025. Renja Tahun 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680320 200212 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI..... 1

KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR GAMBAR..... 6

DAFTAR TABEL 7

BAB I..... 10

PENDAHULUAN..... 10

1.1. Latar Belakang.....10

 a. Pengolahan data dan informasi; 11

 b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan 12

 c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan..... 12

 d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;13

 e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;..... 14

 f. Perumusan tujuan dan sasaran;..... 14

 g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 14

 h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis; 14

 i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan;..... 15

 j. Telaahan Kebijakan Nasional;..... 15

 k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kesehatan;..... 15

 l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan 15

 m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah..... 15

1.2 Landasan Hukum16

1.3 Maksud dan Tujuan18

1.4 Sistematika Penulisan19

BAB II..... 20

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 20

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG 20

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-202620

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Temanggung.....	68
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	68
2.2.2 Data Pokok	86
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.....	101
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	103
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	132
2.6 Inovasi Perangkat Daerah.....	132
2.7 Penghargaan.....	135
BAB III	136
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	136
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	136
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	136
BAB IV	169
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	169
4.1 Program dan Kegiatan	169
BAB V.....	296
PENUTUP	296

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan11



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2024 21

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Temanggung s.d Tahun 2024 39

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2025..... 42

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2025 59

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2025 (Laporan IKPD)... 69

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah RSUD Temanggung Triwulan I Tahun 2025 (Laporan IKPD)..... 75

Tabel 2.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 -2024 86

Tabel 2.8 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 87

Tabel 2.9 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024..... 87

Tabel 2.10 Cakupan Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 .. 88

Tabel 2.11 Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 88

Tabel 2.12 Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024..... 89

Tabel 2.13 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024..... 89

Tabel 2. 14Persentase Pertolongan Persalinan Yang Dilaksanakan Di Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 90

Tabel 2.15 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024..... 90

Tabel 2.16 Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 91

Tabel 2.17 Angka Kematian Neonatal di kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 91

Tabel 2.18 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024..... 91

Tabel 2.19 Angka Kematian Balita di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 92

Tabel 2.20 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024.....	92
Tabel 2. 21Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024	92
Tabel 2. 22Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024	93
Tabel 2.23 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024.....	93
Tabel 2.24 Persentase WNI Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024	94
Tabel 2. 25Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	94
Tabel 2.26 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	95
Tabel 2.27 Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	95
Tabel 2.28 Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	96
Tabel 2.29 Persentase Orang Terduga TB Yang Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024....	97
Tabel 2.30 Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	97
Tabel 2.31 Incident Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	98
Tabel 2.32 Persentase Rumah Sehat di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	98
Tabel 2.33 Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2024	99
Tabel 2.34 Cakupan Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Farmasi Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	99
Tabel 2.35 Persentase PHBS Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	100
Tabel 2.36 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	104
Tabel 2.37 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 RSUD Kabupaten Temanggung	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.38 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	132
Tabel 2.39 Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2024	132
Tabel 2.40 Inovasi RSUD Kabupaten Temanggung.....	134

Tabel 2.41 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 135

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 137

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 170

Tabel 4.2 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kab. Temanggung Tahun 2025 178

Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 179

Tabel 4.4 Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kab. Temanggung Tahun 2026 289

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

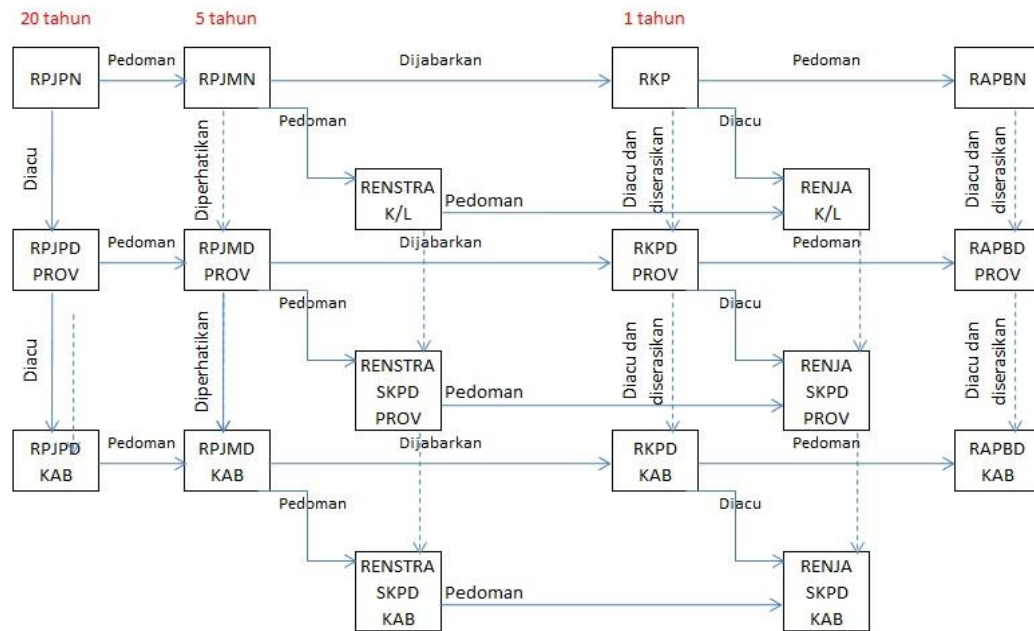
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kesehatan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kesehatan, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kesehatan

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kesehatan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kesehatan untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Kesehatan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Kesehatan;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar

- Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan;
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kesehatan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kesehatan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kesehatan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kesehatan dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan RSUD Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan untuk

Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025 Triwulan I.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kesehatan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2024

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						46.328.507.100	46.392.289.200		42.652.798.983	91,93		
		Angka kematian Ibu	100.000 per KH	71		73			61,01		100		
		Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000 per KH	12		13,5			11,84		91,35		
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,29		0,31			0,16		100		
		Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	98,6		98,2			100		100		
		Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar		30,7		23,1			15,38		66,58		
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar		100		100			100		100		
		Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna		84,05		84,01			97,77		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100		100			100		100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100		100			100		100		
		Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		100			100		100		
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	%	100		100			100		100		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100		100			100		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani	%	100		100			100		100		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	1.000/ KH	9,15		9,15			8,42		68,33		
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100			96		100		
		Angka Kematian Balita	1.000/ KH	15,6		15,6			14,28		81,82		
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			98,8		100		
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100			99,21		100		
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100			94,61		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu		66		62			76,36		100		
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			90,3		100		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			108,2		100		
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100			106,77		100		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		100			127,35		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100			96,28		100		
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Per 100.000 pddk	8		6			10,48		100		
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	87		82			102,33		100		
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	%	14		14			11,29		100		
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	82,7		82,5			89,09		100		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	13,44		13,44			11,46		100		
		Persentase rumah sehat	%	82,5		82,3			86,16		100		
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota												
a	Sub kegiatan Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	unit	1		1	10.000.000.000	10.000.000.000	0,27	9.759.979.960	27	97,56	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
b	Sub kegiatan Pembangunan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	Unit	1		1	72.000.000	72.000.000	1	70.054.775	100	97,26	
c	Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan SPA dan SDM agar sesuai standar	Unit	5		5	2.322.235.000	2.322.235.000	5	2.297.690.770	100	97,94	
d	Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1		1	588.826.000	588.826.000	1	573.863.150	100	97,46	
e	Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	5		5	5.231.341.777	5.231.341.777	5	128.664.000	100	99,81	
f	Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	136		136	94.613.500	94.613.500	76	83.888.000	55,88	53,55	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
g	Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		1	7.806.493.400	7.806.493.400	1	7.733.795.613	100	92,51	
i	Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	312		312	72.221.209	72.221.209	312	59.548.000	100	66,34	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
c	Sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	8.786		8.786	105.000.000	168.782.100	8.786	164.800.000	100	94,81	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
h	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	209.511		209.511	40.000.000	40.000.000	209.511	39.406.650	100	99,94	
i	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13.469		13.469	2.143.054.500	2.143.054.500	13.469	2.134.670.950	100	94,34	
j	Sub kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan ODGJ berat sesuai standar	Orang	2.102		2.102	90.000.000	90.000.000	2.102	89.065.100	100	99,89	
k	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	8.577		8.577	1.164.101.000	1.164.101.000	8.577	1.160.537.245	100	99,72	
l	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga HIV yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	12.230		12.230	287.650.000	287.650.000	12.230	276.638.850	100	96,99	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
n	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Doku men	12		12	17.259.451.000	17.259.451.000	12	14.347.893.185	100	74,11	
p	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Doku men	12		12	1.156.140.000	1.156.140.000	12	1.100.184.900	100	94,72	
q	Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Doku men	12		12	312.128.600	312.128.600	12	301.980.700	100	95,84	
r	Sub kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan surveilans Kesehatan	Doku men	12		12	193.749.000	193.749.000	12	182.307.279	100	86,04	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalah Guna NAPZA yang mendapatkan pelayanan Kesehtan	orang	25		25	29.095.000	29.095.000	25	28.916.850	100	99,38	
t	Sub kegiatan pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Doku men	12		12	200.000.000	200.000.000	12	170.633.631	100	72,1	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
u	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Doku men	12		12	1.461.958.000	1.461.958.000	12	1.422.239.360	100	93,41	
v	Sub kegiatan pengelolaan jaminann kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Doku men	12		12	21.572.946.000	21.572.946.000	12	20.930.963.500	100	99,86	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket	20		20	10.820.000	10.820.000	20	10.410.500	20	96,2	
w	Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen hasil Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Doku men	12		12	89.934.000	89.934.000	12	84.156.030	100	98,02	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	12		12	5.250.000	5.250.000	12	5.210.900	100	99,25	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
y	Sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan RS dalam satu penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Unit	1		1	50.000.000	50.000.000	1	49.912.253	100	98,85	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokume n	12		12	157.230.000	157.230.000	12	152.871.100	100	97,23	
4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C dna D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota												
a	Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas Kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perijinannya	Unit	24		24	63.730.000	63.730.000	24	54.011.450	100	58,83	
b	Sub kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indicator Nasional Mutu (INM)	Unit	24		24	57.000.000	57.000.000	24	41.637.500	100	93,83	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100		100	1.327.703.000	1.327.703.000	100	1.292.963.200	100	97,38	
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota												
a	Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan	Doku men	12		12	62560000	62.560.000	12	56.794.000	100	81,08	
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
b	Sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten	Jumlah sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah Kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Orang	247		247	1.265.143.000	1.265.143.000	222	1.236.169.200	89,88	91,61	
III	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62		62	445.344.000	445.344.000	100	375.928.300	100	84,4	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	77		77			100		100		
		Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	100		100			100		100		
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin Kesehatan	%	100		100			100		100		
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100		100			100		100		
1	Kegiatan Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
a	Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawsan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawsan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Doku men	12		12	63.730.000	63.730.000	12	54.011.450	100	74,14	
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin peoduksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
a	Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Doku men	12		12	196.680.000	196.680.000	12	168.368.400	100	63,11	
3	Kegiatan Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga												
a	Sub kegiatan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga yang beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Produk	120		120	184.934.000	184.934.000	114	153.548.450	95	68,95	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	83,09		83,09	74.153.400	74.153.400	96,28	69.603.950	100	93,86	
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektro Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
a	Sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Doku men	12		12	37115000	37.115.000	12	32.912.000	100	95,5	
2	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
a	Sub kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi UKBM	Doku men	12		12	37.038.400	37.038.400	12	36.691.950	100	95,22	
B.I	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kab/kota												
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah												
a	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	1.200		1.200	76.043.031.100	76.043.031.100	1.200	75.567.432.386	100	99,24	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
2	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah												
a	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		1	15.000.000	15.000.000	1	14.905.000	100	100	
b	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Paket	1		1	30.000.000	30.000.000	1	28.650.100	100	99,13	
c	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1		1	15.000.000	15.000.000	1	11.636.500	100	86,38	
d	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Lapor an	11		11	60.000.000	60.000.000	11	31.206.650	100	70,56	
e	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapor an	12		12	100.000.000	100.000.000	12	53.828.000	100	88,54	
3	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah												
a	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lapor an	12		12	230.000.000	230.000.000	12	161.246.580	100	92,81	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
b	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lapor an	12		12	2.476.784.000	2.476.784.000	12	2.073.065.976	100	95,62	
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah												
a	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	16		16	100.000.000	100.000.000	16	99.965.300	100	96,69	
b	Sub kegiatan pemeliharaan/reh abilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20		20	10.000.000	10.000.000	20	10.000.000	100	99,11	
c	Sub kegiatan pemeliharaan/reh abilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabi litasi	Unit	3		3	25.000.000	2.500.000	3	24.985.000	100	99,02	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian s.d 2024		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
d	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10		10	5.000.000	5.000.000	10	4.985.000	100	100	

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Temanggung s.d Tahun 2024

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27.959.193.417	29.518.008.322		29.290.061.485	100	99,23	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat Daerah	bulan	12			27.959.193.417	29.518.008.322		29.290.061.485	100	99,23	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27.959.193.417	29.518.008.322		29.290.061.485	100	99,23	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	Bulan	12	Bulan	27.959.193.417	29.518.008.322	12	29.290.061.485	100	99,23	
B	URUSAN PEMERINTAHAN												

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	
	BIDANG KESEHATAN												
1	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%			100	320.000.000.000	176.598.127.595	100	173.181.534.607	100	98,07	
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	%			100	185.000.000.000	1.500.000.000	100	1.360.851.283	100	90,72	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket			1		1.500.000.000	0	1.360.851.283	0	90,72	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026		Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya gedung dan sarpras pendukungnya	Paket			1	185.000.000.000	0	0	0	0	-	
b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit	%			100	135.000.000.000	175.098.127.595	100	171.820.683.324	100	98,12	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen			1	135.000.000.000	175.098.127.595	1	171.820.683.324	100	98,13	

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						82.193.308.207	112.509.232.097		30.741.304.399	27,32		27,32		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						79.391.508.207	109.682.437.097		30.026.322.210	27,37		27,37		
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	1180 orang/bulan		1180 orang/bulan	79.391.508.207	109.682.437.097		30.026.322.210	27,37		27,37		
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah						172.476.000	172.471.000		5.262.700	3,05		3,05		
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1 paket		1 paket	12.606.000	12.601.000		0	0		0		
b	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1 paket		1 paket	29.286.000	29.286.000		0	0		0		
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1 paket		1 paket	15.000.000	15.000.000		0	0		0		
d	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	12 Laporan		12 Laporan	52.902.000	52.902.000		0	0		0		
e	Penyelenggaraan rapat koordinasi dna konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12 Laporan		12 Laporan	62.682.000	62.682.000		5.262.700	8,4		8,4		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerinta Daerah						90.000.000	90.000.000		0	0		0		
g	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	50 unit		50 unit	0	90.000.000		0	0		0		
h	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		0		0	90.000.000	0		0	0		0		
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.399.324.000	2.399.324.000		709.719.489	29,58		29,58		
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan		12 Laporan	230.000.000	230.000.000		39.284.193	17,08		17,08		
b	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan		12 Laporan	2.169.324.000	2.169.324.000		668.735.296	30,83		30,83		
c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan				140.000.000	165.000.000		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
d	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	unit 20		20 unit	100.000.000	100.000.000		1.700.000	1,7		1,7		
e	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10 unit		10 unit	10.000.000	10.000.000		0	0		0		
f	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1 unit		1 unit	25.000.000	35.000.000		0	0		0		
g	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10 unit		10 unit	5.000.000	20.000.000		0	0		0		
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						75.537.251.214	66.881.875.518		7.942.709.839	11,88		11,88		
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						22.883.391.214	32.041.324.000		9.294.500	0,03		0,03		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar					0	5.841.786.500		0	0		0		
3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit	4 unit		4 unit	0	680.000.000		0			0		
4	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	unit	1 unit		1 unit	1.890.480.000	701.433.000		50.000	0,007		0,007		
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan yang telah dilakukan rehabiltasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	2 unit		2 unit	1.200.000.000	100.000.000		0	0		0		
6	Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	1 unit		1 unit	11.592.911.214	9.444.688.500		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas Kesehatan yang disediakan	unit	902 unit		902 unit	8.000.000.000	15.078.416.000		0	0		0		
8	Pengelolaan pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Kesehatan Puskesmas	paket	50 paket		50 paket	50.000.000	45.000.000		0	0		0		
9	Distribusi alat Kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Jumlah distribusi alat Kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas Kesehatan	keluarga	65639 Keluarga		65639 Keluarga	150.000.000	150.000.000		9.244.500	6,16		6,16		
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						52.568.860.000	34.770.551.518		7.933.415.339	22,8		22,8		
a		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100		100			20,53		20,53		20,53		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
b		Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		100			20,53		20,53		20,53		
c		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	%	100		100			20,53		20,53		20,53		
d		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100		100			20,31		20,31		20,31		
e		Cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani	%	100		100			100		100		100		
f		Angka Kematian Neonatal (AKN)	1.000/ KH	9,15		9,15			2,68		2,68		29,29		
g		Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100			20,31		20,31		20,31		
h		Angka Kematian Balita	1.000/ KH	15,6		15,6			4,15		4,15		26,6		
i		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	%	100		100			23,67		23,67		23,67		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		kesehatan sesuai standar													
J		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100			25,3		25,3		25,3		
k		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100			26,17		26,17		26,17		
l		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu		66		64			78,18		78,18				
m		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			20,55		20,55		20,55		
n		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			34,99		34,99		34,99		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
o		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100			35,59		35,59		35,59		
p		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		100			36,43		36,43		36,43		
q		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100			30		30		30		
r		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Per 100.000 pddk	8		7			1,46		1,46		20,85		
s		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan		87		85			15,07		15,07		17,73		
t		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	%	14		14			11,67		11,67		83,36		
u		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	82,7		82,6			91,20		91,20		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
v		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	13,44		13,44			11,35		11,35		84,45		
w		Persentase rumah sehat	%	82,5		82,4			87,93		87,93		100		
11	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar					225.000.000	25.000.000		0	0		0		
12	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	orang	8665 orang		8665 orang	103.000.000	25.000.000		0	0		0		
13	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	orang	8222 orang		8222 orang	825.000.000	25.000.000		0	0		0		
14	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	bayi	8196 bayi		8196 bayi	719.500.000	25.000.000		0	0		0		
15	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	balita	50224 balita		50224 balita	675.000.000	25.000.000		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	orang	113737 orang		113737 orang	25.000.000	25.000.000		277.500	1,1		1,1		
17	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	orang	524062 orang		524062 orang	25.000.000	28.520.000		0	0		0		
18	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	orang	125121 orang		125121 orang	40.000.000	35.000.000		0	0		0		
19	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	orang	215413 orang		215413 orang	55.000.000	50.000.000		0	0		0		
20	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	orang	12124 orang		12124 orang	65.000.000	50.000.000		881.840	1,76		1,76		
21	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	2102 orang		2102 orang	55.000.000	55.000.000		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
22	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderota HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	7312 orang		7312 orang	75.000.000	65.000.000		0	0		0		
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	orang	10855 orang		10855 orang	10.000.000	10.000.000		150.000	1,5		1,5		
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	6.452.500.000	25.000.000		0	0		0		
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	20.000.000	91.672.000		982.500	1,1		1,1		
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	1.710.888.000	455.000.000		1.055.000	0,24		0,23		
27	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan promosi Kesehatan	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	10.000.000	343.089.000		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	5.000.000	5.000.000		0	0		0		
29	Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan surveilans Kesehatan	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	25.000.000	69.820.000		0	0		0		
30	Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan dan pasca krisis kesehatan	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	150.000.000	100.000.000		12.122.500	12,12		12,12		
31	Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	7.732.230.000	50.000.000		0	0		0		
32	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	33.305.742.000	32.291.737.518		7.914.621.400	24,5		24,5		
33	Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan/ nasional	Jumlah specimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	0	267.593.000		831.000	0,31		0,31		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	paket	1000 paket		1000 paket	10.000.000	10.000.000		0	0		0		
35	Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	dokume n	12 dokumen		12 dokumen	75.000.000	90.740.000		124.099	0,14		0,14		
36	Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	dokume n	12 dokumen		12 dokumen	100.000.000	100.000.000		0	0		0		
37	Penyediaan dan pengelolaan system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	unit	42 Unit		42 Unit	50.000.000	100.000.000		1.935.000	1,93		1,93		
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	unit	1 unit		1 unit	10.000.000	0		0	0		0		
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Peneraapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peneraapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		0		0	5.000.000	0		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak		0		0	0	317.380.000		172.000	0,06		0,06		
41	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	dokumen	12 dokumen		12 dokumen	10.000.000	10.000.000		262.500	2,62		2,62		
42	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi		dokumen	12 dokumen		12 dokumen	10.000.000	10.000.000		0	0		0		
43	Pengelolaan system informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan system informasi kesehatan					10.000.000	10.000.000		0	0		0		
44	Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		dokumen	12 dokumen		12 dokumen	75.000.000	60.000.000		0	0		0		
45	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	jumlah faskes yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan Kesehatan	unit	26 unit		26 unit	75.000.000	60.000.000		0	0		0		
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						10.000.000	1.153.781.000		0					

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0	84.043.000		0	0		0		
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0		0	0	84.043.000		0	0		0		
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		dokume n	3 dokumen		3 dokumen	10.000.000	1.069.738.000		0	0		0		
4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	orang	1872 orang		1872 orang	10.000.000	1.069.738.000		0	0		0		
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						445.344.000	205.937.000		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						445.344.000	0		0	0		0		
2	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					445.344.000	0		0	0		0		
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk Makanan			0		0	0	205.937.000		0	0		0		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)		Target 2025			Realisasi 2025 Triwulan I		Realisasi s.d 2025		Capaian s.d 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Minuman Industri Rumah Tangga														
4	Pemeriksaan Post Market pada produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan		42 unit		42 unit	0	205.937.000		0	0		0		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0	318.360.000		0	0		0		
1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	318.360.000		0	0		0		
2	Bimbingan Teknis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokume n	4 dokumen		4 dokumen	0	318.360.000		0	0		0		

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Th. 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Ket.
							TW I						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	bulan	12	30.290.928.890	0		0		0			
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (485 orang/bulan)	Orang	485	30.290.928.890	0							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	12	30.290.928.890	0		0	0	0	0		
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	Program pemenuhan Upaya	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	131.500.000.000	166.296.800.000	100	29.502.747.003	25	29.502.747.003	25	17,74	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Th. 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Ket.
							TW I						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	%	100	1.500.000.000	21.296.800.000	0	0	0	0	-	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.500.000.000	21.296.800.000	0	0	0	0	0	-	
2	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Prosentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	%	100	130.000.000.000	145.000.000.000	25	29.502.747.003	25	29.502.747.003	25		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi per Triwulan Th. 2025		Realisasi 2025		Capaian 2025		Ket.
							TW I						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	130.000.000.000	145.000.000.000	0	29.502.747.003	0,25	29.502.747.003	25	20,35	

Dari Tabel 2.1. dan 2.2. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dan Renstra RSUD Temanggung Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup (AHH).
2. Capaian kinerja sasaran RSUD Temanggung yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran Indeks Kinerja rumah Sakit
3. Capaian kinerja program Dinas Kesehatan yang telah memenuhi target yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut;
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI);
 - b. Prevalensi Balita gizi buruk;
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses jamban;
 - d. Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar;
 - e. Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan;
 - f. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar;
 - g. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - h. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
 - i. Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan;
 - j. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani;
 - l. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;
 - m. Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

- n. Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- o. Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- p. Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas);
- q. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama;
- r. Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- s. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- t. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;
- u. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar;
- v. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;
- w. Persentase Penanganan KLB 1x24 jam;
- x. Angka penemuan kasus malaria;
- y. Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue);
- z. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta;
- aa. Persentase Desa/kelurahan UCI;
- bb. Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak;
- cc. Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60 bulan);
- dd. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan);
- ee. Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif;
- ff. Prevalensi anemia pada ibu hamil;
- gg. Persentase desa bebas rawan gizi;
- hh. Persentase rumah sehat;
- ii. Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi;

- jj. Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar;
 - kk. Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas;
 - ll. Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional;
 - mm. Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin Kesehatan;
 - nn. Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT; dan
 - oo. Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna.
4. Capaian kinerja program RSUD Temanggung telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dengan indikator program :
- a. Cakupan nilai akreditasi rumah sakit;
 - b. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit.
5. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya;
 - b. Pengembangan Puskesmas;
 - c. Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya;
 - d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. Pengadaan Obat, Vaksin;
 - g. Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - h. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 - m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;

- p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- s. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- t. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
- u. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
- v. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- w. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- x. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- y. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- z. Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- aa. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
- bb. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan;
- cc. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- dd. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- ee. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- ff. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- gg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- hh. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria;
- ii. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- jj. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- kk. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
- ll. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- mm. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- nn. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - oo. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
 - pp. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan;
 - qq. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - rr. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).
6. Capaian kinerja sub kegiatan pada RSUD Temanggung yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - c. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 7. Tidak ada kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 8. Tidak ada Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 9. Capaian kinerja program Dinas Kesehatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Angka Kematian Bayi A(KB);
 - b. Angka Kematian Neonatal; dan
 - c. Angka Kematian Balita.
 10. Realisasi sub kegiatan pada Dinas Kesehatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sub kegiatan Pembangunan Puskesmas.

11. Realisasi sub kegiatan pada RSUD Temanggung yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sub kegiatan pengembangan Rumah Sakit (tidak tercantum dalam DPA).

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan *kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 99,61%* (Dinas Kesehatan) dan *kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 100%* (RSUD Temanggung). Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per program sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
Capaian Kinerja : 98,42 % kategori Sangat Baik
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
- c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
- e. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.3. dan dan 2.4. Triwulan I tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2025 **(Laporan IKPD)**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AKHIR 2023	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIANs/d TW 1 2025	STATUS CAPAIAN					KET
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Umur	75,77	75,71	75,72	75,73	75,94			75,94	v					
2	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N.A	0,13	0,15	0,2	0,197			0,197	v					
3	Angka Kematian Ibu (AKI)		44,96	73	72	71	61,01			12,20	v					
4	Angka Kematian Bayi (AKB)		13,04	13,5	12,8	12	11,84			3,54	v					
5	Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100,00			21,6					v	
6	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	11,41	13,44	13,44	13,44	11,46			11,35		v				
7	Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100,00			20,53					v	

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AKHIR 2023	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIANs/d TW 1 2025	STATUS CAPAIAN					KET
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100,00			20,53					v	
9	Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100,00			20,53					v	
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100,00			20,31					v	
11	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100			100	v					
12	Angka Kematian Neonatal		9,22	9,15	9,15	9,15	8,42			2,68	v					
13	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	96,00			20,31					v	
14	Angka Kematian Balita		16,1	15,6	15,6	15,6	14,28			4,15	v					
15	Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,22	0,31	0,3	0,29	0,16			0,13	v					

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AKHIR 2023	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIANs/d TW 1 2025	STATUS CAPAIAN					KET
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
16	Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	%	11,59	14	14	14	11,29			11,67		v				
17	Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	87,42	82,5	82,6	82,7	89,09			91,20	v					
18	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	98,80			23,67					v	
19	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	99,21			25,30					v	
20	Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	94,61			26,17					v	

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AKHIR 2023	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIANs/d TW 1 2025	STATUS CAPAIAN					KET
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
21	Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	%	-	62	64	66	76,36			78,18	v					
22	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	90,03			20,55					v	
23	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	108,20			34,99					v	
24	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	106,77			35,59					v	
25	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	127,35			36,43					v	

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AKHIR 2023	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIANs/d TW 1 2025	STATUS CAPAIAN					KET
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
26	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	96,28			30,00					v	
27	Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)		2,09	8	7	6	10,48			1,46	v					
28	Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	n.a	82	85	87	102,33			15,07					v	
29	Persentase rumah sehat	%	85,99	82,3	82,4	82,5	86,16			87,93	v					
30	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	99,02	98,2	98,4	98,6	100			100,00	v					
31	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	n.a	23,1	26,9	30,7	15,38			15,38				v		
32	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	85	100	100	100	100			100	v					

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AKHIR 2023	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			CAPAIANs/d TW 1 2025	STATUS CAPAIAN					KET
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
33	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	96	84,01	84,03	84,05	97,77			0,00					v	

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah RSUD Temanggung Triwulan I Tahun 2025 **(Laporan IKPD)**

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW I 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja						
						2024	2025	2026	2024	2025	2026			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100		100	ST							
				jumlah standar yang mendapatkan nilai diatas 80				16	16										
				jumlah bab				16	16										
JUMLAH INDIKATOR SASARAN				0	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN														
JUMLAH IKUPD				0	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD														
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				1	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						100	1	0	0	0	0			
JUMLAH TOTAL INDIKATORPERANGKAT DAERAH				1	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH						100	1	0	0	0	0			

Penjelasan untuk masing masing indikator kinerja pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Capaian indikator dengan status capaian *Sangat Tinggi* ada 14 (Empat belas) terdiri dari:

1) Angka Harapan Hidup (AHH).

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat berdampak kepada Angka Harapan Hidup.

2) Indeks Keluarga Sehat

- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Petugas puskesmas sudah mengetahui cara menghitung dan mengintervensi sasaran agar dapat mencapai target tahunan.
- b) Faktor penghambat indikator ini adalah Aplikasi KS tidak berlaku secara realtime, jadi nilai IKS tidak dapat langsung ter update setelah dilakukan intervensi.
- c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan monitoring serta pembinaan secara khusus untuk puskesmas yang masih belum mencapai target tahun 2024.

3) Angka Kematian Ibu.

- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pendeteksian Faktor resiko ibu hamil berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas dan faskes.
- b) Faktor penghambat indikator ini adalah kejadian komplikasi kebidanan merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi, meskipun ibu hamil tertangani dengan baik dari awal kehamilannya

4) Angka Kematian Bayi (AKB)

- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya 5 Puskesmas mampu PONEID untuk penanganan kasus kegawat daruratan ibu dan bayi, serta seluruh Puskesmas

telah menjadi Puskesmas mampu tatalaksana persalinan normal.

- b) Faktor penghambat indikator ini adalah Perlunya update refreshing pengetahuan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal bagi nakes, perlunya pemenuhan sarpras penunjang pendeteksian dan penanganan kasus kegawatdaruratan
- 5) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Seluruh persalinan telah dilaksanakan di Puskesmas dan di Faskes, Nakes telah berkompeten utk memberikan pelayanan pd kasus komplikasi neonatal dan rujukan.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah sasaran merupakan sasaran estimasi belum menggunakan sasaran riil.
- 6) Angka Kematian Neonatal
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pencatatan dan pelaporan kasus kematian sdh berlangsung dengan baik, sehingga setiap kematian dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah kasus kematian tertinggi terjadi di perinatal dan neonatal, sehingga perlu peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas serta pemenuhan sarpras untuk penanganan kasus kegawatdaruratan, serta perlunya advokasi dengan lintprog lintsek dalam penanganan bayi resti
- 7) Angka Kematian Balita
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pencatatan dan pelaporan kasus kematian sdh berlangsung dengan baik, sehingga setiap kematian dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah kasus kematian bayi yang masih tinggi sehingga mempengaruhi jumlah lahir hidup sebagai denominator dari angka kematian ibu, bayi dan balita.

- 8) Prevalensi balita gizi buruk
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya intervensi gizi spesifik yang tepat sehingga dapat menurunkan kasus gizi buruk.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah Sebagian besar balita gizi buruk memiliki penyakit penyerta sehingga sulit sembuh.
- 9) Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif

Faktor pendorong indikator tersebut adalah upaya pencegahan stunting yang terus digalakkan salah satunya program pemberian ASI Eksklusif.
- 10) Persentase Fasyankes yang memenuhi standar mutu
 - a) Faktor pendorong indikator ini adalah Semua Fasyankes sudah mengetahui pentingnya Akreditasi dalam pemenuhan standar mutu pelayanan.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah Khusus untuk Klinik swasta belum semua melaksanakan akreditasi karena terkait biaya akreditasi yang mandiri (tergantung kemampuan/kesiapan klinik yang bersangkutan).
- 11) Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)

Faktor pendorong indikator ini adalah adanya perubahan standar IR DBD, sehingga Kabupaten Temanggung masih masuk kategori aman ($IR\ DBD < 20$ per 100.000 penduduk).
- 12) Persentase rumah sehat
 - a) Faktor pendorong indikator ini adalah adanya dukungan Tenaga Sanitasi Lingkungan di Puskesmas melakukan IKL terhadap rumah yang sudah menjadi sasaran pada tiap bulan, dan memberikan rekomendasi terhadap hasil IKL jika IKL tidak memenuhi syarat.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah masih terdapat rumah yang belum memenuhi kriteria rumah sehat.
- 13) Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya

dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam pemenuhan kebutuhan obat Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Dan juga adanya perencanaan obat yang disusun oleh pengelola program kefarmasin yang berkoordinasi dengan puskesmas dalam merumuskan kebutuhan obat setiap tahunnya.

- b) Faktor penghambat indikator ini adalah masih adanya obat yang dibutuhkan oleh Puskesmas yang belum masuk dalam etalase e-catalog.

14) Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar

Faktor pendorong indikator ini adalah bahwa semua Puskesmas telah terakreditasi sehingga SOP Pengelolaan Obat sudah tersedia. Terjalin kerjasama yang baik antara Petugas Kefarmasian Puskesmas dengan Dinkes. Adanya feedback dan reminder dari Dinkes kepada Puskesmas yang meningkatkan kesadaran Puskesmas untuk melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep dan Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang terdokumentasi.

b. Capaian indikator dengan status capaian *Tinggi* ada 2 (dua) indikator yaitu :

1) Prevalensi anemia pada ibu hamil

- a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah program pemeriksaan Hb pada Ibu Hamil sehingga dapat diketahui ibu hamil yang anemia.
- b. Faktor penghambat indikator ini adalah kebiasaan minum teh setelah makan oleh ibu hamil, mitos di masyarakat bahwa ibu hamil tidak boleh makan protein hewani.

2) Prevalensi stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)

Faktor pendorong indikator tersebut adalah Program pemantauan pertumbuhan baduta di posyandu yang rutin dilakukan serta upaya pencegahan stunting yang tepat sehingga

munculnya baduta stunting baru menurun.

- c. Tidak ada capaian indikator dengan status capaian *Sedang*.
- d. Capaian indikator dengan status capaian *Rendah* ada 1 (satu) indikator yaitu :
 - 1) Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan yang memenuhi standar
 - a) Faktor pendorong indikator ini adalah sudah terdapat Puskesmas yang sudah memenuhi standar ketenagaan sesuai PMK 43 tahun 2019 yaitu Puskesmas Dharmarini, Tembarak, Selopampang, dan Jumo.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah;
 - pemenuhan standar ketenagaan tidak dapat ditentukan oleh Puskesmas sendiri karena kemampuan Puskesmas yang tidak sama.
 - Kurangnya jumlah nutrisisionis sehingga tidak semua puskesmas rawat inap memiliki 2 orang nutrisisionis, yaitu Puskesmas Wonoboyo, Pringsurat, Ngadirejo, Gemawang.
 - Kurangnya jumlah tenaga Promkes sehingga belum semua puskesmas perkotaan memiliki 2 orang tenaga promkes yaitu Puskesmas Bulu, Kedu, Kranggan, Temanggung
 - Puskesmas yang sudah memiliki tenaga SIK hanya sebanyak 5 puskesmas, yaitu Puskesmas Temanggung, Dharmarini, Tembarak, Selopampang, dan Jumo.
- e. Capaian indikator dengan status capaian *Sangat Rendah* ada 16 (Enam belas) indikator, terdiri dari:
 - 1) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran Ibu Hamil untuk memeriksakan kehamilannya sudah tinggi, komitmen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil sudah tinggi.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah untuk Triwulan 1 msh menggunakan sasaran estimasi, belum menggunakan sasaran riil.

- 2) Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
 - a) Faktor pendorong indikator ini adalah seluruh Puskesmas telah menjadi Puskesmas mampu tatalaksana persalinan Normal, kesadaran ibu hamil utk bersalin dgn nakes di faskes sudah tinggi.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah Sasaran masih menggunakan sasaran estimasi blm menggunakan sasaran riil.
- 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Seluruh Puskesmas telah menjadi Puskesmas mampu tatalaksana persalinan Normal, kesadaran ibu hamil utk bersalin dgn nakes di faskes sdh tinggi, bidan dan nakes telah mempunyai kompetensi minimal utk dapat melakukan pertolongan persalinan normal.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah Sasaran masih menggunakan sasaran estimasi blm menggunakan sasaran riil.
- 4) Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Seluruh Puskesmas telah menjadi Puskesmas mampu tatalaksana persalinan Normal, kesadaran ibu hamil utk bersalin dgn nakes di faskes sdh tinggi, bidan dan nakes telah mempunyai kompetensi minimal utk dapat melakukan pertolongan persalinan normal.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah Sasaran masih menggunakan sasaran estimasi blm menggunakan sasaran riil.
- 5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Program kunjungan pada bayi baru lahir (KN1) sudah berjalan

diseluruh Puskesmas.

- b) Faktor penghambat indikator ini adalah Sasaran merupakan sasaran estimasi blm menggunakan sasaran riil, adanya kematian bayi baru lahir.
- 6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semua balita mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar salah satunya adalah penimbangan minimal 8x dalam setahun, dimana orangtua/keluarga membawa balitanya ke posyandu untuk memantau status gizi balitanya melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah sasaran merupakan sasaran estimasi belum menggunakan sasaran riil.
- 7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah seluruh Puskesmas telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar.
 - b) Tidak ada faktor penghambat.
- 8) Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung yang masuk usia produktif telah mendapat pelayanan skrining Kesehatan sesuai standar baik yang datang ke fasilitas kesehatan atau datang ke Posbindu serta hasil kunjungan rumah.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah masyarakat belum menerapkan paradigma sehat, dimana kebanyakan masyarakat hanya akan melakukan pemeriksaan kesehatan saat merasa sakit saja.
- 9) Cakupan Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semua sasaran lansia telah mendapatkan pelayanan skrining Kesehatan

sesuai standar baik yang datang ke fasilitas Kesehatan maupun yang datang ke Posyandu lansia.

- b) Faktor penghambat indikator ini adalah masih adanya stigma di masyarakat bahwa yg berkunjung ke faskes utk skreening hanya lansia yang sakit saja, sasaran masih menggunakan sasaran estimasi blm menggunakan sasaran riil.
- 10) Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya sarana prasarana dan petugas yang kompeten, adanya ILP.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah dalam pelaporan data by name by address dari faskes swasta belum optimal karena laporan belum rutin dilakukan sehingga evaluasi masih belum berjalan optimal.
- 11) Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator ini adalah Adanya program skreening/deteksi dini dan penemuan kasus DM melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah dalam pelaporan data by name by address dari faskes swasta belum optimal karena laporan belum rutin dilakukan sehingga evaluasi masih belum berjalan optimal.
- 12) Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator ini adalah adanya pelayanan Kesehatan jiwa di puskesmas.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah masih banyak stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ yang menyebabkan keluarga cenderung menutupi apabila keluarganya merupakan ODGJ.
- 13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

- a) Faktor pendorong indikator ini adalah Adanya kader kesehatan dan kader Mentari Sehat Indonesia (sumber anggaran Global Fund TBC) dalam melakukan investigasi kontak, adanya program skrining TBC yang bekerjasama dengan lintas program (TB-DM dan TB-HIV), terbentuknya DPPM (District Public Private Mix), Forum Multi Sektoral yang diharapkan mampu meningkatkan jejaring lintas program dan lintas sektoral dalam upaya meningkatkan capaian kinerja program TBC di Kabupaten Temanggung.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah masih banyak stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC yang menyebabkan keluarga menutup ketika akan dilakukan investigasi kontak. Terbatasnya logistik penegakan diagnosis terduga TBC,
- 14) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
- a) Faktor pendorong indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan deteksi dini HIV AIDS, adanya LSM Kalandara dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus untuk memaksimalkan penjangkauan populasi kunci melalui kegiatan VCT mobile maupun rujukan statis ke puskesmas/rumah sakit Terdapatnya dukungan anggaran dari Global Fund AIDS dalam pelaksanaan program HIV AIDS di Kabupaten Temanggung Dukungan lintas sektor dan lintas program dalam upaya peningkatan skrining HIV AIDS baik pada Ibu hamil, pasien TB, maupun WBP.
 - b) Faktor penghambat indikator ini adalah :
 - penjangkauan pada kelompok populasi kunci masih belum maksimal, masih ada populasi beresiko yang menolak atau ragu-ragu untuk dilakukan pemeriksaan HIV, seperti pada kelompok LSL, ibu hamil dan pasien TB.
 - Masih terdapatnya stigma/diskriminasi pada ODHIV di lingkungan masyarakat, serta

- Banyaknya temuan kasus baru yang meninggal sebelum pengobatan (keterlambatan deteksi dini).

15) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan

- Faktor pendorong indikator ini adalah pelaksanaan KIE kepada sasaran, sosialisasi dan koordinasi dan tetap memberikan layanan imunisasi bagi sasaran sesuai jadwal pelayanan.
- Faktor penghambat indikator ini adalah :
 - Masih terdapat keluarga yang menolak imunisasi,
 - Adanya beberapa stok vaksin tertentu yang tidak tersedia karena ketersediaan vaksin untuk tergantung dari Pusat dan distribusi pusat ke Provinsi sehingga terjadi penundaan imunisasi, sert
 - data sasaran yang mengacu dari Kementerian Kesehatan terlalu tinggi.

16) Persentase rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) strata utama dan paripurna.

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pendataan PHBS sudah menjadi pendataan rutin tiap tahun sehingga pelaksanaan di lapangan kader lebih familiar.
- Faktor penghambat indikator ini adalah Pendataan PHBS TW 1 belum dilaksanakan karena menunggu perubahan indikator dari provinsi dan akan dilaksanakan pada bulan April.

Sedangkan penjelasan untuk masing masing indikator kinerja pada RSUD Temanggung adalah sebagai berikut:

a. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 1 terdiri dari:

1) Cakupan nilai akreditasi RSUD

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Pendapatan BLUD RSUD Temanggung mampu membiayai pengeluaran operasional RSUD. Peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.

- Terdapat dukungan anggaran dari DAK untuk pemenuhan sarana medis untuk peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan di RSUD.
- Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi di RSUD sehingga memudahkan Akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD.
- Penanganan komplain pelanggan yang komprehensif sehingga meningkatkan indeks kepuasan pelanggan.

b) Upaya Pencapaian Target Kinerja indikator tersebut adalah

- Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar RS kelas B pendidikan untuk mendukung transformasi kesehatan layanan rujukan kanker, jantung, stroke, uronerfologi, dan KJSU-KIA.
- Peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang profesional dan berkualitas.
- Peningkatan digitalisasi terintegrasi dalam mendukung pelayanan rumah sakit.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kesehatan terdiri dari satu jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Pokok Bidang Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

Realisasi Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 -2024

Angka Harapan Hidup	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Temanggung	75,58	75,64	75,70	75,77	75,94
Jawa Tengah	74,37	74,47	74,54	74,69	74,91
Nasional	71,47	71,57	71,85	73,93	72,39

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

a. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indkes keluarga Sehat kabupaten temanggunbg Tahun 2024 adalah 0,15 dengan jumlah KK sehat sebanyak 45.724 KK dari total 231.704 KK di Kabupaten Temanggung.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Realisasi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung pada Tahun 220-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kematian ibu	10	17	7	4	5
2	Jumlah kelahiran hidup	10.435	9.749	9294	8897	8196
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	95,83	174,38	75,32	44,96	61,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2024

c. Angka Kematian Bayi

Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus kematian bayi	132	124	123	116	97
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)	10.435	9.749	9294	8897	8196
3.	Angka Kematian Bayi	12,65	12,72	13,23	13,04	11,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

d. Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar

Realisasi Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Cakupan Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan K4	10.677	10.740	10.388	9.095	8422
2.	Jumlah sasaran ibu hamil	10.677	10.740	10.388	9.095	8422
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

e. Prevalensi anemia pada ibu hamil

Realisasi Prevalensi anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11 Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil anemia yang ditemukan pada Kunjungan antenatal pertama (K1)	1.514	1.465	343	1092	998
2	Jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa pada Kunjungan antenatal pertama (K1)	10.677	10.737	12.146	9573	8707
3	Prevalensi anemia pda ibu hamil	14,18	13,64	2,82	11,41	11,46

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

f. Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan sesuai standar

Realisasi Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12 Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	10.446	9.792	9.300	8914	8222
2	Jumlah sasaran ibu bersalin	10.446	9.792	9.300	8914	8222
3	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

g. Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Realisasi Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	10.446	9.792	9.300	8914	8222
2.	Jumlah Persalinan	10.446	9.792	9.300	8914	8222
3.	Prosentase Persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

h. Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan

Realisasi Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14Persentase Pertolongan Persalinan Yang Dilaksanakan Di Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Persalinan yang ditolong di fasilitas Kesehatan	10.446	9.792	9.300	8914	8222
2	Jumlah Persalinan	10.446	9.792	9.300	8914	8222
3	Prosentase Persalinan yang ditolong di Fasiltas Kesehatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- i. Persentase Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- Realisasi Cakupan Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.435	9.740	9.209	8786	8181
2	Jumlah sasaran bayi baru lahir	10.435	9.740	9.294	8786	8181
3	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	99,09	100	100

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- j. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani
- Realisasi Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16 Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	2.337	2.138	2.085	2419	1322
2	Jumlah seluruh Neonatus dengan komplikasi	2.337	2.138	2.085	2419	1322
3	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

k. Angka Kematian Neonatal

Realisasi Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17 Angka Kematian Neonatal di kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal	102	93	85	82	69
2	Jumlah Kelahiran Hidup	10.435	9.749	9.294	8897	8196
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	9,77	9,54	9.15	9,2	8,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

1. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Realisasi Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita usia 12-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40.441	42.083	40.199	43.520	40033
2	Jumlah sasaran balita usia 12-59 bulan	50.297	51.545	43.250	43.520	41699
3	Persentase balita Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80,40	81,64	92,95	100	96

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

m. Angka Kematian Balita (AKB)

Realisasi Angka Kematian Balita (AKB) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19 Angka Kematian Balita di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita usia 0 – 59 bulan yang meninggal	145	137	145	143	117
2	Jumlah Kelahiran Hidup	10.435	9.749	9.294	8897	8196
3	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	13,90	14,05	15.60	16,1	14,28

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

n. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Realisasi Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk	93	93	134	95	70
2	Jumlah balita	50.297	51.545	42.350	43.520	43368
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,18	0,18	0,31	0,22	0,16

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024

o. Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)

Realisasi Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 21Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	CAPAIAN STUNTING	
		Balita 0-59 bulan	Baduta 0-23 bulan
1	2020	28,5	14,23
2	2021	-	13,13

NO	TAHUN	CAPAIAN STUNTING	
		Balita 0-59 bulan	Baduta 0-23 bulan
3	2022	23	13,03
4	2023	20,5	9,84
5	2024	-	11,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

p. Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif

Realisasi Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 22Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	4.207	4.937	4.165	4.390	3853
2	Jumlah sasaran bayi usia 0-6 bulan	5.674	5.876	5.059	5022	4325
3	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	74,15	84,02	82,33	87,42	89,09

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

q. Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Realisasi Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2024
1	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58.335	28.242	96.443	81.813	112.019
2	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar	58.335	91.245	113.569	99.708	113.384
3	Persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	30,95	84,92	82,05	98,8

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- r. Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- Realisasi Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24 Persentase WNI Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar	280.135	357.786	456.236	516364	520.721
2	Jumlah orang usia 15-59 tahun	540.662	516.638	512.226	516364	524.877
3	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,81	69,25	89.07	100	99,21

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- s. Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- Realisasi Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 25Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan minimal 1 kali dalam satu tahun	72.733	99.987	91.826	17293	120.976
2	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih	116.105	111.691	110.336	117293	127.874
3	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62,64	89.52	83.22	100	94,61

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- t. Persentase Fasyankes yang memenuhi standar mutu
- Indikator Persentase Fasyankes yang memenuhi standar mutu merupakan indicator baru yang pada tahun 2024 mencapai 76,36 dari total 55 fasyankes, sebanyak 44 fasyankes telah memenuhi standar mutu.
- u. Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Realisasi Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.26 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.629	66.107	187.378	209511	208619
2	Jumlah estimasi penderita Hipertensi	218.228	213.442	221.010	209511	231727
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19,99	30,97	84.78	100	90,03

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- v. Persentase Penderita Diabetes melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Realisasi Penderita Diabetes melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27 Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.084	9.456	13.066	13469	12007

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka Prevalensi nasional	10.448	10.223	10.584	13469	11097
3	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	77,37	92,50	100	100	108,20

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

w. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Realisasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28 Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar	1643	2030	2061	2102	2112
2	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada	1978	1978	1978	2102	1978
3	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	83,06	102,6	104,2	100	106,77

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

x. Persentase orang Terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

Realisasi orang Terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29 Persentase Orang Terduga TB Yang Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	3070	5462	8115	8577	9332
2	Jumlah orang terduga TBC	8039	8046	8484	8577	7238
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	38,19	67,88	95.65	100	127,35

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

y. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Realisasi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30 Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.352	9.338	11.086	11.230	10406
2	Jumlah orang beresiko HIV	12.567	12.706	12.738	11.230	10808
3	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV sesuai standar	74,42	73,49	87.03	100	96,28

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

z. Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)

Realisasi Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31 Incident Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus DBD	406	30	29	17	12
2	Jumlah penduduk	794.055	800.276	801.267	811.798	820736
3	IR DBD per 100.000 penduduk	51,13	3.75	3.62	2,09	10,48

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

- aa. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan
- Indikator Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan merupakan indicator baru yang dimulai tahun 2024, sehingga data series tahun 2020-2024 tidak dapat
- bb. Persentase Rumah Sehat
- Realisasi Persentase Rumah Sehat di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32 Persentase Rumah Sehat di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah yang dipantau	187.560	196.536	154.536	199.283	
2	Jumlah Rumah Sehat	157.078	161.481	135.094	171.364	
3	Jumlah Rumah Tidak Sehat	30.482	35.055	19.442	27.919	
4	Jumlah Rumah Tidak Sehat yang dibina	30.482	35.055	19.442	27.919	199.425
5	Persentase Rumah Sehat	83,75	82,16	87,42	85,99	86,16
6	Persentase Rumah Tidak Sehat yang dibina	100	17,84	100%	100%	

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

cc. Persentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan

Realisasi Pesentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33 Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Jumlah seluruh Puskesmas yang ada	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	99,22	98,57	97,73	98,72	99,02

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

dd. Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar

Indikator Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar merupakan indicator bari du tahun 2024, sehingga data series tahun 2020-2024 tidak dapat ditampilkan.

ee. Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar

Realisasi Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34 Cakupan Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Farmasi Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	n.a	n.a	5	26	26
2	Jumlah puskesmas	n.a	n.a	26	26	26
3	Cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	n.a	n.a	19,23	100	100

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

ff. Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah
Tangga (RT) Strata Utama dan Paripurna
Realisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah
Tangga (RT) Strata Utama dan Paripurna di Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 2.35 Persentase PHBS Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga ber PHBS strata Utama dan Paripurna	197.523	201.477	196.170	210.656	211.055
2	Jumlah Rumah Tangga yang dipantau	212.574	213.410	206.586	218.794	215.862
3	Persentase Rumah Tangga ber PHBS strata Utama dan Paripurna	92,92	94,42	94,96	96,00	97,77

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sedangkan data pokok untuk Rumah Sakit Umum Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data Pokok pada RSUD Kabupaten Temanggung terdiri dari Cakupan nilai akreditasi RSUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 36Cakupan Nilai Akreditasi Rusah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	100	100	100	100

Nilai Akreditasi Rumah Sakit adalah capaian kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi rumah sakit meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Terdapat 16 Standar Akreditasi Rumah Sakit antara lain :

- a. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) (Standar 80%)
- b. Manajemen Fasilitas dan Keamanan (MFK) (Standar 80%)

- c. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) (Standar 80%)
- d. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) (Standar 80%)
- e. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) (Standar 80%)
- f. Pengkajian Pasien (PP) (Standar 80%)
- g. Akses dan Kesiapan Pelayanan (AKP) (Standar 80%)
- h. Program Nasional (Standar 80%), meliputi :
 - 1) Penurunan Angka Kesakitan HIV/ AIDS
 - 2) Penurunan Angka Kesakitan Tuberkulosis
 - 3) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi
 - 4) Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit
 - 5) Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting*
- i. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) (Standar 80%)
- j. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) (Standar 80%)
- k. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK) (Standar 80%)
- l. Hak Pasien dan Keluarga (HPK) (Standar 80%)
- m. Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK) (Standar 80%)
- n. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) (Standar 80%)
- o. Komunikasi dan Edukasi (KE) (Standar 80%)
- p. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) (Standar 80%)

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang tidak mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024 dari 45 indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Indikator Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup
Hal ini disebabkan masih tingginya kasus kematian bayi usia 0-28 hari karena kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal.

b. Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Hal ini disebabkan karena masih tingginya jumlah kematian bayi yang disebabkan BBLR, kelainan kongenital dan asfiksia.

c. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Hal ini disebabkan adanya factor resiko pada saat kehamilan dan adanya infeksi meningitis, kelainan jantung, sesak nafas maupun kecelakaan pada balita.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, antara lain :

- a. Masih tingginya Angka Kematian baik Neonatal, bayi dan balita per 1.000 kelahiran hidup serta AKI per 100.000 kelahiran hidup.
- b. Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar peran serta seluruh lintas sektor dalam penurunan angka kematian yang ada di Kabupaten Temanggung.

Isu-isu strategis yang bersumber dari internal RSUD adalah :

1. Mutu pelayanan
2. Pengembangan RSUD Kabupaten Temanggung dengan Pembangunan Gedung Poliklinik tahun 2026-2027 menggunakan dana cadangan yang dibentuk tahun 2024-2025.
3. Sarana dan prasarana rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas B dan rujukan regional, demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama sehingga menyebabkan alat berfungsi kurang optimal.
4. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai untuk kebutuhan spesialisik dan sub spesialisik.
5. SIM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal

Isu-isu strategis yang bersumber dari eksternal :

1. Penerapan SJSN melalui BPJS.
2. Keterbatasan dana pemerintah pusat (APBN) dan dana pemerintah daerah (APBD) dalam mensubsidi RS.
3. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.

4. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa sub kegiatan hilang/bergabung.
 2. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yaitu kegiatan:
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV);
- Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.37 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	KESEHATAN					101.972.559.907	1	KESEHATAN					141.261.734.649	36.289.174.742
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					81.161.434.907	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					81.565.020.249	403.585.342
1	Administrasi Keuangan Daerah					79.391.508.207		Administrasi Keuangan Daerah					79.391.508.207	0
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					79.391.508.207		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dinkes		1569	orang / bulan	79.391.508.207	0
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					139.702.700		Administrasi Umum Perangkat Daerah					139.702.700	-
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	12.734.700		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	12.734.700	-
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	29.286.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	paket	29.286.000	-
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	15.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	paket	15.000.000	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	20.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	lapora n	20.000.000	-
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	62.682.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	lapora n	62.682.000	-
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-
b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.458.224.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.861.809.342	403.585.342
c	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes, Labkes da dan PSC 119	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	230.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes, Labkesd a dan PSC 119	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12	lapora n	230.000.000	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes, Puskes mas, Labkes da dan PSC 119	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	1.228.224.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes, Puskes mas, Labkesd a dan PSC 119	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	lapora n	1.631.809.342	403.585.342
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					172.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					172.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes, Labkes da dan PSC 119	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	Unit	112.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes, Labkesd a dan PSC 119	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	Unit	112.000.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	10.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	10.000.000	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1	Unit	35.000.000		Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1	Unit	35.000.000	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperlihara/ direhabilitasi	8	Unit	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperlihara/ direhabilitasi	8	Unit	15.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						20.711.125.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						57.828.636.400	37.117.511.400
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						235.383.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						27.604.080.400	27.368.697.400
1			Persentase ibu bersalin mendapatka n pelayanan persalinan sesuai standar	100	%					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		
2			Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%					Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3			Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	100	%					Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	100	%		
4			Persentase bayi baru lahir mendapatka n pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	%		
5			Cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani	100	%					Cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani	100	%		
6			Angka Kematian Neonatal (AKN)	9,15	1.000/ KH					Angka Kematian Neonatal (AKN)	9,15	1.000 / KH		
7			Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%					Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
8			Angka Kematian Balita	15,6	1.000/ KH					Angka Kematian Balita	15,6	1.000 / KH		

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
9			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%					Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
10			Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%					Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
11			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%					Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
12			Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	66						Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	66			
13			Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%					Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
14			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
15			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%					Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
16			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		
17			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%		
18			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Per 100.000 pddk					Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Per 100.000 pddk		
19			Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	87						Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	87			

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
20			Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	%					Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	%		
21			Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,7	%					Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,7	%		
22			Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	%					Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	%		
			Persentase rumah sehat	82,5	%					Persentase rumah sehat	82,5	%		
	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	Unit		1	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		5 Unit	9.748.000.000	9.748.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit		2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	266.246.000	266.246.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kecamatan Wonobo yo dan Kecamatan Selopa mpang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Oleh Puskesmas	5	Unit	20.000.000	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kecamatan Wonobo yo dan Kecamatan Selopa mpang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	Unit	1.705.443.000	1.685.443.000
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	145	Unit		4	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			145	Unit	360.592.400	360.592.400

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terpelihara Sesuai Standar											
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50	Paket		5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			50	Paket	15.423.799.000	15.423.799.000
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12	Paket		6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			12	Paket	100.000.000	100.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.345.742.000		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.224.556.000	9.878.814.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Temanggung	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9095	Orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Temanggung	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9095	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Temanggung	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8914	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Temanggung	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8914	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Temanggung	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8786	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Temanggung	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8786	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Temanggung	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43250	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Temanggung	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43520	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Temanggung	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	109836	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Temanggung	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	109836	orang	25.000.000,00	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			sesuai standar							sesuai standar				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Temang gung	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	5163 64	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Temang gung	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51636 4	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Temang gung	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	1172 93	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Temang gung	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11729 3	Orang	28.520.000,00	3.520.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Temang gung	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	2095 11	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Temang gung	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20951 1	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Temang gung	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatka	1346 9	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Temang gung	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan	13469	Orang	25.000.000,00	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			n pelayanan kesehatan sesuai standar							pelayanan kesehatan sesuai standar				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Temang gung	Jumlah orang yang mendapatka n pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar	2102	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Temang gung	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar	2102	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Temang gung	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	8577	orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Temang gung	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8577	Orang	25.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Temang gung	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatka n pelayanan sesuai standar	1123 0	Orang	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Temang gung	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	11230	Orang	25.000.000,00	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12	Dokume n	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12	Doku men	20.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12	Dokume n	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12	Doku men	91.672.000,00	71.672.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12	Dokume n	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12	Doku men	20.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12	Dokume n	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12	Doku men	353.089.000,00	333.089.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	12	Dokume n	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	12	Doku men	20.000.000,00	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Mandiri, dan Tradisional Lainnya		tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya							tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya				
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12	Dokumen	20.000.000		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12	Doku men	66.870.000,00	46.870.000
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	12	Dokumen	200.000.000		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	12	Doku men	100.000.000,00	- 100.000.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12	Dokumen	20.000.000		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12	Doku men	20.000.000,00	-
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil	12	Dokumen	19.405.742.000		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12	Doku men	28.305.742.000,00	8.900.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							Jaminan Kesehatan Masyarakat				
	Pengembangan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Kab. Temang gung	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratoriu m Rujukan/Na sional yang Didistribusik an	226	Paket	20.000.000		Pengembangan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Kab. Temang gung	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasi onal yang Didistribusika n	226	Paket	285.543.000,00	265.543.000
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil penyelenggar aan Kabupaten/ Kota sehat	12	Dokumen	20.000.000		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil penyelenggara an Kabupaten/K ota sehat	12	Doku men	20.000.000,00	-
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	12	Dokumen	150.000.000		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	12	Doku men	190.740.000,00	40.740.000
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					0		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	- 6.500.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT)	Kab. Temang gung	Jumlah PSC 119 tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan RS dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	50.000.000		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT)	Kab. Temang gung	Jumlah PSC 119 tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan RS dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	43.500.000,00		
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen	20.000.000		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Doku men	337.380.000,00		317.380.000
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi	12	Dokumen	20.000.000		Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi	12	Doku men	20.000.000,00		-
	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas	12	Dokumen	0		Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas	12	Doku men	6.500.000		6.500.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Pelayanan Kesehatan							Pelayanan Kesehatan				
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	10	Doku men	20.000.000	20.000.000
	Penyelenggaraan sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					20.000.000		Penyelenggaraan sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					20.000.000	-
	Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	12	Dokumen	20.000.000		Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	12	Doku men	20.000.000,00	-
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					110.000.000		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					80.000.000	- 30.000.000
	Dalwas serta Tindak Lanjut Perijinan RS Kelas C, D dan Fasyankes Lainnya	Dinkes	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan , Diawasi dan Ditindaklanj uti Perizinannya	54	Unit	20.000.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinkes	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanju ti Perizinannya	54	Unit	20.000.000,00	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (tambah kegiatan ILP 20 juta)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	54	Unit	90.000.000		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (tambah kegiatan ILP 20 juta)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	54	Unit	60.000.000,00	- 30.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					40.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.183.781.000	1.143.781.000
														-
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					20.000.000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					104.043.000,00	84.043.000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	Dokumen	20.000.000		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	Doku men	104.043.000,00	84.043.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.079.738.000,00	1.059.738.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah SDM Kesehatan daerah Kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	1872	Orang	20.000.000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah SDM Kesehatan daerah Kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	1872	Orang	1.079.738.000,00	1.059.738.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					40.000.000		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					245.937.000	205.937.000
														-
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					20.000.000		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					92.161.000,00	72.161.000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	12	dokumen	20.000.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	12	doku men	92.161.000,00	72.161.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah, /dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					20.000.000		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					153.776.000,00	133.776.000
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Temang gung	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12	Unit	20.000.000		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Temang gung	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12	Unit	153.776.000,00	133.776.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					20.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					338.360.000,00	318.360.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah,/dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Target Kinerj a	Satua n	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	-
	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kab. Temang gung	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan (%)	83	%			Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kab. Temang gung	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan (%)	83	%		
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota					338.360.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	4	Dokumen	20.000.000		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	4	Doku men	338.360.000,00	318.360.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 RSUD Kabupaten Temanggung

KETERANGAN				RANCANGAN AWAL RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	92	nilai	205.290.928.890	92	nilai	205.290.928.890
			Persentase Indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	80	%		80	%	
			Persentase Indikator mutu keperawatan yang mencapai target	82	%		82	%	
			Persentase Indikator mutu penunjang medis dan non medis yang mencapai target	80	%		80	%	
			Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	94	nilai		94	nilai	
			Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	75	%		75	%	
			Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	80	%		80	%	

KETERANGAN				RANCANGAN AWAL RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
			Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan	75	%		75	%	
			Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	70	%		70	%	
			Persentase Indikator Kinerja Keuangan BLUD yang mencapai target	80	%		80	%	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD	Prosentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	30.290.928.890	100	%	30.290.928.890
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468	Orang/bulan	30.290.928.890	468	Orang/bulan	30.290.928.890
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD	Prosentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	%	175.000.000.000	100	%	175.000.000.000
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit	175.000.000.000	1	Unit	175.000.000.000
2	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%	186.296.800.000	100	%	186.296.800.000

KETERANGAN				RANCANGAN AWAL RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%		100	%	
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%		100	%	
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	100	%	186.296.800.000	100	%	186.296.800.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	unit	21.296.800.000	1	unit	21.296.800.000
	Sub kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	1	unit	165.000.000.000	1	unit	165.000.000.000

KETERANGAN				RANCANGAN AWAL RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
			peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit						

Sumber : RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Kesehatan. Namun dalam proses ini Dinas Kesehatan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, dan hasilnya adalah tidak ada.

Penelaahan usulan dari Masyarakat padaRSUD juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten dengan hasil sebagai berikiut :

Tabel 2.39 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

NIHIL

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.40 Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SIPANJUL JITU (Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul, jemput Ibu Inpartu)	Bidan, kader Kesehatan, PKK, dokter	BLUD	Kolaborasi dan berkesinambungan dari berbagai disiplin ilmu. Mulai dari mendeteksi bumil resti, asuhan sayang ibu dn bayi,			Puskes mas Kedu / 2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
				pendampingan bumil sampai nifas.			
2	PENTOL TANTRI	Puskesmas Candirototo	BLUD	Optimalisasi pendaftaran pasien dengan metode pendaftaran pasien online melalui wa dan telepon	Pasien tidak antri	Pelayanan Kesehatan berjalan lancar	2022
3	JAPRI BUFAS	Puskesmas Parakan	BLUD	Layanan jadwal periksa Ibu Nifas			2023
4	GARDU IMUN	Puskesmas Traji	BLUD	Gerakan peduli imunisasi			2023
5	GEMPI	Puskesmas Kledung	BLUD	Gerakan edukasi untuk mengatasi penyakit hipertensi			2023
6	Impelemen-tasi Home visite	Puskesmas Bansari	BLUD	Pelaksanaan asuhan keperawatan pada kegiatan perkesmas	Meningkatkan pelaksanaan asuhan keperawatan pada kegiatan perkesmas		2023
7	SI BELA BERSAJAK	Puskesmas Bulu	BLUD	Sayangi ibu setelah bersalin dengan pijat oksitosin			2023
8	KONCALAN REMBULAN	Puskesmas Temanggung	BLUD	Konsultasi perencanaan kehamilan untuk remaja, ibu dan calon pengantin			2023
9	TEMAN SUZI	Puskesmas Tlogomulyo	BLUD	Temui damping dengan asuhan gizi			2023
10	TEMAN SI MANIS	Puskesmas Tembarak	BLUD	Sistem Pemantauan Atasi kencing manis			2023
11	PANDU BU MITA	Puskesmas Rejosari	BLUD	Pelayanan terpadu ibu hamil sehat dan bahagia			2023
12	GERBEK PARU	Puskesmas Jumo	BLUD	Gerakan berantas kasus Tuberkulosis Paru			2023
13	SUSCATIN JAMIRAH	Puskesmas Bejen	BLUD	Kursus calon pengantin dan remaja putri			2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
				minum tablet tambah darah			
14	KURSI BIRU	Puskesmas Gemawang	BLUD	Kursus singkat ibu menyusui baru			2023
15	CETINGE BU HARTAPAN	Puskesmas Kandangan	BLUD	Cegah stunting melalui E-book seribu hari pertama kehidupan			2023
16	GERABAH MAGICOM	Puskesmas Candioto	BLUD	Gerakan minum tablet tambah darah seminggu sekali catat di google form			2023
17	JESELIN	Puskesmas Wonobojo	BLUD	Layanan jemput pasien rawat inap dan ibu bersalin			2023

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung nomor 072.3/351 tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 :

Tabel 2.41 Inovasi RSUD Kabupaten Temanggung

No	Nama Inovasi
1	POS Teko, Lara Lunga Inovasi Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD Kab. Temanggung
2	Forti-PreMILK: Fortifikasi ASI untuk Meningkatkan Berat Badan Bayi Prematur di Ruang PICU NICU RSUD Temanggung
3	Kolak Pisang Gendis Menuju Rumah Sakit Ramah Lingkungan
4	e-Report IKP: Pencatatan dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Berbasis Aplikasi
5	e-TraceMed : Pencatatan dan Pelaporan penggunaan Alat Kedokteran berbasis Barcode di RSUD
6	Si Tangkas “Strategi Intervensi Turunkan Angka Stunting”

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ada 5 (lima)) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.42 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Predikat “Tertinggi” Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	OMBUDSMAN,	Nasional	Dinas Kesehatan
2.	Predikat Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan dari Bupati Temanggung	Bupati Temanggung	Regional	Dinas Kesehatan
3.	Peringkat I Penghargaan atas Kontribusi terhadap Penyampaian Inovasi Daerah Kabupaten Terbanyak		Nasional	Dinas Kesehatan
4.	Penghargaan atas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan			Dinas Kesehatan
5	Terbaik III Lomba Puskesmas Bersih (Puskesmas Bulu) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah	Regional	Puskesmas Bulu

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, *SDG's*, maupun Program Prioritas Nasional (PPN) bidang kesehatan. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung harus dilaksanakan untuk peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Tujuan Dinas Kesehatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 adalah “**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**” dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
2. Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Kesehatan,
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)					Tahun	76,06	76,45
1.			Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Jumlah Kematian Ibu			kasus	5	5
					Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)		%	100%	100%
						Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	%	40%	50%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		%	100%	100%
						Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas lengkap	%	80%	85%
						Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun			
2.				Jumlah Kematian Balita			kasus	161	158
					Angka Kematian bayi		%	11.84%	11.84%
						Cakupan pelayanan komplikasi pada neonatal	%	100%	100%
					Angka Kematian Neonatal		%	8.24%	8.24%
						Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap	%	100%	100%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		%	100%	100%
						Persentase bayi baru lahir mendapat skrining SHK	%	100%	100%
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		%	100%	100%
						Persentase Balita sakit dilayani MTBS	%	100%	100%
						Persentase Balita dilakukan deteksi dini tumbuh kembang (SDIDTK)	%	65%	70%
3.				Prevalensi stunting			%	23,9	23,05
					Prevalensi wasting balita		%	8	7,5
						Persentase Balita dipantau pertumbuhannya	%	75	80
						Persentase Balita Gizi buruk mendapat tata laksana Gizi Buruk	%	91	92

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase Balita bermasalah gizi yang mendapat makanan tambahan	%	65	70
					Insiden Stunting balita (kasus baru)		%	4	3
						Persentase IMD	%	50	55
						Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 - 5 bln	%	73	76
						Persentase anak usia 6 - 23 bulan mendapatkan MPASI	%	80	82
					Persentase Anemia pada ibu hamil		%	11,3	11,2
						Persentase ibu hamil mengkonsumsi suplementasi gizi	%	97	97,3
4.				Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar			%	60%	62%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar		%	100%	100%
						Persentase remaja putri diskriming anemia	%	82%	84%
						Persentase remaja putri anemia	%	10%	10%
						Persentase remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah	%	10%	10%
					Persentase orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar		%	100%	100%
						Persentase calon pengantin di skrining kesehatan	%	70%	72%
						Persentase PUS perempuan yang berencana hamil dan mempunyai resiko masalah kesehatan	%	30%	32%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	%	70%	72%
						Persentase KB Pasca Persalinan	%	50%	52%
					Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan		%	100%	100%
						Persentase lanjut usia mandiri	%	75%	77%
						Persentase Puskesmas memberikan layanan santun lansia	%	70%	75%
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		%	20	25
						Persentase Puskesmas yang bekerja sama dengan minimal 80% jejaring	%	50	55
						Persentase Pustu menerapkan ILP	%	70	75
						Persentase layanan kegawatdaruratan	%	100%	100%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		%	84	84,5
						Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	%	80	81
						Indeks Kepuasan Masyarakat di Labkesmas			
					Persentase fasyankes terintegrasi SIKN		%	20%	30%
						Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	%	20%	30%
						Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	%	20%	30%
					Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi Paripurna		%	96,67%	96,67%
						Persentase Puskesmas yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan yang ditentukan	%	15	30
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terregistrasi	%	30	35

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase Labkesmas Tk I yang dilakukan pembinaan	%	82%	85%
						Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	%	96,15%	96,15%
						Persentase RS terakreditasi Paripurna	%	100%	100%
						Persentase Klinik terakreditasi Paripurna	%	56%	60%
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar			83%	85%
						Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	%	70%	75%
						Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL	%	70%	75%
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar		%	100	100

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase Puskesmas dengan SPA kesehatan sesuai standar		100	100
						Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tk. Desa/Kel dengan SPA sesuai standar		1,53	2,29
						Persentase RS Tipe D dan C dengan SPA kesehatan sesuai standar		60	62
						Persentase Faskes Lainnya dengan SPA kesehatan sesuai standar		50	52
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		%	100%	100%
						Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	90%	90%
						Persentase Pasien TBC yang memulai pengobatan	%	95%	95%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Insidensi TBC		109 per 100000 pddk	329 per 100.000 pddk	252 per 100.000 pddk
						Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TBC	%	86%	87%
						Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada kontak serumah	%	72%	80%
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)			100%	100%
						ODHIV baru ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	%	90%	90%
						Persentase Ibu hamil diperiksa HIV dan Sifilis	%	100%	100%
					Insidensi HIV			0,09	0,08
						Persentase ODHIV on ARV di tes viral load (VL) dengan hasil viral load tersupresi		95%	90%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		%	100%	100%
						Persentase Diabetes Melitus (DM) dalam pengendalian	%	17%	17%
					Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		%	100%	100%
						Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	15,25%	15,25%
					Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		%	100%	100%
						Persentase penduduk berusia ≥ 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa dan atau NAPZA		10%	15%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase penduduk berusia ≥ 7 tahun bermasalah jiwa dan atau NAPZA yang mendapatkan tindak lanjut	%	30%	30%
						Prevalensi depresi penduduk usia ≥ 15 tahun		1,00%	1,50%
						Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun		28,00%	27,80%
					Prevalensi Obesitas		%	15%	15%
						Persentase skrining obesitas pada populasi target	%	90%	90%
					Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas		%	69,23%	73,08%
						Persentase skrining hipertensi pada populasi target	%	90%	90%
						Persentase skrining DM pada populasi target		35%	35%
						Presentase skrining faktor risiko penyakit jantung dengan pemeriksaan EKG		10%	11%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase skrining kanker kolektoral pada populasi target		0,30%	0,30%
						Cakupan skrining penyakit ginjal kronis		10%	11%
						Persentase skrining kanker paru pada populasi target		0,30%	0,30%
						Persentase skrining kanker payudara pada populasi target		10,0%	10,0%
						Persentase skrining kanker leher rahim pada populasi target		10,0%	10,0%
						Persentase skrining tajam penglihatan pada populasi target	%	85%	85%
						Persentase skrining PPOK pada populasi target	%	20%	20%
						Persentase skrining kolesterol pada populasi target	%	23%	23%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Insidensi Hepatitis B		per 100.000 pddk	23 per 100.000 pddk	20 per 100.000 pddk
						Persentase Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil	%	100%	100%
						Persentase Puskesmas melakukan pencegahan penularan hepatitis virus		75%	90%
					Prevalensi Kusta			<1/ 10.000 pddk	<1/ 10.000 pddk
						Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	%	86%	86%
						Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	%	90%	90%
					Eliminasi Rabies		0	0	0
						Persentase Puskesmas melaksanakan upaya		20%	22%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						preventif promotif Rabies			
					Penurunan Angka Kematian Dengue		%	0,5%	0,4%
						Persentase Puskesmas melakukan deteksi dini dengue		80%	80%
					Eliminasi Malaria		%	100%	100%
						API (Annual Paracyte Indeks) < 1 per 1000 penduduk	per 100.000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk
						Positivity Rate < 5%	%	<5%	<5%
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap			100	100
						Cakupan imunisasi MR1 pada bayi		100	100
						Cakupan imunisasi HPV		90%	90%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen mencapai target		85	87
						Cakupan imunisasi antigen baru		85	87
						Cakupan imunisasi lengkap pada Baduta		100	100
						Cakupan Imunisasi di usia SD		95	95
						Cakupan status imunisasi T2+ pada WUS		100	100
					Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah		%	80%	80%
						Persentase Puskesmas yang melakukan respon terhadap minimal 80% sinyal SKDR < 24 jam	%	80%	80%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase Penyakit yang dilakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan rekomendasinya	%	100%	100%
						Persentase Puskesmas yang mempunyai kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	%	90%	90%
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans dan intervensi vektor & binatang pembawa penyakit	%	100%	100%
						Persentase Puskesmas yang mencapai target kinerja surveilans PD3I	%	90%	90%
						Persentase jemaah haji risiko tinggi estimasi berangkat T+1 yang mendapatkan pembinaan kesehatan haji		70%	80%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi			2,24	2,28
						Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	92,31%	92,31%
						Persentase RS pemerintah dengan jenis dokter spesialis sesuai standar	%	100%	100%
						Tingkat retensi tenaga kesehatan dan tenaga medis	%	90%	90%
						Persentase tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ditingkatkan mutunya	%	20%	22%
5.				Cakupan Kepesertaan JKN				69,48	69,58
					Cakupan Kepesertaan Aktif JKN			72	73
						Persentase penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS		38	38

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Kelas III yang dibayarkan iurannya		7,75	7,75
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan		%	15%	15%
						Persentase klaim pelayanan krisis kesehatan terbayarkan		100	100
6.				Persentase Kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan				10	12
					Persentase Desa /Kelurahan STBM			20	25
						Persentase Desa/Kelurahan dengan Kepala Keluarga yang melakukan		72	73

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						pengelolaan air minum dan pangan min 75%			
						Persentase Desa/Kelurahan dengan Kepala Keluarga Berperilaku CTPS min 75%		94.00	94.25
						Persentase Desa/Kelurahan dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan limbah cair min 30%		79.00	79.25
						Persentase kualitas udara memenuhi syarat		5	7,5
						Persentase sarana air minum memenuhi syarat		5	7,5
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan		%	17,40%	20,00%
						Persentase TPP dilakukan IKL dan memenuhi syarat	%	84,00%	84,25%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase TPP diberi pelatihan penjamah makanan		20	25
7.				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah				83,5	84
					Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar			60%	62%
						Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		80%	82%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan			54%	58%
						Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	23,73%	30,30%
						Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		75%	76%
8.				Net Death Rate			%	20,30 ‰	20,25 ‰
					Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		%	100%	100%
					Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit			0	100%
						Persentase Capaian Pembangunan Gedung Poliklinik		0	70%
						Persentase Capaian Pembangunan Jembatan Penghubung		0	0

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		%	100%	100%
						Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	%	100%	100%
9.				Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD				87,8	88
					Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit		Paripurna nilai 91,2	Paripurna nilai 91,2	Paripurna nilai 92
					Persentase Indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target			80%	80%
						Persentase capaian waktu tunggu rawat jalan	%	60%	60%
						persentase kepatuhan waktu visite dokter	%	10%	8%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Persentase waktu tunggu sebelum operasi/penundaan operasi efektif	%	100%	100%
						persentase kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	%	80%	82%
						persentase waktu tanggap operasi secsio cesarea emergency	%	75%	80%
					Persentase Indikator mutu penunjang medis dan non medis yang mencapai target			80%	80%
						penulisan resep sesuai formularium/ kepatuhan penggunaan formularium nasional	%	90%	93%
						Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Kritis/Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	%	98,20%	98,50%
						Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	%	80%	85%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Pengelolaan Baku Mutu Limbah Air	%	100%	100%
					Persentase Indikator mutu keperawatan yang mencapai target			82%	82%
						Persentase Kepatuhan Kebersihan Tangan	%	85%	87%
						Persentase Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	%	85%	85%
						Persentase Kepatuhan Identifikasi Pasien	%	95%	95%
						Persentase Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	%	92,00%	93%
					Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD		Peringkat AA nilai 93	Peringkat AA nilai 93,5	Peringkat AA nilai 94
					Persentase kecukupan SDMK sesuai standar			75%	75%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Presentase Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Rumah Sakit sesuai Standar	%	75%	80%
						Persentase jumlah dan jenis dokter spesialis sesuai standar layanan	%	75%	80%
						Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	%	100%	100%
					Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar			80%	80%
						Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan pada Instalasi/Pelayanan Medik-Keperawatan dan Penunjang Medis		80%	80%
					Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan			75%	75%
						Persentase Pelatihan 20 Jam Per Pegawai	%	75%	75%
						Presentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT		75%	75%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
					Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional			70%	70%
						Persentase Pengembangan Modul SIM RS	%	70%	70%
					Persentase Indikator Kinerja Keuangan BLUD yang mencapai target			80%	80%
						Rasio Kas (Cash Ratio)	%	80%	80%
						Rasio Lancar (Current Ratio)		80%	80%
						Rasio Kewajiban terhadap Aset		80%	80%
						Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas		80%	80%
						Rasio Pendapatan BLUD Non APBD-LO terhadap Biaya Operasional / Cost Recovery Rate		80%	80%
						Porsi Pendapatan APBD - LO dibandingkan Pendapatan Non APBD - LO		80%	80%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
10.			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik cukup				2,75%	3%
					Presentase penduduk menerapkan hidup sehat			17%	19%
						Presentase Puskesmas yang melaksanakan kampanye kesehatan	%	40%	50%
						Persentase sekolah memenuhi stratifikasi standar sekolah sehat		5%	10%
						Persentase Rumah Tangga sehat	%	20%	22%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Presentase Puskesmas dengan cakupan skrining aktifitas fisik secara assesment mandiri minimal 70% dari kehadiran		70%	74%
					Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja			2,5%	5%
						Persentase tempat kerja formal melaksanakan skrining kesehatan		10%	15%
						Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja		10%	15%
						Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal		50	75
					Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan		%	85%	87%
						Persentase kader posyandu bidang kesehatan strata madya dan utama	%	10%	20%

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
			Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	AKIP Dinas Kesehatan					
				IKM Dinas Kesehatan					
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		%	100	100
						Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersedia			
					Persentase administrasi kepegawaian, umum, dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan Target	TARGET Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
						Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang			
						Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
						Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
					Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia			

Sumber : Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang mengacu pada Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	KESEHATAN	101.972.559.907	1	KESEHATAN	176.195.662.739	74.223.102.832
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.161.434.907	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.598.948.339	35.437.513.432
1	Administrasi Keuangan Daerah	79.391.508.207		Administrasi Keuangan Daerah	114.425.436.297	35.033.928.090
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.391.508.207		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114.425.436.297	35.033.928.090
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.702.700		Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.702.700	0
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.734.700		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.734.700	0
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.286.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.286.000	0
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	0
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	0
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.682.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.682.000	0
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.224.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.861.809.342	403.585.342
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	0
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.228.224.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.631.809.342	403.585.342

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.000.000	0
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000	0
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	0
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	0
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	0
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.711.125.000		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.828.636.400	37.117.511.400
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	235.383.000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.604.080.400	27.368.697.400
a	Pengembangan Puskesmas	0	1	Pengembangan Puskesmas	9.748.000.000	9.748.000.000
b	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	266.246.000	266.246.000
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	20.000.000	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.705.443.000	1.685.443.000
d	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	4	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	360.592.400	360.592.400

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
e	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0	5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.423.799.000	15.423.799.000
f	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	0	6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	100.000.000	100.000.000
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		-20.000.000
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.345.742.000		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.224.556.000,00	9.878.814.000
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.000.000,00	0
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000,00	0
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000,00	0
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000,00	0
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.000.000,00	0
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000,00	0
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.520.000,00	3.520.000
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000,00	0
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.000.000,00	0

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.000.000,00	0
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.000.000,00	0
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.000.000,00	0
m	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-20.000.000
n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000,00	0
o	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	91.672.000,00	71.672.000
p	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	0
q	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	353.089.000,00	333.089.000
r	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.000.000,00	0
s	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.000.000		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	66.870.000,00	46.870.000
t	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	200.000.000		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000,00	-100.000.000
u	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.000.000		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.000.000,00	0
v	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19.405.742.000		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.305.742.000,00	8.900.000.000

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
w	Pengembangan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	20.000.000		Pengembangan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	285.543.000,00	265.543.000
x	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	20.000.000		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	20.000.000,00	0
y	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	150.000.000		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	190.740.000,00	40.740.000
z	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT)	50.000.000		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT)	43.500.000,00	-6.500.000
aa	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	20.000.000		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	337.380.000,00	317.380.000
ab	Pengelolaan Layanan Imunisasi	20.000.000		Pengelolaan Layanan Imunisasi	20.000.000,00	0
ac	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	0		Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	6.500.000	6.500.000
ad	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	20.000.000	20.000.000
3	Penyelenggaraan sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000.000		Penyelenggaraan sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000.000	0
a	Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	20.000.000		Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	20.000.000,00	0
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	-30.000.000
a	Dalwas serta Tindak Lanjut Perijinan RS Kelas C, D dan Fasyankes Lainnya	20.000.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	20.000.000,00	0
b	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (tambah kegiatan ILP 20 juta)	90.000.000		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (tambah kegiatan ILP 20 juta)	60.000.000,00	-30.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	40.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.183.781.000	1.143.781.000

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
						0
6	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	20.000.000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	104.043.000,00	84.043.000
a	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	104.043.000,00	84.043.000
7	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.079.738.000,00	1.059.738.000
a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.079.738.000,00	1.059.738.000
C	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	40.000.000		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	245.937.000	205.937.000
						0
1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.000.000		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92.161.000,00	72.161.000
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.000.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92.161.000,00	72.161.000

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
2	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	20.000.000		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	153.776.000,00	133.776.000
a	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	20.000.000		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	153.776.000,00	133.776.000
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	338.360.000,00	318.360.000
						0
1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota	338.360.000,00	318.360.000
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.000.000		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	338.360.000,00	318.360.000

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dari rancangan awal mengalami kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp. 45.110.965.214,- yang berasal dari usulan kegiatan bersumber dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBHCHT, dan tambahan DAU.

Program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan RSUD Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja RSUD Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA RSUD TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	205.290.928.890	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	205.290.928.890	-
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.290.928.890	2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.290.928.890	-
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.290.928.890	3	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.290.928.890	-
4	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	175.000.000.000	4	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	175.000.000.000	-
5	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	175.000.000.000	5	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	175.000.000.000	-
6	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	186.296.800.000	6	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	186.296.800.000	-
7	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	186.296.800.000	7	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	186.296.800.000	-
8	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.296.800.000	8	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.296.800.000	-
9	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	165.000.000.000	9	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	165.000.000.000	-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASI ONAL	DAERA H					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KESEHATAN						141.261.734. 649							220.000.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						141.261.734. 649							220.000.000		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						141.261.734. 649							220.000.000		
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						81.565.020.2 49						-	220.000.000		
		[Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian]	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	81.565.020.2 49	-	-	-	-	-	-	220.000.000	-	
	1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	79.391.508.2 07			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an	-	-	0	DINAS KESEH ATAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1569 Orang/ bulan	79.391.508.2 07	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												priorita s						
	1.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	139.702.700			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm	-	-	70.000.000	DINAS KESEH ATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ap progra m priorita s				
	1.02.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.734.700	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.286.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe	-		30.000.000	DINAS KESEH ATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		15.000.000	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												priorita s				
	1.02.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Lapora n	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		25.000.000	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s						
	1.02.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lapora n	62.682.000	Kab. Tema nggu ng, Tema nggu ng, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing	-		0	DINAS KESEH ATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.861.809.34 2			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapora n	230.000.000	Kab. Tema nggu ng, Tema	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe	-		0	DINAS KESEH ATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapora n	1.631.809.34 2	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												priorita s				
	1.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	172.000.000			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm	-	-	150.000.000	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ap progra m priorita s				
	1.02.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	112.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua	-		150.000.000	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000	Kab. Tema nggu ng, Tema nggu ng, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				1 Unit	35.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi				8 Unit	15.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 96 96.67		83 84 96.67	84.5 85 96.67									
	1.02.0 2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	27.604.080.400			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.01. 0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	9.748.000.00 0	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata	DBH CUKAI HASIL TEMB AKAU (CHT), DAK FISIK-	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									n, Semu a Kel/D esa	BIDAN G KESEH ATAN DAN KB- REGUL ER- PELAY ANAN KESEH ATAN DASAR		r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		-	-	-	-	-	-	57.928.636.400	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.0 2.2.01. 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	266.246.000	Kab. Tema nggu ng, Tema nggu ng, Semu a Kel/D esa	DAK FISIK-BIDAN G KESEH ATAN DAN KB-REGUL ER-PELAY ANAN KESEH ATAN DASAR	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	96.67		96.67	96.67									
	1.02.0 2.2.01. 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				5 Unit	1.705.443.00 0	Kab. Tema nggu ng, Jumo , Moro bongo Kab. Tema nggu ng, Krang gan, Genta n	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK FISIK- BIDAN G KESEH ATAN DAN KB- REGUL ER-	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kab. Tema nggu ng, Selop ampa ng, Selop ampa ng Kab. Tema nggu ng, Wono boyo, Seme n	PELAY ANAN KESEH ATAN DASAR		reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kab. Tema nggu ng, Gema wang, Ngadi sepi							
	1.02.0 2.2.01. 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				145 Unit	360.592.400	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMB AKAU (CHT)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.01. 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				50 Paket	15.423.799.0 00	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe	-		0	DINAS KESEH ATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	100.000.000	Kab. Temanggung, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMB AKAU (CHT)	-	Pengua tan Landas an Pembentuk an Sumber Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												priorita s				
		[Menurunnya kasus kematian ibu]	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.224.556.0 00			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9095 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												priorita s				
	1.02.0 2.2.02. 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8914 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		0	DINAS KESEH ATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8786 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												priorita s				
	1.02.0 2.2.02. 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43520 Orang	25.000.000	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		-	-	-	-	-	-	57.928.636.400	-	-	-	-	-	-	0	-
	1.02.0 2.2.02. 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				109836 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a Kel/D esa			a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Terpenuhi nya pelayan an kesehat an berdas arkan sik lus hidup sesuai stan dar]	Cakupan p elayanan kesehatan pada anak usia pend idikan da sar sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) se suai stan dar	100	100 99.21	100	100	57.928.636.400	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar													
	1.02.0 2.2.02. 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				516364 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.02. 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				117293 Orang	28.520.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										KAB UPATE N/KOT A		Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi bayi lengkap Eliminasi Malaria Eliminasi Rabies Insidensi Hepatitis B Penurunan Angka Kematian Dengue	0 0.1 100	0 0.1 0.2	0 0.1 0.5	0 0.1 0.4	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				209511 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												priorita s				
	1.02.0 2.2.02. 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13469 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.02. 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2102 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.02. 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8577 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an	-		0	DINAS KESEH ATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11230 Orang	25.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												priorita s						
		[Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting]	Insiden Stunting balita (kasus baru) Persentase anemia pada ibu hamil Prevalensi wasting balita	1 10.8 5	11.44 5.3 8.5	11.3 4 8	11.2 3 7.5	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-		
	1.02.0 2.2.02. 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an	-		0	DINAS KESEH ATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									mata n, Semu a Kel/D esa			Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat]	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	15	-	17	19	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	27		2.5	5									
	1.02.0 2.2.02. 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokum en	91.672.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE N/KOT A	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s						
		[Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan]	persentase desa/kelurahan STBM Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	31.42 35	#FIELD! 20	17.40 20	20 25	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-		
	1.02.0 2.2.02. 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe	-		0	DINAS KESEH ATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a Keca mata n, Semu a Kel/D esa			ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatnya masyarakat	Persentase pekerja mendapatkan	15	-	17	19	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		berperilaku hidup sehat]	pelayanan kesehatan kerja Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	27		2.5	5									
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokum en	353.089.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										N/KOT A		akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		-	-	-	-	-	-	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-
	1.02.0 2.2.02. 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan				12 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Mandiri dan Tradisional Lainnya						Keca mata n, Semu a Kel/D esa			an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi bayi lengkap	0	0	0	0	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			berpotensi KLB/wabah															
	1.02.0 2.2.02. 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokum en	66.870.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE N/KOT A	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		0	DINAS KESEH ATAN		

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokum en	100.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Prevalensi kusta prevalensi obesitas Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah		96											
	1.02.0 2.2.02. 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a Kel/D esa			a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional]	Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	50	71.07	50	50	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan	69.98	75	69.48	69.58									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan													
	1.02.0 2.2.02. 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokum en	28.305.742.0 00	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PAJAK ROKO K, DBH CUKAI HASIL TEMB AKAU (CHT)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		-	-	-	-	-	-	57.928.636.400	-	-	-	-	-	-	0	-
	1.02.0 2.2.02. 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				226 Paket	285.543.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									mata n, Semu a Kel/D esa	FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE N/KOT A		Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan]	persentase desa/kelurahan STBM	31.42	#FIELD!	17.40	20	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	35		20	25									
	1.02.0 2.2.02. 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat				12 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan]	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 50 86.5 90	#FIELD! 	100 20 80 83	100 25 83 84.5	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	96 96.67		84 96.67	85 96.67									
	1.02.0 2.2.02. 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokum en	190.740.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										N/KOT A		akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.02. 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat				1 Unit	43.500.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n,	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Darurat Terpadu (SPGDT)						Semu a Kel/D esa			Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Terpenuhi nya pelayanan kesehatan berdasarkan	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	100	100	100	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		siklus hidup sesuai standar]	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar		99.21											
	1.02.0 2.2.02. 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokum en	337.380.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										UPATE N/KOT A		Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Menurunnya kasus kematian ibu]	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah													
	1.02.0 2.2.02. 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 96 96.67		83 84 96.67	84.5 85 96.67									
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	6.500.000	Kab. Temanggung, Semudana, Semudana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia	-		0	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/D esa			Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		[Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi bayi lengkap Eliminasi Malaria Eliminasi Rabies Insidensi Hepatitis B	0 0.1	0 0.1	0 0.1	0 0.1	57.928.636.4 00	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.0 2.2.02. 0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				10 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	96.67		96.67	96.67									
	1.02.0 2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	20.000.000			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.03. 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokum en	20.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Bekar akter	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
		-	-	-	-	-	-	57.928.636.400	-	-	-	-	-	-	0	-
	1.02.0 2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 2.2.04. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang				54 Unit	20.000.000	Kab. Tema nggu ng,	DANA ALOKA SI	-	Pengua tan Landas an	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya						Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	UMUM (DAU)		Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.0 2.2.04. 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				54 Unit	60.000.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASI ONAL	DAERA H					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												roadm ap progra m priorita s					
3.	1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	1.183.781.00 0						-	0		
		[Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan]	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2.44	2.5	2.24	2.28	1.183.781.00 0	-	-	-	-	-	-	0	-	
	1.02.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.043.000			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi	-	-	0	DINAS KESEH ATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 3.2.02. 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber				3 Dokum en	104.043.000	Kab. Tema nggu ng,	DANA ALOKA SI UMUM	-	Pengua tan Landas an	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daya Manusia Kesehatan						Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	(DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE N/KOT A		Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.0 3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.079.738.00 0			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												priorita s						
	1.02.0 3.2.03. 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1872 Orang	1.079.738.00 0	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE N/KOT A	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		0	DINAS KESEH ATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
4.	1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	245.937.000						-	0	
		[Meningkatkan efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah]	Persentase pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	70 72	- 	54 60	58 62	245.937.000	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.0 4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	92.161.000			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												priorita s				
	1.02.0 4.2.03. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokum en	92.161.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATE N/KOT A	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	153.776.000			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
	1.02.0 4.2.06. 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	153.776.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a	-		0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/D esa	DINAS- BOK KAB UPATE N/KOT A		Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm ap progra m priorita s				
5.	1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	338.360.000						-	0	
		[Meningkatnya upaya pemberdayaan	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	92	83	85	87	338.360.000	-	-	-	-	-	-	0	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		masyarakat bidang kesehatan]														
	1.02.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	338.360.000			-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a Berday a Saing Dan Berkar akter Pengua tan reform asi birokra si dan roadm	-	-	0	DINAS KESEH ATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												ap progra m priorita s						
	1.02.0 5.2.03. 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokum en	338.360.000	Kab. Tema nggu ng, Semu a Keca mata n, Semu a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK	-	Pengua tan Landas an Pembe ntuk an Sumbe r Daya Manusi a	-		0	DINAS KESEH ATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa	DINAS-BOK KAB UPATE N/KOTA		Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas				
	J U M L A H								141.261.734. 649						220.000.000	

Tabel 4.4 Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kab. Temanggung Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BELANJA									391.587.728.890					385.290.928.890
1	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan														
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									30.290.928.890					30.290.928.890

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana 2027		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	
			Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progr am	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia								30.290.928.890					30.290.928.890
1.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	RSUD Kabupat en Temangg ung	100%	468 orang/b ulan	468 orang/b ulan	30.290.928.890	DAU		468 orang/b ulan	468 orang/b ulan	30.290.928.890
1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD									175.000.000.000					180.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terpenuhinya Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Kabupaten Temanggung	100%	1 unit	1 unit	175.000.000.000	BLUD		1 unit	1 unit	180.000.000.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSUD)								186.296.800.000					175.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan								186.296.800.000					175.000.000.000
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	Terpenuhi nya Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	RSUD Kabupaten Temanggung	100%	1 unit	1 unit	21.296.800.000	DAK		1 unit	1 unit	10.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2027		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Disediakan	Disediakan										
1.02.02.2.0 1.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai	Terpenuhinya Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM	RSUD Kabupaten Temanggung	100%	1 unit	1 unit	165.000.000.000	DAU + BLUD		1 unit	1 unit	165.000.000.000

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dan merupakan tahun pembuktian bagi Kepala Daerah mengawali program program yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sampai dengan lima tahun ke depan. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kesehatan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 153.594.035.586 - dengan realisasi belanja sebesar Rp. 143.222.322.693,- atau 93,25%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 170.300.512.184,, - dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 38.684.014.238,00,- atau 22,72%.

Sedangkan untuk RSUD Kabupaten Temanggung target anggaran sebesar Rp. 175.098.127.595 dengan realisasi sebesar Rp. 171.820.683.324 dengan capaian 98,13%. Anggaran RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebesar Rp. 145.000.000.000,- dengan capaian pada triwulan I sebesar Rp.29.502.747.003 dengan capaian 20,13%

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 176.195.662.739,- yang terdiri dari 5 (lima) program antara lain ; 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 2) program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3) program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan 4) Program Penunjang operasional seperti program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rencana Anggaran RSUD Temanggung tahun 2026 sebesar Rp. 340.207.593.600 untuk 4 program yaitu : 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680320 200212 2 003



**PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027**



RENJA 2027

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Perencanaan Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan,

Petugas Verifikator,

EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 198311182002122001

TAUFAN RINALDI
NIP. 199707072020081003

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama M

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan anggaran dalam sub kegiatan Tahun 2027, sebagai upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah, terutama apabila dilakukan review atas Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI WENARNO, SE., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731020 199903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASIii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBARvi

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum6

1.3. Maksud dan Tujuan9

1.4. Sistematika Penulisan9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah22

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah.....35

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD38

2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD39

2.6. Inovasi Perangkat Daerah53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....54

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....54

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....54

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN124

4.1. Program dan Kegiatan124

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN131

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027131

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027132

BAB VI PENUTUP135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 Kabupaten Temanggung11

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung.....23

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung.....25

Tabel 2.6. Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 202537

Tabel 2.7. *Review* terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 202739

Tabel 2.8. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2026.....53

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 202755

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 202759

Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2027125

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027131

Tabel 5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027.....133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

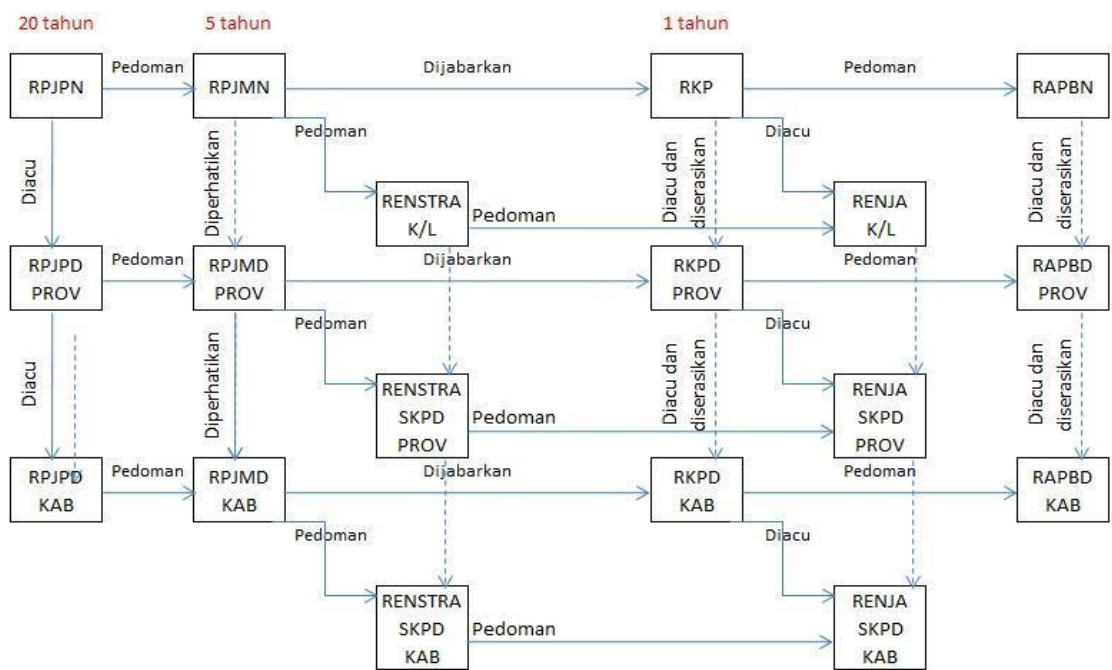
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah;
- 4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat Daerah;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat Daerah;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat Daerah untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta

pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan

kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepatsasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026
Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingk at Realis asi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Ting kat Capa ian Real isasi Targ et Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	K	Rp (DPA)	K	Rp	12=10/8
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
4.01	Sekretariat Daerah										
	Bagian Pemerintahan										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100	112.500.000	25	6.814.000	25
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100		25		25
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		dokumen	30	30	100	30	105.000.000	12	6.814.000	40
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	12	12	100	12	5.000.000	3		25
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	12	12	100	12	10.000.000	3	270.000	25
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	6	6	100	6	90.000.000	6	6.544.000	100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		dokumen	12	12	100	12	7.500.000	3		25
4.01.02.2.04.0001	Fasiilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	12	12	100	12	7.500.000	3		25

	Bagian Kesra dan Bina Mental										
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	87,84	87,84	100	88	29.249.975.350	87,84		
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	80	80	100	80		40		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	4	4	100	4	29.249.975.350			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	2	2	100	2	125.000.000	0,40	87.405.700	20
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	1	100	1	27.865.315.000			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	Dokumen	1	1	100	1	1.259.660.350	0,25	350.660.224	25
	Bagian Hukum										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persenta secakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	456.000.000	100		100
		Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Non Litigasi	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Litigasi	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Dokumentasi Perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100		100		100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							456.000.000			

4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	Dokumen	111	68	100	100	25.000.000	36	1.638.000	36
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi dan litigasi	Kasus	30	28	100	30	416.000.000	6	5.719.297	20
		Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Dokumen		22	100					
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perundangan yang Didokumentasikan melalui JDIH	Dokumen	111	68	100	100	15.000.000	12	9.343.406	12
	Bagian Pembangunan										
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100	100	100		3,2 2		3,22
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100		96, 12		96,1 2
		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	95	95	100	100		100		100
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Laporan	12	12	100	12	34.151.700	3	5.625.000	25
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100	1	10.348.000	0,2 5	1.460.000	25
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	4	4	100	4	23.803.700	1	4.165.000	25
	Bagian Perekonomian										
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	96,99	96,99	100		25		
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100		25		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	100	83, 33		66, 67		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	4	100	4	50.000.000	1	6.130.200	25
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	5	5	100	5	450.000.000	2	26.226.45 6	40
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan										

	Sumber Daya Alam										
	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Laporan	2	2	100	2	26.250.000	1	3.750.000	50
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa										
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	95	100	100	95		1,16		1
		Persentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100	100	100		100		100
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	10	14	100	6323	6.000.000	188		3
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3000	3108	100	700	15.000.000	232	2.322.351	33
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang dan atau Perangkat Daerah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Orang	103	103	100	103	2.695.050	103		100
	Bagian Umum										
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	75,35	75,35	100	76	15.600.203.335	75,35	4.139.551.298	99,14
		Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	9.571.654.795	32,14	1.192.558.945	32,14
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	1.801.029.937	100	182.523.000	100
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Th	1876	1876	100	1876	15.422.665.708	532	4.089.937.842	28,35
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang	22	22	100	28	177.537.627	8	49.613.45	28,5

	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								6	7
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	50	50	100	50	300.000.000	10		20
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	100	2	40.000.000			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	95.000.000	3	-	25
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	115.900.000	3	-	25
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	266.000.000	3	690.631	25
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	228	228	100	228	38.000.000	57	4.042.000	25
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	12	12	100	12	1.300.000.000	3	98.191.550	25
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	12	12	100	12	380.000.000	3	71.775.502	25
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit								
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	100	1	1.253.411.200	-	-	0
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket								
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	100	12				
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa										

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	12	9.500.000	3		25
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	1.094.868.750	3	241.050.959	25
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	3.055.069.845	3	740.960.504	12
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28	28	100	28	237.500.000	7	12.311.299	25
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	100	20	712.500.000	5	23.536.500	25
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	12	100	12	47.500.000	3		25
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100	12	47.500.000	3		25
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	1	18.905.000			
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	72	72	100	72	900.000.000	3		25
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	300.000.000	3	49.948.800	25
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	282.000.000	3	46.978.000	25
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	879.029.937	3	85.596.200	25

	Sekretariat Daerah											
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	%	100	100	100	100		100			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	192	392	100	192		62			
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	500	1093	100	500	355.359.500	213	12.176.500		
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Sosial,	Laporan	2000	2231	100	2000	1.067.250.000	410	73.499.300		
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	800	982	100	800	208.949.100	172			
	Bagian Organisasi											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,77	4,04	100	3,8		4.04			100
		Persentase Fasilitas Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100	100	100		100			100
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi											
4.01.01.2.13.0001	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	2	100	2	50.000.000	1	2.152.517		50
4.01.01.2.13.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Dokumen	2	2	100	2	19343750				

	Kinerja Pemerintah Daerah	Daerah									
4.01.01.2.13.0003	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	2	100	2	10.000.000	1	3.166.500	50

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- d. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program Perekonomian dan Pembangunan

- e. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- f. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- g. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- i. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- m. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- n. Penataan Organisasi

2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Program Perekonomian dan Pembangunan

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Indikator : Indeks Zakat Nasional
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan, indikator : Presentase ketersediaan produk barang bersubsidi, Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu, dan Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi

4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Faktor penyebab tidak tercapai:

- indikator Indeks Zakat Nasional yang merupakan indikator baru (mandatori) baik target maupun penilaiannya dari Baznas pusat
- Agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok
- Perangkat Daerah terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru
- Kelengkapan dokumen kontrak yang diajukan belum optimal, serta adanya perubahan regulasi.

b. Faktor penyebab melebihi target :

- Meningkatnya koordinasi dengan OPD dan pemahaman OPD terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
- Terlaksananya agenda kegiatan pimpinan daerah karena meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

- capaian program tersebut merupakan kegiatan administrasi/rutin yang dapat tercapai di akhir tahun 2026.
- Adanya kesesuaian realisasi dengan target, adapun indikator yang akan mencapai target terdapat pada indikator program :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
- c. Persentase produk hukum yang difasilitasi
- d. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
- e. Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi
- f. Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara litigasi
- g. Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin
- h. Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi
- i. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
- j. Indeks Zakat Nasional

Program Perekonomian dan Pembangunan

- k. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
- l. Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan
- m. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
- n. Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah
- o. Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi
- p. Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu
- q. Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan
- r. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- s. Presentase Pendampingan proses PBJ

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- t. Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan
 - u. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
 - v. Nilai AKIP Sekretariat Daerah
 - w. Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - x. Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah
 - y. Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu.
 - b. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi** yaitu dengan nilai **99,22%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indek Kualitas Kebijakan
Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
Capaian Kinerja: 95,60% kategori Sangat Tinggi
4. Indeks Reformasi Hukum
Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
5. Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual
Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
6. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Capaian Kinerja: 97,95% kategori Sangat Tinggi
7. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Sangat Tinggi
8. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
9. Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB
Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
10. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah
Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	65	66	67	75,71	75,71	100	ST
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	66,5	67,5	68,5	67,37	67,37	99,81	ST
3	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Angka	84,35	84,50	84,55	84,35	84,35	99,82	ST
4	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	ST
5	Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB	%	75,35	76	76,25	84,78	84,78	100	ST
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Angka	-	81,25	81,5	86,22	86,22	100	ST
7	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	100	100	ST
8	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3,46	3,47	3,2983	3,2983	95,33	ST
9	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,88	97,08	97,18	97,12	97,12	100	ST
10	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,82	3,93	3,97	3,82	3,82	97,20	ST
INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100	100	100	ST
2	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	ST
3	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
4	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100	ST
5	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	100	ST
6	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	100	ST
7	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	ST
8	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80	80	80	40	50	SR
9	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	87,84	88	89	87,84	87,84	99,82	ST
10	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,81	0,81	0,82	0,8	0,53	65,43	R
11	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	ST
12	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	ST
13	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	83,33	66,67	80	T
14	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	ST
15	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100	100	75,58	3,22	3,22	SR
16	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	73,79	96,12	96,12	ST
17	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100	100	100	100	100	100	ST
18	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	90	95	100	100	1,16	1,22	SR
19	Presentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100	100	100	100	100	ST
20	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100	100	100	100	100	ST
21	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,77	3,8	3,9	4,04	4,04	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
22	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Angka	75,35	76	76,25	75,35	75,35	99,14	ST
23	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	32,14	32,14	SR
24	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	ST
25	Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	ST

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggungp

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
INDIKATOR IKK (RPJMD 2025-2029)									
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	70	75	80	97,44	59,9*	59,9*	T
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	29	30	31	28,74	59,74*	59,74*	T
3	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	-25	10	15	50,2	81,1*	81,1*	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
INDIKATOR IKK (Kepmendagri.....)									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Bobot	n.a	20	22	n.a	10	10	S
2	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Bobot	n.a	24	24	n.a	24	24	ST
3	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Bobot	n.a	24	24	n.a	24	24	ST

Sumber: Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Keterangan: * masih memakai capaian tahun 2025

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindaklanjuti
A	Tujuan					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Adanya tindaklanjut yang telah dilakukan dari evaluasi tahun sebelumnya	Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi AKIP internal	Menerapkan kebijakan reward dan/atau punishment yang telah disusun
		2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Hasil evaluasi kualitas kebijakan publik, melalui penilaian pada dimensi Perencanaan Kebijakan (20%), Implementasi Kebijakan (25%), Evaluasi & Keberlanjutan Kebijakan (30), serta Transparansi & Partisipasi publik (15%), dan profiling penilaian (10%)	Dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatnya konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki	Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan belum dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan	Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analisis Kebijakan untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan
B	Sasaran					
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variable indeks capaian kinerja	Terjaga sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan selaku sekretariat IKK LPPD dengan OPD pengampu	a. Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum bias tercapai 100% karena terdapat kendala internal pada OPD pengampu IKK. b. OPD belum mampu secara maksimal memenuhi kriteria dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyusunan LPPD	Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyesuaian rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK). Melakukan evaluasi secara berkala dengan OPD yang capaian rendah didampingi inspektorat kabupaten sebagai APSP
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Hasil penilaian IRH yang dilakukan oleh Kementerian Hukum	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Penilaian baru keluar pada bulan November	Dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang menjadi indikator penilaian

	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina mental spiritual yang disusun dikali 100%	Adanya dukungan untuk membuat rumus akan kebijakan	Perubahan kebijakan	Koordinasi dengan pimpinan
	Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%	1. Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU 2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan	1. Kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan 2. Ketidaksesuaian data	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait
	Meningkatnya Kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/ Kota	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	$IKAD_m = \left(\sum_{i=1}^n a_i Z_{im} \right) \times 10$ Di mana a_i merupakan bobot dari masing-masing indikator dalam dimensi penggunaan yang telah disesuaikan menjadi skala. Data dan perhitungan IKAD dilakukan secara nasional dan terpusat, bukan oleh daerah. Daerah menerima pembaruan data setiap periode tertentu	Permasalahan aduan barang bersubsidi yang dapat terselesaikan dengan koordinasi	Aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti dukung	Menghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Total ITKP = Bobot (SDM) + Bobot (Pemanfaatan Sistem) + Bobot (E-Tendering) + Bobot (E-Purchasing) + Bobot (Non e-Tendering/e-Purchasing) + Bobot (E-Contract) + Bobot (Kematangan UKPBJ) Keterangan: ITKP hasil penilaian yang dikeluarkan oleh LKPP RI	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%),	Laporan kinerja yang secara umum telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian	Pada saat evaluasi dilaksanakan, implementasi SAKIP masih menggunakan Renstra tahun 2024-2026	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda

			pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah, dengan menghitung Jumlah PD yang berrediat BB atau diatasnya dibagi Jumlah PD dikali 100%	kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan	sehingga tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum seluruhnya dapat dilaksanakan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus $SKM = (\text{total nilai per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$	Adanya system pelayanan online dan sarana prasarana pendukung layanan	Penilaian IKM belum dapat dilaksanakan di triwulan 1 dan masih menggunakan nilai tahun 2025, karena masih menunggu aplikasi dan jadwal dari kemenpan dan rekapitulasi penilaian dilaksanakan di TW IV	Melaksanakan koordinasi dengan 9 bagian di Setda secara rutin, Peningkatan kapasitas SDM pelayanan, dan peningkatan sarana prasarana yang belum memenuhi standar

B. INDIKATOR PROGRAM

No	Program	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindaklanjut
A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada dikali 100%	Sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan	Adanya perubahan kebijakan	Melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan
2		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%	Sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan	Adanya perubahan kebijakan	Melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan zakat	Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat Nasional (IZN) = $0,30X1 + 0,70X2$ Keterangan : X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)	Sudah adanya Perda	1. Perda Pengelolaan Zakat belum disosialisasikan 2. Dukungan APBD Tahun 2025 belum ada	Koordinasi dengan pimpinan
4	Meningkatnya Penyelenggaraa n pemerintahan yang baik	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang terdata dibagi jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ada dikali 100%	Terjadi sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan dengan stakeholder terkait	Lambatnya respon dan pengumpulan dokumen adminsitrase tata pemerintahan	Bagian Pemerintahan melakukan koordinasi secara berkalahdengan stakeholder
5	Meningkatnya Penyelenggaraa n Kerja Sama	persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan	a. Mendukung pelaksanaan program KKN di	Kurang optimalnya koordinasi	Mengoptimalkan koordinasi Tim Koordinasi Kerja

	Dalam Negeri		diimplementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%	Kabupaten temanggung b. mendukung akreditasi perguruan tinggi	internal Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)	Sama Daerah (TKKSD)
6	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi	jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya propemperda dan propemperkada sesuai waktu pelaksanaan yang telah disusun
7		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul produk hukum dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya pendokumentasia n produk hukum daerah melalui JDIH
8		Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100%	Terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehinggamemper mudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Optimalisasi penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi di Kabupaten Temanggung
9		Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara litigasi	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100%	Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Optimalisasi penyelesaian permasalahan hokum secara litigasi di Kabupaten Temanggung
10		Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diberikan dibagi jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang masuk dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga belum bisa melingkupi masyarakat miskin secara keseluruhan	Optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung
B	Program Perekonomian dan Pembangunan					
11	Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100%	1. APBD ditetapkan tepat waktu 2. Kesiapan Tim Pelaksana	PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait
12		Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	Jumlah dokumen kontrak yang diverifikasi dibagi jumlah keseluruhan dokumen kontrak yang harus diverifikasi dikali 100%	Dokumen kontrak menjadi syarat pencairan	1. Efisiensi anggaran menyebabkan pekerjaan yang sudah dilelang tidak dilanjutkan kontraknya; 2. Triwulan 1 sebagian besar pekerjaan belum dimulai.	1. Koordinasi internal dan eksternal 2. Penetapan target yang realistis 3. Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan 4. Monitoring paket pekerjaan

						fisik 5. Perencanaan diusahakan N-1 dan Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas.
13		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	Jumlah PD (unit kerja) yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD (unit kerja) dikali 100%	1. Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU 2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan	1. Kurang tertibnya admin dalam input data kelaporan setiap bulan 2. Ketidaksesuaian data	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait
14	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibagi Total nilai pagu anggaran APBD Pengadaan barang/jasa dikali 100	Membuat Surat Edaran Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	- Kinerja OPD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi Rencana Umum Pengadaan - Persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
15		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa non e-Procurement yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa dikali 100	Membuat Surat Edaran Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
16		Presentase Pendampingan proses PBJ	Jumlah Perangkat Daerah dibagi jumlah pendampingan yang dilaksanakan dikali 100	Membuat Surat Edaran Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Pemenuhan tenaga ASN yang kompeten dan profesional di UKPBJ belum terpenuhi, terutama bagi tenaga ahli pengadaan barang/jasa yang bersertifikasi.	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
17	Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi/Jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100%			
18		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi	Permasalahan aduan barang bersubsidi yang	Aduan tidak disampaikan secara tertulis	Menghimbau agar aduan disampaikan

		yang terselesaikan	yang terselesaikan/ Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi dikali 100%	dapat terselesaikan dengan koordinasi	dan tidak disertai bukti dukung	secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung
19		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan opini WTP/Jumlah BUMD dikali 100%	Pembinaan dan Evaluasi BUMD yang dilaksanakan secara rutin	Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas
c Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota						
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100 %	Kewajiban untuk mengirimkan dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu antara lain Laporan Keuangan Januari, Februari, Maret 2026, CALK 2025, Dokumen LKJIP 2025, PK 2026, Rencana aksi, SKP, Evaluasi TW I	- Adanya perubahan kebijakan maupun kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal - aplikasi yang sering maintenance - belum semua aplikasi terintegrasi - merupakan kegiatan rutin tiap bulan sehingga target akan tercapai pada triwulan IV	Meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM, Koordinasi antar bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif
21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponennya yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada Sekretariat Daerah	Adanya komitmen dalam manajemen kinerja	- pohon kinerja dan penjenjangan kinerja belum sesuai dengan kaidah, serta cascading di Renstra sebelumnya belum linier - Penilaian masih menggunakan nilai tahun 2025 karena penilaian sapk di tahun 2026 belum dilaksanakan	- Menyusun pohon kinerja, penjenjangan kinerja serta cascading sesuai ketentuan dalam Penyusunan Renstra 2025-2029 - Melaksanakan evaluasi atas isu strategis, tujuan, sasaran, outcome dan output melalui penjenjangan kinerja dan dituangkan dalam dokumen perencanaan
22	Meningkatnya kebutuhan kedinasan pimpinan daerah yang terpenuhi Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%	Adanya sarana prasarana kedinasan Kepala Daerah yang harus dipenuhi	- Adanya perubahan kebutuhan sarana prasarana kedinasan yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan adanya efisiensi anggaran - Adanya perubahan	- Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan OPD terkait serta melaksanakan perubahan anggaran - Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku dan

					peraturan pengadaan barang/jasa - Adanya perubahan kebijakan	koordinasi dengan Bagian PBJ - Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan
23	Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Jumlah Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah yang Terasilitasi dibagi Jumlah Hari Efektif dikali 100%	Terpenuhinya SDM Bagian Prokompim	Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan di luar agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak	Mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas
24	Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenpanRB dengan 7 komponen yaitu: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Inovasi dan Pertanyaan Tambahan	Kelengkapan dari sarana dan prasarana yang ada di unit pelayanan	Belum semua sarpras terkait pelayanan yang dibutuhkan, tersedia	Dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pada unit pelayanan yang akan dilakukan penilaian pada tahun berjalan
25		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah dokumen peraturan bupati tentang SOTK perangkat daerah dan dokumen evaluasi kelembagaan (kematangan organisasi daerah) serta sk analisis jabatan dan analisis beban kerja yang tersusun	adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang sotk, tugas dan fungsi, anjab dan abk	skoring bidang-bidang perangkat daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena mengacu kepada PP 18 tahun 2016, dan ketika menyusun peraturan bupati proses harmonisasi yang cukup lama	dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai sotk, tugas dan fungsi, kematangan organisasi daerah serta penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

IKK sesuai RPJMD 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindakan anjut
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/Jumlah seluruh pengadaan	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakukan verifikasi RUP PBJ	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku

			Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD		
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan/Total belanja modal dan operasional	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakukan verifikasi RUP PBJ	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku
3	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1/Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi n-1	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakukan verifikasi RUP PBJ	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku

IKK sesuai Kepmendagri no 100.2.7-109 TAHUN 2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindaklanjuti
1	Pemanfaatan SistemPengadaan	Jumlah Bobot nilai anggaran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP) DITAMBAH Bobot RUP melalui Penyedia yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP Penyedia) DITAMBAH Bobot RUP TP (e-Tender e-Purchasing) DITAMBAH Bobot	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku

		realisasi TP (e-Tender e-Purchasing) DITAMBAH Bobot realisasi pengadaan langsung DITAMBAH Bobot realisasi Penunjukan Langsung DITAMBAH Bobot realisasi pengadaan	Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD	non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakuka nverifikasi RUP PBJ	
2	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Keterisian formasi JF PPBJ/Personel lainnya dibandingkan dengan kebutuhan DITAMBAH Jumlah penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya sebagai Pokja pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan/atau PPK DITAMBAH Rencana aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	Pelaksanaan Pendampingan (Bimbingan Teknis) terkait Market Sounding dan Market Confirmation Bagi Pelaku PBJ serta Pendampingan MOOC untuk Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1	Rendahnya keterlibatan pimpinan Pememerintah Daerah dan masih terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya penyusunan rencana aksi sebagai strategi pemenuhan SDM PBJ	Pelaksanaan Pendampingan (Bimbingan Teknis) terkait Market Sounding dan Market Confirmation Bagi Pelaku PBJ serta Pendampingan MOOC untuk Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1
3	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Bobot Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026	Belum terbukanya level kematangan UKPBJ yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah seperti level 4 Strategis dan 5 Unggul yang dapat menghambat peningkatan tata kelola pengadaan secara keseluruhan	Aktif mengikuti perkembangan dan proses persiapan pembukaan level kematangan UKPBJ yang lebih tinggi (Strategis) dari LKPP RI

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun di satu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat Daerah dari 35 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

Indikator Sasaran :

- 1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hal ini disebabkan nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan 2026 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2024 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2026 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri.
- 2) Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Hal ini disebabkan Data web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum ditetapkan dan masih menggunakan data tahun 2024.

Indikator Program :

- 1) Indeks Zakat Nasional Hal ini disebabkan Perda Pengelolaan Zakat belum disosialisasikan dan dukungan APBD Tahun 2025 belum ada
 - 2) Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu Hal ini disebabkan pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tepat waktu melalui aplikasi Simpelbangda dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 100%, pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 95,15% dan di tahun 2026 ini yaitu sebesar 98,4%
 - 3) Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi Hal ini disebabkan capaian pupuk tidak dapat tercapai sebesar 25% dikarenakan realisasi tanam untuk tanaman pangan lebih rendah dari rencana kebutuhan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain :
- 1) Keterbatasan anggaran (efisiensi anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan
 - 2) Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah
 - 3) Perubahan kebijakan yang dinamis
 - 4) Adanya perubahan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan mendadak yang harus dilaksanakan diluar rencana.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
- 1) Adanya koordinasi dan pelayanan yang baik akan memudahkan pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah, antara lain :
 - 1) Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia
 - 2) Meningkatkan kemampuan SDM
 - 3) Meningkatkan koordinasi Internal dan eksternal
 - 4) Meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah

- 5) Formulasi isu-isu penting
 - 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 2) Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - 3) Meningkatkan Pelayanan Publik
 - 4) Penguatan Koordinasi dan Kerjasama

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPDTUJUAN	PROGRAM
Sekretariat Daerah			
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana rumah ibadah	Bagian Kesejahteraan dan Bina Mental	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Bagian Kesra dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Jumlah pokok pikiran DPRD yang disetujui 193 pikir. Dari 200 usulan, berdasarkan hasil verlap terdapat 7 usulan yang ditolak dengan alasan :

1. Belum punya surat keterangan terdaftar
2. Tercatat 2 kali
3. Dibangun di rumah pribadi

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat usulan penambahan anggaran pada Bagian Hukum dari pagu indikatif Rp 456.000.000 menjadi Rp 806.000.000 untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan 2 (dua) unit Laptop dan persediaan penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi (pilkades serentak) dan Pengadaan server, anjungan, dan 1 (satu) unit Komputer dalam rangka menunjang pengelolaan JDIH Kabupaten Temanggung.
2. Usulan penambahan anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari pagu indikatif Rp 23.695.050,- menjadi Rp 123. 695.050,- untuk Peningkatan SDM dan Integritas PBJ guna mendukung Indeks Tata Kelola PBJ, Pengadaan 5 (lima) unit personal komputer dan 1 (satu) unit Laptop untuk mendukung kinerja SDM PBJ dalam pelayanan OPD dan pelayanan publik pada proses e-Procurement (e-Tendering, e-PL dan e-Purchasing) dengan rata-rata 6.000 (enam ribu) paket per tahun, dan Pelaksanaan sosialisasi Clearing House PBJ.
3. Usulan penambahan anggaran pada Bagian Umum dari pagu indikatif Rp 26.017.476.869,- menjadi Rp 26.438.446.932,- untuk Jamuan Makan Minum Tamu Pimpinan Daerah dan kegiatan Nasional, Kebutuhan Mebel dan AC rumah dinas, serta sarana prasarana kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara, Peringatan hari Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Temanggung.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.7.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Sekretariat Daerah													
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)	TMG	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	%	112.500.000	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)	TMG	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	%	112.500.000	
			Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	%					Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	%		
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	%	103.500.000		Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	%	103.500.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	%	9.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	%	9.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum)	TMG	Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	456.000.000
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	
			Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	100	%	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumenta sian Produk Hukum dan	100	%	456.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum)	TMG	Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	806.000.000	
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%		
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%		
			Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	100	%		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumenta sian Produk Hukum dan	100	%	806.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Informasi Hukum			
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental)		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	80	%	1.492.775.350
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	88	%	
			Indeks Zakat Nasional	0,81	poin	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100	%	1.492.775.350

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Pengelolaan Informasi Hukum				
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental)		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	80	%	1.492.775.350	
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	88	%		
			Indeks Zakat Nasional	0,81	poin		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100	%	1.492.775.350	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian)	TMG	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	526.250.000
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Pengendalian Inflasi Daerah	100	%	76.250.000
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	100	%	450.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
4	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian)	TMG	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	526.250.000	
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%		
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Pengendalian Inflasi Daerah	100	%	76.250.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	100	%	450.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
5	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan)		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	34.151.700
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%	
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	%	34.151.700
6	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian PBJ)	TMG	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%	23.695.050

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				
5	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan)		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	34.151.700	
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%		
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%		
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	%	34.151.700	
6	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian PBJ)	TMG	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%	123.695.050	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	95	%	
			Presentase Pendampingan proses PBJ	100	%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa		Presentase terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	100	%	23.695.050
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Organisasi)	TMG	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	100	%	79.343.750

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	95	%		
			Presentase Pendampingan proses PBJ	100	%		
	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa		Presentase terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	100	%	123.695.050	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Organisasi)	TMG	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	100	%	79.343.750	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,8	Angka	
	Penataan Organisasi		Persentase terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	%	79.343.750
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian	TMG	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	76	Angka	25.519.476.869

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,8	Angka		
	Penataan Organisasi		Persentase terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	%	79.343.750	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian	TMG	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	76	Angka	25.519.476.869	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Umum)					
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	13	Laporan	15.422.665.709
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	25	Dokumen	1.500.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Umum)						
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%		
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%		
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	13	Laporan	15.422.665.709	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	25	Dokumen	1.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada	100	%	2.193.400.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada	100	%	2.193.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	4.159.438.595
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa	100	%	1.763.905.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	4.159.438.595	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa	100	%	1.763.905.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah,	100	%	1.959.029.937

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah,	100	%	1.959.029.937	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtang- gaan Sekretariat Daerah			
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan	100	%	517.537.628

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtang- gaan Sekretariat Daerah				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan	100	%	517.537.628	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Wakil Kepala Daerah			
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Prokompim)		Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	2.231.558.963
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	600.000.000
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan, Fasilitas Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	%	1.631.558.963

Sumber : [PERANGKAT DAERAH] Kabupaten Temanggung, 2026

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Wakil Kepala Daerah				
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Prokompim)		Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	2.231.558.963	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	600.000.000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan, Fasilitas Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	%	1.631.558.963	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah ada 1 (satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	RABA HUKUM JDIH (Ragam Akses Braille Hukum JDIH)	Bagian Hukum	APBD	Penyediaan produk hukum dalam huruf braille (pengalih hurufan produk hukum daerah ke dalam huruf braille)	Produk Hukum Daerah dengan Huruf Braille	Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi hukum bagi penyandang disabilitas terutama bagi disabilitas netra, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif	Bagian Hukum - 2025

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan Sekretariat Daerah yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien” dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
2. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
3. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang bina mental spiritual
4. Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
5. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien			Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	67	69
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	68,5	70,5
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,47	3,49
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Pemerintahan)	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	%	100	100
			Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum		Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Angka	97,18	97,38
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Hukum)	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100
			Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100

	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang bina mental spiritual		Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Kesra dan Bina Mental)	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89	91
			Indeks Zakat Nasional	Poin	0,82	0,83
	Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3,97	4,05
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Perekonomian)	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Pembangunan)	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Pengadaan Barang/Jasa)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Angka	84,55	84,65

			Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100	100
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	100	100
			Presentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	76,25	76,75
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Organisasi)	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,9	4
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Umum)	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Angka	76,2 5	76,75
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah		IKM Sekretariat Daerah	Angka	81,5	82
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Umum)	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/paguindikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2027

Bagian Pemerintahan																					
N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALI SASI 2025	PRA KIRA AN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	PRO VIN SI	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Pemerintahan						112.500.000,00								227.724.393,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						112.500.000,00								227.724.393,00	
	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						112.500.000,00								227.724.393,00	
1.	4 . 0 1 . 0 2					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT						112.500.000,00								227.724.393,00	
							Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	100 %	93.500.000,00							-	211.217.766,00	

								persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	19.000.000, 00						-	16.506.627, 00	
	4 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1						Administrasi Tata Pemerintahan						93.500.000, 00						-	211.217.766 ,00	
							-						93.500.000, 00						-	211.217.766 ,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-		77.000.000, 00						-	180.000.000 ,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-		7.500.000,0 0						-	15.000.000, 00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-		9.000.000,0 0						-	16.217.766, 00	

4	.	0	1	.	0	2	.	2	.	0	1	.	0	0	0	1				Penataan Administrasi Pemerintahan							7.500.000,0 0				7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasanko rupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			15.000.000, 00	
																			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	12 Dokumen	7.500.000,0 0	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-		15.000.000, 00	Bagian Pemerintahan		
	4	.	0	1	.	0	2	.	2	.	0	1	.	0	0	0				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							9.000.000,0 0				7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			16.217.766, 00	

	2																			
						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	12 Dokumen	9.000.000,0 0	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	16.217.766, 00	Bagian Pemerintahan
	4 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					77.000.000, 00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasanko rupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			180.000.000 ,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	6 Dokumen	77.000.000, 00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	180.000.000 ,00	Bagian Pemerintahan
	4 . 0 1					Fasilitasi Kerja Sama Daerah					19.000.000, 00					-		16.506.627, 00		

	0 2 . 2 . 0 4																				
						-					19.000.000,00						-		16.506.627,00		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	19.000.000,00						-	16.506.627,00		
	4 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 4 . 0 0 0 1					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					19.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			16.506.627,00		
						Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	12 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	16.506.627,00	Bagian Pemerintahan	
	J U M L A H										112.500.000,00									227.724.393,00	

Bagian Hukum

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE L O M P O K S A S A R A N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL	PRO VIN SI		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Hukum						456.000.000 ,00								924.149.538, 00	
	4					UNSUR PENDUKUN G URUSAN PEMERINTA HAN						456.000.000 ,00								924.149.538, 00	
	4 . 0 1					SEKRETARIA T DAERAH						456.000.000 ,00								924.149.538, 00	
1.	4 . 0 1 . 0 2					PROGRAM PEMERINTA HAN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT						456.000.000 ,00								924.149.538, 00	
							Persentase produk hukum yang difasilitasi	-		-	100 %	456.000.000 ,00							-	924.149.538, 00	
	4 .					Fasilitasi dan Koordinasi						456.000.000 ,00						-		924.149.538, 00	

	0 1 . 0 2 . 2 . 0 3					Hukum													
						-					456.000.000 ,00					-		924.149.538, 00	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	416.000.000 ,00					-	844.149.538, 00	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	25.000.000, 00					-	50.000.000,0 0	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	15.000.000, 00					-	30.000.000,0 0	
	4 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 3 .					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					25.000.000, 00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya		50.000.000,0 0	

	0 0 0 1																			
						Terfasilitasi ya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	100 Dokumen	25.000.000, 00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,0 0	Bagian Hukum
	4 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 3 . 0 0 0 2					Fasilitasi Bantuan Hukum					416.000.000 ,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			844.149.538, 00	
						Terlaksana ya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	30 Kasus	416.000.000 ,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	844.149.538, 00	Bagian Hukum

[illegible]

Bagian Kesra dan Bina Mental

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GE T AK HI R RE NS TR A	REALIS ASI 2025	PRAK IRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVI NSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental						13.575.375.350 ,00								13.909.660.35 0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						13.575.375.350 ,00								13.909.660.35 0,00	
	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						13.575.375.350 ,00								13.909.660.35 0,00	
1.	4 . 0 1 . 0 2					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						13.575.375.350 ,00								13.909.660.35 0,00	
							Indeks Zakat Nasional (IZN)	-		-	0,82 angka	13.575.375.350 ,00							-	13.909.660.35 0,00	
							Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-		-	80 %	13.575.375.350 ,00							-	13.909.660.35 0,00	

							Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	-		-	89 %	13.575.375.350,00						-	13.909.660.350,00	
4	.	0	1	.	0	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					13.575.375.350,00						-	13.909.660.350,00	
							-					13.575.375.350,00						-	13.909.660.350,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	-		-	-	1.259.660.350,00						-	1.259.660.350,00	

							TrantibumLinmas														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	-	12.115.715.000,00						-	12.400.000.000,00		
	4 . 0 1 . 0 2						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhm			250.000.000,00	

	. 2 . 0 2 . 0 0 0 1												serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		asyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan aktivitasnya					
						Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	250.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental
	4 . 0 1 . 0 2 . 2 . 0 2 . 0 0 0 2					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					12.115.715.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan aktivitasnya			12.400.000.000,00	

						Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, AdministrasiKependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PengendalianPenduduk dan KB	-		-	1 Dokumen	12.115.715.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	12.400.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental										
	4	.	0	1	.	0	2	.	2	.	0	2	.	0	0	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					1.259.660.350,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.259.660.350,00	

	03												narkoba, judi, dan penyeludupan.							
						Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	-	-	1 Dokumen	1.259.660.350,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.259.660.350,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental
	J U M L A H										13.575.375.350,00								13.909.660.350,00	

Bagian Pembangunan

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGE T AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL	PR OVI NSI		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Pembangunan						34.151.700, 00								69.737.587, 00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						34.151.700, 00								69.737.587, 00	
	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						34.151.700, 00								69.737.587, 00	
1.	4 . 0 1 . 0 3					PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN						34.151.700, 00			p					69.737.587, 00	
							Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	-		-	100 %	34.151.700, 00							-	69.737.587, 00	
	4 . 0 1 . 0					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						34.151.700, 00						-		69.737.587, 00	

	3																		
	.																		
	2																		
	.																		
	0																		
	2																		
						-						34.151.700,00					-		69.737.587,00
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	-	10.348.000,00					-		21.250.000,00
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	23.803.700,00					-		48.487.587,00
	4					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						10.348.000,00		7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			21.250.000,00
	.																		
	0																		
	1																		
	.																		
	0																		
	3																		
	.																		
	2																		
	.																		
	0																		
	2																		
	.																		
	0																		
	0																		
	0																		
	1																		

						Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	10.348.000,00	Kab. Tema nggu ng	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	21.250.000,00	Bagian Pembangunan	
	4 . 0 1 . 0 3 . 2 . 0 2 . 0 0 0 2					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						23.803.700,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasy arakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			48.487.587,00	
						Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	4 Laporan	23.803.700,00	Kab. Tema nggu ng	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	48.487.587,00	Bagian Pembangunan	
	J U M L A H											34.151.700,00								69.737.587,00	

Bagian Perekonomian

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHI R RENS TRA	REALI SASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROV INSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Perekonomian						526.250.000 ,00								154.488.984 ,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						526.250.000 ,00								154.488.984 ,00	
	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						526.250.000 ,00								154.488.984 ,00	
1.	4 . 0 1 . 0 3					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						526.250.000 ,00								154.488.984 ,00	
							Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	-		-	83,33 %	76.250.000, 00							-	154.488.984 ,00	
							Persentase Capaian Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	-		-	100 %	450.000.000 ,00							-	0,00	

							Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang terkoordinasi dengan baik														
							Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	-		-	100 %	76.250.000, 00						-		154.488.984 ,00	
	4 . 0 1 . 0 3 . 2 . 0 1						Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					76.250.000, 00						-		154.488.984 ,00	
							-					76.250.000, 00						-		154.488.984 ,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	50.000.000, 00							-	101.327.244 ,00	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	-		-	-	26.250.000, 00							-	53.161.740, 00	

							dan Distribusi Perekonomian													
4 . 0 1 . 0 3 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					50.000.000, 00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperk uatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			101.327.244 ,00	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	4 Dokumen	50.000.000, 00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	101.327.244 ,00	Bagian Perekon omian
4 . 0 1 . 0 3 . 2						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					26.250.000, 00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna			53.161.740, 00	

	010002												korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik					
						Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	2 Laporan	26.250.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	53.161.740,00	Bagian Perekonomian
	40103204					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						450.000.000,00					-		0,00	
						-						450.000.000,00					-		0,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	-		-	-	450.000.000,00						-	0,00	

						Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja														
4 . 0 1 . 0 3 . 2 . 0 4 . 0 0 0 1						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					450.000.000 ,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-			0,00	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	-		-	5 Dokumen	450.000.000 ,00	Kab. Temang gung	DBH Cukai Hasil Tembak au (CHT)				-	0,00	Bagian Perekon omian

						Modal, Tenaga Kerja	Penanaman Modal, Tenaga Kerja													
	J U M L A H										526.250.000,00								154.488.984,00	

Bagian PBJ

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGE T 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL	PRO VINS I		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						23.695.050, 00								47.885.164, 00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						23.695.050, 00								47.885.164, 00	
	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						23.695.050, 00								47.885.164, 00	
1.	4 . 0 1 . 0 3					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						23.695.050, 00								47.885.164, 00	

							Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	-		-	1 Dokumen	23.695.050,00						-	47.885.164,00	
							Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	-		-	100 %	23.695.050,00						-	47.885.164,00	
							Presentase Pendampingan proses PBJ	-		-	103 OPD	23.695.050,00						-	47.885.164,00	
	4	.	0	1	.	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					23.695.050,00					-		47.885.164,00	
	3	.	2	.	0	3														
							-					23.695.050,00					-		47.885.164,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	15.000.000,00						-	27.885.164,00	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	5.500.000,00					-	15.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	3.195.050,00					-	5.000.000,00	
	4	.	0	1	.	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					5.500.000,00		7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya		15.000.000,00	
							Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	15.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	4 . 0 1 . 0 3 . 2 . 0 3 . 0 0 0 2					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujud nya peningkat an rasa aman bagi seluruhm asyarakat dalam menjalank an kehidupan dan aktivitassn ya			27.885.164,00	
						Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-		27.885.164,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 0 1 . 0 3 . 2 . 0 3 . 0 0 0 0					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						3.195.050,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujud nya peningkat an rasa aman bagi seluruhm asyarakat dalam menjalank an kehidupan dan aktivitassn ya			5.000.000,00	

[illegible]

Bagian Organisasi

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LO MP OK SA SA RA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVI NSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Organisasi						79.343.750, 00								150.656.162,44	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						79.343.750, 00								150.656.162,44	
	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						79.343.750, 00								150.656.162,44	
1.	4 . 0 1 . 0 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA						79.343.750, 00								150.656.162,44	
							Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-		-	3,9 Angka	79.343.750, 00							-	150.656.162,44	
							Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	-		-	100 %	79.343.750, 00							-	150.656.162,44	

	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 3					Penataan Organisasi					79.343.750,00						-		150.656.162,44	
						-					79.343.750,00						-		150.656.162,44	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	29.343.750,00						-	39.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,44	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	0,00						-	18.656.162,00	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	-		-	-	30.000.000,00						-	71.000.000,00	

							Publik dan Tata Laksana															
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 3 . 0 0 0 1						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					20.000.000, 00			7.Memper kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	-	Terwujud nya peningkat an rasa aman bagi seluruhm asyarakat dalam menjalank an kehidupan dan aktivitasn ya			22.000.000,44		
							Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	2 Dokumen	20.000.000, 00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-		22.000.000,44	Bagian Organisasi
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					30.000.000, 00			7.Memper kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamem perkuatpe ncegahan dan	-	Terwujud nya peningkat an rasa aman bagi seluruh masyarak at dalam menjalank an kehidupan			71.000.000,00		

	3 . 0 0 0 2												pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.		dan aktivitasn ya					
						Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	2 Laporan	30.000.000, 00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	71.000.000,00	Bagian Organisasi
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 3 . 0 0 0 3					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					0,00			7.Memper kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamem perkuatpe ncegahan dan pemberan tasankoru psi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	-	Terwujud nyapening katan rasa amanbagi seluruhm asyarakat dalamme njalankan kehidupan dan aktivitasn ya			18.656.162,00	
						Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung	-				-	18.656.162,00	Bagian Organisasi

[illegible]

Bagian Umum

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHI R RENS TRA	REALI SASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
											TARGE T 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PRO VINS I					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Umum						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
1.	4 . 0 1 . 0 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
							akip	-		-	10 0	1.500.000,00							-	1.000.000,00	
							Nilai AKIP Sekretariat Daerah	-		-	76.25 angka	23.776.576.869,00							-	25.201.080.309,00	
							Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang	-		-	100 %	8.069.243.595,00							-	8.999.330.222,00	

							perangkat daerah													
							Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		-	100 %	15.424.165.709,00						-	15.423.665.709,00	
							Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	-		-	100 %	2.476.567.565,00						-	3.215.084.378,00	
	4	.	0	1	.	0	1	.	2	.	0	1						-	4.000.000,00	
							-					1.500.000,00						-	4.000.000,00	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	

[illegible]

	0001																			
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	25 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0004					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.000.000,00	
						Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung	-				-	1.000.000,00	Bagian Umum

	4					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.000.000,00	
	0					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Doku men	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.000.000,00	Bagian Umum
	1					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.000.000,00	
	.																			
	0																			
	1																			
	.																			
	2																			
	.																			
	0																			
	1																			
	.																			
	0																			
	0																			
	0																			
	5																			

	0007																			
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	15 Laporan	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.000.000,00	Bagian Umum
	40101202					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.422.665.709,00						-	15.422.665.709,00	
						-						15.422.665.709,00						-	15.422.665.709,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	15.422.665.709,00						-	15.422.665.709,00	

	4					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.422.665.709,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			15.422.665.709,00		
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	135 Orang /bulan	15.422.665.709,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-		15.422.665.709,00	Bagian Umum
	4					Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.193.400.000,00						-		2.537.000.000,00		
						-					2.193.400.000,00						-		2.537.000.000,00		

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	38.000.000,00						-	40.000.000,00	
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	1.300.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	380.000.000,00						-	500.000.000,00	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	264.500.000,00						-	275.000.000,00	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	95.000.000,00						-	100.000.000,00	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	115.900.000,00						-	122.000.000,00	

	4					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					95.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			100.000.000,00	
	0					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/PeneranganB angunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	95.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	Bagian Umum
	1					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					115.900.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			122.000.000,00	
	.																			
	0																			
	1																			
	.																			
	0																			
	1																			
	.																			
	2																			
	.																			
	0																			
	6																			
	.																			
	0																			
	0																			
	0																			
	1																			

	0 0 2																				
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	115.900.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	122.000.000,00	Bagian Umum	
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 0 6 . 0 0 0 4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						264.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagiseluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			275.000.000,00	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	264.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	275.000.000,00	Bagian Umum	

4	0	1	0	1	2	0	6	0	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							38.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			40.000.000,00	
											Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPer undang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Doku men	38.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-		40.000.000,00	Bagian Umum
4	0	1	0	1	2	0	6				Fasilitasi Kunjungan Tamu							1.300.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.500.000.000,00	

	0008																				
						Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.300.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.500.000.000,00	Bagian Umum	
	4.011.206.009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						380.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			500.000.000,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	380.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	500.000.000,00	Bagian Umum	

4	.	0	1	.	0	1	.	2	.	0	8					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.159.438.595,0 0							-		4.159.938.595, 00	
																-							4.159.438.595,0 0							-		4.159.938.595, 00	
																	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-		1.094.868.750,0 0								-	1.094.868.750, 00	
																	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-		3.055.069.845,0 0								-	3.055.069.845, 00	
																	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-		9.500.000,00								-	10.000.000,00	

	4					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					9.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			10.000.000,00	
	0					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	10.000.000,00	Bagian Umum
	1					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.094.868.750,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.094.868.750,00	

						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.094.868.750,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.094.868.750,00	Bagian Umum	
	4.010.120.080.004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.055.069.845,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			3.055.069.845,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.055.069.845,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	3.055.069.845,00	Bagian Umum	
	4.010.120.080.004					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.763.905.000,00					-		2.402.391.627,00		

	0					Daerah													
	1																		
	.																		
	2																		
	.																		
	0																		
	9																		
						-					1.763.905.000,0						-		2.402.391.627,00
											0								
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.905.000,00						-	19.900.000,00
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	-		-	-	700.000.000,00						-	1.232.491.627,00
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	712.500.000,00						-	750.000.000,00
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	-		-	-	237.500.000,00						-	250.000.000,00

							Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	47.500.000,00					-	50.000.000,00			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	47.500.000,00					-	100.000.000,00			
	4	0	1	0	1	2	0	9	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	-		-	9 Unit	237.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	250.000.000,00	Bagian Umum

							Pajaknya													
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 0 9 . 0 0 2						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				712.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			750.000.000,00	
							Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	27 Unit	712.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	750.000.000,00	Bagian Umum
	4 . 0 1 . 0						Pemeliharaan Mebel				47.500.000,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas			50.000.000,00	

	1 . 2 . 0 9 . 0 0 0 5													antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik						
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	50 Unit	47.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	50.000.000,00	Bagian Umum	
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 0 9 . 0 0 0 6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					47.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			100.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	47.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	100.000.000,00	Bagian Umum	

	4					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						18.905.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya				19.900.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	18.905.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-			19.900.000,00	Bagian Umum
	4					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						700.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya				1.232.491.627,00	

						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	-		-	6 Unit	700.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.232.491.627,00	Bagian Umum	
	4	.	0	1	.	0	1	.	2	.	1	1						-	517.537.628,00		
						-						517.537.628,00						-	517.537.628,00		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	177.537.628,00							-	177.537.628,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	40.000.000,00							-	40.000.000,00	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	300.000.000,00					-	300.000.000,00		
	4	0	1	0	1	2	1	1	0	0	1	177.537.628,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya		177.537.628,00	
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang /Bulan	177.537.628,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	177.537.628,00	Bagian Umum

	4					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					300.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			300.000.000,00	
						Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	50 Paket	300.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	300.000.000,00	Bagian Umum
	4					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					40.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			40.000.000,00	

	0 0 0 3																			
						Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang	40.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	40.000.000,00	Bagian Umum
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 2					Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah						1.959.029.937,0 0						-	2.697.546.750, 00	
						-						1.959.029.937,0 0						-	2.697.546.750, 00	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00						-	480.000.000,00	

							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	879.029.937,00						-	1.857.546.750,00		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	480.000.000,00						-	360.000.000,00		
4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 2 . 0 0 0 1						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						600.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			480.000.000,00	
						Tersedianya Kebutuhan Rumah TanggaKepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	600.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	480.000.000,00	Bagian Umum	

	4					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					480.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			360.000.000,00	
	0					Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	480.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	360.000.000,00	Bagian Umum
	1					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					879.029.937,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.857.546.750,00	
	.																			
	0																			
	1																			
	.																			
	2																			
	.																			
	1																			
	2																			
	.																			
	0																			
	0																			
	0																			
	2																			

	03																			
						Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	879.029.937,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.857.546.750,00	Bagian Umum
	J U M L A H											26.017.476.869,00							27.741.080.309,00	

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALI SASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PR O VI NS I					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.570.457.500,00								2.329.217.611,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.570.457.500,00								2.329.217.611,00	

	4 . 0 1					SEKRETARIAT DAERAH						2.570.457.500, 00							2.329.217.611 ,00	
1.	4 . 0 1 . 0 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.570.457.500, 00							2.329.217.611 ,00	
							Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	-		-	100 %	2.570.457.500, 00						-	2.329.217.611 ,00	
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 1					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600.000.000,00					-		600.000.000,0 0	
						-						600.000.000,00					-		600.000.000,0 0	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,0 0	

								Wakil Kepala Daerah														
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 1 . 0 0 0 4						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					600.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			600.000.000,00		
							Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	192 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-		600.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4 . 0 1 . 0 1 .						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					1.970.457.500,00						-		1.729.217.611,00		

	2 . 1 4																			
							-					1.970.457.500,00					-			1.729.217.611,00
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	455.384.500,00					-		479.952.533,00
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	1.127.250.000,00					-		891.130.107,00
								Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	-		-	-	387.823.000,00					-		358.134.971,00
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 4 . 0 0 0 1						Fasilitasi Keprotokolan						455.384.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya		479.952.533,00

						Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	500 Laporan	455.384.500,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	479.952.533,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 4 . 0 0 0 2					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.127.250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			891.130.107,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	2000 Laporan	1.127.250.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	891.130.107,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	4 . 0 1 . 0 1 . 2 . 1 4					Pendokumentasian Tugas Pimpinan						387.823.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperku atpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			358.134.971,00	

	0003																			
						Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	-		-	800 Laporan	387.823.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	358.134.971,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	J U M L A H										2.570.457.500								2.329.217.611	

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi meliputi penambahan pada Bagian Kesra dan Bina Mental sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (pokir) sebesar Rp 12.082.600.000,-serta Bagian Umum pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah sebesar Rp 300.000.000,- dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 198.000.000,-. Sehingga pagu indikatif semula Rp 30.475.751.682,- menjadi Rp 43.056.351.682,-.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Sekretariat Daerah			Sekretariat Daerah		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	112.500.000	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	112.500.000	0
	Administrasi Tata Pemerintahan	103.500.000		Administrasi Tata Pemerintahan	93.500.000	0
	Penataan Administrasi Pemerintahan	9.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	7.500.000	0
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7.500.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9.000.000	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	87.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	77.000.000	0
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	9.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	19.000.000	0
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	19.000.000	0
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	456.000.000	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	456.000.000	0
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	456.000.000		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	456.000.000	0
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	25.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	25.000.000	0
	Fasilitasi Bantuan Hukum	416.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum	416.000.000	0
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	15.000.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	15.000.000	0
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.492.775.350	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.575.375.350	12.082.600.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.492.775.350		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.575.375.350	12.082.600.000
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	200.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	200.000.000	0
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	33.115.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	12.115.715.000	0

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.259.660.350			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.259.660.350		0
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	526.250.000	4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	526.250.000		0	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	76.250.000		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	76.250.000		0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000		0	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	26.250.000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	26,250,000		0	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	450.000.000		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	450.000.000		0	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	450.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	450.000.000		0	
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	34.151.700	5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	34.151.700		0	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	34.151.700		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	34.151.700		0	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	10.348.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	10.348.000		0	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	23.803.700		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	23.803.700		0	
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	23.695.050	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	23.695.050		0	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	23.695.050		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	23.695.050		0	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000		0	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	15.000.000		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	15.000.000		0	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.195.050		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.195.050		0	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.343.750	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.343.750		0	
	Penataan Organisasi	79.343.750		Penataan Organisasi	79.343.750		0	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20.000.000		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20.000.000		0	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000		0	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	293.43.750		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29.343.750		0	

8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.231.558.963	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.570.457.500	338.898.537
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	0
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	0
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.631.558.963		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.970.457.500	338.898.537
	Fasilitasi Keprotokolan	355.359.500		Fasilitasi Keprotokolan	455,384,500	100.025.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.067.250.000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.127,250,000	60.000.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	208.949.463		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	387,823,000	178.873.537
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.519.476.869	9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.017.476.869	498.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.422.665.709		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.422.665.709	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.422.665.709		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.422.665.709	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.193.400.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.193.400.000	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.900.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.900.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.500.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.500.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.300.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.300.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.159.438.595		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.159.438.595		0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000		0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.868.750		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.868.750		0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.055.069.845		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.055.069.845		0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.763.905.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.763.905.000		0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.500.000		0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	712.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	712.500.000		0
	Pemeliharaan Mebel	47.500.000		Pemeliharaan Mebel	47.500.000		0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000		0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.905.000		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.905.000		0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000		0
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	517.537.628		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	517.537.628		0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.537.628		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.537.628		0
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000		0
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000		0
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.461.029.937		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.959.029.937		498.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	600.000.000		300.000.000

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	480.000.000		198.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	879.029.937			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	879.029.937		0
JUMLAH		30.475.751.682			JUMLAH	43.395.250.219		12.919.498.537

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp12.919.498.537,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Bagian Kesra dan Bina Mental sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (pokir) sebesar Rp 12.082.600.000,- serta

Bagian Umum pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (RTB) sebesar Rp 300.000.000,- dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (RTWB) sebesar Rp 198.000.000,-.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sebesar Rp 100.025.000,- sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Rp 60.000.000,- dan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan sebesar Rp 178.873.537,-

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
29	Sekretariat Daerah				
1	Indeks Kualitas Kebijakan	angka	75,71	67	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	angka	67,37	68,5	
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,298	3,47	nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan 2026 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2024 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2026 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri
4	Indeks Reformasi Hukum	angka	97,12	97,18	
5	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual	%	100	100	
6	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terfasilitasi	%	100	100	
7	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3,82	3,97	
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	angka	84,35	86	
9	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	84,78	76,25	
10	IKM Sekretariat Daerah	angka	86,22	81,5	

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PENUNJANG								
	Pengadaan	7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Paket	3066	80%	Data Inaproc Bagian PBJ
				Jumlah seluruh pengadaan		6472		
		8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan	Rupiah	437,54 M	31%	Data Inaproc Bagian PBJ
				Total belanja modal dan operasional		622,68 M		DJPK Kemenkeu
		9	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1	Rupiah	225,5 M	15%	Data Inaproc Bagian PBJ
				Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi n-1		125,8 M		Data Inaproc Bagian PBJ

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PENUNJANG								
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	7	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Jumlah Bobot Pengumuman RUP, RUP Penyedia, RUP e-Tendering+e-Purchasing, Realisasi e-Tendering + e-Purchasing (TP), Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional (pl), Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional (PL), dan Realisasi Digitalisasi PBJ	Bobot	n.a	22	Bagian PBJ
		8	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Jumlah Bobot Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya, Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya, dan Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	Bobot	n.a	24	Bagian PBJ
		9	Tingkat Kematangan UKPBJ	Bobot Tingkat Kematangan UKPBJ	Bobot	n.a	24	Bagian PBJ

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.982.319.434,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.171.083.110,- (95,23 %) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 55.151.333.111,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.019.749.999,- sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.811.236.324,- (5%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,22% (selisih capaian kinerja sebesar 99,22 % dengan realisasi anggaran 95%), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan Tahun Anggaran 2026 didukung anggaran sebesar Rp 59.686.362.517,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 6.234.009.485,- terdiri dari Belanja Operasional sebesar 10%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 43.395.250.219,- yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI WENARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731020 199903 1 005